LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 10 TAHUN : 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di daerah secara berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah dan cita-cita pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program Prioritas adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis penurunan kinerja.

19. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang berupa keluaran, hasil, dan dampak.
20. Indikator Kinerja adalah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029
Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
    a. Visi dan Misi, Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
    b. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum Daerah;
    c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. penutup.
(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi.

(5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (10/139/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RPJPD, jangka menengah berupa RPJMD serta jangka pendek berupa RKPD.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045. Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 difokuskan pada penguatan fondasi yaitu penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Selain memedomani RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah diperlukan sinergitas dengan Visi, Misi, dan Program Wali Kota yang diwujudkan dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Kemajuan Pembangunan Daerah perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Di sisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi Daerah berupa “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, Visi, dan Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan

ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat; dan
5. mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan yang mendorong Daerah bertaraf internasional yang keren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RPJMD TAHUN 2025-2029
(Nama Lampiran)

- Permohonan pengharmonisasian yang disampaikan pemrakrsa dalam kelengkapan permohonan tidak dilengkapi dengan dokumen RPJMD yang menjadi lampiran suatu Raperda RPJMD, sehingga pengharmonisasian oleh Kantor Wilayah hanya dibatasi pada Raperda tanpa dokumen RPJMD.
- Perhatikan konsistensi perumusan baik jenis dan ukuran huruf, akronim, singkatan, penggunaan awalan huruf, tanda baca, maupun terhadap meteri muatan yang sudah dirumuskan sebelumnya dalam ketentuan umum;
- Jangan ada perumusan materi muatan dengan cetak tebal;
- Perhatikan rumusan dalam bahasa asing, gunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia;
- Untuk rumusan materi muatan berupa angka sebaiknya dirumuskan juga uraian terhadap bilangan dari angka dimaksud;
- Rumuskan uraian RPJMD sebagai lampiran Raperda yang dirumuskan dengan memenuhi teknik penyusunan lampiran peraturan perudang-undangan, bukan hanya berupa dokumen atau laporan akhir penyusunan RPJMD;
- Uraian dokumen RPJMD perlu memperhatikan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan RPJPD, termasuk program pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga antara dokumen RPJMD serasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun provinsi. Sesuaikan kembali perumusan RPJMD dalam lampiran Raperda ini sesuai hasil analisis konsepsi yang disertai dengan keserasian dan keselarasan baik dari sisi sistematika maupun uraian muatan RPJMD sesuai ketentuan PUU terkait;

WALI KOTA BEKASI,
Ttd
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10

RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wataala yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan RPJMD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan pembangunan Kota Bekasi untuk 5 (lima) tahun ke depan dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Billahittaufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Bekasi, 20 Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**

1.1 LATAR BELAKANG ..... I - 1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I - 4

1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN ..... I - 8

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ..... I - 9

1.5 SISTEMATIKA ..... I - 10

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ..... **II - 1**

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... II - 1

2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI ..... II - 1

2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI ..... II - 17

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II - 21

2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI ..... II - 21

2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA ..... II - 26

2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA ..... II - 28

2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF ..... II - 31

2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU ..... II - 33

2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF ..... II - 35

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH ..... II - 40

2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA ..... II - 40

2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI ..... II - 42

2.1.3.3 TRANSFORMASI DIGITAL ..... II - 51

2.1.3.4 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL ..... II - 51

2.1.3.5 PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI ..... II - 54

2.1.3.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO ..... II - 58

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM ..... II - 60

2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF ..... II - 60
2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL ..... II - 65
2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN ..... II - 66
2.1.5 KINERJA PER URUSAN ..... II - 67
2.1.5.1 URUSAN PENDIDIKAN ..... II - 67
2.1.5.2 URUSAN KESEHATAN ..... II - 68
2.1.5.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ..... II - 70
2.1.5.4 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ..... II - 71
2.1.5.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ..... II - 72
2.1.5.6 URUSAN SOSIAL ..... II - 73
2.1.5.7 URUSAN TENAGA KERJA ..... II - 74
2.1.5.8 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ..... II - 74
2.1.5.9 URUSAN PANGAN ..... II - 75
2.1.5.10 URUSAN PERTANAHAN ..... II - 75
2.1.5.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP ..... II - 76
2.1.5.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ..... II - 77
2.1.5.13 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ..... II - 77
2.1.5.14 URUSAN PERHUBUNGAN ..... II - 78
2.1.5.15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ..... II - 79
2.1.5.16 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ..... II - 80
2.1.5.17 URUSAN PENANAMAN MODAL ..... II - 80
2.1.5.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ..... II - 81
2.1.5.19 URUSAN STATISTIK ..... II - 81
2.1.5.20 URUSAN PERSANDIAN ..... II - 82
2.1.5.21 URUSAN KEBUDAYAAN ..... II - 82
2.1.5.22 URUSAN PERPUSTAKAAN ..... II - 83
2.1.5.23 URUSAN KEARSIPAN ..... II - 83
2.1.5.24 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ..... II - 84
2.1.5.25 URUSAN PARIWISATA ..... II - 85

2.1.5.26 URUSAN PERTANIAN ..... II - 85
2.1.5.27 URUSAN PERDAGANGAN ..... II - 86
2.1.5.28 URUSAN PERINDUSTRIAN ..... II - 87
2.1.5.29 UNSUR SEKRETARIAT DAERAH ..... II - 88
2.1.5.30 UNSUR SEKRETARIAT DPRD ..... II - 89
2.1.5.31 UNSUR PERENCANAAN ..... II - 90
2.1.5.32 UNSUR KEUANGAN ..... II - 91
2.1.5.33 UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ..... II - 92
2.1.5.34 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ..... II - 93
2.1.5.35 UNSUR PENGAWASAN ..... II - 94
2.1.5.36 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM ..... II - 94
2.1.5.37 UNSUR KEWILAYAHAN ..... II - 95
2.1.6 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..... II - 96
2.1.7 PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ..... II -104
2.1.8 BADAN USAHA MILIK DAERAH ..... II -108
2.1.9 KERJA SAMA DAERAH ..... II -113
2.1.10 KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK ..... II -114
2.1.10.1 RUMAH ..... II -114
2.1.10.2 AIR BERSIH ..... II -115
2.1.10.3 AIR LIMBAH ..... II -115
2.1.10.4 LISTRIK ..... II -116
2.1.10.5 PERSAMPAHAN ..... II -117
2.1.10.6 SARANA PENDIDIKAN ..... II -118
2.1.10.7 SARANA KESEHATAN ..... II -119
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... II -120
2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU ..... II -120
2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD ..... II -120
2.2.1.2 NERACA DAERAH ..... II -128
2.2.1.2 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN ..... II -132
2.2.1.3 ANALISIS PEMBIAYAAN ..... II -134
2.2.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH ..... II -135
2.2.3 PENDANAAN NON APBD ..... II -139
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ..... II -142
2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ..... II -142
2.3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... II -143
2.3.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II -144

2.3.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH ..... II -146
2.3.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM ..... II -149
2.3.2 ISU SESUAI KONTEKS ..... II -150
2.3.2.1 ISU GLOBAL ..... II -150
2.3.2.2 ISU NASIONAL ..... II -152
2.3.2.3 ISU REGIONAL JAWA BARAT ..... II -155
2.3.3 ISU STRATEGIS KOTA BEKASI ..... II -157

BAB III VISI, MIS, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... III - 1

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ..... III - 1
3.1.1 RPJPD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2045 ..... III - 1
3.1.2 VISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ..... III - 4
3.1.3 MISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ..... III - 5
3.1.4 TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ..... III - 7
3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ..... III - 17
3.2.1 STRATEGI ..... III - 17
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ..... III - 23
3.2.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029 ..... III – 24
3.2.4 PROGRAM UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT DI KOTA BEKASI ..... III – 40
3.2.5 PROGRAM/PROYEK PROVINSI DKI DI KOTA BEKASI ..... III - 40
3.2.6 PROGRAM/PROYEK NASIONAL DI KOTA BEKASI ..... III – 41
3.2.7 KETERKAITAN SAPTA PROGRAM DENGAN ASTA CITA ..... III – 41
3.2.8 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BEKASI ..... III - 42

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... IV - 1
4.1.1 PROGRAM PRIORITAS ..... IV - 1
4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA ..... IV - 5
4.1.3 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA ..... IV – 9
4.1.4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... IV - 15
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV - 89

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....IV - 89
4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH.....IV - 92

BAB V PENUTUP.....V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Distribusi PDRB ADHK Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 43
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II - 44
Tabel 2.3 Kinerja Urusan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 68
Tabel 2.4 Kinerja Urusan Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 69
Tabel 2.5 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 70
Tabel 2.6 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 72
Tabel 2.7 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 72
Tabel 2.8 Kinerja Urusan Sosial Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 73
Tabel 2.9 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 74
Tabel 2.10 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 75
Tabel 2.11 Kinerja Urusan Pangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 75
Tabel 2.12 Kinerja Urusan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 76
Tabel 2.13 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 77
Tabel 2.14 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 77
Tabel 2.15 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 78
Tabel 2.16 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 79
Tabel 2.17 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 79
Tabel 2.18 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 80
Tabel 2.19 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 80
Tabel 2.20 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 81
Tabel 2.21 Kinerja Urusan Statistik Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 82
Tabel 2.22 Kinerja Urusan Persandian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 82
Tabel 2.23 Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 83
Tabel 2.24 Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 83

Tabel 2.25 Kinerja Urusan Kearsipan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 84
Tabel 2.26 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2020-2024..... II – 84
Tabel 2.27 Kinerja Urusan Pariwisata Kota Bekasi Tahun 2020-2024..... II – 85
Tabel 2.28 Kinerja Urusan Pertanian Kota Bekasi Tahun 2020-2024..... II – 86
Tabel 2.29 Kinerja Urusan Perdagangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 86
Tabel 2.30 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 87
Tabel 2.31 Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024..... II – 88
Tabel 2.32 Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020-2024..... II – 90
Tabel 2.33 Kinerja Unsur Perencanaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 90
Tabel 2.34 Kinerja Unsur Keuangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 92
Tabel 2.35 Kinerja Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 93
Tabel 2.36 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 93
Tabel 2.37 Kinerja Unsur Pengawasan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 94
Tabel 2.38 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum) Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 95
Tabel 2.39 Kinerja Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ... II – 95
Tabel 2.40 Pencapaian Pelaksanaan SPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 97
Tabel 2.41 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) ..... II- 121
Tabel 2.42 Target dan Realisasi Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) ..... II- 124
Tabel 2.43 Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) ..... II- 127
Tabel 2.44 Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024..... II – 128
Tabel 2.45 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024..... II - 130
Tabel 2.46 Proporsi Belanja Aparatur Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) II- 133
Tabel 2.47 Proporsi Belanja Rutin (Operasi) Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) ..... II- 133
Tabel 2.48 Proporsi Belanja Modal Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)..... II- 134
Tabel 2.49 Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)..... II- 134
Tabel 2.50 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) ..... II- 135
Tabel 2.51 Proyeksi APBD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 (Miliar Rupiah) ..... II- 136
Tabel 2.52 Pendanaan PKBL dan TJSL Bank Jabar Tahun 2021-2024..... II -139

Tabel 2.53 Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi ..... II- 163
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ..... III - 13
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030 ..... III - 23
Tabel 3.3 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ..... III - 28
Tabel 4.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 . IV - 1
Tabel 4.2 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa .... IV - 6
Tabel 4.3 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita ..... IV - 10
Tabel 4.4 Program Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 ..... IV - 16
Tabel 4.5 IKU Kota Bekasi Tahun 2025-2030 ..... IV - 90
Tabel 4.6 IKD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 ..... IV - 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ..... I – 8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi ..... II – 2
Gambar 2.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022 ..... II – 6
Gambar 2.3 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Bekasi Tahun 2022 ..... II – 7
Gambar 2.4 IKP Kota Bekasi Tahun 2022-2024 ..... II – 9
Gambar 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi Tahun 2020 - 2023 ..... II – 9
Gambar 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 10
Gambar 2.7 IKLH Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 11
Gambar 2.8 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Tahun 2020-2024 ..... II – 12
Gambar 2.9 Persentase Sampah Terangkut ke TPA Tahun 2020-2024 ..... II – 13
Gambar 2.10 Iklim Kota Bekasi ..... II – 14
Gambar 2.11 IRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 15
Gambar 2.12 Indeks Penanggulangan Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ..... II – 15
Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021-2023 ..... II – 16
Gambar 2.14 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bekasi II – 17
Gambar 2.15 Komposisi Penduduk Kota Bekasi ..... II – 18
Gambar 2.16 Penduduk Komuter Tahun 2023 ..... II – 19
Gambar 2.17 Jumlah dan Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ..... II – 20
Gambar 2.18 LPE Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 21
Gambar 2.19 Angka Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 22
Gambar 2.20 TPT Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 23
Gambar 2.21 IPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 24
Gambar 2.22 Rasio Gini Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 25
Gambar 2.23 Indeks Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 26
Gambar 2.24 UHH Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 27
Gambar 2.25 Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 28
Gambar 2.26 Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 29
Gambar 2.27 HLS/RLS Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 29
Gambar 2.28 Skor Literasi/Numerasi Kota Bekasi Tahun 2023-2024 ..... II – 31

Gambar 2.29 IPLM Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 31
Gambar 2.30 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta Jaminan Kesehatan ..... II – 32
Gambar 2.31 Indeks Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2020-2023 ..... II – 33
Gambar 2.32 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 34
Gambar 2.33 Pemenuhan Kluster Kota Layak Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 36
Gambar 2.34 iBangga Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ..... II – 37
Gambar 2.35 IPG Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 38
Gambar 2.36 Peran Komunitas Kreatif Kota Bekasi Tahun 2019-2023 ..... II – 39
Gambar 2.37 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 40
Gambar 2.38 Rasio Ketergantungan Kota Bekasi Tahun 2019-2023 ..... II – 41
Gambar 2.39 Pengeluaran Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 42
Gambar 2.40 PDRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 42
Gambar 2.41 Sektor Unggulan Kota Bekasi Berdasarkan PDRB Tahun 2024 ..... II – 44
Gambar 2.42 Kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II – 45
Gambar 2.43 PDRB Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 46
Gambar 2.44 TPAK Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 47
Gambar 2.45 Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi Tahun 2022-2023 ..... II – 48
Gambar 2.46 Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 50
Gambar 2.47 IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 50
Gambar 2.48 Adopsi TIK Kota Bekasi Tahun 2022-2024 ..... II – 51
Gambar 2.49 Investasi dan PMTB Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 52
Gambar 2.50 Nilai Ekspor Kota Bekasi Tahun 2024 ..... II – 53
Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 ..... II – 54
Gambar 2.52 Indeks Infrastruktur Ke-PU-an Kota Bekasi Tahun 2020-2023 ..... II – 55
Gambar 2.53 Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ..... II – 56
Gambar 2.54 Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021-2023 ..... II – 57
Gambar 2.55 Indeks Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 58
Gambar 2.56 Inflasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 59
Gambar 2.57 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 60

Gambar 2.58 Indeks SPBE Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 61
Gambar 2.59 Perkembangan Nilai Smart City Kota Bekasi Tahun 2020-2024 ..... II – 62
Gambar 2.60 MCP Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ..... II – 62
Gambar 2.61 Nilai SPI Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ..... II – 63
Gambar 2.62 IKM Terhadap Layanan Publik Kota Bekasi Tahun 2021-2024 ..... II – 64
Gambar 2.63 Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Tahun 2019-2024 ..... II – 65
Gambar 2.64 Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024 ..... II – 66
Gambar 2.65 Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Berakhir di Tahun 2024-2027 ..... II–113
Gambar 2.66 Jumlah Kebutuhan Rumah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 ..... II–114
Gambar 2.67 Jumlah Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ..... II–115
Gambar 2.68 Jumlah Timbulan Air Limbah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ..... II–116
Gambar 2.69 Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ..... II–117
Gambar 2.70 Jumlah Timbulan Sampah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ..... II–118
Gambar 2.71 Jumlah Kebutuhan Sekolah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ..... II–118
Gambar 2.72 Jumlah Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030 ..... II–119
Gambar 2.73 Capaian Kinerja Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ..... II–121
Gambar 2.74 Pertumbuhan Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ..... II–122
Gambar 2.75 Capaian Kinerja Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ..... II–123
Gambar 2.76 Pertumbuhan Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ..... II–125
Gambar 2.77 Capaian Kinerja Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ..... II–126
Gambar 2.78 Pertumbuhan Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ..... II–128
Gambar 2.79 Proporsi Penggunaan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 ..... II–132
Gambar 2.80 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi II–142
Gambar 2.81 Isu Global II–150
Gambar 2.82 Isu Nasional II–153
Gambar 2.83 Isu Regional Jawa Barat II–156
Gambar 2.84 Isu Strategis Kota Bekasi II–158
Gambar 2.85 Keterkaitan Isu Strategis Kota Bekasi dengan Rekomendasi KLHS RPJMD II–162
Gambar 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 ..... III - 1
Gambar 3.2 Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 ..... III - 2
Gambar 3.3 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 ..... III - 3
Gambar 3.4 Indikasi Intervensi dalam RPJMN Tahun 2025-2045 ..... III - 3
Gambar 3.5 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ..... III - 4
Gambar 3.6 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ..... III - 5

Gambar 3.7 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ..... III – 12
Gambar 3.8 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi dengan Provinsi..... III - 16
Gambar 3.9 Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030 ..... III - 17
Gambar 3.10 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ..... III – 39
Gambar 3.11 Keterkaitan Gerakan Kobe dengan Asta Cita dan Jabar Istimewa ..... III – 42

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Bekasi memiliki peran penting dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat maupun Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, peran Kota Bekasi dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 4,56 persen dan menduduki peringkat ke-6 dari 27 kabupaten/kota di tahun 2024. Dalam konteks Jabodetabekpunjur, peran Kota Bekasi bukan hanya sebagai kota satelit, tetapi juga motor penggerak ekonomi, simpul mobilitas, dan pusat urbanisasi. Peranannya sangat penting dalam mendukung keberlanjutan kawasan metropolitan melalui fungsi ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Sebagai kota metropolitan, masyarakat Kota Bekasi banyak beraktivitas di Jakarta. Hal ini didukung dengan kualitas sumber daya manusia Kota Bekasi yang relatif lebih baik jika diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Bekasi mencapai 83,55 dan hanya di bawah Kota Tangerang Selatan yang angkanya mencapai 84,16 di tahun 2024. Capaian-capaian tersebut, merupakan bagian kecil dari kontribusi pembangunan Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Kota Bekasi sesuai kewenangannya diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan cita-cita Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Kota Bekasi Maju, Berdaya

Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan. Cita-cita tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dilantiknya Dr. H. Tri Adhianto T, SE, MM dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 maka Kota Bekasi harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat dari Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Penyusunan RPJMD ini juga harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Adapun pedoman teknis penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Sesuai dengan tahapannya, tahap pertama RPJPD Kota Bekasi difokuskan pada penguatan fondasi yaitu penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Selain memedomani RPJPD, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Penyelarasan kinerja diutamakan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita serta pencapaian Jabar Istimewa.

Aspek strategis dan politis RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Media untuk melaksanakan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada saat kampanye sesuai dengan kaidah perencanaan;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dioperasionalkan dalam RKPD;
3. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan perencanaan;

4. Pedoman penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. Instrumen untuk mengukur ketercapaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pelaksanaan otonomi daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Tahapan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diawali dengan persiapan penyusunan RPJMD. Selanjutnya, dilakukan pembahasan visi dan misi secara teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMD, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal RPJMD, pengajuan rancangan awal RPJMD kepada DPRD, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD dengan DPRD, konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur Jawa Barat, penyusunan rancangan RPJMD, musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD, pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD, evaluasi rancangan peraturan daerah RPJMD dan penetapan. Dengan demikian, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7); dan
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).

1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota.

Pedoman utama dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Muatan RPJPD yang dipedomani yaitu arah kebijakan dan sasaran pokok tahap pertama. Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana strategis kota ke dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang juga harus dipedomani yaitu RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terutama berkaitan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran, program prioritas, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing dokumen tersebut.

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

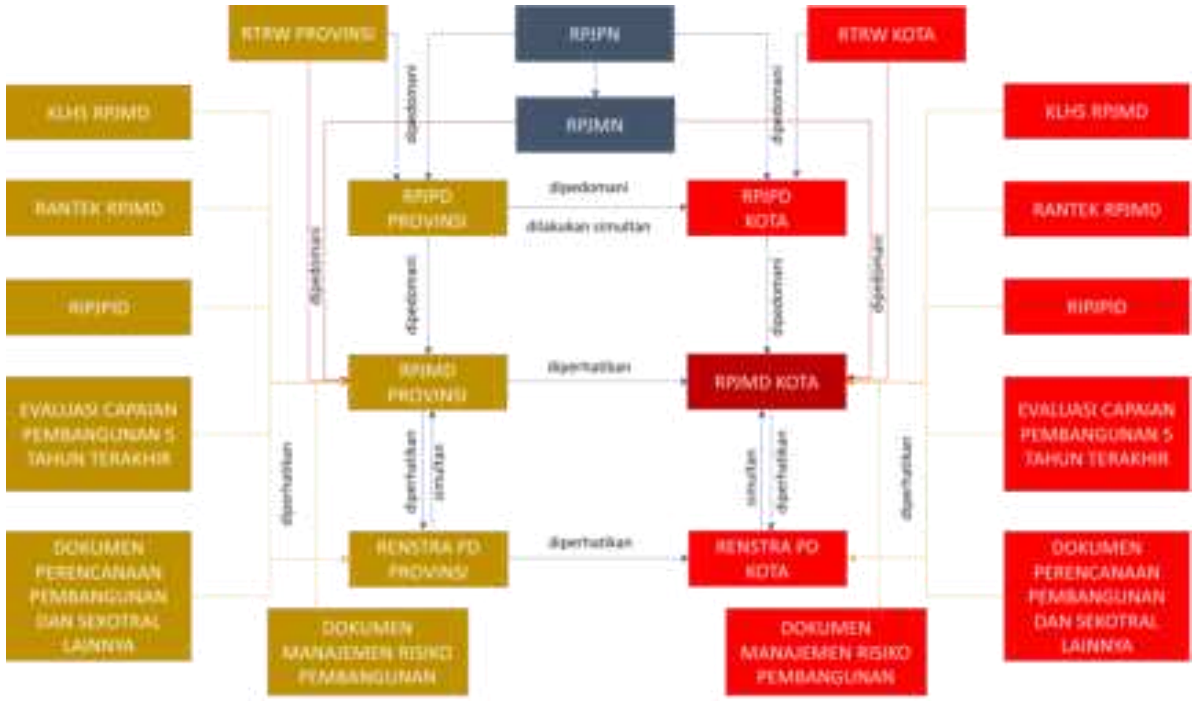

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (diolah)

Selain dokumen di atas, penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 sebagai bagian masukan dalam perumusan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisi tentang daya dukung dan daya tampung

lingkungan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan rekomendasi isu strategis juga perlu diakomodasi dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga memiliki keterkaitan dengan Renstra PD dan RKPD. RPJMD akan memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun hingga tahun 2030.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran umum Kota Bekasi dalam mengoptimalkan potensi dan peluang sebagai modalitas pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029;
2. Mengoperasionalkan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai dengan kaidah perencanaan sehingga tersusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Menjamin keselarasan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
4. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
5. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun hingga tahun 2030.

1.5 SISTEMATIKA

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, gambaran keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu dan gambaran proyeksi keuangan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, permasalahan pembangunan serta isu strategi pembangunan daerah.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi tentang visi dan misi kepala daerah serta hasil *cascading* yang berupa tujuan dan sasaran yang merupakan gambaran ketercapaian visi, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi keseluruhan program Perangkat Daerah yang merupakan sigma dari program-program Renstra PD, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab V Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek. Bahkan Kota Bekasi juga menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Sebagai kota yang berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban, Kota Bekasi yang juga sering dijuluki sebagai Kota Patriot atau Kota Pejuang, merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera - Jakarta - Jawa Tengah - Jawa Timur maupun poros Jakarta - Bandung.

Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Daerah yang dulunya hanya berupa sawah, saat ini telah disulap menjadi kota dengan berbagai infrastruktur yang sangat memadai. Kota Bekasi sudah dilintasi berbagai transportasi publik seperti kereta *Commuter Line*, LRT serta berbagai transportasi umum lainnya. Selain itu, keberadaan jalan tol juga makin menunjang mobilitas masyarakat.

Mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Bekasi tercermin dari kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Tingginya komuter yang masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi kota tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan di Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta yang berada pada 106°48’28” - 107°27’29” Bujur Timur dan 6°10’6” - 6°30’6” Lintang Selatan. Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 kelurahan,

memiliki luas wilayah sekitar 213,1174 km² atau 21.311,74 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah Barat : Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi

Sumber: Analisis GIS, 2021

Secara fisik geografis, ketinggian wilayah di Kota Bekasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berkisar antara 28 hingga 110 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Limpasan air permukaan di setiap kecamatan di Kota Bekasi rata-rata sekitar 33,92 juta m³/tahun.

Penggunaan lahan Kota Bekasi didominasi oleh permukiman teratur (perumahan) dan permukiman tidak teratur yang dibangun secara individu. Permukiman teratur yang dikembangkan developer banyak dikembangkan di Kota Bekasi dengan tingkat kepadatan cukup tinggi yang memanfaatkan potensi aksesibilitas jalan arteri dan kolektor primer yang

strategis untuk menampung limpahan penduduk yang bekerja di Jakarta dan di kota-kota sekitar Kota Bekasi. Penggunaan lahan terbangun lainnya diperuntukkan untuk kawasan komersial, industri, fasilitas pelayanan umum, kawasan campuran, pemerintahan, perkantoran dan infrastruktur pendukung kegiatan perkotaan.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam konteks Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, kedudukan Kota Bekasi dalam konteks Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai:

a) pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
b) pusat perdagangan dan jasa skala regional;
c) pusat pelayanan kesehatan;
d) pusat pelayanan pendidikan tinggi;
e) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; dan
f) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042, Kota Bekasi diarahkan sebagai PKN yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala interNasional, Nasional atau beberapa provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek. Selain itu, Kota Bekasi juga diarahkan untuk menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja.

Adapun berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kota Bekasi diarahkan sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang

nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rencana struktur ruang, sistem pelayanan perkotaan Kota Bekasi yaitu:

(1) Penetapan PPK, yang berada di koridor Jalan Sudirman-Juanda-Cut Meutia-Ahmad Yani, koridor Jalan Siliwangi-Jalan Pekayon Jaya-Jalan Perjuangan-Jalan Noer Ali-Jalan Muchtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan *Central Business District* (CBD) Kota Bekasi.

(2) Penetapan SPPK meliputi:

a. SPPK Pondokgede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;

b. SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapanjaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapanbaru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa;

c. SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan dan jasa;

d. SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPST DKI Bantargebang).

(3) Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, lokasi Kota Bekasi yang strategis kemudian menyebabkan tingkat persaingan penggunaan lahan menjadi sangat tinggi. Dampak langsung dari tingginya penggunaan lahan adalah semakin langkanya ketersediaan lahan untuk pengembangan kota. Kerapatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi di Kota Bekasi berubah dari sekitar 54 persen pada tahun 2001 menjadi 73 persen pada tahun 2021 (Dewi, Taryana dan Astuti, 2023).

Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan terbangun di Kota Bekasi berkembang dengan sangat tinggi. Penggunaan lahan yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya harga lahan di Kota Bekasi. Keterbatasan lahan disertai dengan tingginya harga lahan menjadi tantangan utama dalam hal penyediaan lahan untuk kebutuhan pelayanan publik.

C. Potensi Sumber Daya Alam

Dengan karakter perkotaan yang dominan, potensi sumber daya alam yang ada di Kota Bekasi sangat terbatas. Potensi sumber daya alam tersebut seperti pertambangan gas dengan luas kurang lebih 3,44 ha yang terletak di Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna.

Sumber daya air di Bekasi sangat vital, terutama untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sektor pertanian. Kota Bekasi terletak pada zona Cekungan Air Bawah Tanah Bekasi Karawang dan pada 3 Daerah aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Bekasi, DAS Sunter, dan DAS Cakung. Potensi imbuhan air tanah bebas pada Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Bekasi Karawang adalah sebesar 47,0256 m3/detik. Potensi air permukaan (Sungai Bekasi) yang dapat diandalkan di Kota Bekasi saat ini adalah 9.16 m3/detik namun dengan adanya tambahan pasokan dari Jatiluhur melalui Saluran Induk Tarum Barat debit yang diandalkan dapat mencapai 44,62 m3/detik.

Di sisi lain, tanah di Kota Bekasi sebagian besar merupakan tanah aluvial yang terbentuk dari endapan sungai seperti Sungai Bekasi dan Sungai Cikarang. Tanah aluvial cenderung subur, gembur, dan kaya bahan organik, sangat cocok untuk tanaman pangan, terutama padi. Namun, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan dan kawasan industri, menyebabkan penurunan kualitas tanah dan berdampak negatif bagi ketahanan pangan. Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan kebijakan zonasi untuk melindungi lahan pertanian yang masih ada. Sebagian lahan di pinggiran (terutama Bekasi Timur dan Selatan) masih bisa dikembangkan untuk pertanian. Kondisi ini perlu didukung dengan kebijakan pertanian perkotaan (*urban farming*) untuk mendukung ketahanan pangan kota seiring dengan alih fungsi lahan yang tidak bisa dihindari.

D. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Hasil analisis potensi ketersediaan air

di Kota Bekasi dengan menggunakan data ketersediaan berdasarkan data SK.147/2023, luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RDTR Kota Bekasi, ketersediaan air tahun 2022 sebesar 130.844.849,84 m^3/tahun.

Gambar 2.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022

Sumber: Laporan KLHS RPJMD, 2024 (diolah)

Dengan kebutuhan air Kota Bekasi sebesar 301.284.051,97 m^3/tahun, maka terdapat selisih yang cukup besar yaitu mencapai 170.456.164,16 m^3/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung air/ketersediaan air pada tahun 2022 secara keseluruhan sudah melampaui ambang batas. Jika dilihat dari luasannya, luas wilayah yang belum melampaui ambang batas yaitu sebesar 1.560,61 ha sedangkan luas wilayah yang sudah melampaui sebesar 19.742,98 ha.

Gambar 2.3 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Bekasi Tahun 2022

Sumber: Laporan KLHS RPJMD, 2024 (diolah)

Luas sawah eksisting di Kota Bekasi yaitu seluas 276,78 ha. Dengan asumsi 1 kg = 1300 kkal, maka ketersediaan pangannya sebesar 2.610.799.620,01 kkal/tahun. Dari hasil perhitungan, kebutuhan pangan Kota Bekasi terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Selisih ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di Kota Bekasi tahun 2022 dengan sebesar 2.030.095.735.379,97 kkal. Hal ini mengindikasikan bahwa status daya dukung pangan Kota Bekasi sudah terlampaui.

E. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Sumber daya energi, air dan pangan terus menjadi hal krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, mengatasi permasalahan global terkait kelaparan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ketiga elemen tersebut yaitu energi, air dan pangan membentuk suatu hubungan yang saling berkaitan, kemandirian pangan sangat bergantung dengan ketersediaan sumber daya air dan ketersediaan air digunakan untuk menghasilkan sebagian besar bentuk energi. Permintaan ketiganya meningkat pesat pada kondisi sekarang sehingga perlu dipastikan bahwa pengelolaan energi, air dan pangan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menyeimbangkan kebutuhan hidup manusia dan alam. Khususnya di Kota Bekasi, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam upaya dukungan terhadap ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, seperti Indeks Ketahanan Pangan, prevalensi

ketidakcukupan konsumsi pangan, akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum dan beberapa indikator lainnya.

Ketahanan energi merupakan kemampuan ekonomi untuk menjamin ketersediaan pasokan sumber daya energi pada tingkat yang tidak akan mempengaruhi kinerja ekonomi (*World Economi Forum, 2006*). Dapat disimpulkan bahwa aspek pasokan/*supply* dan harga menjadi aspek utama dalam ketahanan energi. Pada konteks Kota Bekasi, ketahanan energi berkaitan dengan kemampuan pasokan energi dalam mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bekasi. Pasokan energi di Kota Bekasi, khususnya energi listrik, dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar milik PLN Nusantara Power yang terletak di wilayah Kabupaten Bekasi. Dengan kapasitas terpasang mencapai 2.290 megawatt (MW), PLTGU ini menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik nasional. Di Kota Bekasi sendiri, seluruh rumah tangga yang ada sudah menerima aliran listrik sehingga rasio elektrifikasinya sudah 100 persen.

Selain kuantitas, kualitas pasokan energi di Kota Bekasi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan konsep ramah lingkungan yang menitikberatkan pada pemanfaatan energi terbarukan. PLTGU Muara Tawar sendiri terus bertransformasi menjadi salah satu pionir dalam memproduksi hidrogen hijau. Produksi ini dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di area pembangkit.

Pemerintah Kota Bekasi juga terus berkomitmen untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini ditandai dengan akan dimulainya kembali proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang. PLTSa ini diharapkan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengolah 1.800 ton sampah harian yang dihasilkan. Selain untuk mengurangi volume sampah, keberadaan PLTSa akan memperkuat pasokan listrik di Kota Bekasi dan tentu akan berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Mengingat tumpukan sampah berkontribusi dalam pelepasan gas metana yang berpengaruh pada perubahan iklim.

Dari sisi ketahanan pangan, meskipun status daya dukung pangan Kota Bekasi sudah terlampaui, namun kinerja Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan Badan Pangan Nasional, IKP Kota Bekasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022. IKP Kota Bekasi ini bahkan berada pada peringkat kedua secara Nasional setelah Kota Denpasar. Capaian ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Bekasi melalui program-program untuk meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, dan aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas menunjukkan keberhasilan. Selain itu, upaya dalam memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi pangan juga memainkan peran penting dalam meningkatnya IKP.

Gambar 2.4 IKP Kota Bekasi Tahun 2022-2024

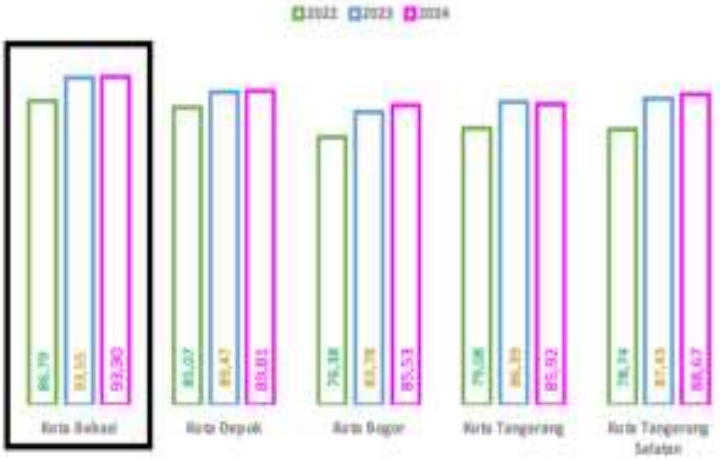

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah)

Meskipun IKP Kota Bekasi sudah tinggi, namun capaian tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini sebagai antisipasi mengingat penyediaan pangan di masa depan akan semakin kompleks di tengah ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim yang makin nyata.

Gambar 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah)

Meskipun IKP Kota Bekasi sudah tinggi, namun masih ada prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masuk dalam kategori rendah, bahkan di tahun 2024, angkanya hanya 2,04 persen, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6 persen. Angka 2,04 persen tersebut maknanya adalah hanya sekitar 2 dari setiap 100 orang yang tidak mendapatkan cukup kalori dari makanan setiap harinya untuk menjalankan aktivitas normal dan hidup sehat.

Sementara dari sisi ketahanan air, *Asian Development Bank* (2016) mendefinisikan ketahanan air yaitu keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Kondisi sumber daya air di Kota Bekasi dapat dilihat berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Secara akses terhadap sumber air minum layak, Kota Bekasi memiliki nilai persentase lebih tinggi dibandingkan akumulasi persentase Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Kota Bekasi Tahun 2020-2024

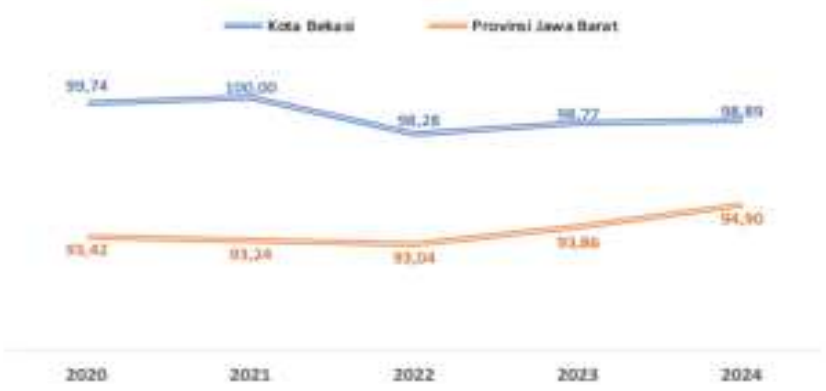

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Berdasarkan data dari PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, pada tahun 2024 tercatat volume air yang disalurkan sebanyak 4.174.121 m^3 dengan nilai nominal sebesar 38,2 juta rupiah. Sumber air baku yang digunakan selama ini berasal dari Kali Bekasi. Namun karena kondisi air baku dari Kali Bekasi sudah tidak lagi memadai, Pemerintah Kota Bekasi berupaya

memanfaatkan air Kalimalang untuk menjamin pasokan air bersih yang lebih berkualitas bagi warga. Pembangunan Intake Siltrap dengan memanfaatkan air Kalimalang ini ditargetkan dapat memanfaatkan air sebesar 650 meter kubik per detik, dengan alokasi awal 400 meter kubik per detik. Upaya yang dilakukan ini berkat kerja sama dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Infrastruktur ini juga dirancang untuk melayani sekitar 42.000 pelanggan di wilayah Bekasi Utara, Medan Satria, dan Bekasi Barat.

F. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting di tengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah lingkungan baik sebagai dampak pembangunan maupun pertambahan jumlah penduduk. Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kualitas lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Mencermati kinerja IKLH Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir terlihat bahwa hanya pada tahun 2020 yang memiliki kinerja baik dengan realisasi melebihi target. Untuk tahun 2023, nilai IKLH Kota Bekasi menurun jika dibandingkan tahun 2022 dan masuk dalam kategori "waspada". kemudian, tahun 2024 nilai IKLH meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023. Akan tetapi, tahun 2024 realisasi IKLH masih di bawah target. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat jika dicermati per komponen, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Bekasi yang paling rendah dibanding nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.

Gambar 2.7 IKLH Kota Bekasi Tahun 2020-2024

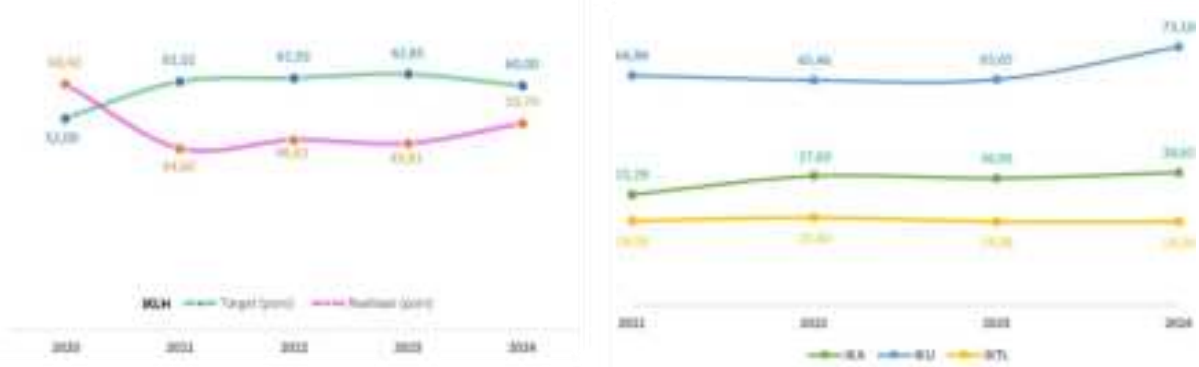

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Mencermati nilai komponen IKLH diatas, hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan ke depan antara lain memperluas dan melindungi ruang terbuka hijau (RTH), menerapkan zona rendah emisi (*Low Emission Zone*) di kawasan padat kendaraan, mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan listrik, membangun dan memperluas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di permukiman, memperketat pengawasan dan sanksi terhadap pembuangan limbah cair ke sungai dan saluran umum, merevitalisasi sungai dan sempadan dengan pendekatan ekologi, mengembangkan kota secara vertikal, bukan horizontal untuk mengurangi tekanan lahan, dan menginisiasi program insentif konservasi, seperti pajak rendah untuk lahan yang dipertahankan sebagai RTH atau lahan pertanian.

Gambar 2.8 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Tahun 2020-2024

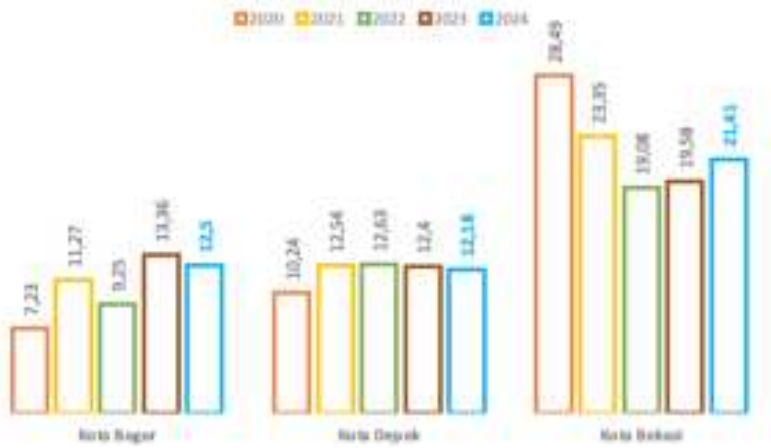

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akses sanitasi layak dan aman menjadi prioritas dalam kebijakan infrastruktur dasar di kota-kota berpenduduk masif, salah satunya seperti Kota Bekasi. Dibandingkan kota sekitar Jakarta lainnya yang berada di Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki penurunan persentase akses sanitasi aman dengan gap yang cukup tinggi. Untuk dapat meningkatkan kembali persentase rumah tangga menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, Pemerintah Kota Bekasi perlu untuk melakukan beberapa langkah penting, seperti membangun dan memperluas infrastruktur sanitasi layak, seperti jamban sehat, *septic tank* kedap, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, meningkatkan kampanye kesadaran tentang pentingnya sanitasi aman dan

dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan sebagainya.

Gambar 2.9 Persentase Sampah Terangkut ke TPA Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Seiring dengan pertambahan penduduk dan aktivitas perkotaan yang makin tinggi, timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Bekasi cenderung makin besar. Sementara kapasitas tampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) makin terbatas. Berdasarkan analisis dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, timbulan sampah di Kota Bekasi mencapai 6.568.075 m^3/hari di tahun 2023. Dengan jumlah timbulan sampah yang besar tersebut, tidak seluruhnya terangkut ke TPA. Hanya 64,96 persen sampah yang dapat diangkut ke TPA Sumur Batu.

Upaya penanganan sampah di Kota Bekasi memerlukan pendekatan yang terpadu. Maksudnya adalah, diperlukan penggunaan teknologi yang mampu mengolah sampah menjadi energi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah memperkuat layanan persampahan, dan penguatan melalui regulasi beserta penegakan yang lebih tegas akan regulasi tersebut.

G. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan.

Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrem dan gelombang panas.

Gambar 2.10 Iklim Kota Bekasi

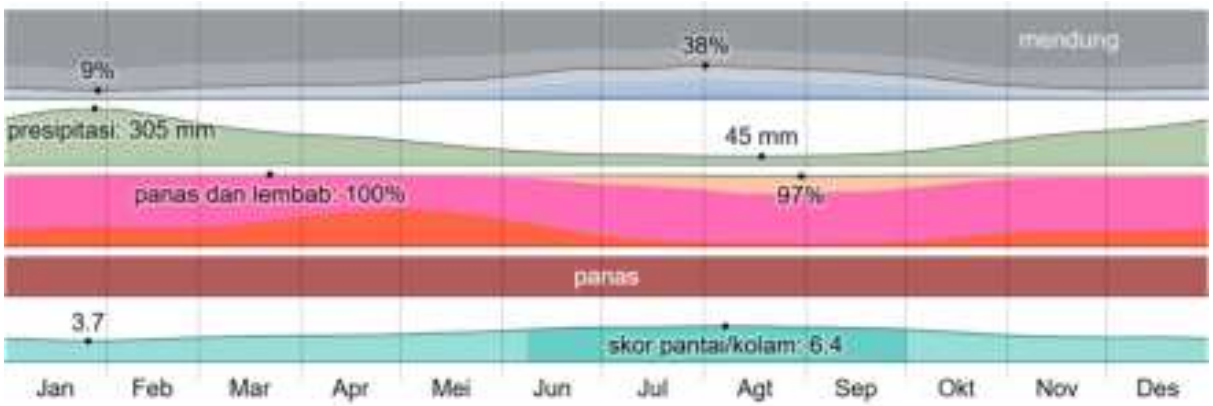

Sumber: https://id.weatherspark.com (diakses 1 Februari 2025)

Berdasarkan klasifikasinya, Kota Bekasi didominasi jasa ekosistem sangat rendah sebesar 15.912,33 ha atau 74,69 persen, untuk jasa ekosistem pengaturan iklim rendah sebesar 4.787,67 ha atau 22,47 persen, jasa ekosistem pengaturan iklim sedang sebesar 475,24 ha atau 2,23 persen dan jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 128,35 ha atau 0,60 persen.

Terkait dengan penanganan perubahan iklim, Pemerintah Kota Bekasi aktif mengembangkan Program Kampung Iklim sejak tahun 2023. Masyarakat di 29 RW terlibat dalam aksi adaptasi (penghijauan, pengelolaan sampah/plastik, komposting) dan mitigasi (pengurangan emisi karbon). Kota Bekasi juga menempatkan pembangunan sistem drainase ekologis berupa sumur resapan, kolam retensi, ruang terbuka hijau, dan *konsep sponge city*. Selain itu, pendekatan seperti Ekosistem–Berdasarkan Pengurangan Risiko Bencana (Eco-DRR) dan solusi alamiah (*Nature-Based Solutions*) akan lebih diperkuat dengan *grey infrastructure* agar efektif.

Komitmen Kota Bekasi ini juga tercermin dari mulai diterapkannya indikator Penurunan Emisi GRK sebagai tolak ukur aksi penanganan perubahan iklim. Hingga tahun 2024, data Penurunan Emisi GRK belum tersedia. Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan diharapkan dapat diukur sehingga intervensi ke depan agar lebih tepat.

Berkaitan dengan bencana, identifikasi risiko bencana merupakan langkah penting dalam upaya untuk merencanakan daerah. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan manajemen risiko selanjutnya baik terkait perencanaan maupun perumusan kebijakan dan aksi. Untuk melihat gambaran dan kondisi risiko bencana itu dapat menggunakan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Gambar 2.11 IRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: BNPB dan Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Tren IRB Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dan pada tahun 2024 masuk dalam kategori “sedang”. Meski demikian, di antara kota di sekitar Jakarta, IRB Kota Bekasi termasuk paling tinggi. Jika dicermati per bencana, risiko bencana yang cukup besar yaitu terkait bencana banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

Gambar 2.12 Indeks Penanggulangan Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Sebagai salah satu kota di sekitar Jakarta, penurunan IRB Kota Bekasi memiliki dampak yang penting dalam konteks mitigasi risiko bencana regional. Dengan menurunnya IRB, Kota Bekasi dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai bencana alam yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, Kota Bekasi masih memerlukan upaya-upaya lanjutan dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan sistem peringatan dini, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.

Wilayah perkotaan yang cukup padat, menjadikan Kota Bekasi mempunyai risiko kebakaran yang cukup tinggi. Risiko itu dapat diminimalkan yang tercermin dari Indeks Penanggulangan Kebakaran yang cenderung meningkat per tahunnya. Tahun 2024 bahkan realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan target. Berbagai kegiatan guna pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran perlu terus ditingkatkan agar nilai Indeks Penanggulangan Kebakaran makin meningkat. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi terkait dengan penanganan kebakaran terletak pada kapasitas SDM dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki.

Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021-2023

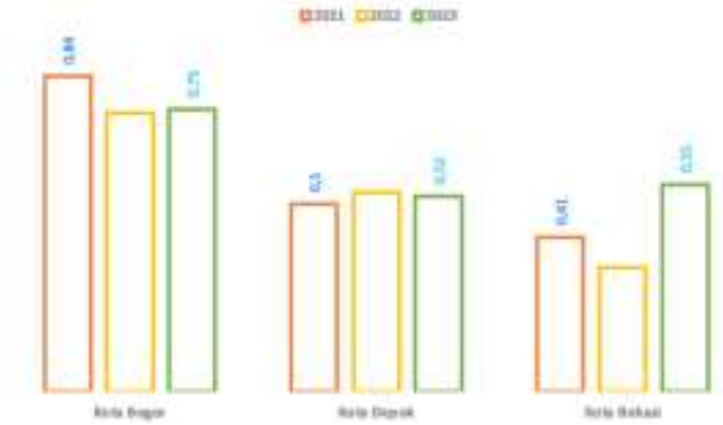

Sumber: Data.go.id, Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Secara garis besar pembagian kelas tingkat ketahanan daerah: Indeks <=0,4 adalah rendah; Indeks 0,4 – 0,8 adalah sedang; serta indeks 0,8 – 1 adalah tinggi.

Kota Bekasi berhasil meningkatkan 0,14 poin IKD dalam kurun waktu 3 tahun, meskipun tetap berada dalam kategori sedang. Terlebih Kota Bekasi masih berada jauh di bawah Kota

Bogor. Untuk dapat meningkatkan indeks ketahanan daerah, pemerintah kota perlu untuk melibatkan kolaborasi multisektor, mengingat penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri. Selain itu, penting untuk dapat mengembangkan infrastruktur sistem drainase yang baik, mendorong penggunaan material bangunan tahan gempa serta ramah lingkungan, atau menerapkan kebijakan pengelolaan limbah dan sampah yang lebih baik untuk mengurangi polusi dan dampak lingkungan lainnya.

2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2024 penduduk Kota Bekasi berdasarkan hasil proyeksi dari SP2020 diperkirakan sebanyak 2,64 juta jiwa. Populasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sekitar 13,24 persen penduduk, diikuti Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Jatiasih, masing-masing 10,83 persen dan 10,22 persen. Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang dengan jumlah penduduk sekitar 4,25 persen.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi periode 2020-2024 rata-rata sebesar 1,04 persen dengan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan yang bervariasi. Terkait dengan kepadatan penduduk, sebagian besar wilayah Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dari 12 kecamatan, 9 diantaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km^2. Kecamatan Bekasi Barat menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 19 ribu jiwa/km^2.

Gambar 2.14 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bekasi

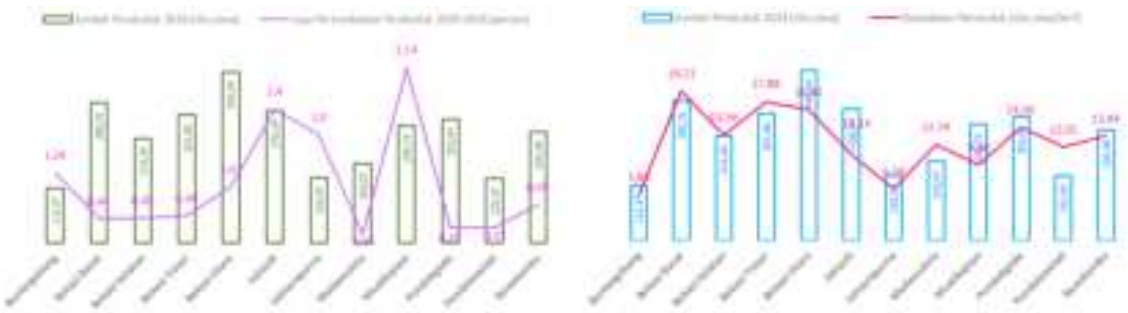

Sumber: BPS Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Kepadatan penduduk tidak selalu berkorelasi langsung dengan jumlah penduduk, karena faktor luas wilayah juga mempengaruhi. Berdasarkan analisis kepadatan penduduk, terlihat bahwa beberapa kecamatan seperti Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara dan Pondok Gede memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 19,21; 17,88; 16,81 dan 14,56 ribu jiwa/km^2. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang cukup pesat di wilayah-wilayah tersebut.

B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,32 juta jiwa dan perempuan 1,31 juta jiwa. Dengan demikian, angka *sex ratio* Kota Bekasi di tahun tersebut sebesar 100,9 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Gambar 2.15 Komposisi Penduduk Kota Bekasi

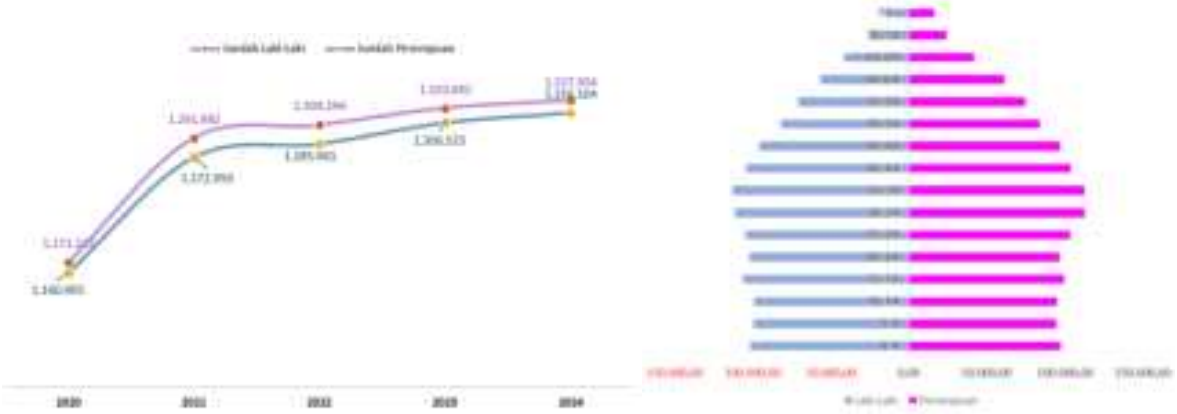

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Bekasi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Kelompok usia 25-39 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan jumlah total 658.169 jiwa, atau sekitar 24,9 persen dari total penduduk. Selanjutnya, data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk seiring bertambahnya kelompok usia. Ini mencerminkan tren global dalam proses penuaan penduduk juga terjadi di Kota Bekasi.

C. Penduduk Komuter

Kedekatan dengan Jakarta mengakibatkan banyak penduduk Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 466.260 penduduk Kota Bekasi (19,2 persen) yang melakukan komuter ke daerah lain di Metropolitan Jakarta. Dari angka tersebut, sebagian besar yaitu 68,24 persen penduduk komuter beraktivitas di Jakarta. Di antara komuter ini, 68,3 persen adalah laki-laki, sedangkan 31,7 persen adalah perempuan.

Tujuan utama dari kegiatan komuter adalah untuk bekerja yaitu sebesar 87,2 persen, sedangkan yang lainya yaitu 12,8 persen untuk menempuh pendidikan (sekolah/kuliah/kursus). Dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta, persentase penduduk komuter Kota Bekasi adalah tertinggi kedua setelah Kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan utama lokasi tempat tinggal bagi penduduk komuter di Metropolitan Jakarta.

Gambar 2.16 Penduduk Komuter Tahun 2023

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Selain sebagai tempat tinggal, Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan utama kegiatan komuter di Metropolitan Jakarta. Pada tahun 2023, terdapat 258.759 kegiatan komuter yang memasuki Kota Bekasi dari daerah-daerah lainnya di Metropolitan Jakarta. Kegiatan komuter tersebut terutama berasal dari Kabupaten Bekasi (55,2 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (20,3 persen). Angka komuter yang masuk ke Kota Bekasi merupakan tertinggi kedua setelah Kota Tangerang di antara kota-kota di sekitar Jakarta. Tingginya komuter masuk di Kota Bekasi menunjukkan bahwa Kota Bekasi saat ini sudah menjadi tujuan bekerja/pendidikan bagi daerah-daerah di sekitarnya.

D. Tren Demografi

Proyeksi penduduk tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi akan berjumlah sekitar 2.648.270 jiwa dan akan bertambah menjadi sekitar 2.677.000 di tahun 2030. Dari jumlah penduduk tahun 2030 tersebut, distribusi terbesar akan berada di Kecamatan Bekasi Utara (13,3 persen), Bekasi Barat (11,9 persen), dan Bekasi Timur (11,4 persen).

Kepadatan penduduk Kota Bekasi tahun 2025 diperkirakan mencapai 12,58 ribu jiwa/km^2 dan 12,72 ribu jiwa/km^2 di tahun 2030. Dari 12 kecamatan yang ada, 2 kecamatan akan memiliki kepadatan penduduk di atas 20 ribu jiwa/km^2. Kecamatan itu yaitu Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Barat.

Gambar 2.17 Jumlah dan Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Tren penduduk usia produktif (15-64 tahun) tahun 2025-2030 menunjukkan penurunan namun masih yang dominan dibanding penduduk usia nonproduktif. Dengan mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif, penting untuk dipastikan bahwa ketersediaan lapangan kerja serta pendidikan dan kesehatan yang berkualitas agar bonus demografi dapat memberikan dampak yang signifikan. Sementara itu, dengan adanya jumlah penduduk usia lanjut yang cenderung meningkat, perlu kiranya ada peningkatan pemenuhan kebutuhan kelompok umur tersebut dalam hal layanan kesehatan, sosial, dan fasilitas publik lainnya.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, Kota Bekasi menghadapi tantangan ekonomi yang serius dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yakni sebesar -2,58 persen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda global dan mengganggu aktivitas ekonomi secara luas termasuk Kota Bekasi.

Gambar 2.18 LPE Kota Bekasi Tahun 2020-2024

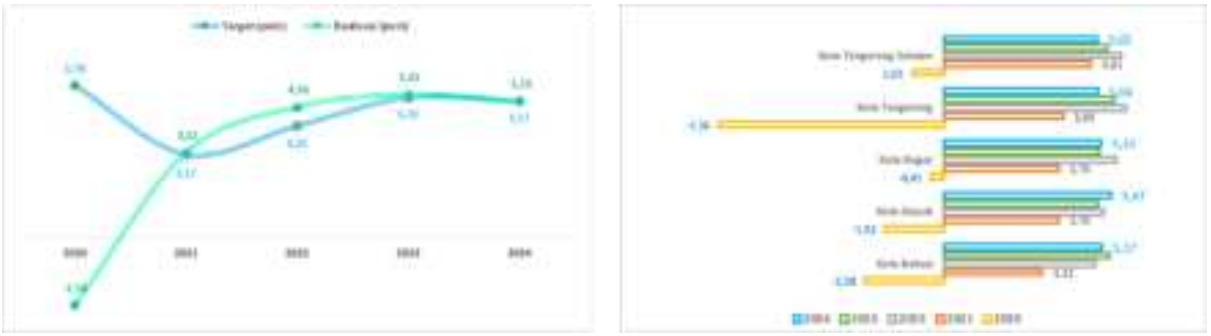

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah)

Setelah terkontraksi cukup dalam, LPE Kota Bekasi di tahun-tahun berikutnya selalu menunjukkan peningkatan bahkan pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 5,19 persen. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni dengan capaian sebesar 5,43 persen, namun pada tahun 2024, capaian ini juga melebihi LPE Kota Bogor (5,15 persen) serta Provinsi Jawa Barat (4,95 persen) dan Nasional (5,03 persen). Namun jika dibandingkan dengan kota lain di sekitar Jakarta, LPE Kota Bekasi telah berhasil melampaui LPE Kota Tangerang (5,04 persen) dan Kota Tangerang Selatan (5,02 persen).

Secara keseluruhan, meskipun LPE Kota Bekasi mengalami fluktuasi namun kota ini berada dalam posisi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi antarkota menunjukkan pentingnya faktor-faktor lokal dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi juga sejalan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi antara kebijakan pemerintah

di tingkat lokal, provinsi, dan Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi cenderung berkorelasi positif dengan kinerja LPE yang dicapai. Maksudnya yaitu, jika LPE Kota Bekasi menunjukkan peningkatan maka angka kemiskinan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan meningkatkan LPE melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial.

Gambar 2.19 Angka Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

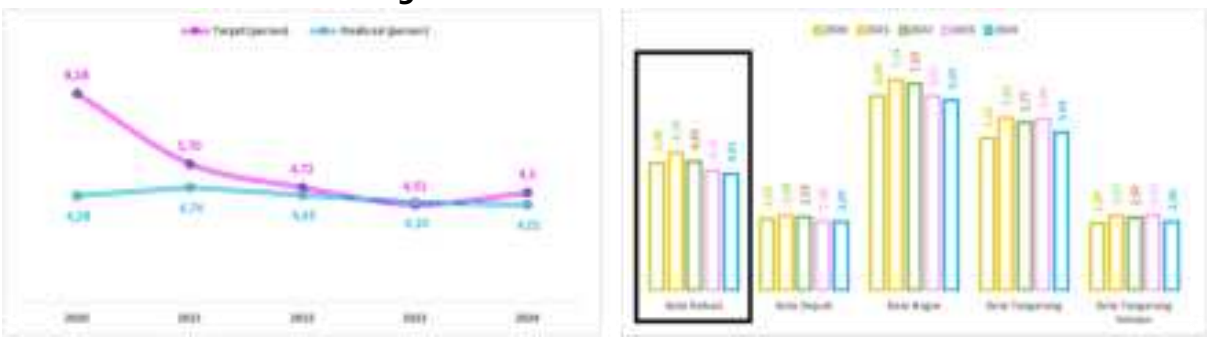

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah)

Pada tahun 2020, angka kemiskinan Kota Bekasi mengalami kenaikan yaitu mencapai 4,38 persen. Penyebab utama kenaikan ini terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu banyak sektor ekonomi dan menyebabkan hilangnya pekerjaan serta pendapatan masyarakat. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan terus dilakukan.

Realisasi pada tahun 2021-2022 dan tahun 2024 mampu mencapai target penurunan yang telah ditetapkan. Hanya pada tahun 2023, target belum tercapai. Hal ini dimungkinkan oleh pengaruh dari sektor-sektor lain seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, peningkatan jumlah pengangguran, sektor pendidikan yang belum optimal, dan sebagainya.

Untuk ke depannya, upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah lanjutan dengan melakukan pemetaan per kecamatan bahkan hingga ke level terendah agar intervensi penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran. Selain itu, penanganan lintas urusan juga perlu dikedepankan agar penanganan kemiskinan lebih komprehensif.

C. Pengurangan Pengangguran Terbuka

Upaya pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada akhirnya menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 terus melampaui target yang ditetapkan semenjak tahun 2023 dan TPT Kota Bekasi berada pada angka terendah yaitu 7,82 persen. TPT Kota Bekasi masih relatif lebih tinggi di antara kota-kota di sekitar Jakarta–meskipun lebih rendah dari TPT Kota Bogor–namun penurunan angka TPT masih tergolong stagnan dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Gambar 2.20 TPT Kota Bekasi Tahun 2020-2024

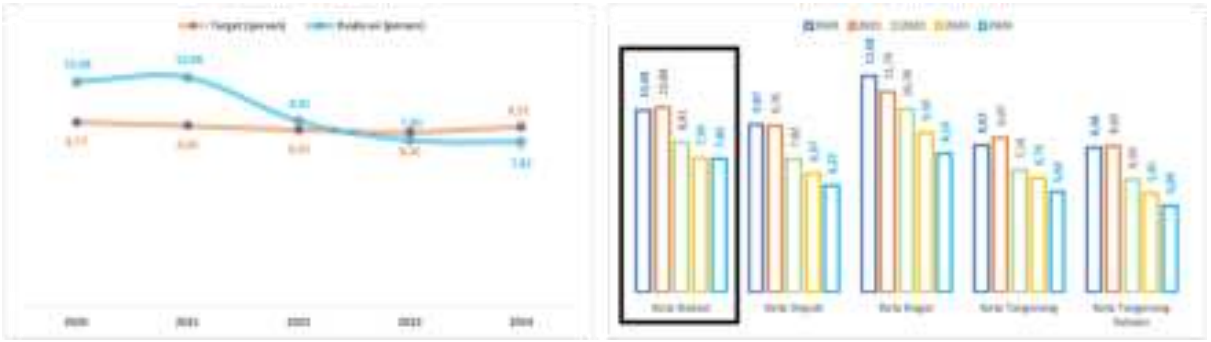

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah)

Jika dikorelasikan dengan LPE, pada tahun 2024 LPE Kota Bekasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun LPE menurun, namun TPT Kota Bekasi juga mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan LPE tidak serta meningkatkan TPT. Sementara jika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan, TPT Kota Bekasi menunjukkan korelasi yang positif. Artinya ketika tingkat kemiskinan berkurang, angka TPT pun juga menurun.

Capaian penurunan TPT Kota Bekasi ini perlu untuk ditingkatkan, mengingat tren penurunannya sudah terjadi sejak tahun 2022. Hal ini dapat dimungkinkan karena berbagai faktor, seperti sudah adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, meningkatnya daya saing tenaga kerja, meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah lanjutan perlu ditingkatkan seperti: a) peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri dan bersertifikasi; b) penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM untuk mendorong penyerapan tenaga kerja mandiri dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal tertentu; c) perluasan investasi dan

penciptaan lapangan kerja baru melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal; dan d) optimalisasi penempatan tenaga kerja melalui layanan informasi pasar kerja melalui *job fair*.

D. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan suatu daerah yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat. IPM Kota Bekasi sejak tahun 2020 hingga 2024 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, capaian ini hanya dibawah capaian IPM Kota Tangerang Selatan.

Gambar 2.21 IPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024

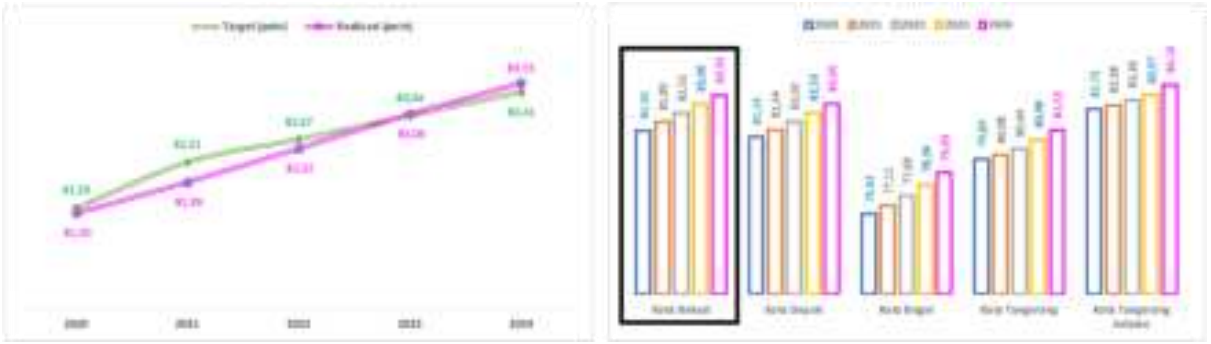

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Peningkatan IPM Kota Bekasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta peluang ekonomi yang lebih luas, kemungkinan besar telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

Meskipun demikian, perbandingan dengan kota di sekitar Jakarta menunjukkan bahwa setiap kota memiliki tantangan dan potensi pembangunan manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antarwilayah dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah sekitar Jakarta.

E. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan

Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di Kota Bekasi menunjukkan tren yang menarik. Hal ini terlihat dari nilai Rasio Gini Kota Bekasi selama periode 2020 hingga 2024 yang fluktuatif. Rasio Gini di Kota Bekasi cenderung mengalami kenaikan yang signifikan hingga tahun 2022 dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi, ketidakseimbangan dalam distribusi lapangan kerja, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2023, terlihat adanya penurunan sedikit dalam realisasi Rasio Gini menjadi 0,414, namun masih di atas target yang ditetapkan, Di tahun 2024, Rasio Gini Kota Bekasi meningkat menjadi 0,435. Angka peningkatan ini dapat dianggap sebagai sinyal negatif bahwa upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Kota Bekasi perlu untuk ditingkatkan. Gini Rasio Kota Bekasi ini juga tidak berpengaruh signifikan dengan LPE. Maksudnya adalah, pada saat LPE Kota Bekasi mengalami peningkatan, Rasio Gini juga meningkat. Namun pada tahun 2023, LPE mengalami peningkatan tetapi Rasio Gini mengalami penurunan. Bahkan di tahun 2024, LPE Kota Bekasi yang mengalami penurunan, Rasio Gini mengalami peningkatan.

Gambar 2.22 Rasio Gini Kota Bekasi Tahun 2020-2024

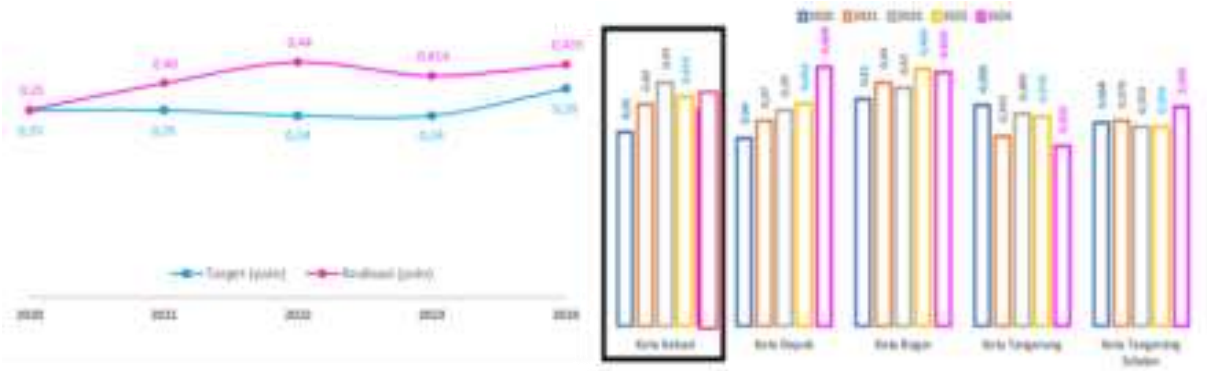

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi; BPS Provinsi Jawa Barat; BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah)

Untuk itu, langkah-langkah lanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan semakin perlu diperkuat untuk mengembalikan kestabilan dalam distribusi pendapatan. Hal ini penting mengingat pengurangan ketimpangan pendapatan merupakan tujuan penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik.

2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

A. Kualitas Kesehatan

Salah satu cerminan hasil pembangunan bidang kesehatan yaitu dengan melihat Indeks Kesehatan. Indeks ini dibentuk dari Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencerminkan harapan hidup rata-rata individu dalam suatu wilayah. Angka UHH sendiri minimal 20 tahun dan maksimal 85 tahun.

Gambar 2.23 Indeks Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Indeks Kesehatan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dan cenderung melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan Indeks Kesehatan yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, selain karena adanya peningkatan UHH, di sisi lain adanya program-program pemerintah di bidang kesehatan juga dapat membantu meningkatkan indeks tersebut. Faktor-faktor lain seperti pola hidup sehat, serta kondisi lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memenuhi aspek kesehatan warganya telah berlangsung dengan cukup baik.

UHH Kota Bekasi dibandingkan dengan kota di sekitar Jakarta seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, terlihat bahwa Kota Bekasi relatif memiliki UHH yang lebih tinggi. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2024, Kota Bekasi memiliki UHH tertinggi dengan 76,14 tahun, diikuti oleh Kota Tangerang Selatan dengan 75,80 tahun.

Gambar 2.24 UHH Kota Bekasi Tahun 2020-2024

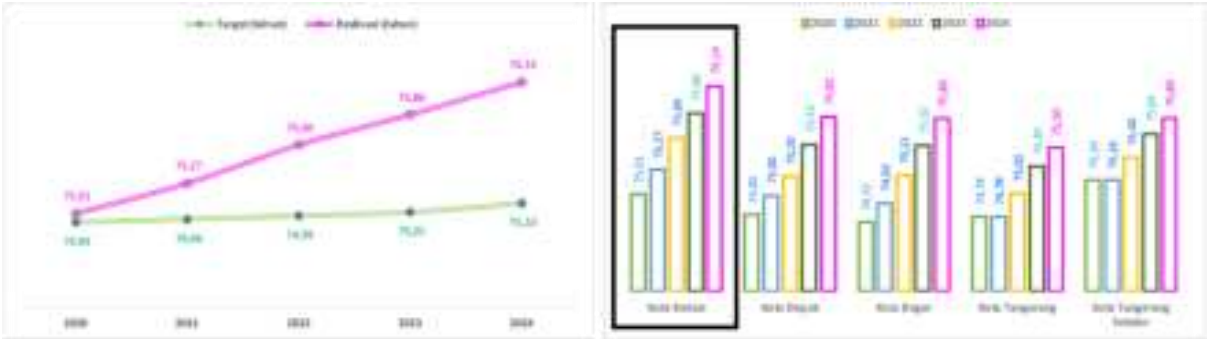

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Perbandingan UHH ini memberikan gambaran bahwa Kota Bekasi menunjukkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya di sekitar Jakarta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur kesehatan yang lebih berkembang, dan efektifnya program-program kesehatan yang dijalankan di Kota Bekasi. Namun demikian tantangan ke depan yaitu terkait dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama berkontribusi pada perbaikan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Penanganan Stunting

Stunting merupakan salah satu isu Nasional dan juga Kota Bekasi yang mendapat perhatian serius dalam 5 tahun terakhir. Angka persentase stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. Stunting pada dasarnya terjadi diakibatkan berbagai macam faktor tidak hanya persoalan gizi semata. Faktor lainnya disebabkan oleh usia dini pernikahan, lingkungan yang tidak sehat hingga pola asuh terhadap anak.

Selama periode tahun 2020-2024, Kota Bekasi berhasil menurunkan angka stunting cukup signifikan yaitu 7,46 persen. Penurunan angka stunting tersebut mencerminkan perbaikan kondisi gizi dan kesehatan anak-anak yang dilakukan secara konsisten di Kota Bekasi. Namun, tetap diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tren penurunan ini terus berlanjut hingga mencapai *zero* stunting sehingga anak-anak di Kota Bekasi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal.

Gambar 2.25 Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024

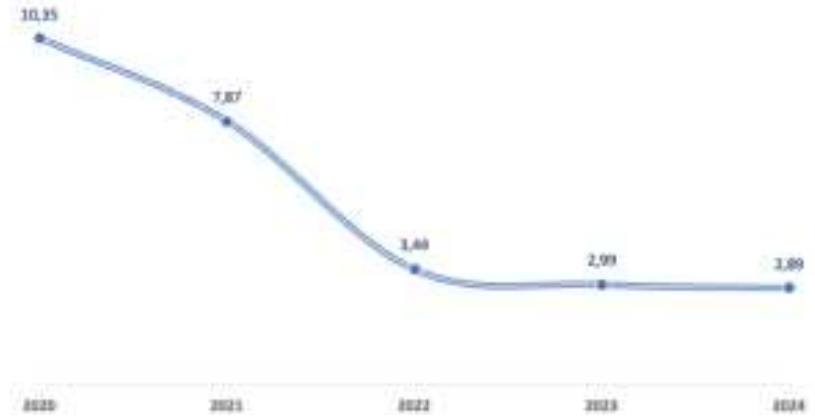

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Upaya pencapaian target zero stunting di Kota Bekasi tentunya memerlukan kesadaran kolektif, saling kolaborasi dari semua pihak, penyusunan strategi yang tepat komprehensif, dan bergerak dengan cepat turun ke wilayah berisiko. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kota Bekasi seperti balita (bayi di bawah usia lima tahun) dan baduta (bayi di bawah usia dua tahun) tumbuh di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh dengan ventilasi dan cahaya matahari buruk, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang.

2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

A. Akses Pendidikan

Hasil pembangunan bidang pendidikan di Kota Bekasi salah satunya tercermin dari Indeks Pendidikan yang dicapai. Indeks ini pada dasarnya dibentuk dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Jika di lihat tren 5 tahun terakhir, Indeks Pendidikan Kota Bekasi selalu meningkat dan melebihi target yang ditetapkan. Terjadi peningkatan realisasi sebesar 2,49 persen selama kurun waktu tahun 2020-2024 tersebut. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dari sisi partisipasi siswa.

Gambar 2.26 Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Gambar 2.27 HLS/RLS Kota Bekasi Tahun 2020-2024

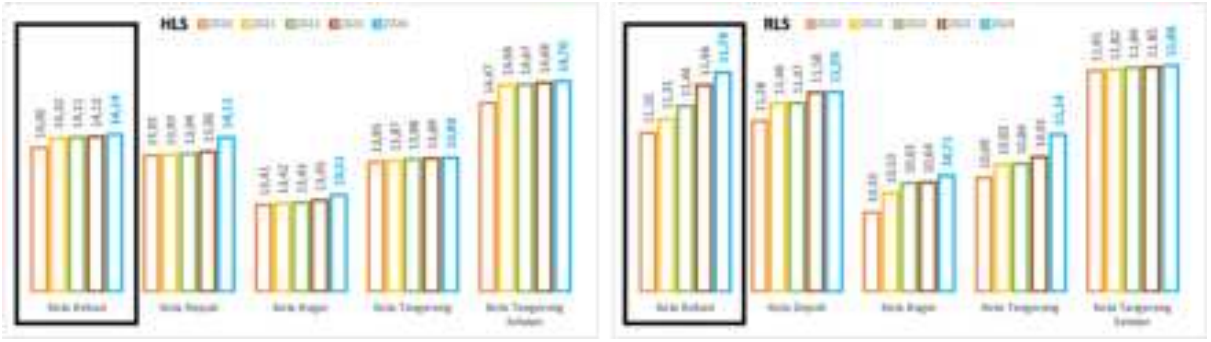

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Meningkatnya Indeks Pendidikan Kota Bekasi berkorelasi positif dengan HLS dan RLS yang dicapainya. Maksudnya adalah kedua indikator pembentuk Indeks Pendidikan juga menunjukkan kenaikan per tahunnya. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, HLS dan RLS Kota Bekasi berada di peringkat ke-2 di bawah Kota Tangerang Selatan. Hal ini tentunya merupakan capaian yang baik mengingat jumlah penduduk Kota Bekasi yang terbanyak di antara kota-kota tersebut.

B. Kualitas Pendidikan

Kemajuan pendidikan dari sisi kualitas siswa diukur dari skor literasi dan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan memahami dan menggunakan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan menggunakan prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemampuan literasi dan numerasi penting bagi murid di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai dasar

pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir logis dan analitis, serta bekal daya saing pada era globalisasi dan teknologi.

Gambar 2.28 Skor Literasi/Numerasi Kota Bekasi Tahun 2023-2024

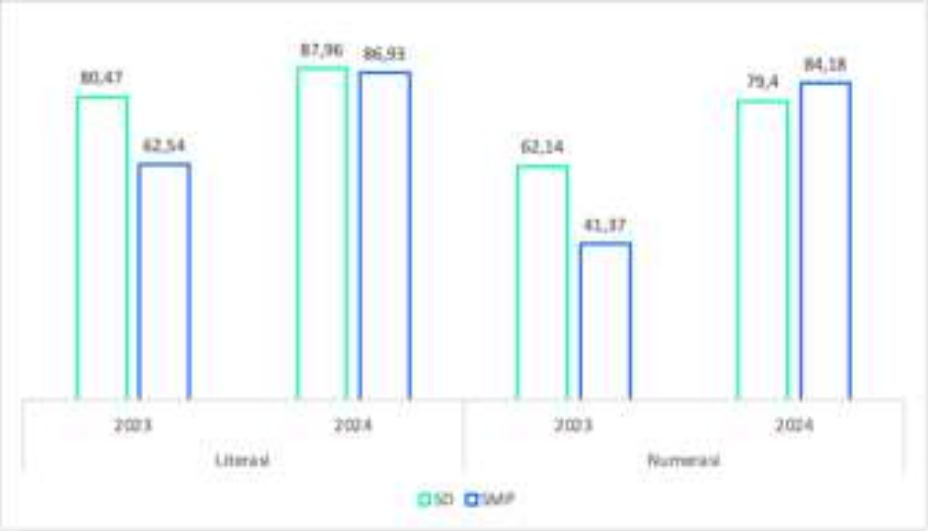

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Berdasarkan data di atas, kemampuan literasi dan numerasi siswa SD di Kota Bekasi sudah berada pada kategori "Baik" di tahun 2024. Sementara untuk skor literasi dan numerasi siswa SMP keduanya juga beada pada kategori "Baik" di tahun 2024. Kondisi ini memerlukan upaya berkesinambungan untuk lebih meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa mengingat kemampuan ini sebagai dasar pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir logis dan analitis, serta bekal daya saing pada era globalisasi dan teknologi.

C. Sekolah Rakyat

Dalam mewujudkan prioritas nasional terkait Sekolah Rakyat, Kota Bekasi berkomitmen untuk mendukung hal itu. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Adapun target pemenuhan siswa Sekolah Rakyat Menengah di Kota Bekasi yaitu sejumlah 136. Semua siswa telah siap mengikuti proses belajar di STPL Kota Bekasi.

D. Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Bekasi yang mengukur sejauh mana usaha yang dilaksanakan dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2024, skor IPLM Kota Bekasi sebesar 59,36 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih termasuk dalam kategori yang sama yaitu "sedang". Skor ini terendah dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta dan nilainya hanya sedikit di atas kategori rendah (< 50).

Gambar 2.29 IPLM Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Jika dicermati lebih dalam per unsur yang membentuk IPLM, unsur tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4) memiliki nilai terendah jika dibandingkan unsur lainnya. Hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku membaca sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan bacaan digital dibandingkan dengan berkunjung ke perpustakaan. Untuk lebih meningkatkan angka IPLM diperlukan pendekatan lintas sektor dan partisipatif. Langkah tersebut bukan hanya membangun gedung perpustakaan, tapi juga menggerakkan warga, guru, keluarga, dan komunitas dalam budaya baca, tulis, dan berpikir kritis. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga memerlukan adaptasi dalam penyediaan materi bacaan yang tentu juga sudah harus diperbanyak dengan berbasis digital.

2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

Perlindungan sosial di Kota Bekasi menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, memastikan setiap individu memiliki akses yang sama untuk hidup lebih

baik. Indikator untuk mengukur kinerja ini seperti cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, yang mencerminkan seberapa luas perlindungan bagi pekerja formal dan informal. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, jumlah kepesertaan Universal Coverange Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 433.079 peserta (33.5 persen) dari total angkatan kerja. Masih ada sekitar 858.582 tenaga kerja lagi yang belum terlindungi. Sedangkan untuk pembayaran klaim, selama periode tahun 2022-2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan Klaim Jaminan sebanyak 182.359 kasus dengan nilai jaminan sebesar Rp2.2 Triliun.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri berupaya untuk terus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terutama fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan ini berturut-turut terus mencapai target. Jumlah penerima bantuan ini sebanyak 347.567 jiwa di tahun 2023, meningkat menjadi 383.216 jiwa di tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk melindungi warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Gambar 2.30 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta Jaminan Kesehatan

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Berdasarkan data di atas, Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan, yang menggambarkan proporsi peserta jaminan kesehatan yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan tingkat lanjut (rujukan) seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKRTL) dibandingkan dengan seluruh peserta jaminan kesehatan sudah mencapai angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan adanya ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan (jumlah dan sebaran rumah sakit), kualitas fasilitas kesehatan primer, kepatuhan terhadap sistem rujukan berjenjang, serta infrastruktur dan transportasi yang mempengaruhi akses fisik ke FKRTL.

2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Kualitas kerukunan umat beragama dapat direfleksikan dari capaian indikator Indeks Kota Toleran (IKT). IKT ini pada dasarnya merupakan studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Gambar 2.31 Indeks Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2020-2023

Sumber: Setara Institute, 2024 (diolah)

Kota Bekasi yang pada tahun 2023 berada pada peringkat kedua secara Nasional benar-benar hadir sebagai pelopor dan contoh sukses bahwa tata kelola pemerintahan inklusif dan ekosistem kota yang toleran dapat dikelola pada kota-kota yang memiliki luas wilayah dengan populasi penduduk yang padat. Kota Bekasi yang di tahun 2015 berada di posisi ke-93 dari 94

kota berhasil masuk 10 besar di tahun 2020. Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga toleransi beragama mengingat Kota Bekasi termasuk kota metropolitan yang masyarakatnya heterogen.

Meskipun capaian IKT Kota Bekasi sudah tinggi, namun masih terdapat beberapa kejadian terkait suku, agama dan ras yang bahkan menjadi sorotan luas. Kejadian tersebut seperti bentrokan antarkelompok suku tertentu dan intoleransi dalam beragama. Karena itu, upaya untuk menjaga toleransi di Kota Bekasi masih harus ditingkatkan. Upaya itu dapat dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

B. Pembangunan Kebudayaan

Kota Bekasi merupakan kota urban dan wilayah aglomerasi Jabodetabek, ia menjadi tempat tinggal bagi banyak suku bangsa lain. Hal ini membuat Bekasi memiliki budaya yang multikultural, terutama dalam hal kuliner, musik, dan ekspresi seni lainnya. Meskipun secara administratif berbeda dari Jakarta, Kota Bekasi memiliki akar budaya yang kuat dalam budaya Betawi, terutama Betawi Pinggiran (Betawi Ora).

Gambar 2.32 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Bekasi Tahun 2020-2024

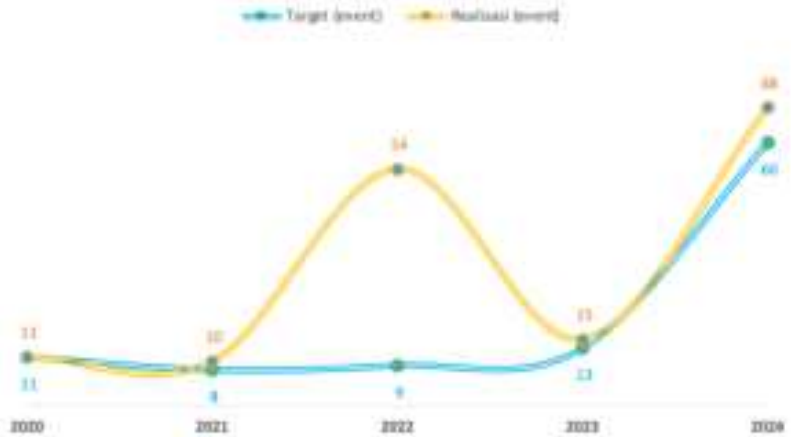

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Upaya pelestarian budaya Kota Bekasi di antaranya dilakukan dengan penyelenggaraan festival budaya, lomba kesenian tradisional, dan pelatihan seni bagi generasi muda. Selain itu,

dilakukan juga pencatatan dan pelestarian warisan budaya takbenda (WBTb) seperti pencak silat tradisi Bekasi.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas budaya suatu wilayah. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya lokal. Keberagaman festival juga mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya, sementara partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut mencerminkan kesadaran dan kebanggaan akan budaya mereka serta sejauh mana budaya tersebut dihargai dan dilestarikan.

Jika dilihat trennya, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bekasi selalu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan antusiasme dan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat dalam menggelar festival seni dan budaya untuk mempromosikan dan merayakan kekayaan budaya lokal. Namun demikian, tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam pengembangan seni dan budaya yaitu arus informasi dan pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian tersebut. Karena itu, penggalian potensi seni dan budaya serta pengembangan ekosistem yang memadai mutlak diperlukan agar seni dan budaya Kota Bekasi tetap lestari di tengah arus modernisasi.

2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. Perlindungan Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Terdapat 5 kluster dalam KLA yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan dan kluster perlindungan khusus.

KLA Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu masuk dalam kategori "nindya". Nilai KLA berada pada angka 742,34 di tahun 2024. Capaian ini masih bisa ditingkatkan dengan meningkatkan kolaborasi pemangku kepentingan dan menerapkan pendekatan yang berbeda sehingga dapat meraih predikat "utama bahkan KLA".

Jika dicermati lebih mendalam, pemenuhan kluster KLA Kota Bekasi cenderung menurun dan penurunan terdalam pada periode tahun 2020-2023 yaitu sebesar 25,31 persen, sebelum kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2024. Pada 5 tahun terakhir, pemenuhan kluster KLA Kota Bekasi menurun sebesar 19,56 persen. Hal ini mengindikasi adanya persoalan serius dan juga perlunya penanganan yang lebih tepat. Salah satu persoalan tersebut yaitu berkaitan dengan meningkatnya kasus kekerasan pada anak yang terjadi.

Gambar 2.33 Pemenuhan Kluster Kota Layak Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Penurunan Pemenuhan Kluster KLA berkorelasi dengan Indeks Perlindungan Anak Kota Bekasi yang juga menurun dari 75,54 di tahun 2021 (peringkat 1 Nasional) menjadi 73,98 di tahun 2022 (peringkat 2 Nasional). Untuk itu, diperlukan pelaksanaan strategi yang dibarengi pelaksanaan program/kegiatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah (level kecamatan). Kebutuhan akan pemenuhan dan perlindungan anak antara satu wilayah dengan wilayah lain tentunya akan berbeda. Karena itu, intervensi yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah diharapkan lebih tepat sasaran dalam memenuhi dan melindungi anak.

B. Pembangunan Kualitas Keluarga

Pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dapat tercermin dari iBangga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan.

Selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, pembangunan keluarga di Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 12,78 poin. Dengan iBangga sebesar 64,96 di tahun 2024 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Kota Bekasi masuk dalam klasifikasi "berkembang". Ke depannya, Kota Bekasi diharapkan dapat terus melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga yang lebih baik sehingga dapat mencapai klasifikasi "tangguh".

Gambar 2.34 iBangga Kota Bekasi Tahun 2021-2024

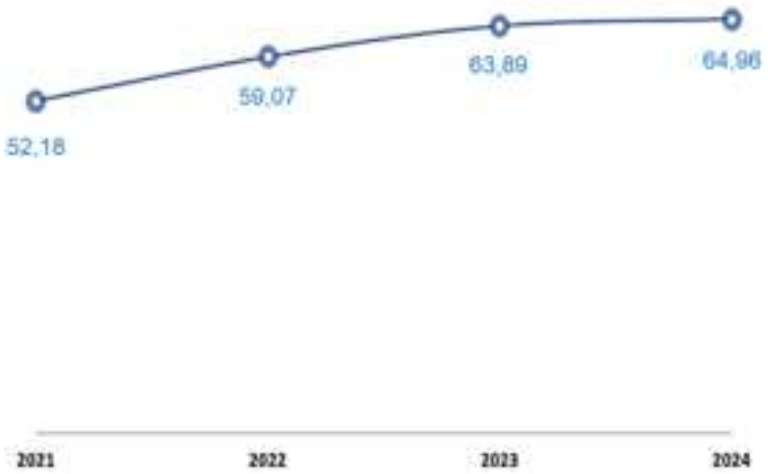

Sumber: siperindu.online, 2025 (diolah)

Untuk meningkatkan capaian iBangga Kota Bekasi, perlu dilakukan perkuatan dan perluasan intervensi program/kegiatan, misalnya melalui Kampung Keluarga Berkualitas. Konvergensi program/kegiatan tersebut dapat berupa peningkatan cakupan pemenuhan administrasi kependudukan, advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pendampingan dan pelayanan pada keluarga yang rentan risiko kejadian stunting, meningkatkan cakupan layanan dan akses pendidikan, meningkatkan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan, dan lainnya.

C. Kualitas Gender

Gender adalah perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab tata perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Untuk melihat kemajuan pembangunan gender di suatu wilayah salah satunya dapat

menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan gambar di bawah ini, diketahui bahwa IPG Kota Bekasi cenderung meningkat dan mencapai 94,28 pada tahun 2024. IPG semakin kecil jaraknya dengan angka 100, akan menunjukkan semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, Kota Bekasi telah berhasil meningkatkan kesetaraan pembangunan pada tahun 2024.

Gambar 2.35 IPG Kota Bekasi Tahun 2020-2024

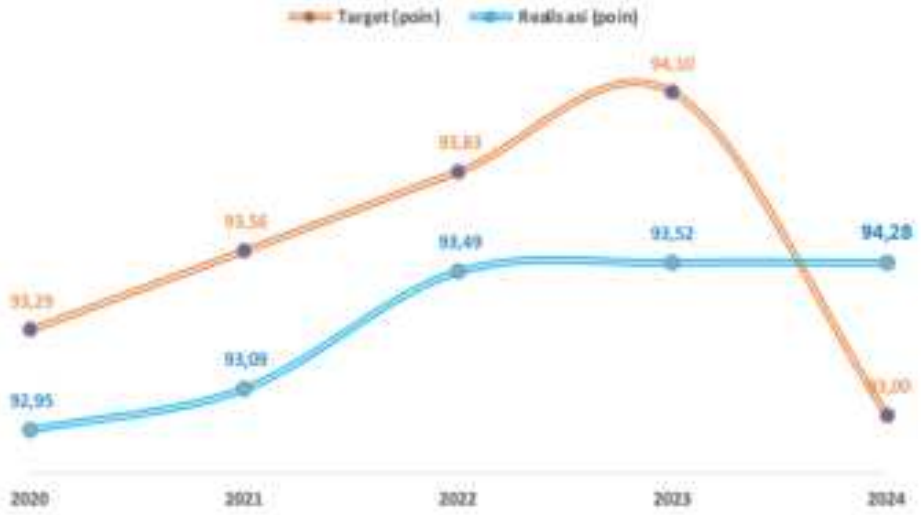

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Pencapaian IPG ini tidak serta berkorelasi positif dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merupakan gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dalam suatu masyarakat. Di Kota Bekasi, IKG-nya ternyata masih berada di angka 0,273 di tahun 2024. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas gender di Kota Bekasi perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Dukungan berbagai pihak tersebut untuk memastikan bahwa pengaturan komitmen, penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, penguatan data terpilah, penguatan instrumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dan penguatan partisipasi masyarakat dapat berjalan maksimal.

D. Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukan strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam semua dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Sebagai kota yang mayoritas penduduknya berada pada usia produktif dan karakternya urban maka kreativitas pemuda Kota Bekasi dalam pembangunan tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Gambar 2.36 Peran Komunitas Kreatif Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2024 (diolah)

Peran komunitas kreatif di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan sebagaimana tercermin dalam target dan realisasi yang dicapai. Target tersebut menunjukkan harapan pemerintah terhadap tingkat partisipasi dan kontribusi komunitas kreatif dalam proses pembangunan kota. Sementara realisasinya di tahun 2022 dan 2023 bahkan melebihi target.

Pengembangan olahraga di Kota Bekasi menunjukkan kemajuan dengan banyaknya jumlah atlet/pelatih yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional yaitu mencapai 722 atlet/pelatih di tahun 2024. Kota Bekasi untuk ke depannya juga akan menyelenggarakan Pekan Olah Raga Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.36-Kesra/2025 tentang Penunjukan Tuan Rumah Bersama Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat lebih mendorong dan meningkatkan prestasi atlet/pelatih Kota Bekasi

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah dapat dilihat dari produktivitasnya yang diukur dengan persentase peningkatannya. Hal ini penting untuk diketahui karena tenaga kerja yang berkualitas akan menjadi salah satu pengungkit daya saing daerah.

Gambar 2.37 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Kota Bekasi Tahun 2020-2024

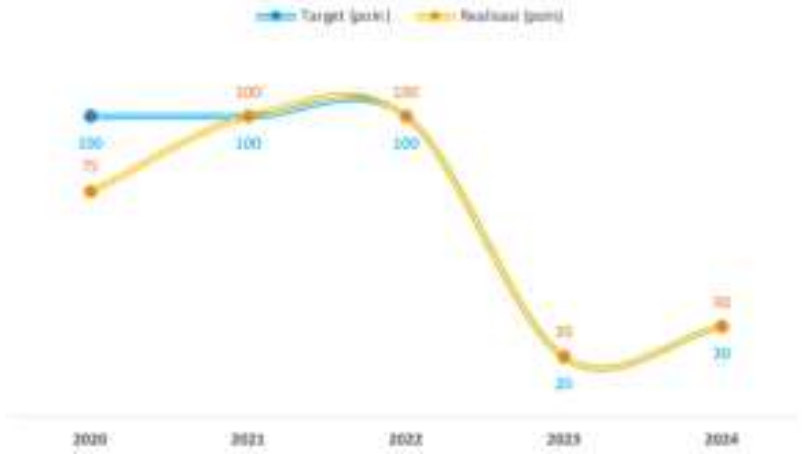

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kota Bekasi hampir selalu mencapai target yang ditetapkan. Hanya di tahun 2020, realisasinya hanya 75 persen. Hal ini dimungkinkan karena pandemi COVID-19 berdampak pada pengurangan aktivitas tenaga kerja bahkan pengurangan tenaga kerja.

B. Kualitas Beban Tanggungan Masyarakat

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan ini bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila angkanya tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi.

Jika dicermati Rasio Ketergantungan Kota Bekasi realisasinya relatif lebih rendah dari yang ditargetkan. Hal ini makin baik, karena beban tanggungan penduduk usia produktif menjadi tidak tinggi. Namun jika dilihat trennya, Rasio Ketergantungan Kota Bekasi cenderung meningkat. Artinya beban tanggungan penduduk usia produktif juga makin meningkat. Untuk menjaga agar Rasio Ketergantungan Kota Bekasi tetap rendah diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, mendukung program antinatalitas, dan memperluas lapangan pekerjaan.

Gambar 2.38 Rasio Ketergantungan Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan dan BPS Kota Bekasi, 2024 (diolah)

C. Pengeluaran Masyarakat

Pengeluaran per kapita merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat konsumsi dan kemampuan belanja masyarakat di suatu wilayah. Pengeluaran per kapita ini juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak makin membaiknya ekonomi. Membaiknya kondisi ekonomi tersebut tentunya dipengaruhi berbagai faktor yang menyebabkan wilayah tersebut makin kompetitif dan produktif.

Pengeluaran per kapita Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan sangat dipengaruhi berbagai faktor. Meskipun pengeluaran per kapita Kota Bekasi berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Kota Tangerang Selatan, upaya untuk meningkatkan kinerja itu tetap diperlukan. Penciptaan lapangan kerja baru dengan meningkatkan investasi akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Gambar 2.39 Pengeluaran Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024

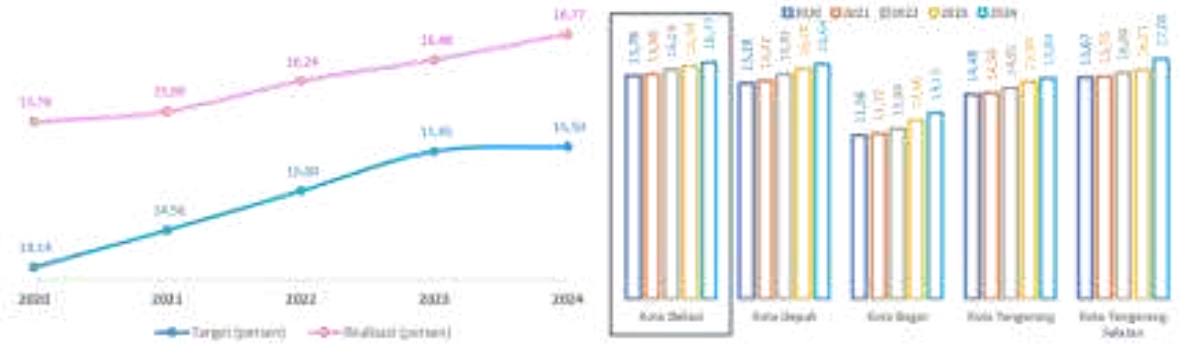

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. Sektor Unggulan dan Potensial

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan PDRB maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangannya semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan PDRB maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Gambar 2.40 PDRB Kota Bekasi Tahun 2020-2024

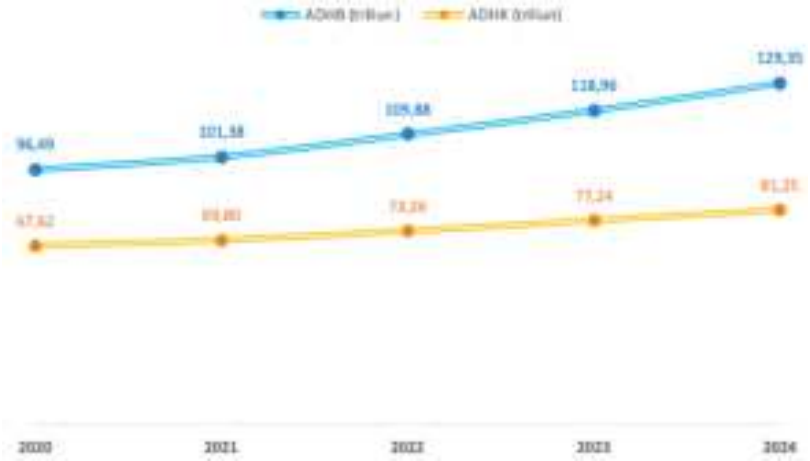

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Tren pertumbuhan PDRB Kota Bekasi menunjukkan bahwa ekonomi kota tersebut terus berkembang seiring waktu. Terdapat fluktuasi tahunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi Nasional dan global, kebijakan pemerintah, serta dinamika industri

lokal. Untuk itu, perkuatan sektor-sektor ekonomi potensial dapat menjadi strategi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bekasi.

Tabel 2.1 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,59	0,57	0,57	0,57	0,55
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	33,74	34,00	33,89	33,67	33,05
Pengadaan Listrik dan Gas	1,42	1,40	1,43	1,36	1,32
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	11,18	11,03	10,61	10,84	10,84
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi	22,08	21,87	21,47	20,87	20,70
Transportasi dan Pergudangan	10,09	10,05	11,11	12,12	13,00
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,05	3,99	4,16	4,21	4,21
Informasi & Komunikasi	2,79	2,85	2,69	2,66	2,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,13	3,22	3,19	2,97	2,98
Real Estate	1,65	1,77	1,70	1,62	1,58
Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,45	0,46	0,47
Administrasi Pemerintahan	1,77	1,77	1,63	1,51	1,47
Jasa Pendidikan	2,80	2,78	2,70	2,68	2,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,26	1,18	1,13	1,12
Jasa Lainnya	3,00	2,91	3,12	3,21	3,31
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025

Sektor yang berkontribusi besar di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2024, kontribusi masing-masing sektor itu yaitu industri pengolahan (33,05 persen), perdagangan besar dan eceran (20,70 persen), dan transportasi dan pergudangan (13,00 persen). Terdapat satu sektor yang kontribusinya tidak jauh berbeda dan berada di peringkat ke-4, yaitu konstruksi (10,84 persen). Sementara sektor lainnya kontribusinya di bawah 5 persen.

Gambar 2.41 Sektor Unggulan Kota Bekasi Berdasarkan PDRB Tahun 2024

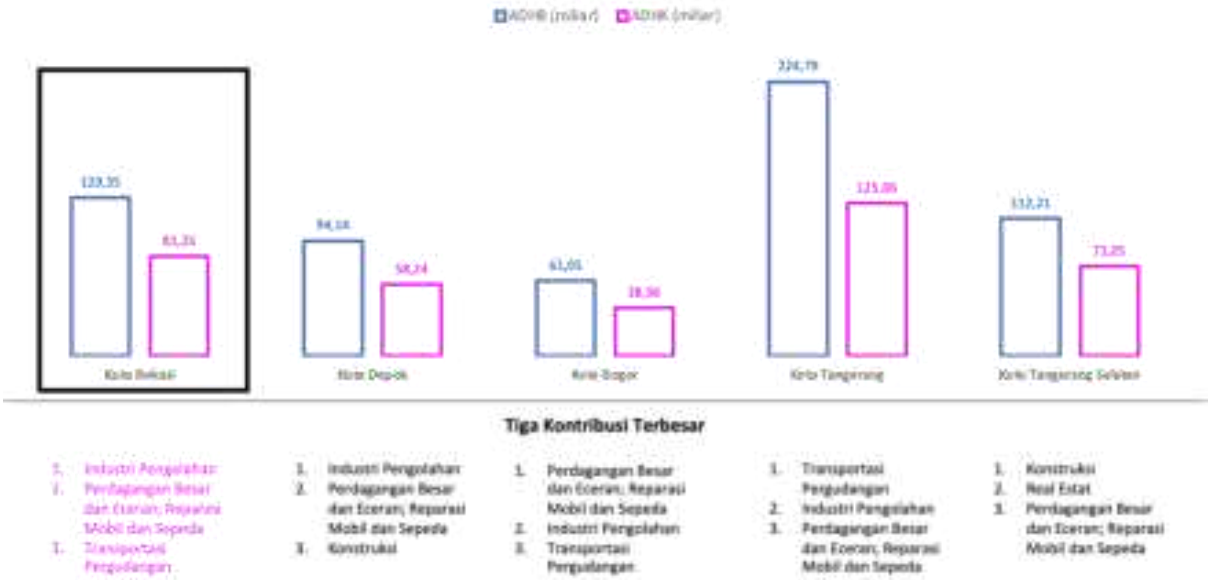

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, terdapat satu kesamaan sektor yang berkontribusi di masing-masing kota yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara 3 sektor dominan di Kota Bekasi sangat identik dengan Kota Bogor dan Kota Tangerang.

Selain sektor unggulan di Kota Bekasi seperti yang dijelaskan di atas, terdapat sektor yang memiliki laju pertumbuhan tinggi di tahun 2024 dan potensial untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian ke depannya. Sektor itu yaitu, jasa lainnya (8,17 persen), pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (6,97 persen), informasi dan komunikasi (6,81 persen), penyediaan akomodasi makan dan minum (6,63 persen), dan jasa pendidikan (6,26 persen).

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	1,44	1,63	5,52	3,70
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	-1,19	3,13	5,00	4,58	2,96
Pengadaan Listrik dan Gas	-12,88	3,37	6,83	1,10	4,79
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	10,48	9,43	5,00	5,23	6,97
Konstruksi	-8,72	2,65	1,05	7,24	8,02

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi	-5,72	2,81	2,97	3,01	2,95
Transportasi dan Pergudangan	-1,98	1,76	15,55	11,33	11,35
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-5,06	0,86	7,94	7,35	6,63
Informasi & Komunikasi	33,57	8,08	3,27	7,19	6,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	3,67	-0,27	0,44	4,36
Real Estate	0,55	12,90	0,80	3,12	5,71
Jasa Perusahaan	-14,21	2,20	10,13	8,64	6,05
Administrasi Pemerintahan	-6,18	2,93	-0,01	0,01	5,06
Jasa Pendidikan	2,31	2,53	4,01	7,36	6,26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,87	11,54	1,79	3,99	5,77
Jasa Lainnya	-2,94	1,74	11,26	9,18	8,17
KOTA BEKASI	**-2,58**	**3,22**	**4,96**	**5,43**	**5,19**

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2025

Jika dicermati kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung stabil diangka 4,5 persen. Pada tahun 2024 terlihat bahwa kontribusi Kota Bekasi berada di peringkat ke-6, jauh di bawah Kabupaten Bekasi (14,89 persen), Kota Bandung (13,00 persen), Kabupaten Bogor (10,92 persen), dan Kabupaten Karawang (10,85 persen). Namun masih relatif tidak jauh dari Kabupaten Bandung (5,92 persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Bekasi masih penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.42 Kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

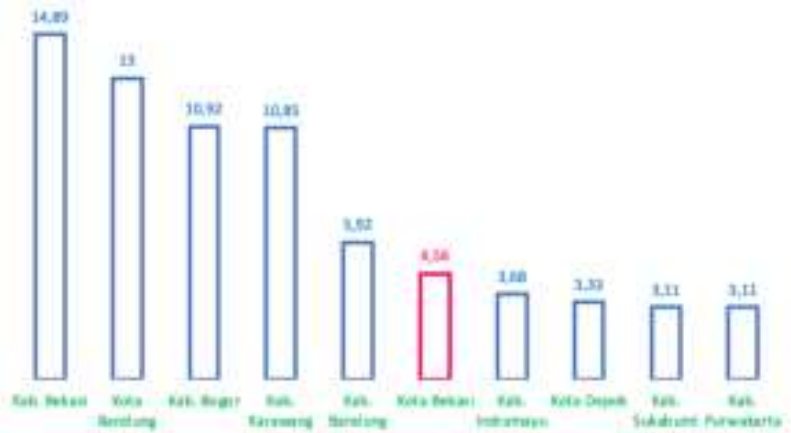

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

B. Produktivitas Ekonomi Penduduk

Salah satu indikator produktivitas ekonomi penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per Kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Gambar 2.43 PDRB Per Kapita Kota Bekasi Tahun 2020-2024

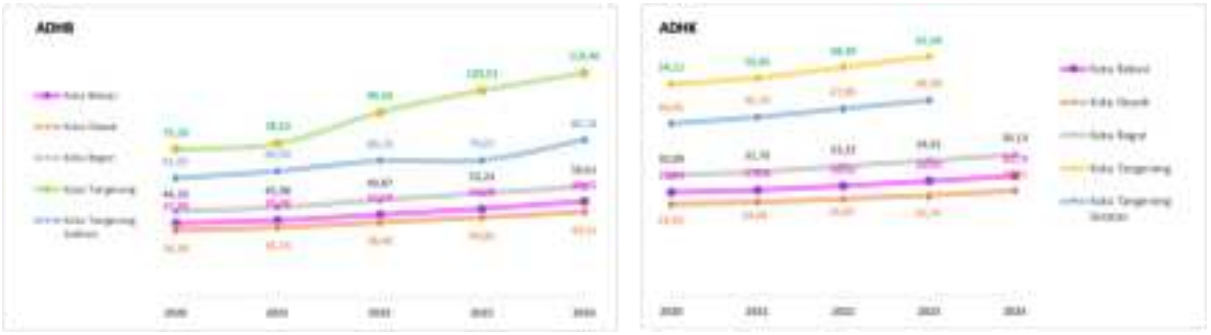

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Banten, 2025 (diolah)

PDRB per Kapita Kota Bekasi cenderung menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dalam konteks kota di sekitar Jakarta, PDRB per Kapita Kota Bekasi hanya di atas Kota Depok meskipun PDRB-nya tertinggi ke-2. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Kota Bekasi merupakan yang terbanyak mencapai 2,6 juta jiwa di tahun 2024. Tantangan dalam upaya meningkatkan PDRB per Kapita Kota Bekasi ini yaitu mengoptimalkan sektor-sektor potensial dan menjaga laju pertumbuhan penduduk.

C. Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, baik pekerja maupun pencari kerja.

TPAK Kota Bekasi tahun 2024 menunjukkan angka 65,58 persen dan berada di peringkat ke-3 di antara kota-kota di sekitar Jakarta. TPAK Kota Bekasi jika disandingkan dengan TPT menunjukkan hal yang menarik. Artinya bahwa tidak serta bahwa jika ada kenaikan TPAK akan menurunkan TPT.

Gambar 2.44 TPAK Kota Bekasi Tahun 2020-2024

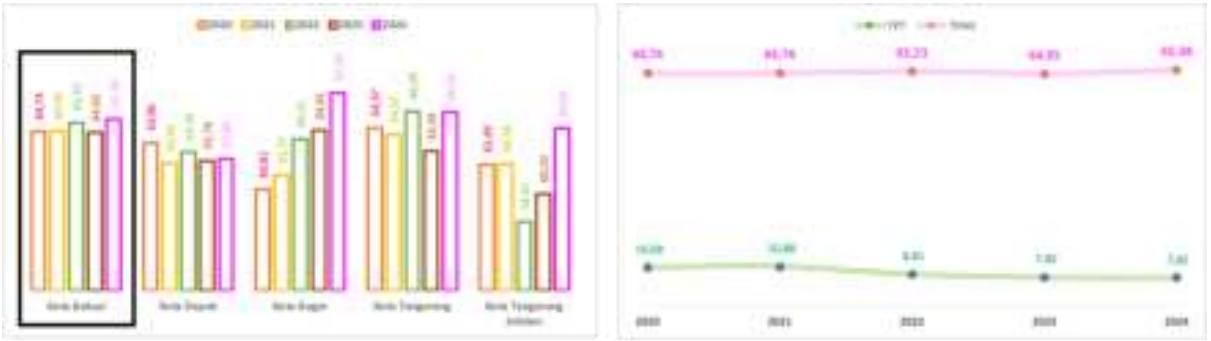

Sumber: BPS Kota Bekasi; Provinsi Jawa Barat; dan Provinsi Banten, 2025 (diolah)

Kondisi TPAK Kota Bekasi di tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun apabila dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta lainnya, Kota Bekasi berada di bawah peringkat Kota Tangerang. Hal ini dapat menandakan bahwa kesempatan kerja yang tersedia di Kota Bekasi tidak sebanyak yang tersedia di Kota Tangerang, atau terdapat banyak pekerja informal yang tidak terdokumentasi dalam survei tenaga kerja. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Bekasi perlu meningkatkan peluang kerja yang luas untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal di Kota Bekasi, serta menyediakan beragam program pengembangan tenaga kerja untuk dapat menciptakan tenaga kerja berkualitas serta relevan dengan kebutuhan industri yang ada.

Untuk ke depannya, kualitas tenaga kerja di Kota Bekasi perlu untuk terus ditingkatkan. Hal ini juga didasarkan pada perubahan peran Jakarta yang diarahkan sebagai kota global tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Tenaga-tenaga kerja yang berkualitas ini dapat dipenuhi salah satunya dari Kota Bekasi.

D. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kota Bekasi tidak memiliki sumber daya alam. Modal utama yang dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian kota yaitu SDM. Selain sebagai modal, SDM yang besar sekaligus juga sebagai pasar yang potensial. Kondisi demikian tentunya perlu ekosistem kreatif

agar SDM yang besar dapat berperan dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bekasi.

Perkembangan ekonomi kreatif Kota Bekasi dapat dilihat dari perkembangan Indeks Kota Kreatif yang dicapainya. Tahun 2023, Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan dan menduduki peringkat ke-4 diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Jika tahun 2021 Kota Bekasi berada di peringkat ke-15, kemudian meningkat menjadi peringkat ke-6 di tahun 2022.

Sejumlah faktor pembentuk Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan. Pertama, peningkatan dalam sektor Budaya, Rekreasi & Pariwisata, menunjukkan upaya yang lebih besar dalam mempromosikan warisan budaya lokal dan destinasi pariwisata di Kota Bekasi. Selain itu, terlihat juga peningkatan dalam sektor Luaran & Pekerjaan Kreatif, Modal & Partisipasi Budaya, Tempat, Sumber Daya & Fasilitas, Pemerintah & Regulasi, Kewirausahaan, Digitalisasi & TIK, serta Aktivitas Bisnis & Ekonomi, mencerminkan komitmen yang kuat dalam memajukan sektor kreatif dan inovatif di Kota Bekasi.

Gambar 2.45 Indeks Kota Kreatif Kota Bekasi Tahun 2022-2023

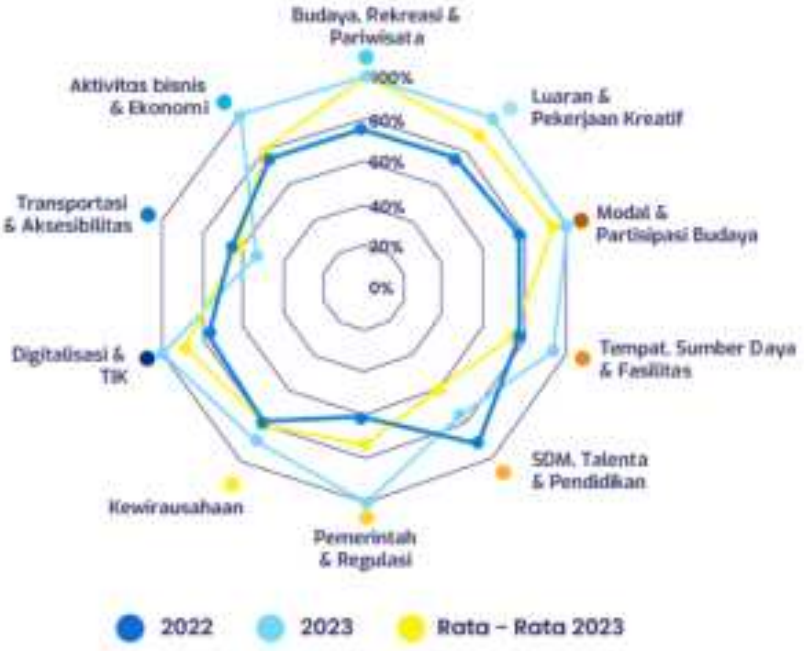

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2024

Meski demikian, terdapat dua faktor yang mengalami penurunan. Pertama yaitu Transportasi & Aksesibilitas, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memperbaiki infrastruktur transportasi dan meningkatkan aksesibilitas di Kota Bekasi. Selain itu, penurunan

juga terjadi pada sektor SDM, Talenta & Pendidikan, menandakan perlunya peningkatan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan sistem pendidikan untuk mendukung pertumbuhan sektor kreatif di masa mendatang.

E. Pengembangan Ekonomi Syariah

Indonesia didorong untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan, serta menghindari praktik yang merugikan atau eksploitatif.

Untuk mendukung tujuan besar tersebut, Pemerintah Kota Bekasi sendiri telah berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang perbankan syariah. Sementara dari sisi masyarakat, telah terdapat wadah organisasi (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang juga berupaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Kota Bekasi.

Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi pengembangan ekonomi syariah di Kota Bekasi masih cukup besar. Hal ini juga diindikasikan dengan indikator Indeks Zakat yang pada tahun 2024 mencapai angka 0,35. Artinya pengelolaan zakat di Kota Bekasi masih dalam kategori berkembang.

F. Pengembangan Inovasi Daerah

Inovasi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inovasi tersebut dapat berbentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2024, Kota Bekasi berada di peringkat ke-5 Nasional di bawah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Palembang, dan Kota Padang Panjang. Pencapaian peringkat ini menurun 2 posisi dibandingkan tahun 2023. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian agar dapat lebih

ditingkatkan terkait ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menguatkan inovasi tematik.

Gambar 2.46 Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

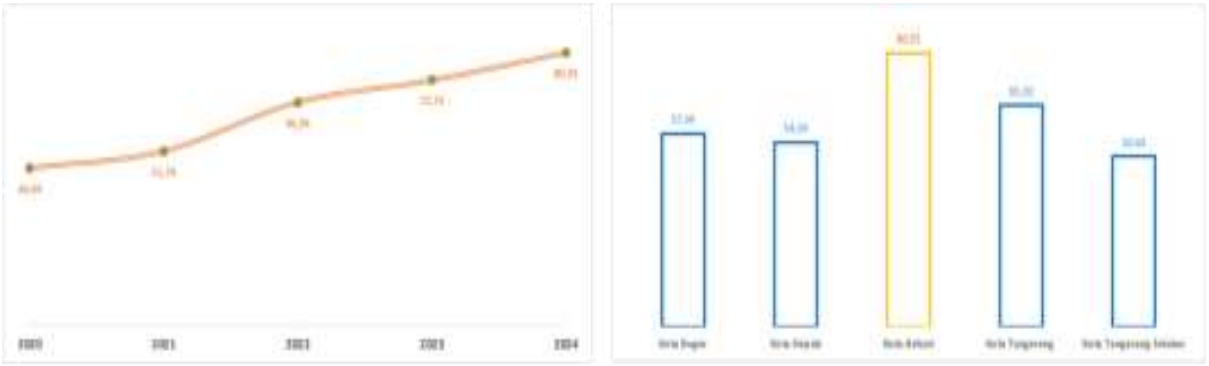

Sumber: Kemendagri, 2025 (diolah)

G. Kualitas Perizinan

Untuk meningkatkan daya saing daerah dalam memberikan kemudahan berusaha diperlukan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Hal ini penting agar penanaman modal yang difasilitasi dalam bentuk kemudahan pelayanan perizinan tersebut dapat meningkatkan perekonomian.

Gambar 2.47 IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

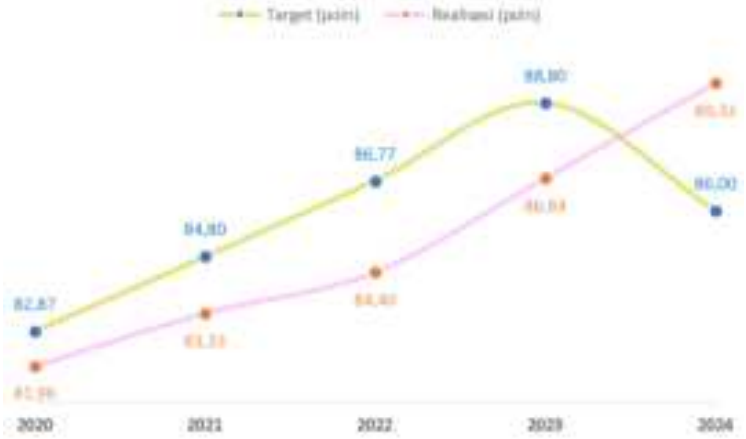

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kota Bekasi cenderung semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasinya yang melebihi target pada tahun 2024. Namun pada tahun 2020-2023 realisasi masih di bawah target. Kondisi demikian perlu menjadi

perhatian agar birokrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan ditingkatkan sehingga lebih mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel. Selain itu, pengembangan inovasi yang berkelanjutan mutlak diperlukan agar masyarakat dapat menerima pelayanan prima.

2.1.3.3 TRANSFORMASI DIGITAL

Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencerminkan ukuran tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif.

Gambar 2.48 Adopsi TIK Kota Bekasi Tahun 2022-2024

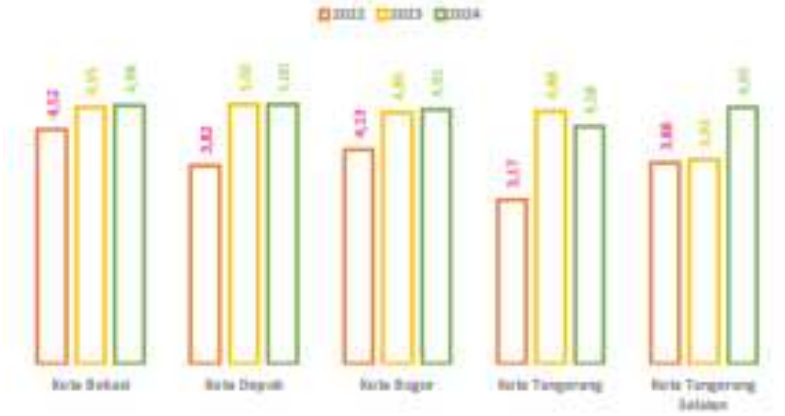

Sumber: BRIN, 2025 (diolah)

Adopsi TIK ini lebih menekankan pada penggunaan telepon seluler dan internet. Skor adopsi TIK Kota Bekasi dan kota lain di sekitar Jakarta menunjukkan kesetaraan dan mendekati sempurna (nilai maksimal 5). Meskipun demikian, terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian yaitu berkaitan dengan literasi digital masyarakat. Hal ini lebih penting mengingat literasi digital lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital.

2.1.3.4 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

A. Peningkatan Investasi

Investasi merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi suatu wilayah. Realisasi investasi di Kota

Bekasi dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi atau regulasi yang kompleks. Tahun 2020, realisasi investasi di Kota Bekasi mengalami penurunan signifikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda. Setelah meningkat di tahun 2021 dan 2022, realisasi investasi menurun kembali di tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 realisasi investasi naik kembali dan sudah di atas target investasi.

Kondisi yang fluktuatif perlu menjadi perhatian mengingat Kota Bekasi memiliki beberapa keunggulan dalam hal investasi, mulai dari potensi pasar hingga aksesibilitas yang memadai. Namun, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi investasi, yakni kawasan yang relatif sudah padat sehingga ketersediaan lahan pun semakin menipis untuk penanaman investasi baru.

Gambar 2.49 Investasi dan PMTB Kota Bekasi Tahun 2020-2024

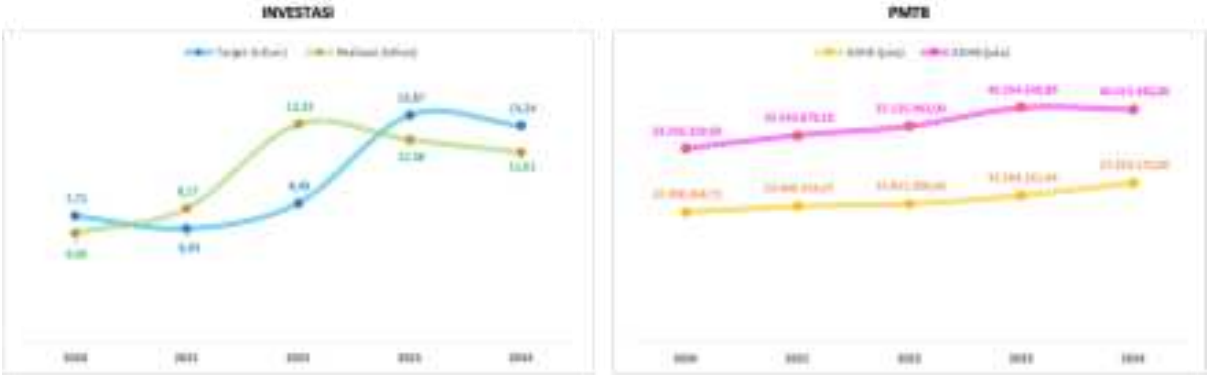

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan dan BPS Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan ukuran investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi di suatu wilayah dalam satu tahun. PMTB di Kota Bekasi cenderung meningkat setelah pandemi Covid-19 melanda. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menumbuhkan perekonomian melalui pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Tantangan ke depan yaitu, kondisi global yang masih bergejolak karena peperangan dapat menyebabkan aliran modal masuk terhambat. Selain itu, kebijakan yang

dapat menjamin keberlangsungan investasi sangat diperlukan agar investor yakin dengan investasinya.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Kota Bekasi memainkan peran penting dalam integrasi ekonomi domestik dan global, khususnya dalam ekspor barang dan jasa. Dengan ketersediaan infrastruktur logistik dan manufaktur yang mendukung serta sektor jasa yang kompetitif, Kota Bekasi terus berupaya memperkuat daya saingnya dalam rantai pasok global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2.50 Nilai Ekspor Kota Bekasi Tahun 2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Pada tahun 2023, terjadi penurunan nilai ekspor yang terus menjauhi target. Pemerintah Kota Bekasi perlu untuk tetap berupaya meningkatkan nilai ekspor agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan nilai ekspor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, di antaranya adalah adanya penurunan permintaan global, fluktuasi harga komoditas, nilai tukar mata uang yang kurang kompetitif, penurunan kapasitas produksi, dan lainnya.

2.1.3.5 PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses terhadap hunian layak menjadi salah satu indikator penting di suatu daerah. Rumah tangga dengan akses hunian layak, memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan serta kenyamanan, seperti ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi yang baik, struktur atau kualitas bangunan yang layak, serta lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat. Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu fokus program yang menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kota Bekasi.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Kota Bekasi rata-rata capaiannya melampaui Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir. Hanya di tahun 2021 yang capaiannya dibawah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Pemerintah Kota Bekasi tetap harus mewaspadai potensi pertumbuhan permukiman kumuh yang diakibatkan dari tingginya urbanisasi yang cepat. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk terus memastikan agar ketersediaan akses infrastruktur dasar seperti sumber air minum bersih serta sanitasi tetap terpenuhi.

Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

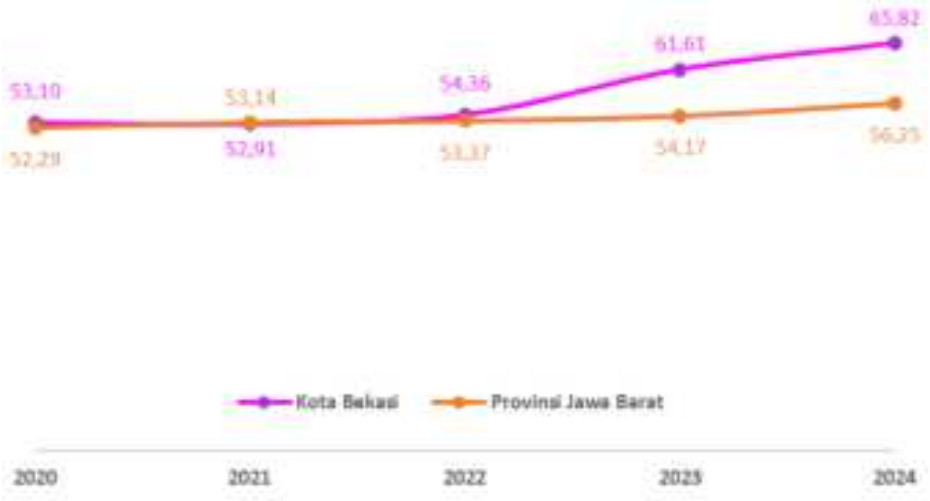

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

B. Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Pemerintah Kota Bekasi secara berkesinambungan berupaya untuk meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar

pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan mudah diakses. Dalam konteks Ke-PU-an, upaya yang dilakukan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang mencakup jaringan jalan, jembatan, trotoar, drainase/saluran pembuangan, polder, dan penerangan jalan umum.

Berdasarkan Indeks Infrastruktur Ke-PU-an Kota Bekasi, nilai indeksnya cenderung meningkat terutama setelah pandemi Covid-19 di tahun 2021. Meskipun pada tahun itu, nilainya hanya sedikit di atas target karena adanya *refocusing* anggaran, namun setelahnya nilainya melonjak drastis.

Pemerintah Kota Bekasi perlu tetap melakukan upaya-upaya yang konsisten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Ke-PU-an. Upaya yang diprioritaskan terutama berkaitan dengan infrastruktur polder mengingat salah satu fungsinya dapat untuk mengendalikan banjir yang merupakan salah satu bencana yang sering melanda Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan pemerintah wilayah perbatasan seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta perlu dilakukan.

Gambar 2.52 Indeks Infrastruktur Ke-PU-an
Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

C. Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan perhubungan untuk mendukung mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup. Sarana dan prasarana perhubungan tersebut mencakup ruas jalan yang memenuhi

kelancaran jalan, lalu lintas, fasilitas penunjang transportasi, layanan angkutan umum massal, dan kelaikan kendaraan bermotor.

Gambar 2.53 Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2021-2024

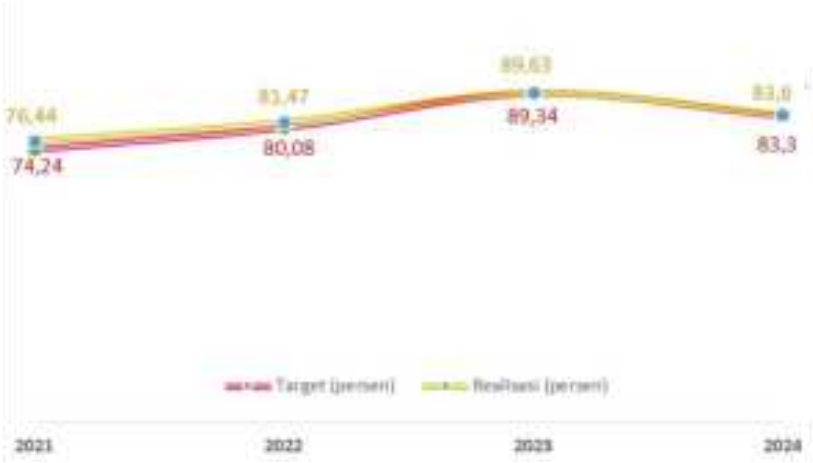

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi yang terukur dari Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kurun 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Meskipun nilai indeksnya selalu meningkat dan melebihi target, namun upaya yang berkesinambungan untuk perbaikan tetap diperlukan. Secara khusus, upaya yang perlu ditingkatkan yaitu pemasangan fasilitas lalu lintas, penempatan petugas pengatur lalu lintas, penataan median, pelebaran simpang, dan perbaikan radius serta manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah (SSA).

D. Kualitas Perumahan dan Permukiman

Kualitas perumahan dan permukiman dipengaruhi banyak faktor yang meliputi kondisi fisik bangunan serta fasilitas dan pelayanan lain yang membuat hunian di suatu kawasan menjadi nyaman dan kondusif. Fasilitas tersebut seperti sistem penyediaan air minum, sistem penyediaan air limbah domestik, dan PSU. Sementara itu, kondisi fisik meliputi kondisi perumahan, permukiman, penataan bangunan gedung, dan kawasan perumahan serta permukiman kumuh.

Gambar 2.54 Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021-2024

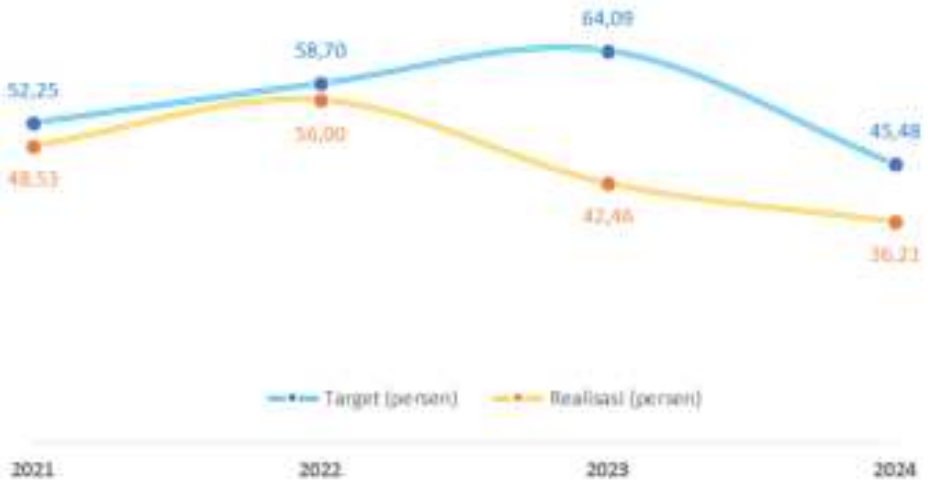

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Jika dicermati gambar di atas, kualitas perumahan dan permukiman di Kota Bekasi yang direfleksikan dengan Indeks Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi dalam kurun 4 tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target dan bahkan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2024. Upaya yang diperlukan Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkat kinerja ini di antaranya meningkatkan pengelolaan air bersih, menyediakan lahan untuk pembangunan PSU, dan penyusunan *database* ketersediaan serta kebutuhan pemenuhan PSU.

E. Kualitas Penataan Ruang

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan penataan ruang yang teratur dan efisien, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan harus selaras dan sesuai dengan tata ruang kota, peningkatan penataan kawasan strategis kota, peningkatan ketersediaan lahan untuk pembangunan, dan peningkatan penataan serta pemeliharaan reklame untuk menjaga estetika kota.

Gambar 2.55 Indeks Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan ruang yang tercermin dari Indeks Penataan Ruang menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 sampai 2023 dan melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada tahun 2023-2024 menunjukkan tren penurunan target dan realisasi. Kondisi tersebut tetap memerlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan terutama berkaitan dengan pemenuhan RTH sebesar 30 persen dari luas wilayah dengan 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen merupakan RTH privat. Tantangan utama pemenuhan itu yaitu kondisi eksisting sudah merupakan area-area terbangun perkotaan dan ketersediaan lahan untuk RTH yang makin sulit untuk diupayakan.

2.1.3.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO

A. Pengendalian Inflasi

Laju inflasi Kota Bekasi dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang stabilitas ekonomi dan kinerja kebijakan moneter. Target pengendalian laju inflasi ditetapkan setiap tahun untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi tertinggi di Kota Bekasi terjadi pada tahun 2022, di mana laju inflasi Kota Bekasi melonjak menjadi 5,37 persen melebihi rata-rata kota di sekitar Jakarta. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kenaikan harga energi atau tekanan inflasi dari sektor-sektor tertentu dalam ekonomi.

Pengendalian inflasi di Kota Bekasi menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun terjadi fluktuasi, upaya untuk menjaga stabilitas harga terus dilakukan dengan hasil yang bervariasi setiap tahunnya tergantung pada kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi inflasi. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi sangat

diperlukan, seperti dengan meningkatkan *monitoring* dan evaluasi harga-harga barang pokok dan penting secara rutin, meningkatkan ketersediaan pangan, melancarkan distribusi barang, dan lainnya.

Gambar 2.56 Inflasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024

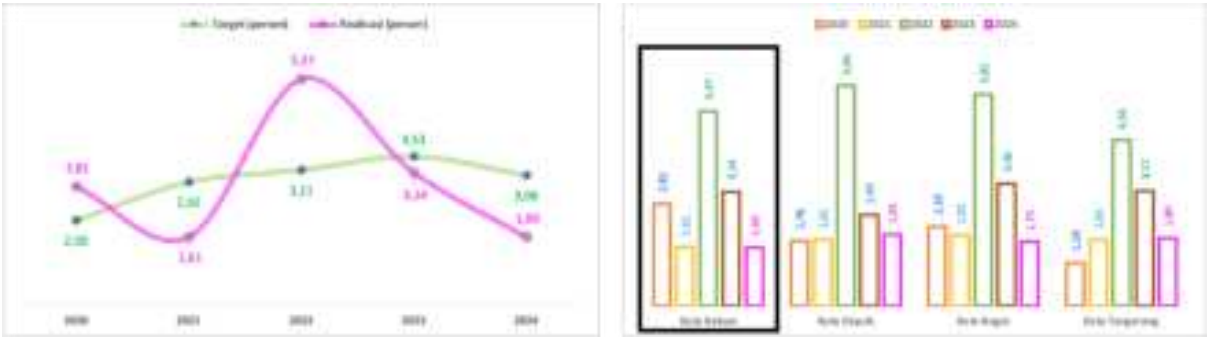

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

B. Kesehatan Fiskal Daerah

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. DOF diformulasikan sebagai Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), yang menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Hasil analisis DOF dalam 6 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi masuk kategori "Menuju Mandiri" dengan pola hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bersifat "Konstruktif".

Untuk Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,85 persen, merupakan tahun dengan rasio tertinggi pada 3 (tiga) tahun terakhir dan rasio terendah yaitu pada tahun 2023 yaitu sebesar 51,77 persen. Rata-rata Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan Sangat Tinggi karena mencapai 53,97 persen (>50%). Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat dikatakan harus meningkatkan realisasi penerimaan PAD agar kemandirian keuangan dapat bertambah dengan tidak tergantung penerimaan daerah dari pemerintah pusat.

Sementara, Derajat Kemandirian (DK) atau Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah

pusat dan pinjaman. derajat kemandirian daerah kota Bekasi bergerak relatif konstan berfluktuatif tipis dalam 6 (enam) tahun terakhir dari 40,02 persen pada tahun 2018 kemudian naik menjadi 43,86 persen di tahun 2019 kemudian turun menjadi 42,80 persen di tahun 2020, dan naik lagi menjadi 44,47 persen di tahun 2021 kemudian naik lagi menjadi 45,47 persen di tahun 2022 dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 42,58 persen. Kriteria dari derajat kemandirian kota Bekasi ini masuk kategori "Rendah" dengan pola hubungan "Konstruktif" dalam periode ini, sedangkan derajat kemandirian provinsi Jawa Barat memiliki kriteria "Sedang" dengan pola hubungan "Partisipatif".

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) pada dasarnya merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Pada perkembangannya, RB diarahkan juga pada penanganan di hilir (RB Tematik) yang menjadi permasalahan di masyarakat.

Capaian RB di Kota Bekasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2022, capaiannya sebesar 66,32 dan masuk kategori "Baik". Capaian tersebut kemudian meningkat signifikan di tahun 2023 dan 2024.

Gambar 2.57 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2020-2024

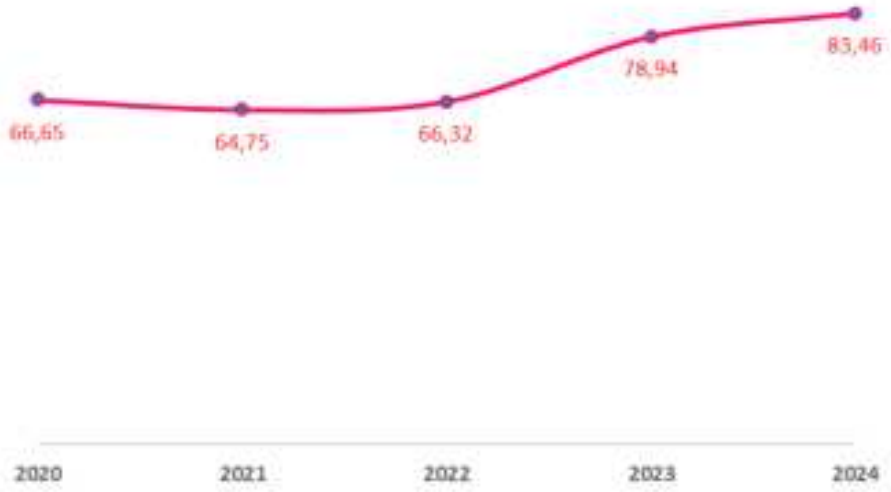

Sumber: Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kota Bekasi pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Roadmap* RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2024, Indeks SPBE Kota Bekasi pada tahun ini memiliki indeks yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun pencapaiannya. Jika dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta, Indeks SPBE Kota Bekasi hanya lebih baik dari Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat tuntutan digitalisasi pelayanan publik semakin meningkat seiring gaya hidup perkotaan yang menjadi ciri khas kota metropolitan. Selain itu, perlunya sinergi pengembangan SPBE dengan *smart city* yang menjadi salah satu tujuan Kota Bekasi.

Gambar 2.58 Indeks SPBE Kota Bekasi Tahun 2020-2024

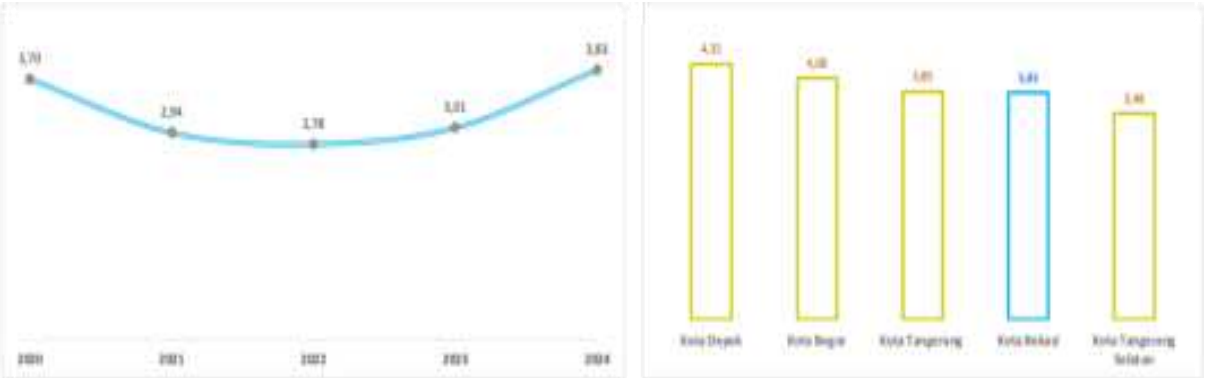

Sumber: Kemenpan, 2025 (diolah)

Terkait dengan kota cerdas, Kota Bekasi berhasil meraih posisi membanggakan dalam evaluasi Kota Cerdas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai skor 3,60 pada (skala 1-4) pada

tahun 2024. Capaian ini juga menempatkan Kota Bekasi di urutan ketiga tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat dan peringkat ketujuh secara Nasional dalam kategori kabupaten/kota reguler.

Gambar 2.59 Perkembangan Nilai *Smart City* Kota Bekasi Tahun 2020-2024

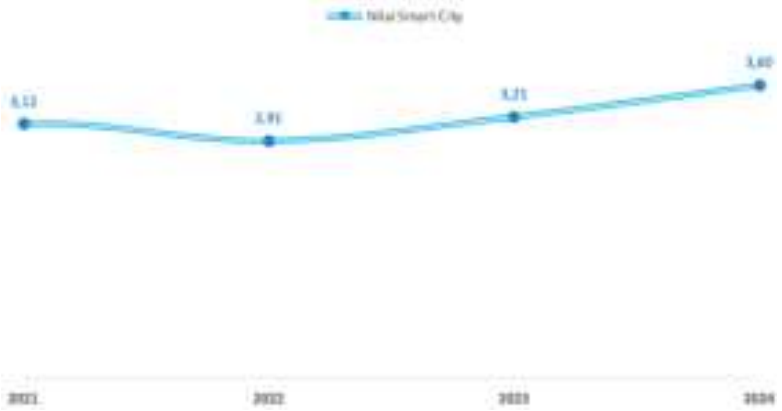

Sumber: Kemenkomdigi, 2025 (diolah)

C. Pencegahan Korupsi

Penilaian pencegahan korupsi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui Indeks Pencegahan Korupsi atau *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk memantau dan mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.

Gambar 2.60 MCP Kota Bekasi Tahun 2020-2024

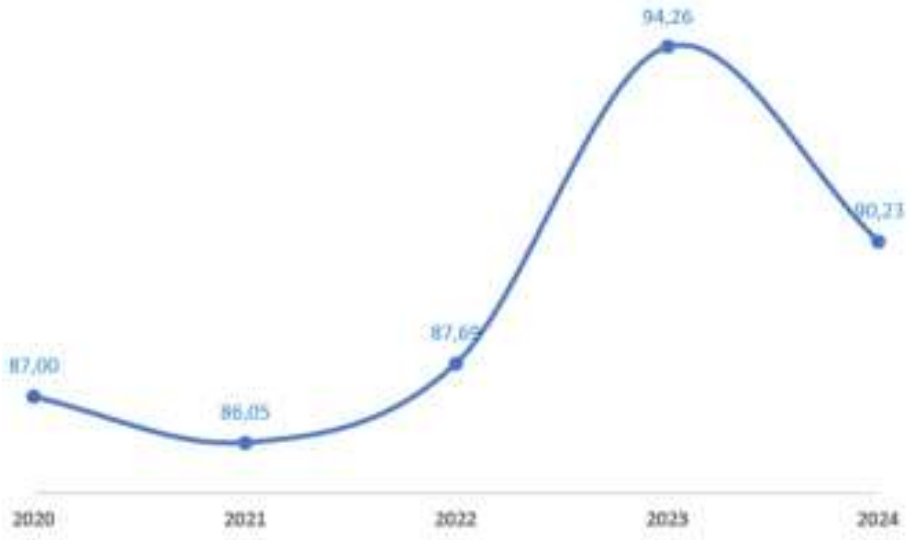

Sumber: jaga.id, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, skor MCP Kota Bekasi cenderung fluktuatif namun selalu dalam kategori baik dan sangat baik. Dengan skor 90,23 di tahun 2024, Kota Bekasi telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan minim risiko korupsi melalui pencegahan korupsi secara sistemik dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, upaya peningkatan tetap diperlukan terutama pada area penerimaan daerah, area perencanaan, area penganggaran dan area pengadaan barang dan jasa.

D. Integritas Kota

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik KPK yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Adapun kategori Indeks Integritas dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: "Rentan" untuk Indeks Integritas kurang dari 72,9; "Waspada" untuk Indeks Integritas rentang 73,0 – 77,9 dan "Terjaga" untuk Indeks Integritas lebih dari 78,0.

Gambar 2.61 Nilai SPI Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021-2024

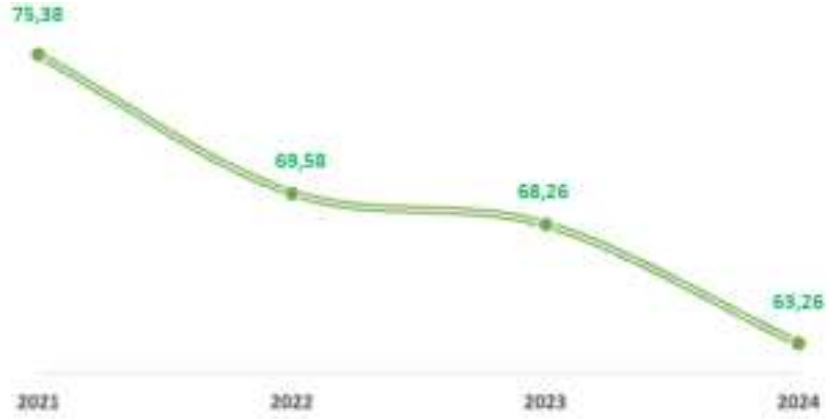

Sumber: Survei Penilaian Integritas, 2025 (diolah)

Indeks Integritas Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun hingga mendapatkan nilai 63,26 poin di tahun 2024. Nilai tersebut turun sebanyak 5.00 poin dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Bekasi saat ini berada dalam kategori "Rentan", karena itu penting untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kota Bekasi, sehingga diperlukan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan skor SPI pada tahun berikutnya. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan tata

kelola pemerintahan seperti meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan layanan publik, dan lain sebagainya.

E. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memberikan harapan masyarakat, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

Gambar 2.62 IKM Terhadap Layanan Publik Kota Bekasi Tahun 2020-2024

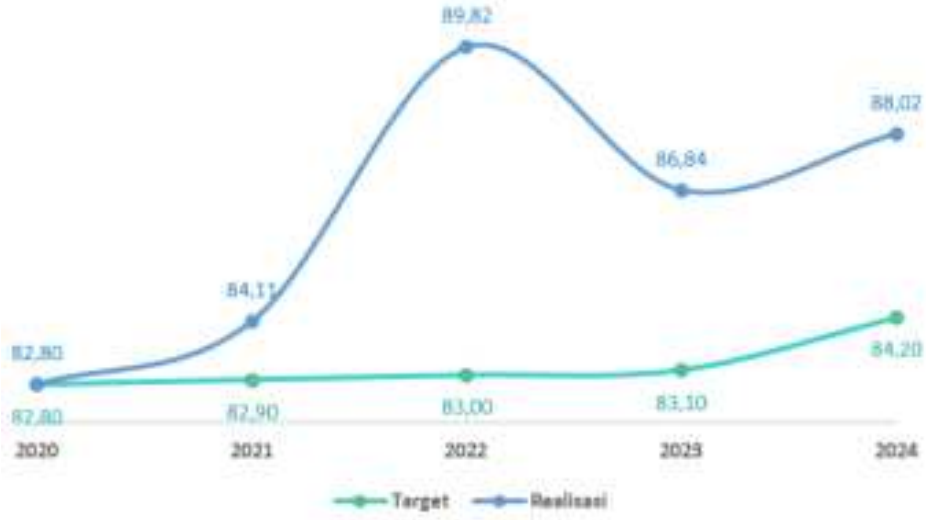

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir realisasinya selalu memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tetap perlu ditingkatkan mengingat Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk yang besar, kebutuhan layanan publik tinggi, kompleksitas permasalahan perkotaan dan tuntutan warga tinggi terhadap kecepatan, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan yang dapat dilakukan antara lain penguatan layanan berbasis digital, pelatihan pelayanan prima dan etika kerja aparatur secara berkala, modernisasi sarana fisik pelayanan, perluasan

jaringan pelayanan, tindak lanjut cepat dan transparan atas pengaduan, dan kolaborasi dalam pemberian pelayanan.

2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Kota Bekasi mendapatkan Penghargaan Kriteria Kota Peduli HAM pada tahun 2022 yang menjadi bentuk apresiasi yang membanggakan dikarenakan Kota Bekasi secara konsisten meraih predikat tersebut setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen Kota Bekasi dalam menjaga dan melindungi hak-hak kebebasan masyarakatnya.

Kualitas keamanan dan ketertiban di suatu wilayah sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Kondisi demikian tentunya dapat menunjang masyarakat untuk beraktivitas tanpa ada kekhawatiran sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Gambar 2.63 Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Kota Bekasi Tahun 2020-2024

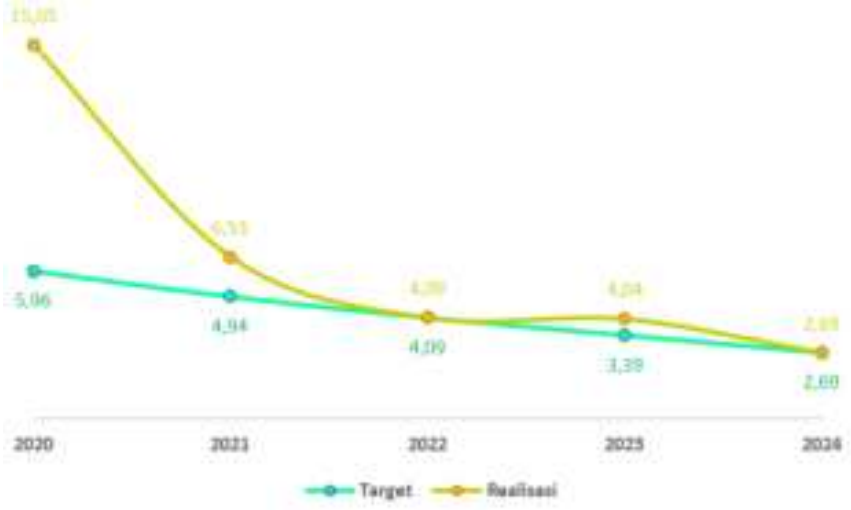

Sumber: Aplikasi Data Pembangunan Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Di Kota Bekasi, persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang menunjukkan persentase dari nilai menurunnya jumlah kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban dari tahun ke tahun konsisten membaik. Hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang selalu melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga didukung dengan adanya jaminan regulasi sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban,

ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Bekasi secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun tantangan peningkatan keamanan dan ketertiban di Kota Bekasi yaitu perlunya peningkatan langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

Penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting. Dalam konteks ini, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat dijadikan alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi.

Gambar 2.64 Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024

Sumber: BRIN, 2025 (diolah)

IDSD Kota Bekasi tahun 2024 mencapai skor 4,18 yang meningkat 0,31 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 3,87. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, IDSD Kota Bekasi ini tertinggi keempat setelah Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bogor. Sedangkan dalam konteks kota di sekitar Jakarta, IDSD Kota Bekasi pada tahun 2024 merupakan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi perlu meningkatkan kembali aspek daya saingnya,

terutama pada kondisi ekonomi yang dinamis, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan investasi.

Persaingan antara kota-kota di sekitar Jakarta dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi dapat dikatakan cukup seimbang, dilihat dari skor pencapaiannya yang tidak terlampau jauh. Masing-masing kota memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam memperkuat daya saingnya.

Tantangan dalam peningkatan daya saing daerah Kota Bekasi yaitu terkait dengan dinamisme bisnis. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah. Hal ini penting karena capaian nilai dinamisme bisnis di Kota Bekasi paling rendah dibandingkan dengan pilar-pilar lain yang membentuk IDSD.

2.1.5 KINERJA PER URUSAN

Kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) *outcome* yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain IKK, indikator lainnya juga digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi serta konteks daerah masing-masing.

2.1.5.1 URUSAN PENDIDIKAN

Kinerja urusan pendidikan di Kota Bekasi, terdapat 2 indikator yang menunjukkan tren penurunan pada periode waktu 2020-2024 dan 2 indikator menunjukkan tren meningkat. Partisipasi warga dalam pendidikan menunjukkan tren beragam. Partisipasi PAUD sempat meningkat, namun kemudian menurun, mencerminkan tantangan dalam akses dan kesadaran orang tua. Partisipasi pendidikan dasar sedikit menurun, sementara pendidikan menengah pertama terus meningkat, menunjukkan keberhasilan program inklusif. Sebaliknya, partisipasi dalam pendidikan kesetaraan menurun, mengindikasikan perlunya peningkatan akses, fasilitas, dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

Tabel 2.3 Kinerja Urusan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	-	-	-	54,56	-	81,50	100	68,62	100	77.15
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	-	-	100	99,52	100	99,97	100	99,80	100	99,68
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	-	-	100	98,06	100	97,79	100	98,11	100	99,43
4	Tingkat partisipasI warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	-	-	100	100	94,19	100	52,95	100	25.67

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.2 URUSAN KESEHATAN

Dari 14 indikator kinerja urusan kesehatan, sebanyak 11 indikator menunjukkan tren realisasi yang meningkat pada periode waktu 2020-2024. Sementara itu, 3 indikator mengalami penurunan antara lain indikator persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2020 capaian sekitar 100 dan menurun menjadi 99 persen pada tahun 2024. Indikator Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 capaian sekitar 92,52 persen menurun pada tahun 2024 menjadi 91,00 persen dan Indikator Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 capaian sekitar 130,3 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi 88,00 persen.

Tabel 2.4 Kinerja Urusan Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Angka	1	1,92	1	1,93	1	2,25	1	2,22	1	2,22
2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	Persen	100	91,3	100	83,36	100	91,3	100	97,92	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	81,1	100	97,27	100	96,82	100	100	100	96,95
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	97,76	100	97,15	100	92,91	100	99,00
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	84,2	100	97,93	100	97,26	100	100	100	97,47
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	69,5	100	74,10	100	95,72	100	84,97	100	96,60
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	92,52	100	63,08	100	74,67	100	88,27	100	91,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	16,1	100	28,10	100	28,66	100	27,97	100	51,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	75,94	100	69,39	100	74,90	100	91,30	100	91,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	13,2	100	11,70	100	23,22	100	70,15	100	76,00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	130,3	100	91,00	100	92,99	100	99,97	100	88,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	63,6	100	65,20	100	52,80	100	84,21	100	97,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	88,37	100	43,13	100	107,85	100	100,9	100	99,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persen	100	88	100	62,50	100	83,60	100	101,86	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar											

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2025

Tahun 2024 hanya 1 Indikator yang realisasinya sudah mencapai 100 persen terutama berkaitan dengan Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi dan 13 Indikator lainnya masih di bawah 100 persen. Capaian urusan kesehatan di bawah 100 persen dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga medis, serta kurangnya aksesibilitas layanan di daerah tertentu. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan sosial, dan dampak pandemi juga mempengaruhi pencapaian tersebut. Efektivitas program pemerintah dan koordinasi antarinstansi yang kurang juga turut berperan.

2.1.5.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dari 9 indikator kinerja kunci dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 2 di antaranya tidak dihitung karena Kota Bekasi tidak memiliki pantai maupun prasarana irigasi. Sementara itu, dari 7 indikator yang dihitung, terdapat beberapa yang realisasinya belum mencapai 100 persen pada tahun 2024, meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.5 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISAS	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	Persen	-	-	-	99,22	-	73,96	-	92,32	-	92,32

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISAS	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	-	-	-	-	99.73	99.73	100	82.13	100	82,13
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	Persen	-	-	95,5	95,5	95,5	94,94	97,4	97,4	97,724	97,724
6	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	Persen	-	-	65,85	65,85	64,45	41,03	51,85	43,73	52,35	52,35
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, 2025

Dari indikator di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan berkaitan dengan akses rumah tangga terhadap SPAM, akses rumah tangga terhadap pengolahan air limbah domestik, kemantapan jalan kota yang belum sepenuhnya mencapai pelayanan 100 persen, dan rasio tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

2.1.5.4 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Saat ini, data termutakhir indikator pada kinerja urusan perumahan belum tersedia. Jika melihat tren pada tahun sebelumnya, urusan perumahan dan kawasan permukiman ini masih menghadapi permasalahan berkaitan dengan permukiman kumuh, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), dan PSU. Hal ini didasarkan pada realisasi capaian untuk masing-masing indikator yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Sementara itu, terdapat 2 indikator yang tidak dihitung realisasinya karena di Kota Bekasi tidak terjadi bencana yang mengharuskan untuk rehabilitasi rumah warga terdampak dan tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan untuk melakukan relokasi rumah warga.

Tabel 2.6 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Persen	-	-	-	68,32	-	73,37	-	71,51	-	71,51
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	-	-	-	-	0,12	0,29	100	0,09	100	0,09
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	-	-	-	0,32	100	100	100	75,28	100	75,28

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Namun terdapat beberapa yang perlu ditingkatkan seperti pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang realisasinya belum 100 persen. Di samping itu, waktu tanggap terhadap kebakaran juga memerlukan peningkatan meskipun secara target dan realisasi sudah sesuai akan tetapi belum mencapai 100. Hal tersebut mengingat Kota Bekasi merupakan kota yang padat serta memiliki risiko bencana kebakaran yang relatif tinggi.

Tabel 2.7 Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	-	-	100	99,94	100	95,39	100	99,41	100	100,92
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	250	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	148,07	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	-	-	100	96,42	100	100	100	90,75	100	94,49
7	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	-	-	79	100	80	100	9.88	9,88	7,63	7,63

Sumber: Satpol PP, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2025

2.1.5.6 URUSAN SOSIAL

Kinerja urusan sosial Kota Bekasi telah menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan realisasi mencapai 100 persen selama lima tahun terakhir. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut ke depannya, perlu dioptimalkan upaya mitigasi terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Tabel 2.8 Kinerja Urusan Sosial Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2025

2.1.5.7 URUSAN TENAGA KERJA

Saat ini, data termutakhir untuk indikator pada urusan tenaga kerja Kota Bekasi masih belum *update*. Merujuk pada tahun sebelumnya, kinerja urusan tenaga kerja Kota Bekasi yang masih memerlukan peningkatan yaitu terkait dengan peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja. Jika kedua indikator ini meningkat, tentunya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pendataan tenaga kerja hingga level terendah misalnya kelurahan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran.

Tabel 2.9 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	-	-	-	0,117	-	1,002	-	2	-	2
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	-	-	-	5,015	-	75,66	-	53,6	-	53,6
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	-	-	-	53,65	-	73,69	-	100	-	100
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kab/kota	Persen	60,83	60,83	61,15	76,17	61,78	76,28	76,40	76,40	76,40	76,40

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2025

2.1.5.8 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam aspek perlindungan anak yang telah mencapai 100 persen. Namun, pemberdayaan perempuan masih memerlukan penguatan, mengingat rasio kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi serta belanja APBD responsif gender yang baru mencapai sekitar 53 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.10 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISAS	TARGET	REALISAS	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	-	-	19,38	19,38	22,36	22,36	52,56	52,56	53,05	53,05
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	-	-	23,25	23,25	30,25	30,25	41,80	41,80	46,48	46,48

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, 2025

2.1.5.9 URUSAN PANGAN

Saat ini ketersediaan data pada indikator urusan pangan belum tersedia. Jika melihat tren pada tahun sebelumnya, kinerja ketahanan pangan Kota Bekasi tahun 2023 berada pada kondisi yang tahan dengan capaian Indeks Ketahanan Pangan mencapai 91,55 persen. Namun jika diukur dari persentase ketersediaan pangan (beras/jagung) memang menunjukkan angka yang kecil yaitu hanya 0,38 persen. Kondisi ini dapat disebabkan karena luas lahan pertanian yang menghasilkan kedua komoditas tersebut sangat terbatas. Untuk mengatasi ketersediaan pangan (beras/jagung) tersebut dapat dilakukan upaya kerja sama dengan daerah penghasil ataupun membuka lahan pertanian di daerah lainnya.

Tabel 2.11 Kinerja Urusan Pangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	-	-	-	4,71	-	0,86	-	0,38	-	0,38

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.10 URUSAN PERTANAHAN

Saat ini, ketersediaan data termutakhir indikator pada urusan pertanahan Kota Bekasi belum tersedia, akan tetapi jika melihat data pada tahun sebelumnya, dari 3 indikator kinerja

urusan pertanahan Kota Bekasi yang diukur sudah menunjukkan capaian yang tinggi dan sangat tinggi. Pada indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum capaiannya tinggi meskipun dalam konteks Kota Bekasi pembebasan tanah cukup kompleks karena intensitas penggunaan dan harga tanah yang tinggi.

Tabel 2.12 Kinerja Urusan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	-	-	-	24,42	-	76,27	-	88,83	-	88,83
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Bekasi menghadapi tantangan yang kompleks, terbukti dari menurunnya realisasi IKLH. Selain itu, pengelolaan persampahan juga memerlukan perhatian khusus. Sebagai kota metropolitan yang terhubung dengan wilayah sekitarnya, upaya peningkatan kualitas lingkungan tidak dapat dilakukan secara mandiri. Diperlukan kolaborasi yang terintegrasi untuk menanganinya secara efektif. Dalam hal pengelolaan sampah, diperlukan perubahan paradigma yang mencakup pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.13 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	Poin	52	60,42	61,02	44,6	61,93	46,25	62,85	45,81	60	50,70
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Persen	-	-	74	63	73	64,26	72	77,44	65	80,50
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	23,88	100	54,94	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2025

2.1.5.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bekasi, terutama dalam perekaman KTP elektronik dan kepemilikan akta kelahiran, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan memperluas akses serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah juga perlu ditingkatkan.

Tabel 2.14 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISAS
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	-	-	94,51	97,38	99,3	97,17	95,23	99,5	94,51	99,99
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	-	-	65	35,92	40	37,10	50	44,19	65,00	73,65
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	66,96	93,7	67,29	97,74	67,62	97,53	67,96	98,33	67,29	98,69
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Persen	100	75,00	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2025

2.1.5.13 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Bekasi cenderung muda, dengan mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Dengan kondisi demikian, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi sangat penting agar

komposisi penduduk tetap terjaga sehingga dapat menunjang produktivitas daerah. Dari indikator kinerja yang ada, berkaitan dengan pemakaian kontrasepsi modern pada tahun 2024 realisasi mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan mencatat angka negatif. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam program keluarga berencana, baik dari segi sosialisasi, aksesibilitas, maupun kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian, kebutuhan KB juga perlu menjadi perhatian mengingat merupakan hal penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.15 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	-	-	1,87	1,87	1,87	1,87	1,85	1,85	1,85	-1,85
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Persen	-	-	47,31	79,83	47,31	47,31	56,83	56,82	56,83	-56,83
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need)*	Persen	-	-	34,97	34,97	34,97	34,97	19,86	19,86	19,86	19,86

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, 2025

2.1.5.14 URUSAN PERHUBUNGAN

Pada saat ini, data tahun 2024 untuk indikator urusan perhubungan Kota Bekasi belum tersedia, akan tetapi jika melihat kinerja sektor perhubungan di Kota Bekasi tahun sebelumnya, yang diukur melalui rasio konektivitas, menunjukkan bahwa seluruh wilayah telah terhubung dengan baik. Namun, dalam tiga tahun terakhir, derajat kejenuhan (*v/c ratio*) mengalami penurunan, menandakan adanya perbaikan dalam kelancaran lalu lintas. Meskipun demikian, beberapa titik masih tergolong rawan kemacetan dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi transportasi di Kota Bekasi.

Tabel 2.16 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Rasio konektivitas kab/kota	Angka	-	-	-	1	-	1	-	0,98	-	0,98
2	V/C Ratio di Jalan kab/kota	Angka	-	-	-	1,155	-	0,73	-	0,701	-	0,701

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Bekasi yang diukur dari 3 indikator sebagaimana pada tebel di bawah sudah menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Namun jika dilihat Indeks SPBE, Kota Bekasi menempati urutan ke-16 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal digitalisasi birokrasi, integrasi sistem, serta kualitas layanan berbasis elektronik. hal tersebut tentunya masih perlu mendapat perhatian mengingat seiring perubahan gaya hidup perkotaan yang menjadi ciri khas kota metropolitan.

Tabel 2.17 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	-	100	94,12	100	94,12	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota	Persen	-	-	100	94,15	100	99,24	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, 2025

2.1.5.16 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada saat ini data tahun 2024 kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bekasi masih belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya, kinerja sektor koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Bekasi menunjukkan tren positif. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas koperasi agar lebih profesional dan berkelanjutan. Selain itu, jumlah wirausaha juga perlu ditingkatkan hingga mencapai minimal 4 persen guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing Kota Bekasi.

Tabel 2.18 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	-	-	10	12,08	10	13,65	10	14,13	10	14,13
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	-	-	20	21,21	20	25,6	20	36,07	20	36,07

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, 2025

2.1.5.17 URUSAN PENANAMAN MODAL

Kinerja urusan penanaman modal Kota Bekasi mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun 2020-2024. bahkan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena realisasi bernilai negatif. Kondisi demikian memerlukan upaya terutama berkaitan dengan pemetaan potensi investasi dan promosi investasi yang masif serta meningkatkan dinamisme bisnis (kemudahan berinvestasi).

Tabel 2.19 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	Persen	10	-14,83	4	22,6	4	63,27	4	-7,17	7	10,7

Sumber: Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, 2025

2.1.5.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pada saat ini, data termutakhir indikator urusan kepemudaan dan olah raga belum tersedia, akan tetapi jika melihat data tren tahun sebelumnya, kinerja sektor kepemudaan dan olahraga di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri serta keterlibatan mereka dalam organisasi kepemudaan menjadi tantangan utama. Mengingat besarnya potensi ekonomi kreatif di Kota Bekasi, diperlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam ekosistem kreatif agar mereka dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 2.20 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	-	-	-	0,19	-	0,37	-	0,57	-	0,57
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	-	-	-	18,37	-	26,19	-	26,24	-	26,24
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jenis	-	-	-	178	-	32	-	82	-	82

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bekasi, 2025

2.1.5.19 URUSAN STATISTIK

Kinerja sektor statistik di Kota Bekasi telah mencapai tingkat yang sangat baik dibuktikan dengan realisasi sudah mencapai 100 persen pada tahun 2024. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pelayanan bagi pengguna eksternal di luar perangkat daerah. Hal ini penting mengingat data statistik merupakan sumber informasi yang relevan dan perlu diakses oleh berbagai pihak untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik.

Tabel 2.21 Kinerja Urusan Statistik Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, 2025

2.1.5.20 URUSAN PERSANDIAN

Kinerja sektor persandian di Kota Bekasi telah mencapai kategori yang sangat tinggi, sebagaimana dibuktikan dengan realisasi yang terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Bahkan, pada tahun 2024, capaian tersebut telah mencapai 100 persen. Meskipun demikian, penguatan sistem keamanan siber tetap perlu ditingkatkan, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan potensi ancaman siber yang semakin kompleks. Langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi enkripsi yang lebih canggih, serta pemantauan dan respons yang lebih proaktif terhadap ancaman siber menjadi hal yang krusial untuk memastikan keamanan data dan informasi di Kota Bekasi.

Tabel 2.22 Kinerja Urusan Persandian Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	-	-	100	77,52	100	88,99	89,92	91,32	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, 2025

2.1.5.21 URUSAN KEBUDAYAAN

Kinerja sektor kebudayaan di Kota Bekasi, yang diukur melalui indikator pelestarian cagar budaya, menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024. Bahkan, pada tahun 2024, realisasi pelestarian telah mencapai 100 persen. Meskipun demikian, upaya pelestarian perlu terus ditingkatkan agar kualitas perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya semakin optimal di masa mendatang. Pelestarian ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap warisan

budaya yang membentuk identitas dan sejarah Kota Bekasi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat karakter lokal di tengah pesatnya arus modernisasi. Selain itu, pengelolaan cagar budaya yang lebih baik dapat mendukung pengembangan wisata budaya, menciptakan peluang ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghormati warisan leluhur.

Tabel 2.23 Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	33.33	-	36	-	10,44	-	7,14	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.22 URUSAN PERPUSTAKAAN

Saat ini data termutakhir indikator pada urusan perpustakaan belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya, kinerja sektor perpustakaan di Kota Bekasi menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang serba digital dan lebih berorientasi pada konten visual. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan menyesuaikan layanan perpustakaan agar lebih adaptif terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan membaca di era digital, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Tabel 2.24 Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	-	-	-	39,18	-	40,01	-	68,49	-	68,49
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	-	-	6,31	-	52,14	-	51,79	-	59,36

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025

2.1.5.23 URUSAN KEARSIPAN

Saat ini data pada tiap indikator urusan kearsipan belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya, kinerja sektor kearsipan di Kota Bekasi masih memerlukan perbaikan, mengingat capaian saat ini masih di bawah 80 persen. Seiring dengan perkembangan transformasi digital yang akan berdampak pada sistem kearsipan di masa depan, diperlukan upaya untuk menerapkan arsip digital. Digitalisasi arsip tidak hanya akan

membuat pengelolaan data lebih sistematis dan efisien, tetapi juga menghemat ruang penyimpanan serta meningkatkan aksesibilitas dan keamanan dokumen.

Tabel 2.25 Kinerja Urusan Kearsipan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	Persen	-	-	-	75	-	75	-	78	-	78
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	-	-	-	32	-	18,66	-	50	-	50

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025

2.1.5.24 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Saat ini data pada indikator urusan kelautan dan perikanan belum tersedia, akan tetapi merujuk pada data tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa Kota Bekasi tidak memiliki garis pantai, produksi perikanan di Kota Bekasi lebih bertumpu pada sektor perikanan budidaya. Mengingat karakteristik wilayah yang didominasi kawasan perkotaan, diperlukan upaya intensifikasi budidaya perikanan agar produksi terus meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.26 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota	Persen	-	-	-	-	-	100,03	-	106,64	-	106,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.25 URUSAN PARIWISATA

Kinerja sektor pariwisata di Kota Bekasi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada tahun 2024 menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan, mengingat potensi wisata yang belum sepenuhnya dioptimalkan serta besarnya peluang dari sektor industri kreatif. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan perlu terus didorong agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melengkapi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Tabel 2.27 Kinerja Urusan Pariwisata Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-	-	100	-39,07	100	1.831	100	169,7	100	100
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	Persen	-	-	100	58,75	100	47,85	100	60,57	100	100
3	Tingkat hunian akomodasi	Hari	-	-	100	74,75	100	56,14	100	49,90	100	100
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	-	-	100	6,90	100	7,27	100	0	100	100
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	-	-	100	12,28	100	17,01	100	18,48	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.26 URUSAN PERTANIAN

Pada saat ini data pada indikator urusan pertanian belum tersedia, akan tetapi jika merujuk tahun sebelumnya dengan lahan pertanian yang terbatas, produktivitas sektor pertanian di Kota Bekasi cenderung stabil di kisaran 7,5 persen. Seiring dengan pesatnya perkembangan perkotaan, alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan yang sulit dihindari. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif untuk menjaga produktivitas pertanian, salah satunya melalui penerapan sistem *urban farming*, yang dapat mengoptimalkan lahan terbatas dan mendukung ketahanan pangan perkotaan.

Tabel 2.28 Kinerja Urusan Pertanian Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	-	-	-	7,51	-	7,71	-	7,67	-	7,67
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-	-	-	0	-	0	-	-10,27	-	-10,27

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025

2.1.5.27 URUSAN PERDAGANGAN

Kinerja sektor perdagangan di Kota Bekasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, terutama pada indikator jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan serta persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang bertanda tera sah. Pada tahun 2024, capaian realisasi untuk indikator tersebut telah mencapai 100 persen. Namun, indikator persentase realisasi pupuk masih relatif rendah, hanya mencapai 18,27 persen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kota Bekasi bukanlah daerah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan keterbatasan lahan pertanian yang tersedia.

Tabel 2.29 Kinerja Urusan Perdagangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	-	-	16,98	-	22,80	-	18,27	-	18,27
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

2.1.5.28 URUSAN PERINDUSTRIAN

Pada saat ini, beberapa data pada tiap indikator urusan perindustrian belum tersedia, akan tetapi jika merujuk pada data tahun sebelumnya perkembangan kinerja sektor perindustrian di Kota Bekasi menunjukkan tren positif, terutama pada indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah. Pada tahun 2023, peningkatan jumlah industri kecil dan menengah cukup signifikan, meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan industri kecil dan menengah dapat terus meningkat di masa mendatang. Mengingat Kota Bekasi sudah tidak lagi memungkinkan menjadi lokasi bagi industri skala besar, pengembangan industri kecil dan menengah menjadi langkah strategis untuk mendukung perekonomian kota. Selain itu, arah pengembangannya perlu difokuskan pada sektor industri kreatif guna meningkatkan daya saing serta mendorong inovasi di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Tabel 2.30 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	-	-	-	5,6	-	-8,92	-	139	-	7,38
2	Persentase realisasi sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	-	-	-	120	-	100	-	0	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	-	-	0	-	100	-	100	-	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	-	-	0	-	100	-	0	-	0
5	Tersedianya informasi industri	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	secara lengkap dan terkini											

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2025

2.1.5.29 UNSUR SEKRETARIAT DAERAH

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Namun, masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan, salah satunya adalah rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan, yang pada tahun 2024 baru mencapai 45,10 persen. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi dalam proses pengadaan. Selain itu, persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur masih berada di bawah target, sehingga perlu adanya peningkatan dalam penyediaan fasilitas guna mendukung kelancaran birokrasi di Kota Bekasi. Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Tabel 2.31 Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISAS	TARGET	REALISASI
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	-	-	-	13,36	-	5,62	84,03	84,03	56,52	56,52
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	-	-	-	22,90	-	24,12	-	31,56	45,10	45,10
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemda		-	-	-	-	-	49,34	-	87,76	-	87,76
5	Persentase peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang diundangkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISAS	TARGET	REALISASI
6	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP PD	Persen	-	-	50	93,18	60	61,36	75	90,91	75	100
7	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan sosial	Persen	40	40	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan kerjasama pemerintah daerah	Persen	40	35	100	100	100	100	100	125,58	100	172,73
9	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan	Persen	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan ekonomi	Persen	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	Persen	100	83,33	100	100	100	100	100	100	100	51
15	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Persen	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bekasi, 2025

2.1.5.30 UNSUR SEKRETARIAT DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD sudah pada kategori sangat tinggi. Namun, indikator persentase terfasilitasinya proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah masih perlu ditingkatkan, karena realisasinya pada tahun 2024 masih berada di bawah target yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah agar proses legislasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Bekasi.

Tabel 2.32 Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase terpenuhinya proses penyusunan dan penetapan APBD dan LAPBD	Persen	100	100	100	100	100	100	75,2	100	100	100
2	Persentase terfasilitasinya proses penyusunan dan penetapan Perda	Persen	100	100	100	100	100	75	100	80	100	97,77
3	Persentase terfasilitasinya kegiatan DPRD	Persen	100	100	100	82	100	100	100	100	100	100
4	Persentase terfasilitasinya informasi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2025

2.1.5.31 UNSUR PERENCANAAN

Hingga saat ini kinerja unsur perencanaan Kota Bekasi belum tersedia, akan tetapi jika merujuk tahun sebelumnya, kinerja perencanaan Kota Bekasi sudah sangat tinggi dan hanya pada indikator persentase kesesuaian antara realisasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang realisasinya masih berada di angka 50 persen pada tahun 2023. Kondisi ini memerlukan upaya perbaikan dalam perumusan program prioritas sehingga kinerja utama dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel 2.33 Kinerja Unsur Perencanaan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase kesesuaian antara realisasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan	Persen	100	67	100	62	100	48	100	50	0	0
2	Persentase kesesuaian antara realisasi target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	99	100	100	100	100	0	0
3	Persentase kesesuaian antara realisasi target	Persen	100	100	100	99	100	100	100	100	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam											
4	Persentase kesesuaian antara realisasi target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	99	100	100	100	100	0	0

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

2.1.5.32 UNSUR KEUANGAN

Hingga saat ini data tiap Indikator-indikator pada Kinerja Unsur Keuangan Kota Bekasi Tahun 2024 belum tersedia. Akan tetapi, jika dilihat data sebelumnya, Kinerja keuangan Kota Bekasi masih memerlukan peningkatan yang signifikan, terutama terkait dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada tahun 2023 masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini mengindikasikan bahwa, secara umum, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material, termasuk posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperbaiki agar transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dapat semakin meningkat.

Secara umum, berbagai indikator menunjukkan peningkatan target dalam kinerja keuangan Kota Bekasi. Namun, terdapat beberapa indikator yang justru mengalami penurunan realisasi, seperti deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD serta rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, sehingga diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan alokasi dan penyerapan anggaran berjalan optimal. Optimalisasi pengelolaan belanja daerah sangat penting agar kebijakan fiskal yang diterapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 2.34 Kinerja Unsur Keuangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	-
2	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	-	-	-	15,76	-	22,11	-	19,58	-	19,58
3	Rasio PAD	Persen	-	-	-	37,91	-	44,32	-	44,45	-	44,45
4	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	-	-	-	62,95	-	79,55	-	92,13	-	92,13
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-	-	0	11,55	0	14,31	0	7,2	-	7,2
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-	-	0	2,51	0	4,17	0	12	-	12
7	Manajemen aset	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	-	-	0	17,27	0	15,67	0	9,16	-	9,16
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
10	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	-	-	113,5	-	85,7	-	88,83	-	88,83

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

2.1.5.33 UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Realisasi kinerja unsur kepegawaian Kota Bekasi mengindikasikan perlunya peningkatan kualifikasi pegawai, terutama dalam hal jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta peningkatan jumlah pegawai fungsional. Hal ini sejalan dengan dinamika kebutuhan aparatur yang semakin terspesialisasi dan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih strategis perlu menjadi fokus utama guna memastikan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bekasi.

Tabel 2.35 Kinerja Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	66,84	66,84	68,77	66,76	67,56	67,56	69,33	69,33
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	10,82	10,82	17,55	17,55	19,93	19,93	20,83	20,83
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	75,77	75,77	52,86	52,86	74,80	74,80	78,12	78,12

Sumber: BKPSDM Kota Bekasi, 2025

2.1.5.34 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Realisasi kinerja unsur penelitian dan pengembangan secara keseluruhan telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, upaya peningkatan pada setiap indikator tetap perlu dilakukan, mengingat penelitian dan pengembangan berperan krusial dalam mendorong inovasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan penguatan riset dan pengembangan yang berkelanjutan, diharapkan inovasi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi pembangunan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi.

Tabel 2.36 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persen	-	-	20	29	40	55,45	60	64,29	60	90
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	-	-	20	20	40	50	60	71,43	60	66
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Persen	10	18	20	25	40	50	60	75	60	66

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
4	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	Produk	1	2	1	2	1	1	2	6	1	5

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

2.1.5.35 UNSUR PENGAWASAN

Kinerja unsur pengawasan Kota Bekasi masih memerlukan peningkatan mengingat realisasi level maturitas menurun dari tahun sebelumnya 3 menjadi 2,80 pada tahun 2024 dan kapabilitas APIP masih memiliki capaian 3. Sehingga, perlu dioptimalkan agar memperoleh nilai 5 yang merupakan nilai maksimal untuk Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Kondisi ini berkorelasi dengan persentase tindak lanjut temuan internal/eksternal yang realisasi belum mencapai 100 persen.

Tabel 2.37 Kinerja Unsur Pengawasan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,80
2	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Persentase tindak lanjut temuan internal	Persen	75	80,6	75	79,1	80	80	80	77,8	80	74,49
4	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	Persen	85	91.01	90	90,52	90	90,4	90	89,01	90	86,50

Sumber: Inspektorat Kota Bekasi, 2025

2.1.5.36 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kinerja unsur pemerintahan umum, khususnya dalam aspek kesatuan bangsa dan pemerintahan umum, telah mencapai realisasi 100 persen pada setiap indikator di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam koordinasi pemerintahan, stabilitas Nasional di tingkat daerah, serta implementasi kebijakan yang berjalan sesuai target. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam

memperkuat sinergi antar instansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.38 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum) Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Optimalisasi pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	10	10	15	10	30	30	50	50	100	100
2	Optimalisasi penanganan potensi konflik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Optimalisasi pembinaan politik daerah	Persen	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100
4	Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,18	0,18	100	100

Sumber: Bakesbangpol Kota Bekasi, 2025

2.1.5.37 UNSUR KEWILAYAHAN

Kinerja unsur kewilayahan secara keseluruhan telah mencapai kategori sangat tinggi. Namun, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut tetap perlu dilakukan, mengingat kecamatan merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dibandingkan perangkat daerah lainnya. Penguatan kapasitas kecamatan dalam pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, serta responsivitas terhadap kebutuhan warga menjadi kunci utama dalam menjaga efektivitas dan kualitas pelayanan di tingkat wilayah.

Tabel 2.39 Kinerja Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Realisasi kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	105	100	104	100	105
2	Persentase jumlah kelembagaan kemasyarakatan aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
4	Persentase wilayah tertib K3	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan di Kota Bekasi, 2025

2.1.6 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai dengan pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2023, penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM ini diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Tabel 2.40 Pencapaian Pelaksanaan SPM Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PENDIDIKAN												
1	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/Mts)	-	-	100%	99,52%	100%	99,97%	100%	99,80%	100%	99,68%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	100%	100%	100%	94,19%	100%	52,95%	100%	25,67%
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	-	-	100%	54,56%	100%	81,50%	100%	68,62%	100%	77,15%
KESEHATAN												
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,14%	100%	97,00%	100%	96,82%	100%	96,83%	100%	96,95%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	102,34%	100%	98,00%	100%	97,26%	100%	97,26%	100%	97,47%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,17%	100%	98,00%	100%	97,15%	100%	97,17%	100%	99,00%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,42%	100%	74,00%	100%	95,72%	100%	95,72%	100%	96,60%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	56,49%	100%	63,00%	100%	74,67%	100%	88,30%	100%	91,00%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	38,43%	100%	36,00%	100%	38,10%	100%	36,25%	100%	51,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	61,33%	100%	70,00%	100%	76,91%	100%	173,6%	100%	91,00%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	13,00%	100%	15,00%	100%	38,00%	100%	70,15%	100%	76,00%
9	Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*	Jumlah warga negara penderita *diabetes melitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	109,04%	100%	91,00%	100%	94,99%	100%	100%	100%	88,00%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	65,00%	100%	66,16%	100%	84,21%	100%	97,32%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	30,09%	100%	43,00%	100%	100%	100%	101%	100%	99,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	72,09%	100%	34,00%	100%	83,61%	100%	112%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	-	-	-	100%	96,29%	100%	90,91%	100%	120,55%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	-	100%	98,96%	100%	99,17%	100%	124,44%
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	100%	99,94%	100%	95,39%	100%	99,46%	100%	100,92%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	100%	250%	100%	100%	100%	97,45%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	96,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SOSIAL												
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	88,02%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Setda Kota Bekasi, 2025

Penerapan SPM di Kota Bekasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan. Pada tahun 2024, dari 29 indikator kinerja pelayanan dasar yang harus dipenuhi terdapat 12 indikator yang capaiannya mencapai 100 persen, sebanyak 12 indikator capaiannya antara 80-99 persen, dan sisanya berada di bawah 80 persen. Adapun pada tahun 2023, hanya 12 indikator yang capaiannya 100 persen, 11 indikator capaiannya antara 80-99 persen, dan 4 indikator capaiannya di bawah 80 persen. Jika dicermati, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 2 indikator yang capaiannya 0 persen yaitu indikator pada urusan perumahan rakyat. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tidak terdapat kejadian bencana dan tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan untuk dilakukannya relokasi.

Dari ketercapaian indikator SPM seperti yang dijelaskan di atas, penerapan SPM di Kota Bekasi masih menghadapi tantangan yang perlu untuk ditangani. Tantangan penerapan SPM di Kota Bekasi itu, antara lain:

1. Pendidikan

Dari 3 jenis pelayanan dasar pendidikan hanya layanan pendidikan dasar yang capaiannya hampir mencapai 100 persen di tahun 2024. Untuk pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini belum mencapai target 100 persen. Pada pendidikan dasar masih terdapat kendala terutama pada jenjang pendidikan SMP yang distribusi sekolahnya belum merata. Hal ini berdampak pada adanya siswa yang tidak tertampung di sekolah-sekolah tersebut. Sementara pada pendidikan anak usia dini keberadaan PAUD berstatus negeri hanya 13 sekolah, sedangkan ratusan PAUD yang lain lebih banyak dikelola oleh swasta. Konsekuensinya, tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah PAUD swasta.

2. Kesehatan

Terdapat 12 pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Bekasi. Pada tahun 2024, dari 12 pelayanan tersebut, baru terdapat 1 pelayanan yang sudah mencapai target 100 persen (pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV), 8 pelayanan lainnya berada di rentang 90-99 persen, dan sisanya masih berada di bawah 80 persen. Untuk pelayanan yang belum mencapai target dan berada di bawah skor capaian 80 persen, yaitu:

- Pelayanan kesehatan pada usia produktif (capaian 51,00 persen), dikarenakan masih rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan secara berkala, wanita usia subur usia 30-50 tahun dan aktif secara seksual masih banyak yang enggan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, belum maksimalnya jejaring pelayanan kesehatan dengan RS/Klinik/DPM/BPS di wilayah kerja masing-masing puskesmas, dan proses pelaporan melalui Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) yang belum maksimal.
- Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (capaian 76,00 persen), dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan secara rutin dan belum maksimalnya puskesmas dalam penginputan data di aplikasi PTM.
- Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus (capaian 88,00 persen) dapat terjadi dikarenakan belum optimalnya program skrining untuk mendeteksi penyakit diabetes melitus sejak dini, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Selain itu, faktor lain seperti ketersediaan obat antidiabetes yang mungkin tidak tersedia di sebagian besar fasilitas kesehatan serta belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan komplikasi penyakit diabetes melitus juga dapat mempengaruhi perolehan skoring.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-sehari serta pengolahan air limbah domestik capaiannya pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Hal ini perlu untuk tetap dipertahankan pada periode berikutnya. Permasalahan yang sebelumnya terjadi perlu diantisipasi agar tidak terjadi kembali, seperti potensi adanya penolakan warga untuk diberikan akses air minum perpipaan karena sumber air minum dari air tanah dirasa masih layak, potensi adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sejalan dengan kegiatan air minum, potensi diperlukannya ketersediaan lahan untuk pembangunan instalasi air minum baru, koordinasi dan integrasi pembangunan air minum antar PD yang perlu dioptimalkan, kapasitas IPLT yang mungkin perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ke depannya, serta perlunya meningkatkan kesadaran warga untuk pengelolaan air limbah domestik.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Bekasi capaiannya masing-masing yaitu 0 persen. Maksudnya yaitu pada tahun 2024 tidak terdapat kejadian bencana yang mengharuskan Pemerintah Kota Bekasi menyediakan dan merehabilitasi rumah bagi korban bencana. Begitu juga tidak terdapat program pemerintah yang mengharuskan dilakukannya relokasi masyarakat.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Terdapat 5 pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang harus disediakan Pemerintah Kota Bekasi. Dari 5 pelayanan tersebut, 4 di antaranya sudah mencapai target 100 persen yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum capaiannya masih belum 100 persen. Belum tercapainya 100 persen pelayanan ini dikarenakan belum optimalnya sinergi antara Satpol PP, Kepolisian, dan dinas terkait dalam menangani masalah ketertiban serta keterbatasan jumlah personel dalam pengawasan di lapangan.

6. Sosial

Dari 5 jenis pelayanan sosial yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi semuanya sudah mencapai target 100 persen. Namun masih terdapat tantangan yang harus ditangani yaitu berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia teknis yang berkompeten dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.1.7 PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Data termutakhir terkait dengan capaian indikator TPB yaitu tahun 2022 (Laporan KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029) dan hanya tersedia beberapa indikator saja. Akan tetapi, jika merujuk pada capaian indikator TPB tahun sebelumnya menunjukkan bahwa dari 199 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Bekasi, terdapat 76,88 persen indikator yang diketahui capaiannya, sedangkan 23,12 persen sisanya masih belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Dari data tersebut, terdapat 43,72 persen yang telah mencapai target Nasional, 33,17 persen yang belum mencapai target Nasional dan 23,12 persen tidak tersedia datanya.

Berdasarkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap 199 indikator TPB kewenangan Kota Bekasi yang dibagi ke dalam 4 Pilar Pembangunan yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, berikut hasil capaian target indikator TPB Per Pilar di Kota Bekasi:

1. Pilar Sosial

Sebagian besar indikator TPB Pilar Sosial di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional, yaitu sebanyak 52 indikator atau sebesar 55,32 persen. Namun, masih terdapat 28 indikator atau sebesar 29,79 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 14 indikator atau sebesar 14,89 persen yang belum ada data. Indikator TPB Pilar Sosial yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi.

2. Pilar Ekonomi

Sebagian besar indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional, yaitu sebanyak 15 indikator atau sebesar 32,61 persen. Namun, masih terdapat 17 indikator atau sebesar 36,96 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 14 indikator

atau sebesar 30,43 persen yang belum ada data. Indikator TPB Pilar Ekonomi yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator TPB Pilar Ekonomi yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi ini tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

3. Pilar Lingkungan

Indikator TPB Pilar Lingkungan di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional yaitu sebanyak 14 indikator atau sebesar 36,84 persen. Namun, masih terdapat 13 indikator atau sebesar 34,21 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 11 indikator atau sebesar 28,95 persen yang belum ada data. Indikator yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi terkait Pilar Lingkungan di Kota Bekasi tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

4. Pilar Tata Kelola dan Hukum

Indikator TPB Pilar Tata Kelola dan Hukum di Kota Bekasi sudah mencapai target Nasional yaitu sebanyak 6 indikator atau sebesar 28,57 persen. Namun, masih terdapat 8 indikator atau sebesar 38,10 persen indikator yang belum mencapai target Nasional dan 7 indikator atau sebesar 33,33 persen yang belum ada data. Indikator yang belum mencapai target Nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Bekasi. Selain itu, indikator yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi terkait Pilar Tata Kelola dan Hukum di Kota Bekasi tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas dan analisis capaian TPB yang dilakukan dengan menghitung selisih antara capaian indikator TPB di Kota Bekasi terhadap target capaian Nasional, beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk perumusan isu strategis Kota Bekasi ke depannya, antara lain terkait dengan:

1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11)

Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kemacetan, pengembangan pariwisata dengan konsep *urban tourism* dan kearifan lokal, bencana banjir, terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), dampak perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), penggunaan transportasi publik, penurunan kualitas udara akibat pencemaran, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPA Sumurbatu, TPST Bantargebang, TPA Burangkeng), dan penyediaan sanitasi serta air minum aman

2. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB 3)

Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, permasalahan stunting, ketahanan dan kedaulatan pangan

3. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6)

Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penyediaan sanitasi dan air minum aman, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPA Sumurbatu, TPST Bantargebang, TPA Burangkeng) yang berada di wilayah Kota Bekasi, permasalahan sampah, dan pengelolaan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota

4. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9)

Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kota Bekasi, dampak perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kota Bekasi, dan penggunaan transportasi publik

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8)

Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengembangan pariwisata Kota Bekasi dengan konsep *urban tourism* dan kearifan lokal, dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan dampak perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kota Bekasi

6. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13)

Yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bencana banjir dan penurunan kualitas udara akibat pencemaran

7. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17)

Pengembangan pariwisata Kota Bekasi dengan konsep *urban tourism* dan kearifan lokal, dampak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kota Bekasi, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPA Sumurbatu, TPST Bantargebang, TPA Burangkeng) yang berada di wilayah Bekasi, dan pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten/kota

2.1.8 BADAN USAHA MILIK DAERAH

Kota Bekasi memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Pendirian BUMD tersebut bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian kota; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD Kota Bekasi, antara lain:

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot

BUMD ini usahanya bergerak dalam bidang pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum, pengelolaan sanitasi dan air limbah. Adapun seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dari sisi kinerja keuangan yang diukur berdasarkan perhitungan Rasio Laba terhadap Investasi (ROI/*Return on Investmen*), tahun 2023 menunjukkan angka 5,59 persen, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 5,57 persen. Angka ROI sebesar 5,59 persen

menunjukkan bahwa investasi yang dinilai menghasilkan keuntungan sebesar 5,59 persen dari total biaya investasi atau sumber dana yang digunakan untuk operasional perusahaan.

Dari sisi bisnis proses yang dilakukan, diketahui bahwa kinerja PDAM Tirta Patriot, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kehilangan air 5 persen (katagori Baik di bawah ketentuan maksimal 20 persen), karena 30 persen produksi air PDAM Tirta Patriot di jual secara curah ke Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi.
2. Perumda Tirta Patriot telah menciptakan barang produktif dengan menjual air curah ke Perumda Tirta Bhagasasi, dan kepada masyarakat produsen air minum isi ulang. Untuk menunjang hal ini dibangun Reservoir 4000 M3 lahan di Perumda Tirta Patriot di *Offtake* Jatibening.
3. Produk inovatif lainnya yang dilakukan Perumda Tirta Patriot adalah pada tahun 2023 meluncurkan produk air minum dalam kemasan (AMDK). Produk itu dimaksudkan untuk meningkatkan sektor pendapatan badan usaha milik daerah di bidang air tersebut.
4. Melakukan layanan responsif dengan mengganti meteran Air yang sudah lama dengan usia teknis 5 tahun.
5. Meningkatkan volume air terdistribusi IPA Teluk Buyung dari 510 lt/detik menjadi 590 lt/detik.

Dengan jumlah pelanggan saat ini sebanyak 105.254 pelanggan, maka untuk 5 (lima) tahun ke depan PDAM Tirta Patriot menargetkan cakupan sebesar 55 persen dengan jumlah pelanggan sebanyak 357.000 pelanggan. Target baru pelanggan sebanyak 190.919 pelanggan dan untuk itu dibutuhkan tambahan air baku sebesar 820 lt/detik.

2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPRS Patriot Bekasi

BPRS Patriot Bekasi dengan bidang usaha perbankan syariah ini memiliki ruang lingkup usaha yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil; melakukan penyaluran dana; melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS Patriot Bekasi; memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan mengelola kegiatan dana sosial berupa zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS dan wakaf tunai. Di lihat dari salah indikator keuangan yaitu jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL)), NPL BPRS Patriot pada tahun 2023 mengalami penurunan, dimana pada tahun

2022 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 8.242.567.147,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp.4.431.975.611,-. Dengan demikian terjadi penurunan kredit bermasalah sebesar 46,23 persen. Sedangkan jumlah pembiayaan seluruhnya mengalami peningkatan sebesar 46,73 persen dibandingkan tahun 2022.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS Patriot Kota Bekasi dari segi perspektif bisnis proses, di antaranya;

1. Melakukan pelayanan responsif melalui; a). monitoring ketat dan pembinaan kepada nasabah agar dana pembiayaan digunakan secara produktif. b). Melakukan pemulihan secara cepat kepada nasabah yang mengalami permasalahan usaha atau berpotensi kemungkinan bermasalah
2. Optimalisasi Jaringan Informasi; dengan pembukaan jaringan kantor kas dan kas keliling di daerah strategis dan sentra-sentra Bisnis, saat ini ada 4 Kantor kas dan 1 Mobil keliling
3. Meminimalisir kesalahan, seperti mengurangi kredit macet, menerapkan prinsip kehati-hatian.
4. Menciptakan barang/jasa pelayanan inovatif, belum banyak terlaksana, produk layanan masih produk umum perbankan syariah seperti; Murabahah, Musyarakah, Ijarah, dan Al-Qordh.

BPRS Patriot Bekasi juga diberikan tugas menyalurkan Program Dana Bergulir yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Kota Bekasi. Tujuan program Dana Bergulir adalah:

1. Meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi untuk mengakses sumber pendanaan permodalan
2. Meningkatkan peran koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi dalam membuka lapangan kerja sehingga mampu membantu upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan
3. Meningkatkan kemampuan koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa.

PT. BPRS Patriot Bekasi berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana dengan pola *executing*, dan mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir. Manfaat atas Program Dana Bergulir.

Berdasarkan laporan keuangan PT. BPRS Patriot Bekasi Periode Desember 2024 jumlah dana bergulir Pemerintah Kota Bekasi adalah Rp.25.094.418.398,- , yang mana dana tersebut telah disalurkan kepada koperasi dan usaha mikro di Kota Bekasi dengan total perguliran sebesar Rp.92.535.500.000,- kepada 1.507 koperasi dan pengusaha mikro. Dengan mempertimbangkan bahwa Program Dana Bergulir secara nyata memberikan dampak yang positif kepada perkembangan koperasi dan pengusaha mikro di Kota Bekasi, diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat menambahkan portofolio penempatan dana bergulir pada periode 2026-2030 sebesar Rp.100.000.000.000,- dengan alokasi per tahun sebesar Rp.20.000.000.000,-.

3. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Mitra Patriot

Kegiatan usaha Mitra Patriot yang dijalankan yaitu di bidang perdagangan barang dan jasa, antara lain pengelolaan transportasi, pengolahan limbah padat dan cair, pengelolaan parkir, reklame/periklanan, percetakan, konstruksi, telekomunikasi, perdagangan umum, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan. ROI PT. Mitra Patriot tahun 2023 diketahui bahwa terjadi pertumbuhan negatif sebesar 10,77 persen, atau turun dari -22,97 persen pada tahun 2022 menjadi -33,74 persen pada tahun 2023. Data tersebut juga berarti bahwa setiap Rp. 1 investasi akan menghasilkan kerugian sebesar Rp. 0,3374,-. Dengan demikian dari sudut Rasio laba terhadap Investasi, PT. Mitra Patriot menunjukkan kinerja yang terus menurun.

Dari bisnis proses PT Mitra Patriot, apakah sesuai dengan tujuan utama yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/RKAP tahun 2023, terutama proses bisnis dari bisnis inti PT Mitra Patriot sendiri. Karena PT Mitra Patriot yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk angkutan umum massal dan sudah tidak lagi beroperasi, maka nilai skor BUMD PT Mitra Patriot Kota Bekasi Tahun 2023 tentang Perspektif Bisnis proses sangat kurang = 20 persen x 10 = 2 (dua).

4. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Minyak dan Gas Bumi

Perseroda Migas melakukan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, yaitu melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam melaksanakan usahanya, Perseroda Migas dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang sejenis dan melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil perhitungan persentase

pertumbuhan laba terhadap investasi PT. Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 gas (Perseroda) menghasilkan ROI sebesar 4.143,62 persen yang artinya bahwa setiap Rp1,00 *capital employment* yang digunakan mampu menghasilkan laba sebesar Rp 41,4362,-. Hal ini jauh di atas standar ukuran kinerja ROI sebesar 18 persen. Di samping itu juga menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 13,88 persen.

Dari bisnis proses, perusahaan membuat Perjanjian Operasi Bersama dengan BUT Foster Oil and Energy Pte. Ltd. (FOE) untuk membantu Perusahaan membiayai kegiatan operasional KSO PD Migas dan memberi dukungan teknis untuk kegiatan operasional lapangan gas Jatinegara. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut yang disepakati pembagian keuntungan dengan FOE dan PD Migas masing-masing sebesar 90% :10% sesuai dengan *participating interest* yang tertuang pada perjanjian tersebut.

Untuk 5 (lima) tahun ke depan, program kerja Perseroda Migas ini, antara lain:

- Menjaga realisasi penyerapan MMSCFD dan peningkatan ke 15 MMSCFD
- Mengajukan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda, agar dapat dinaikkan sesuai kebutuhan bisnis migas
- Rencana ekspansi dengan mengikuti proses lelang pengelolaan sumur minyak Pertamina di luar Bekasi
- *Refocussing* Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ke Kota Bekasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

5. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Sinergi Patriot Bekasi

Kegiatan usaha Perseroda Sinergi Patriot Bekasi yaitu minyak dan gas bumi di sektor hilir, sektor energi, energi baru dan terbarukan dan jasa penunjang lainnya. BUMD ini digolongkan sebagai BUMD non-infrastruktur, karena BUMD ini dalam kegiatannya tidak menyediakan barang dan jasa secara langsung untuk kepentingan masyarakat luas. Pada tahun 2023, PT Sinergi Patriot menghasilkan ROI sebesar minus 5,83 persen, meskipun nilai ROI pada tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 yaitu minus 8,20 persen. Hal itu berarti bahwa setiap Rp 1,00 *capital employment* yang digunakan pada tahun 2023 ternyata menghasilkan kerugian sebesar Rp 0,0583,-.

Dari sisi bisnis proses yang dilakukan, diketahui bahwa kinerja PT Sinergi Patriot Kota Bekasi, adalah sebagai berikut:

1. Telah dihasilkan CNG (*Compressed Natural Gas*), tipe gas alam yang disimpan melalui dikompres dengan tekanan tinggi, yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan gas untuk Rumah Makan, Kawasan Kuliner, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Hotel dan Perkantoran.
2. Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Sinergi Patriot Bekasi dengan PT Pertamina EP yang disusul dengan kesepakatan pengaliran gas melalui pipa milik PT Pertamina Gas yang dituangkan dalam *Gas Transportation Agreement* (GTA). Gas bumi dialirkan ke *Metering Regulator Station* (M/RS) melalui melalui pipa transmisi yang berjarak 12,886 Km dari *Tapping Out* 04 milik PT. Pertamina untuk kemudian disalurkan ke jaringan gas Kota Bekasi.
3. PT Sinergi Patriot Kota Bekasi menjual gas kepada PT Pasundan Resources (PR) untuk pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah Kota Bekasi.

2.1.9 KERJA SAMA DAERAH

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Bekasi menjalin berbagai kerja sama daerah baik antara daerah dan daerah lain serta antara daerah dan pihak ketiga, yang didasarkan pada pertimbangan saling menguntungkan. Berbagai kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi mencakup berbagai bidang antara lain kesehatan, pendidikan, pengelolaan aset, kemitraan dalam pengembangan kapsitas, dan lainnya. Adapun jangka waktu kerja sama yang dilakukan mencakup jangka waktu 1 (satu) hingga 20 (dua puluh) tahun.

Gambar 2.65 Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Berakhir di Tahun 2024-2027

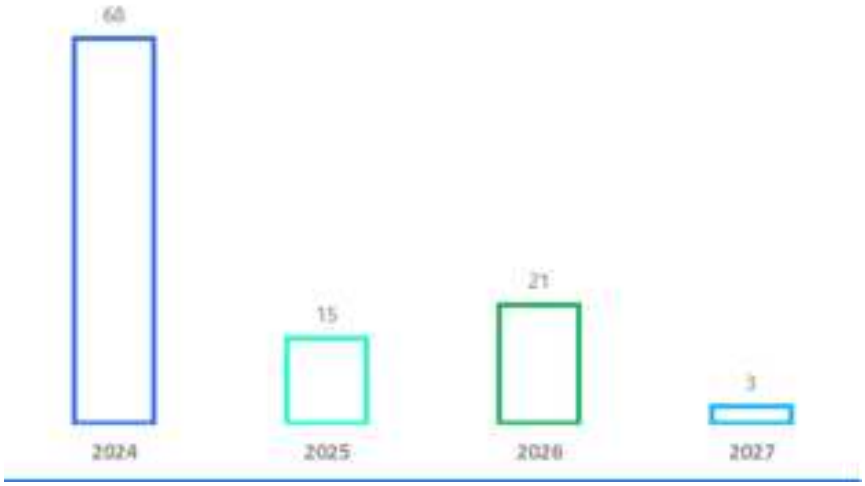

Sumber: Bappedalitbang Kota Bekasi, 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 68 kerja sama daerah yang akan berakhir. Dari 68 kerja sama tersebut, sebanyak 48 kerja sama merupakan kerja sama jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan sisanya merupakan kerja sama dalam jangka waktu 2 (dua) hingga 5 (lima) tahun.

Untuk jumlah kerja sama di tahun berikutnya, tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah. Hal ini dimungkinkan jika di tahun 2025 ini dilakukan penandatanganan kerja sama baru untuk jangka waktu tertentu yang akan berlaku mulai tahun 2026 dan seterusnya.

2.1.10 KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.1.10.1 RUMAH

Ketersediaan rumah/stok rumah di Kota Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketersediaan rumah di Kota Bekasi saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan (toponimi) tahun 2022, jumlah rumah di Kota Bekasi mencapai 731.107 unit, dengan jumlah rumah terbanyak yaitu di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 91.076 unit atau sekitar 12,46 persen dari jumlah keseluruhan unit rumah.

Gambar 2.66 Jumlah Kebutuhan Rumah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan rumah di Kota Bekasi juga akan bertambah. Berdasarkan perhitungan, terdapat kebutuhan penyediaan rumah sebanyak 69.040 unit di tahun 2025 dan 61.857 unit di tahun 2030. Dengan keterbatasan lahan yang ada maka penyediaan rumah di Kota Bekasi diarahkan pada rumah vertikal atau rumah susun.

2.1.10.2 AIR BERSIH

Pemenuhan kebutuhan air bersih di lingkungan hunian merupakan prioritas utama. Penyediaan air bersih di Kota Bekasi dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan memanfaatkan air baku. Air baku bersumber dari air tanah, air permukaan, air hujan, dan mata air. Pemanfaatan air tanah sebagai suplai air bersih terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan jaringan induk PDAM Kota.

Gambar 2.67 Jumlah Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

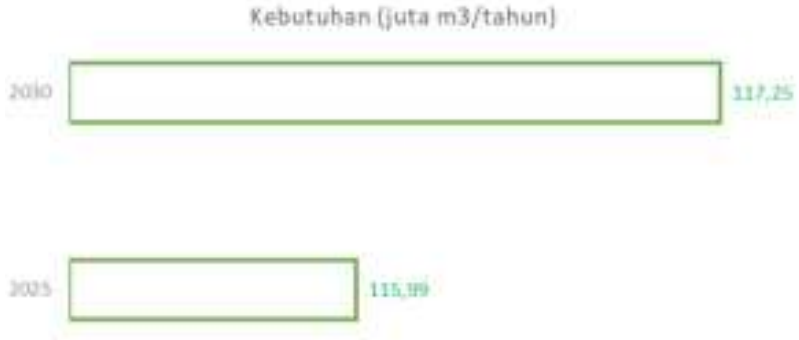

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Kebutuhan air bersih di Kota Bekasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh PDAM. Mengingat kualitas air tanah di Kota Bekasi kurang bagus maka alternatif pemenuhan air bersih di wilayah-wilayah yang tidak dilewati oleh perpipaan PDAM yaitu dengan menyediakan kran umum.

2.1.10.3 AIR LIMBAH

Kondisi sanitasi lingkungan di Kota Bekasi salah satu dengan melihat kondisi jaringan air limbah, yang terdiri dari jaringan air limbah domestik dan jaringan air limbah nondomestik (industri). Air limbah domestik ini merupakan salah satu sumber pencemaran badan air tanah. Proyeksi timbulan air limbah domestik di Kota Bekasi tahun 2025-2030 lebih besar dibandingkan dengan timbulan air limbah nondomestik. Untuk itu perlu adanya pengolahan limbah domestik secara baik dan terpadu di lingkungan rumah tangga ataupun di lingkungan masyarakat.

Gambar 2.68 Jumlah Timbulan Air Limbah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

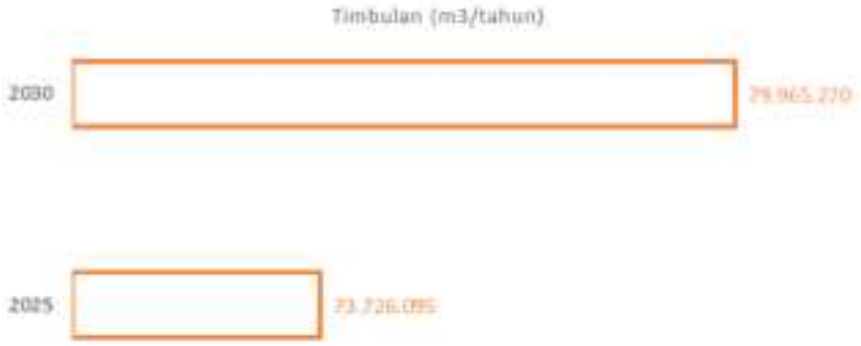

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Dalam rangka melakukan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Bekasi, kinerja terbesar telah dilakukan di Kecamatan Bantargebang sebesar 88 persen bagi kepala keluarga dengan kepemilikan jamban sendiri, sedangkan kinerja terkecil berada di Kecamatan Bekasi Utara sebesar 61 persen untuk kelompok kepala keluarga dengan kepemilikan jamban sendiri. Persentase tersebut berbeda jauh dengan persentase kelompok masyarakat yang belum memiliki jamban, persentase lebih rendah. Pengelolaan limbah domestik dari kelompok belum memiliki jamban masih terbilang sulit, dikarenakan tidak ada tempat yang dijadikan lubang tanah untuk jamban.

2.1.10.4 LISTRIK

Listrik merupakan infrastruktur yang penting untuk mendukung pembangunan wilayah. Penyediaan listrik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertugas untuk menyediakan pasokan Listrik secara Nasional, termasuk di Kota Bekasi. Proyeksi yang berkaitan dengan listrik sangat penting untuk diperhatikan, khususnya dalam perencanaan dan pengembangan wilayah perkotaan seperti di Kota Bekasi.

Proyeksi kebutuhan listrik di Kota Bekasi yang terbagi atas kebutuhan Listrik domestik, kebutuhan listrik nondomestik, dan penerangan jalan umum (PJU). Proyeksi terhadap kebutuhan listrik tersebut masing-masing dilakukan terhadap daya listrik sebesar 450 watt, 900 watt, dan 1.300 watt yang tersebar di 12 kecamatan yang berada di Kota Bekasi. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Kota Bekasi semakin meningkat dalam 5 tahun mendatang. Peningkatan kebutuhan listrik di Kota Bekasi di masa mendatang perlu

diimbangi dengan langkah-langkah strategis untuk mengatasi terbatasnya sumber energi listrik, sehingga peluang terjadinya krisis energi listrik di masa depan dapat diantisipasi dan dicegah secara optimal.

Gambar 2.69 Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

2.1.10.5 PERSAMPAHAN

Kota Bekasi memiliki tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara. Tempat pembuangan sampah ini merupakan tempat pembuangan akhir bukan hanya untuk Kota Bekasi saja tetapi juga daerah tetangga seperti Jakarta. Untuk itu, pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu merupakan hal yang fundamental mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangannya. Setiap kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbal baliknya.

Perkembangan produksi sampah di Kota Bekasi setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama sampah yang bersumber dari permukiman, perkantoran, perhotelan, dan lain-lain sehingga kebutuhan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah perlu terpenuhi dengan baik. Pada tahun 2030, penambahan TPA sudah tidak dibolehkan. Untuk itu perlu adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan di hulu sehingga sampah di hilir bisa direduksi.

Gambar 2.70 Jumlah Timbulan Sampah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

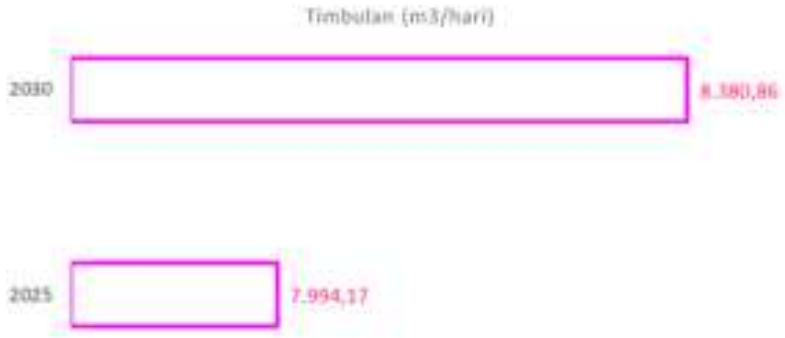

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

2.1.10.6 SARANA PENDIDIKAN

Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan dilakukan untuk memenuhi fasilitas dasar yang diperlukan oleh masyarakat. Ketersediaan sarana pendidikan yang mencukupi akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan masyarakat yang akan terbentuk.

Gambar 2.71 Jumlah Kebutuhan Sekolah Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 kebutuhan sarana pendidikan di Kota Bekasi untuk TK sebanyak 1.893 unit dengan kebutuhan lahan seluas 94,65 ha, SD sebanyak 31 unit dengan kebutuhan lahan seluas 6,13 ha, SMP sebanyak 7 unit dengan kebutuhan lahan seluas 9,20 ha, dan SMA sebanyak 18 unit dengan kebutuhan lahan seluas 22,66 ha. Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan kebutuhan sarana pendidikan, perlu

dicermati terkait dengan distribusinya. Hal ini didasarkan pada kondisi eksisting yang mana keberadaan sekolah belum terdistribusi merata. Selain itu, penting kiranya kebutuhan sekolah untuk PAUD yang lebih diprioritaskan untuk dipenuhi mengingat ketersediaannya saat ini masih sangat kurang.

2.1.10.7 SARANA KESEHATAN

Perencanaan kebutuhan sarana kesehatan dilakukan untuk memenuhi fasilitas dasar yang diperlukan oleh masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan yang mencukupi akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat yang akan terbentuk.

Jumlah kebutuhan sarana kesehatan di Kota Bekasi terus meningkat mengikuti pola laju pertumbuhan penduduk. Dengan statusnya sebagai kota metropolitan, pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan tidak serta merta harus mengikuti hasil proyeksi yang sudah dilakukan. Untuk ke depannya pun akan lebih dibutuhkan rumah sakit dengan skala pelayanan regional yang dilengkapi dengan layanan penyakit yang lebih spesifik.

Gambar 2.72 Jumlah Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2025 dan 2030

Sumber: Rankhir RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

A. Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. PAD terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Capaian realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi atas target yang ditetapkan pada periode 2019-2024 cenderung fluktuatif. Rata-rata capaiannya dalam kurun waktu itu sebesar 94,96 persen. Kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi hanya sekali mencapai di atas 100 persen, yaitu pada tahun 2021 sebesar 101,44 persen. Sedangkan kinerja terendahnya terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 85,28 persen. Kinerja realisasi Pendapatan Daerah yang kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum berhasil menghimpun sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi target yang ditetapkannya pada awal tahun rencana.

Gambar 2.73 Capaian Kinerja Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024

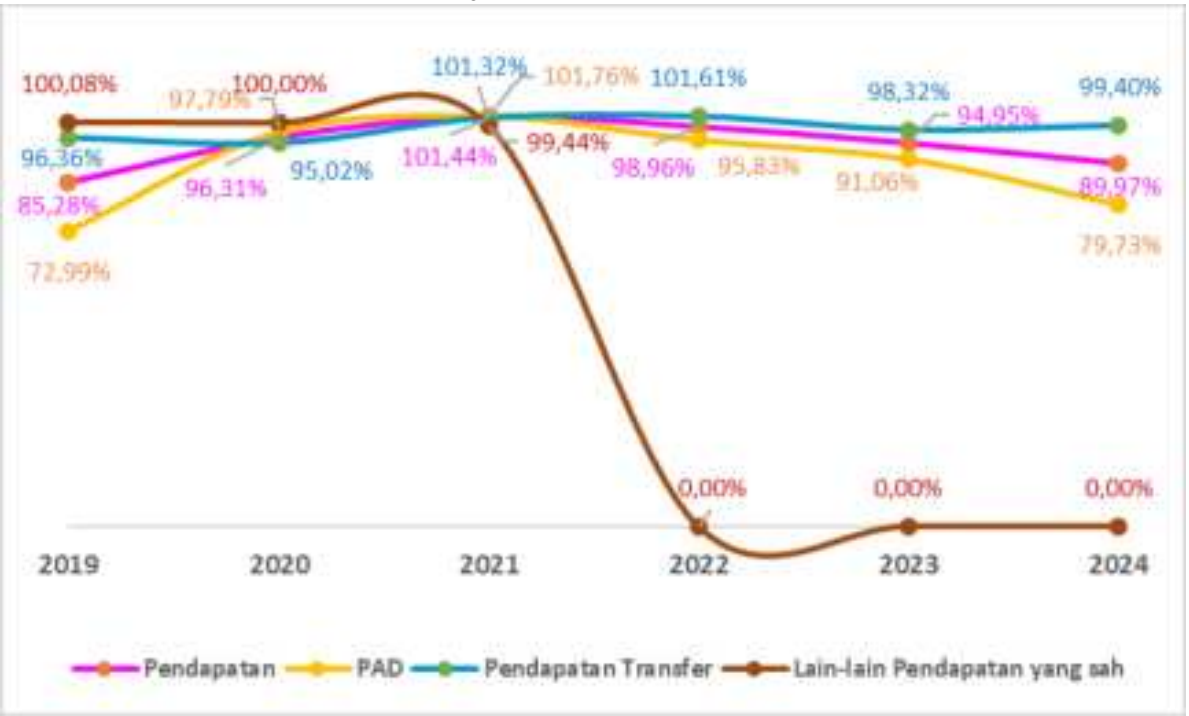

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Jika dicermati per komponen pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer selalu lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Meskipun demikian, PAD Kota Bekasi yang pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan, secara bertahap meningkat di tahun berikutnya,. Meningkatnya proporsi PAD ini berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah Kota Bekasi dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi.

Tabel 2.41 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Target Pendapatan	**6.993,51**	**5.287,39**	**5.685,69**	**5.924,24**	**6.467,82**	**6.989,31**	**6.224,66**
▪ PAD	3.346,02	2.095,14	2.492,95	2.711,75	2.997,68	3.350,24	2.832,30
▪ Pendapatan Transfer	3.454,97	2.992,97	2.982,12	3.212,49	3.470,14	3.639,07	3.291,96
▪ Lain-lain Pendapatan yang sah	192,52	199,28	210,62	0,00	0,00	0,00	100,40

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Realisasi Pendapatan	**5.963,93**	**5.092,17**	**5.767,65**	**5.862,70**	**6.141,46**	**6.288,59**	**5.852,75**
▪ PAD	2.442,15	2.048,91	2.536,71	2.598,63	2.729,78	2.671,24	2.504,57
▪ Pendapatan Transfer	3.329,11	2.843,99	3.021,52	3.264,07	3.411,68	3.617,35	3.247,95
▪ Lain-lain Pendapatan yang sah	192,67	199,27	209,43	0,00	0,00	0,00	100,23
Kinerja Pendapatan	**85,28%**	**96,31%**	**101,44%**	**98,96%**	**94,95%**	**89,97%**	**94,03%**

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Selama periode 2019-2024, Pendapatan Daerah Kota Bekasi rata-rata tumbuh sebesar 5,13 persen. Untuk masing-masing komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD tumbuh paling tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan komponen lainnya. Pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 7,19 persen, pendapatan transfer sebesar 6,72 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 4,51 persen. Untuk lebih rincinya, perkembangan pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan masing-masing komponennya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.74 Pertumbuhan Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024

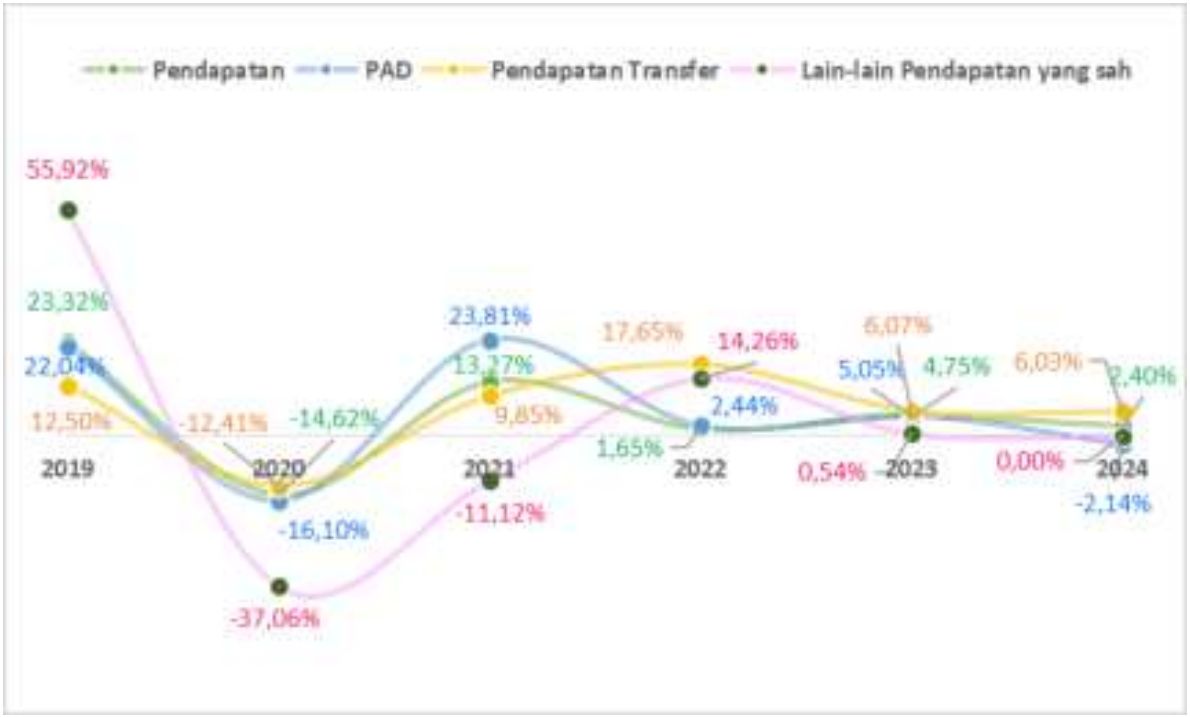

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode 2019-2024 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan pada komponen

PAD. Sementara proporsi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) cenderung fluktuatif. Rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada periode itu sebesar 42,74 persen, proporsi Pendapatan Transfer sebesar 55,47 , dan proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,80 persen.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, yang manfaatnya hanya sampai satu tahun anggaran. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Transfer terdiri dari transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya dan transfer bantuan keuangan lainnya.

Gambar 2.75 Capaian Kinerja Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024

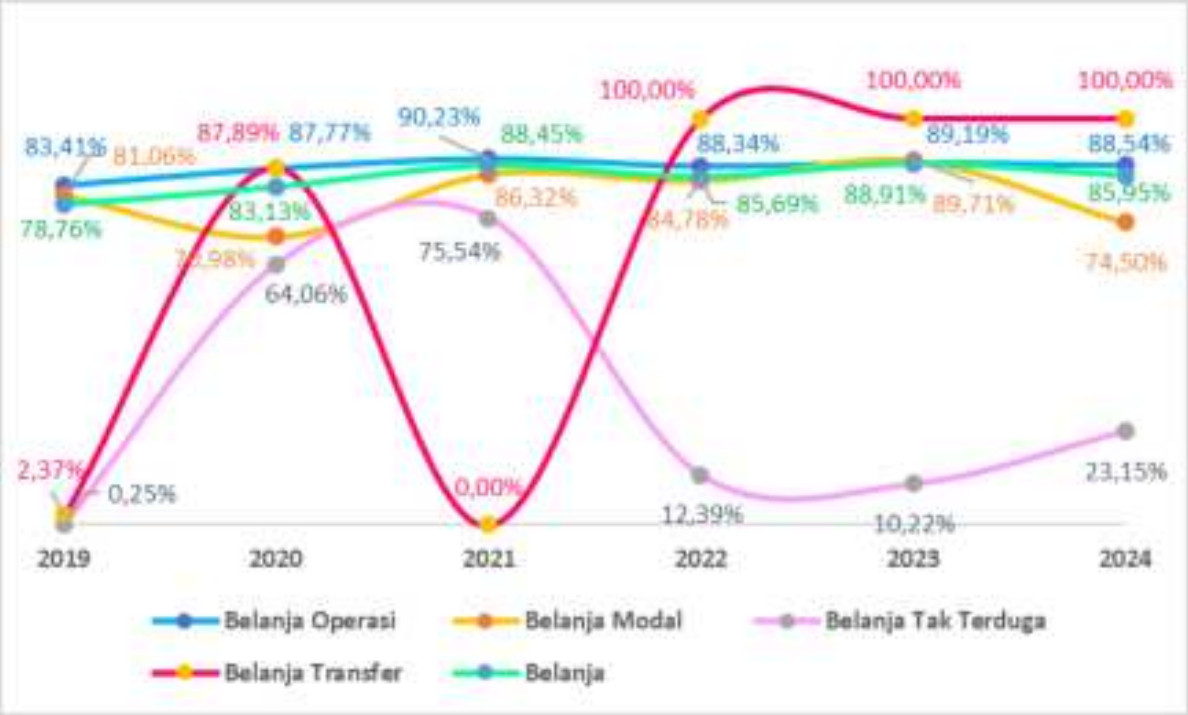

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi pada kurun waktu 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Daerah selalu berada di bawah pagu atau targetnya. Kinerja realisasi

belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 88,45 persen dari pagu/target, sedangkan terendah pada tahun 2019 yakni sebesar minus 79,47 persen dari pagu/target. Realisasi belanja yang lebih kecil dari target/pagu anggarannya ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi disisi lain, Realisasi belanja yang lebih kecil dari pagu ini bisa jadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, yang mengalami penurunan signifikan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020, mulai meningkat di tahun-tahun berikutnya. Adapun rata-rata komponen Belanja Daerah terbesar masih didominasi Belanja Operasi yaitu mencapai Rp 4.598,81 miliar. Meningkatnya realisasi Belanja Operasi terhadap total belanja daerah Kota Bekasi berarti meningkatnya biaya operasional rutin daerah. Sementara itu, Belanja Modal berfluktuatif dan rata-ratanya sebesar Rp 1.059,01 miliar. Belanja Tak Terduga juga fluktuatif, terutama pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021, yang mengalami lonjakan belanja.

Tabel 2.42 Target dan Realisasi Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Target Belanja	**7.069,40**	**5.759,34**	**6.449,62**	**6.674,93**	**7.211,55**	**7.533,14**	**6,783,00**
▪ Belanja Operasi	5.348,41	4.303,60	4.659,35	5.233,70	5.834,76	6.011,19	5.231,83
▪ Belanja Modal	1.362,42	1.113,12	1.377,85	1.266,45	1.285,41	1.400,64	1.300,98
▪ Belanja Tak Terduga	293,26	340,72	412,42	173,78	41,38	15,97	212,92
▪ Belanja Transfer	65,31	1,90	0,00	1,00	50,00	105,34	37,26
Realisasi Belanja	**5.567,93**	**4.787,48**	**5.704,88**	**5.719,81**	**6.411,45**	**6.475,00**	**5.777,76**
▪ Belanja Operasi	4.461,26	3.777,48	4.204,03	4.623,56	5.204,11	5.322,45	4.598,81
▪ Belanja Modal	1.104,38	790,05	1.189,30	1.073,71	1.153,11	1.043,52	1.059,01
▪ Belanja Tak Terduga	0,74	218,28	311,55	21,54	4,23	3,70	93,34
▪ Belanja Transfer	1,55	1,67	0,00	1,00	50,00	105,34	26,59
Kinerja Belanja	**78,76%**	**83,13%**	**88,45%**	**85,69%**	**88,91%**	**85,95%**	**85,18%**

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Pada periode tahun 2019-2024 itu, pertumbuhan tertinggi realisasi Belanja Daerah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 19,20 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar -

14,02 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata Belanja Daerah pada periode ini sebesar 4,97 persen per tahun. Pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi yang cukup tinggi menunjukkan adanya belanja yang meningkat

Jika dilihat per komponen, pertumbuhan rata-rata Belanja Operasi sebesar 4,42 persen per tahun dan Belanja Modal sebesar 8,64 persen per tahun. Untuk Belanja Tak Terduga mengalami lonjakan pada saat Pandemi Covid-19 sehingga rata-ratanya menjadi tinggi.

Gambar 2.76 Pertumbuhan Belanja Kota Bekasi Tahun 2019-2024

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2024 (diolah)

Untuk proporsi realisasi komponen belanja terhadap total Belanja Daerah Kota Bekasi periode 2019-2024 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan pada proporsi Belanja Operasi serta penurunan proporsi Belanja Modal. Jika dirata-rata pada periode itu, proporsi Belanja Operasi sebesar 79,94 persen dan proporsi Belanja Modal sebesar 18,34 persen.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri; Pengeluaran

Investasi Non Permanen Lainnya; Pembayaran Hutang Jangka Panjang Lainnya; Pemberian Pinjaman Daerah.

Realisasi kinerja Pembiayaan Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerjanya hampir selalu berada di bawah pagu atau target yang sudah ditetapkan. Hanya di tahun 2021, kinerja realisasi pembiayaan sebesar 100 persen dari pagu/target. Realisasi capaian yang masih di bawah target terjadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Gambar 2.77 Capaian Kinerja Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024

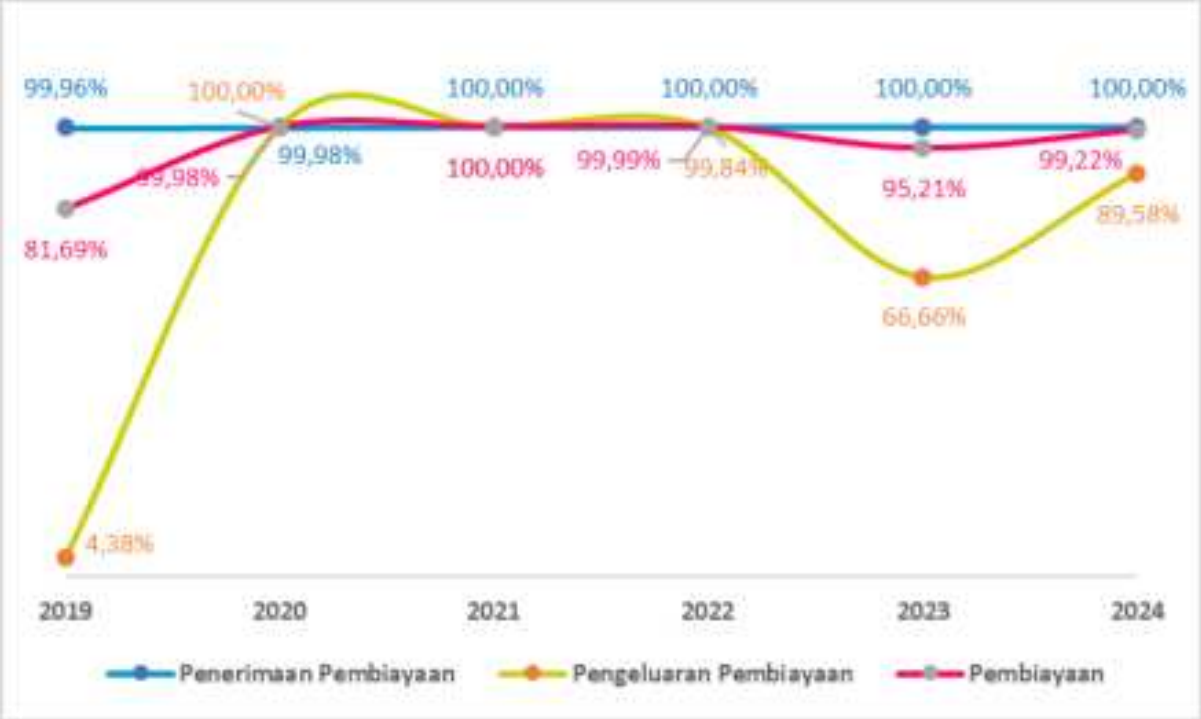

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Bekasi tahun 2019-2024 cenderung meningkat setiap tahunnya. Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Kota Bekasi sebesar Rp 99,36 miliar di tahun 2019, meningkat menjadi Rp 591,84 miliar di tahun 2024. Meningkatnya realisasi SiLPA ini dapat dimaknai terjadinya penurunan penyerapan anggaran daerah.

Tabel 2.43 Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Target Pembiayaan	**122,90**	**516,94**	**789,12**	**902,69**	**1.043,67**	**639,84**	**669,19**
Penerimaan Pembiayaan	99,40	494,44	776,52	826,69	893,70	591,84	613,76
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	99,36	494,34	776,52	826,69	893,70	524,36	613,76
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	67,47	-
Pengeluaran Pembiayaan	23,50	22,50	12,60	76,00	149,97	48,00	55,43
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	23,50	22,50	10,10	46,00	107,50	48,00	42,93
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	2,50	-	-	-	1,25
Pembayaran Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	30,00	37,47	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	37,47	-	11,25
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	5,00	-	-
PEMBIAYAAN NETO	75,90	471,94	763,92	750,69	743,73	543,84	558,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-
Realisasi Pembiayaan	**100,39**	**516,84**	**789,12**	**902,57**	**993,68**	**634,84**	**656,24**
Penerimaan Pembiayaan	99,36	494,34	776,52	826,69	893,70	591,84	613,74
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	99,36	494,34	776,52	826,69	893,70	524,36	613,74
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	67,472	-
Pengeluaran Pembiayaan	1,03	22,50	12,60	75,88	99,97	43,00	42,50
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1,03	22,50	10,10	45,88	57,50	43,00	30,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	2,50	-	-	-	1,25
Pembayaran Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	30,00	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	37,47	-	11,25
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	5,00	-	-
PEMBIAYAAN NETO	98,33	471,84	763,92	750,82	793,73	548,84	571,24
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	494,34	776,52	826,69	893,70	524,36	362,43	646,24
Kinerja Pembiayaan	**81,69%**	**99,98%**	**100,00%**	**99,99%**	**95,21%**	**99,22%**	**96,01%**

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Pada periode tahun 2019-2024, pertumbuhan tertinggi realisasi Pembiayaan Daerah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 414,82 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar -71,14 persen. Pertumbuhan rata-rata Pembiayaan Daerah pada periode ini sebesar 64,12 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan rata-rata Penerimaan Pembiayaan sebesar 61,30 persen per tahun dan pertumbuhan rata-rata Pengeluaran Pembiayaan sebesar 402,61 persen per tahun.

Gambar 2.78 Pertumbuhan Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2019-2024

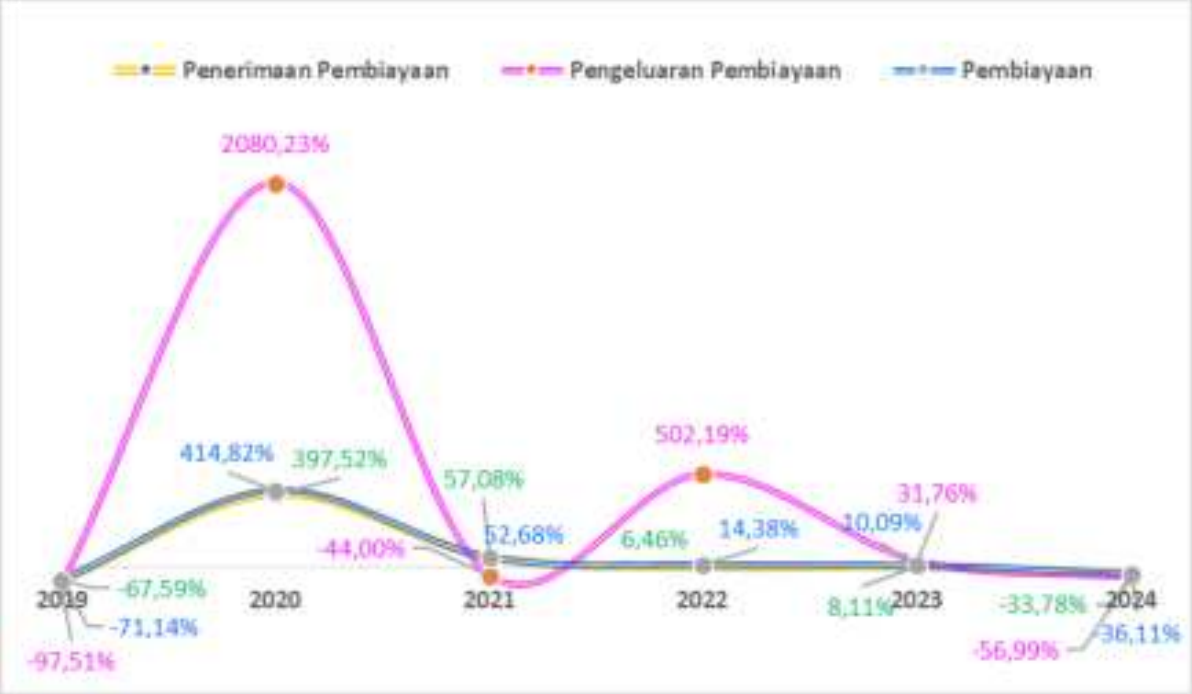

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah)

2.2.1.2 NERACA DAERAH

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 2.44 Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
ASET	13.504,84	14.486,41	15.153,84	16.014,27	16.334,58	16.893,35
Aset Lancar	1.106,16	1.452,68	1.576,93	1.552,02	1.249,66	1.106,31
Kas	494,44	776,56	826,69	893,70	429,70	293,72

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Piutang	405,93	458,94	469,65	452,35	451,80	469,49
Piutang lain-lain	81,62	74,83	106,80	95,28	76,89	17,04
Beban dibayar di muka	0,97	1,48	1,18	1,63	2,26	1,87
Persediaan	123,20	140,87	172,62	109,05	120,15	148,16
Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-
INVESTASI JANGKA PANJANG	411,94	439,82	452,63	496,07	554,33	603,40
ASET TETAP	11.864,28	12.349,37	13.000,43	13.759,39	14.264,48	15.013,70
Tanah	6.142,63	6.703,99	7.234,33	7.598,79	8.309,02	8.783,57
Peralatan dan Mesin	1.507,46	1.849,01	2.151,29	2.488,78	2.873,73	3.162,48
Gedung dan Bangunan	2.956,37	3.039,68	3.186,01	3.367,71	3.677,48	3.952,12
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.527,68	5.651,99	6.113,99	6.598,50	6.971,18	7.441,89
Aset Tetap lainnya	68,58	69,95	71,96	73,46	68,75	71,92
Konstruksi dalam pengerjaan	58,65	55,24	143,66	90,79	17,84	118,75
Akumulasi Penyusutan	(4.397,10)	(5.020,49)	(5.900,80)	(6.458,65)	(7.653,52)	(8.517,06
DANA CADANGAN	0,00	(0,06)	(0,00)	30,00	68,09	-
ASET LAINNYA	122,46	244,60	123,85	176,79	198,02	169,92
KEWAJIBAN	193,14	134,34	104,73	121,67	96,25	106,73
Kewajiban jangka pendek	193,14	134,34	104,73	121,67	96,25	106,73
Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-	-	-
EKUITAS	13.311,71	14.352,07	15.049,10	15.892,60	16.238,33	16.786,62
KEWAJIBAN & EKUITAS	13.504,84	14.486,41	15.153,84	16.014,27	16.334,59	16.893,35

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1. Pertumbuhan Aset:

   Total aset Pemerintah Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan dari Rp13.504,84 miliar (2019) menjadi Rp16.893,35 miliar (2024), dengan pertambahan sebesar Rp3.388,51 miliar dalam kurun waktu 5 tahun. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh:

   - Aset Tetap: Meningkat dari Rp11.864,28 miliar (2019) menjadi Rp15.013,70 miliar (2024), terutama pada aset tanah, gedung, dan infrastruktur.
   - Investasi Jangka Panjang: Naik dari Rp411,94 miliar (2019) menjadi Rp603,40 miliar (2024), menunjukkan komitmen pembangunan berkelanjutan.

2. Penurunan Kewajiban:

Total kewajiban (utang) mengalami penurunan dari Rp193,14 miliar di tahun 2029 menjadi Rp106,73 miliar di tahun 2024, atau turun sebesar Rp86,41 miliar. Hal ini mencerminkan:

- Kebijakan fiskal yang konservatif dengan minimnya utang jangka panjang.
- Kemampuan membayar utang jangka pendek secara tepat waktu.

3. Kinerja Ekuitas:

Ekuitas daerah tumbuh stabil dari Rp13.311,71 miliar (2019) menjadi Rp16.786,62 miliar (2024), menegaskan penguatan modal internal.

Hal ini berimplikasi pada struktur keuangan yang sehat dengan rasio utang/aset hanya 0,63% (2024) serta aset tetap dominan (88,9% total aset) perlu diimbangi dengan optimalisasi aset lancar untuk likuiditas. Dengan demikian maka kebijakan Keuangan harus tetap mempertahankan kebijakan utang rendah sambil meningkatkan efisiensi aset serta memantau penurunan kas (Rp293,72 miliar di 2024) untuk antisipasi kebutuhan likuiditas.

Analisis rasio keuangan untuk pemerintah daerah memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sektor bisnis, akibat tidak adanya sejumlah informasi yang biasa digunakan di sektor bisnis seperti laba. Namun ada beberapa rasio yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Rasio Likuiditas:							
- Rasio Lancar	5,73	10,81	15,06	12,97	12,98	10,37	11,32
- Rasio Kas	2,56	5,78	7,89	7,6	4,46	2,75	5,17
- Rasio Cepat	5,08	9,75	13,4	12,02	11,71	8,96	10,15
- Rasio Modal kerja terhadap Total Aset	0,08	0,1	0,1	0,1	0,07	0,06	0,08
Rasio Solvabilitas	0,0143	0,0093	0,0069	0,0076	0,0059	0,0063	0,0084
Rasio Utang:							
- Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,0145	0,0094	0,007	0,0077	0,0059	0,0064	0,01
- Rasio Utang terhadap Aset Modal	0,0143	0,0093	0,0069	0,0076	0,0059	0,0063	0,01

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Rasio Likuiditas, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya:

1. Rasio Lancar untuk Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan angka yang sangat baik dalam kurun waktu 2019-2024, dengan rata-rata sebesar 11,32 : 1. Angka ini mengindikasikan bahwa aset lancar Kota Bekasi lebih dari cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya, dengan kecenderungan stabil meski sedikit menurun di tahun 2024 (10,37).
2. Rasio Kas menunjukkan rata-rata sebesar 5,17 pada periode ini. Meski terjadi penurunan di tahun 2023-2024 (4,46 dan 2,75), nilai ini tetap positif dan mencerminkan ketersediaan kas yang memadai untuk kewajiban jangka pendek.
3. Rasio Cepat (tanpa persediaan) juga menunjukkan kinerja kuat dengan rata-rata 10,15 : 1. Tren yang stabil hingga 2023 (11,71) dan sedikit penurunan di 2024 (8,96) tetap menunjukkan likuiditas yang sehat.
4. Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,08 (8%), mengindikasikan bahwa 8% aset Pemerintah Kota Bekasi bersifat likuid setelah dikurangi utang lancar. Angka ini relatif konsisten dari tahun ke tahun.

Rasio Solvabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang:

1. Rasio **Total Utang terhadap Total Aset** rata-rata sebesar **0,0084 (0,84%)** pada periode 2019-2024. Nilai ini menunjukkan bahwa utang hanya mencakup **0,84%** dari total aset, mengindikasikan struktur keuangan yang sangat konservatif dan minim risiko.
2. Tren rasio yang terus menurun (dari 0,0143 di 2019 ke 0,0063 di 2024) mencerminkan kebijakan utang yang semakin ketat.

Rasio Utang memberikan gambaran proporsi pendanaan eksternal:

1. **Rasio Utang terhadap Ekuitas** rata-rata **0,01 (1%)**, dengan nilai terendah di 2023 (0,0059). Ini menunjukkan ekuitas dominan dalam struktur modal.
2. **Rasio Utang terhadap Aset Modal** rata-rata **0,01 (1%)**, konsisten dengan rasio sebelumnya. Keduanya menegaskan bahwa utang tidak membebani pemerintah.

2.2.1.3 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi daripada pertumbuhan komponen Pendapatan Daerah lainnya menunjukkan dijalankannya kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu yang berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan Pemerintah Pusat. Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan komponen lainnya menyebabkan adanya peningkatan proporsi PAD dan penurunan proporsi komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Derajat Belanja Pegawai pada kurun waktu 2019-2024 rata-rata sebesar 34,50 persen dan trennya cenderung stabil. Secara nominal, Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur rata-rata sebesar Rp 1.975,75 miliar per tahun. Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pemerintah Kota Bekasi harus segera menerapkan kebijakan terkait belanja aparatur. Di mana batas maksimal belanja aparatur yaitu 30 persen dari APBD. Hal tersebut dimaksudkan agar belanja daerah difokuskan pada layanan dasar publik, dan pemenuhan amanat alokasi belanja minimum untuk pendidikan dan kesehatan.

Gambar 2.79 Proporsi Penggunaan Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Secara rinci, realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) dan proporsi Belanja Aparatur Kota Bekasi selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46 Proporsi Belanja Aparatur Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun Anggaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	1.899,85	1.798,77	1.956,09	2.028,52	1.996,52	2.174,75	1.975,75
Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	5.566,38	4.785,81	5.704,89	5.718,82	6.361,45	6.369,66	5.751,17
Derajat Belanja Pegawai (Kebutuhan Aparatur) Daerah	34,13%	37,59%	34,29%	35,47%	31,38%	34,14%	34,50%

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Derajat Belanja Rutin, selama kurun waktu 2019-2024 rata-rata sebesar 18,41 persen. Secara nominal, Belanja Rutin meningkat sebesar dari Rp 861,19 miliar pada rentang waktu tersebut.

Tabel 2.47 Proporsi Belanja Rutin (Operasi) Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun Anggaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Belanja Rutin	4.461,26	3.777,48	4.204,03	4.623,56	5.204,11	5.322,45	4.598,81
Total Pengeluaran	5.566,38	4.785,81	5.704,89	5.718,82	6.361,45	6.369,66	5.751,17
Derajat Belanja Rutin Daerah	80,15%	78,93%	73,69%	80,85%	81,81%	16,38%	18,41%

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Derajat Belanja Modal, selama kurun waktu 2019-2024 rata-rata sebesar 18,41 persen. Secara nominal, Belanja Modal cenderung fluktuatif pada periode ini. Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan Belanja Modal pada tahun 2020 turun sebesar Rp 314,33 miliar dan pada tahun berikutnya meningkat kembali.

Tabel 2.48 Proporsi Belanja Modal Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun Anggaran	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Belanja Modal	1.104,38	790,05	1.189,30	1.073,71	1.144,21	1.043,52	1.059,01
Total Pengeluaran	5.566,38	4.785,81	5.704,89	5.718,82	6.215,93	6.369,66	5.751,17
Derajat Belanja Modal Daerah	19,84%	16,51%	20,85%	18,78%	18,41%	16,38%	18,41%

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

2.2.1.4 ANALISIS PEMBIAYAAN

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari Rp 5.963,93 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 6.288,59 miliar pada tahun 2024. Sementara Pengeluaran Daerah Kota Bekasi juga menunjukkan peningkatan dari Rp 5.567,41 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 6.412,66 miliar di tahun 2024. Pengeluaran Daerah tersebut terdiri atas Belanja Daerah sebesar Rp 6.369,66 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 43,00 miliar.

Dengan komposisi Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Daerah seperti tersebut, maka pada tahun 2019 terdapat surplus senilai Rp 396,52 miliar. Selanjutnya mengalami defisit pada tahun 2024 sebesar Rp -124,07 miliar di tahun 2024.

Tabel 2.49 Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Realisasi Pendapatan Daerah	**5.963,93**	**5.092,17**	**5.767,65**	**5.862,70**	**6.141,46**	**6.288,59**	**5.852,75**
Dikurangi realisasi							
Realisasi Pengeluaran Daerah	**5.567,41**	**4.808,31**	**5.717,49**	**5.794,69**	**6.365,93**	**6.412,66**	**5.793,66**
Belanja Daerah	5.567,93	4.787,48	5.704,88	5.719,81	6.411,45	6.475,00	5.777,76
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,03	22,50	12,60	75,88	99,97	43,00	42,50
Defisit Riil	**396,52**	**283,85**	**50,17**	**68,01**	**(492,96)**	**(124,07)**	**59,09**

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Sementara itu realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Kota Bekasi selama periode TA 2019–2024 menunjukkan pergerakan yang cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 terdapat SiLPA tahun sebelumnya sebanyak Rp 99,36 miliar atau 20,10 persen dari jumlah SiLPA tahun tersebut sebesar Rp 493,34 miliar. Pada tahun 2024, terdapat SiLPA tahun sebelumnya sebanyak Rp 523,74 miliar atau 144,51 persen dari jumlah SiLPA tahun tersebut sebesar Rp 362,43 miliar

Tabel 4.50 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Bekasi Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Jumlah SiLPA	494,34	776,52	826,69	893,70	523,74	362,43	646,24
SiLPA tahun sebelumnya	99,36	494,34	776,52	826,69	893,70	523,74	602,40
Persentase dari SiLPA	**20,10%**	**63,66%**	**93,93%**	**92,50%**	**170,64%**	**144,51%**	**97,56%**

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

2.2.2 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH

Dalam penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Bekasi.

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, Belanja Daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Tabel 2.51 Proyeksi APBD Kota Bekasi Tahun 2026-2030 (Miliar Rupiah)

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	**6.820,79**	**7.027,22**	**7.244,67**	**7.473,35**	**7.713,40**
Pendapatan Asli Daerah	**4.132,56**	**4.338,99**	**4.556,43**	**4.785,11**	**5.025,16**
Pajak Daerah	3.550,53	3.740,18	3.922,77	4.114,07	4.307,87
Retribusi Daerah	519,18	531,78	558,14	581,85	612,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,75	29,19	36,48	47,71	60,42
▪ PT Bank Jabar	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
▪ BPR Syariah	6,06	6,56	6,94	7,77	8,53
▪ PT Migas	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
▪ PT Sinergi Patriot	0,30	0,86	1,55	1,52	1,51
▪ PDAM Tirta Patriot	5,56	10,43	16,16	26,08	37,54
Lain-lain PAD yang Sah	40,09	37,82	39,03	41,47	44,33
Pendapatan Transfer	**2.688,23**	**2.688,23**	**2.688,23**	**2.688,23**	**2.688,23**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.343,34	2.343,34	2.343,34	2.343,34	2.343,34
▪ Dana Bagi Hasil (DBH)	194,73	194,73	194,73	194,73	194,73
▪ Dana Alokasi Umum (DAU)	1.477,17	1.477,17	1.477,17	1.477,17	1.477,17
▪ Dana Alokasi Khusus (DAK)	671,43	671,43	671,43	671,43	671,43
□ DAK Fisik	-	-	-	-	-
□ DAK Non Fisik	671,43	671,43	671,43	671,43	671,43
Pendapatan Transfer Antar Daerah	344,89	344,89	344,89	344,89	344,89
▪ Pendapatan Bagi Hasil	344,89	344,89	344,89	344,89	344,89
▪ Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Belanja Daerah	**6.820,79**	**7.027,22**	**7.244,67**	**7.473,35**	**7.713,40**
Belanja Operasi	**4.934,62**	**4.846,05**	**4.768,50**	**4.702,18**	**4.647,23**
Belanja Modal	**1.856,16**	**2.156,16**	**2.456,16**	**2.756,16**	**3,056,16**
Belanja Tak Terduga	**30,00**	**25,00**	**20,00**	**15,00**	**10,00**
Belanja Transfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pembiayaan Daerah	**75,00**	**149,72**	**441,89**	**706,09**	**991,77**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**100,00**	**823,81**	**851,13**	**878,45**	**905,76**

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100,00	115,00	130,00	145,00	160,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**25,00**	**75,17**	**79,25**	**83,32**	**87,39**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25,00	75,17	79,25	83,32	87,39
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	75,00	748,64	771,88	795,13	818,37

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2025

Apabila mengacu rata-rata perkembangan Pendapatan Daerah dalam 6 tahun terakhir ini (2019-2024) sebesar 4,24 persen, maka Pendapatan Daerah tahun 2026 diperkirakan naik. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada 2026 diperkirakan sebesar Rp6.820,79 miliar dan pada tahun 2030 sebesar Rp7.713,40 miliar. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi di tahun 2024 sebesar Rp 4.132,56 miliar diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan menjadi Rp5.025,16 miliar di tahun 2030.

Secara khusus, untuk 5 (lima) tahun ke depan, kontribusi PAD dari BUMD pada tahun 2026 ditarget sebesar Rp22,75 miliar, meningkat menjadi Rp60,42 miliar di tahun 2030. Kondisi ini sangat diperlukan agar kinerja BUMD semakin membaik dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bekasi.

Untuk mencapai proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, perlu beberapa kebijakan yang harus dilakukan di masa mendatang, antara lain:

a. Peningkatan Pendapatan Daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Identifikasi objek-objek wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

d. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional; dan
e. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut, Belanja Daerah Kota Bekasi pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 6.820,79 miliar dan akan tumbuh menjadi Rp 7.713,40 miliar pada tahun 2030. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengharuskan pemda mengalokasikan lebih besar belanja produktif, maka Kota Bekasi berkomitmen untuk menurunkan belanja pegawai hingga 30 persen.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :

a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
b. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD;
c. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
d. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah,
e. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD;
f. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus

APBD, mengembangkan jangkauan pelayanan BUMD, dan menambah sumber pendapatan daerah.

2.2.3 PENDANAAN NON APBD

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, pelaksanaan pembangunan di kota ini juga didukung dengan pendanaan yang bersumber dari non APBD. Pendanaan non APBD meliputi pendanaan dari swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sektor swasta di Kota Bekasi berperan penting dalam mendukung pembangunan kota, baik secara langsung melalui investasi maupun tidak langsung melalui kemitraan dan program tanggung jawab sosial. Bentuk investasi langsung dalam mendukung pembangunan kota seperti pembangunan pusat perbelanjaan, kawasan perumahan, fasilitas wisata, dan lainnya. Bentuk pembangunan seperti ini sangat berpengaruh terhadap daya tarik kota yang secara tidak langsung berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian kota.

Pendanaan lain dalam pembangunan Kota Bekasi yaitu bersumber dari PKBL dan TJSL. PKBL dan TJSL di Kota Bekasi tahun 2021-2024 yang tercatat baru berasal dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52 Pendanaan PKBL dan TJSL Bank BJB di Kota Bekasi Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	Dana (Miliar Rupiah)	Program
2021-2022	1,443	Pembangunan taman, gapura, dan lampu penerangan di 9 lokasi
2023	2,894	Pembangunan Plaza Patriot
2024	0,659	Pembangunan sarana olah raga di 7 lokasi

Sumber: Setda Kota Bekasi, 2025

Mencermati masih minimnya pendanaan yang bersumber dari PKBL dan TJSL di atas, diperlukan upaya terobosan peningkatan pendanaan dan perluasan mitra. Hal ini penting untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemanfaatannya dapat diarahkan

untuk membantu menangani persoalan yang menjadi fokus perhatian misalnya terkait penanganan stunting, kemiskinan, penataan PKL, estetika kota, dan lainnya.

Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi juga melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023).

Bentuk kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan tepat guna, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Proyek KPBU adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

Beberapa KPBU yang telah dan direncanakan akan dilaksanakan di Kota Bekasi, antara lain:

- KPBU SPAM Regional Jatiluhur I

  Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya menggunakan skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur air minum curah (AMC). Proyek dengan kapasitas 4.750 l/d (liter per detik) ini melayani Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta. Pembangunan proyek yang dimulai pada akhir tahun 2021, saat ini telah selesai dikerjakan.
- KPBU Ducting

  KPBU ini merupakan kerja sama berupa pembangunan ducting dan menara telekomunikasi di ruas jalan Kota Bekasi. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merapikan tampilan kabel-kabel utilitas, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta mendukung penerapan Bekasi Smart City. Pengerjaan proyek ini dilaksanakan diruas jalan Kota Bekasi dengan panjang jalur saluran ducting sepanjang 608.673 meter dan pembangunan sebanyak 373 Menara Telekomunikasi Seluler (Mikro Seluler/Microcell Pole

(MCP)) di jalur jalan Kota Bekasi. Untuk ke depannya, KPBU Ducting ini direncanakan akan dilakukan kembali di beberapa ruas yang ada di Kota Bekasi.

- KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

  KPBU pengelolaan sampah di Kota Bekasi mengacu pada upaya pemerintah kota untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun dan mengelola fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan menghasilkan energi terbarukan. Tahap yang sedang dilakukan yaitu permohonan dukungan yang ditujukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain dari sumber pendanaan di atas, terdapat beberapa alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan, misalnya:

1. Pinjaman Daerah

   Pinjaman daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik. Pinjaman ini dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Namun demikian, dalam prosesnya memerlukan persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

2. Obligasi Daerah

   Obligasi daerah adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks kota, obligasi daerah kota diterbitkan oleh pemerintah kota untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di wilayah kota tersebut. Tujuan penerbitan obligasi ini yaitu untuk membiayai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, obligasi dapat mendukung program-program pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat kota. Obligasi ini juga merupakan bentuk diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan daerah.

3. Zakat dan Wakaf

   Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pembangunan daerah berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Secara

teori, zakat adalah salah satu instrumen utama dalam redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks pembangunan daerah, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Bekasi didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis seperti yang diuraikan di Bab II. Rumusan permasalahan tersebut disajikan sesuai dengan 4 (empat) aspek pembangunan dan dirinci seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.80 Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi

Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

2.3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Geografi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan geografi di Kota Bekasi, antara lain:

a. Daya dukung/ketersediaan air secara keseluruhan telah melewati ambang batas dan luasannya mencapai 19.742,98 ha;
b. Daya dukung pangan sudah melampaui batas dengan selisih (kekurangan) mencapai 2.030.095.735.379,97 kkal;
c. Alih fungsi lahan untuk perumahan, industri, dan jasa menyebabkan lahan pertanian yang tersisa hanya 15 persen dari luas lahan total;
d. Intensitas pembangunan yang tinggi menyebabkan kerapatan bangunan pada tingkat sedang dan tinggi mencapai 73 persen sehingga ketersediaan lahan semakin terbatas dan mahal;
e. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Bekasi merupakan yang tertinggi di antara kota-kota di sekitar Jakarta, namun perlu untuk tetap mewaspadai terjadinya penurunan indeks apabila krisis iklim melanda;
f. Kualitas lingkungan semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun dengan capaian IKLH hanya 50,70 poin dan masuk kategori "waspada";
g. Jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah yaitu mencapai luas 15.912,33 ha atau 74,69 persen;
h. Kota Bekasi mengalami persentase akses sanitasi aman dengan gap yang cukup tinggi yaitu dari 28,49 persen pada tahun 2020 menjadi 21,41 persen pada tahun 2024;
i. Ancaman bencana banjir masih besar mengingat kondisi DAS, saluran drainase, dan kondisi tanah tidak mendukung untuk menyalurkan air di saat hujan meski IRB Kota Bekasi sudah berada di angka 106,3 dan masuk kategori "sedang, akan tetapi angka tersebut masih dibawah target;
j. Indeks Ketahanan Daerah di Kota Bekasi Mengalami kenaikan dari 0,41 pada tahun 2021 menjadi 0,55 pada tahun 2023, akan tetapi angka tersebut masih kecil dibandingkan daerah hulu dalam hal ini Kota Bogor;
k. Normalisasi dan naturalisasi sungai belum dilakukan secara optimal, sehingga belum mampu mengatasi permasalahan banjir dan genangan di Kota Bekasi;

l. Penerapan infrastruktur ramah lingkungan seperti *permeable pavement* dan *bio-swales* untuk mengurangi limpasan air belum banyak dilakukan; dan
m. Potensi konflik kepemilikan lahan di Kota Bekasi masih terus terjadi berupa tumpang tindih hak atas tanah.

B. Demografi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan demografi di Kota Bekasi, antara lain:

a. Tekanan jumlah penduduk yang semakin besar hingga mencapai 2,64 juta jiwa pada tahun 2024 dengan distribusi yang belum merata;
b. Beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi melebihi 16 ribu jiwa/km^2;
c. Tren usia produktif (15-64 tahun) tahun 2025-2030 menunjukkan penurunan dan jumlah penduduk usia lanjut yang cenderung meningkat dan diprediksi mencapai 252.160 jiwa di tahun 2030;
d. Jumlah penduduk didominasi kelompok umur produktif namun belum optimal terserap dalam pasar kerja mengingat TPT masih 7,82 persen di tahun 2024; dan
e. Penduduk komuter cenderung meningkat hingga mencapai 19,2 persen di tahun 2023 dan Kota Bekasi juga menjadi salah satu tujuan komuter wilayah sekitar;
f. Kebijakan wilayah DK Jakarta yang menonaktifkan NIK warga yang tidak lagi bertempat tinggal di Jakarta menyebabkan adanya tren perpindahan warga eks Jakarta ke Kota Bekasi; dan
g. Adanya potensi ledakan jumlah penduduk Kota Bekasi sehingga perlu mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan serta ruang dan lahan untuk tempat tinggal, sarana prasarana, serta aktivitas perekonomian lainnya.

2.3.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Bekasi, antara lain:

a. LPE sebesar 5,19 persen belum mampu mengurangi tingginya ketimpangan pendapatan secara signifikan karena angkanya masih berada di 0,435 poin pada tahun 2024;
b. Tingginya TPT yang mencapai 7,82 persen di tahun 2024 menyebabkan bonus demografi belum dapat dioptimalkan;

c. Angka kemiskinan menunjukkan penurunan hingga mencapai 4,01 persen di tahun 2024, namun karena jumlah penduduk Kota Bekasi besar maka jumlah penduduk miskinnya juga banyak yaitu sekitar 129 ribu jiwa;
d. Terdapat warga miskin ekstrem sebanyak 8.000 KK; dan
e. Tingkat ketimpangan di Kota Bekasi masih tinggi, meskipun memiliki laju pertumbuhan ekonomi serta IPM yang tinggi.

B. Kesehatan untuk Semua

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesehatan untuk semua di Kota Bekasi, antara lain:

a. Masih adanya stunting sebesar 2,89 persen yang mayoritas berada di dalam keluarga perokok aktif, sanitasi yang tidak layak, lingkungan rumah yang kumuh, serta pola makan yang belum dapat dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi berimbang;
b. Adanya fenomena *aging population* dimana jumlah masyarakat lansia relatif banyak sehingga diperlukan kebijakan pro lansia.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pendidikan berkualitas yang merata di Kota Bekasi, antara lain:

a. Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan SDM Kota Bekasi paling tidak hingga ke level D3 ataupun S1 mengingat RLS masih 11,79 atau setara kelas 3 SMA;
b. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang ditunjukkan dengan unsur UPLM 4 bernilai terendah dari keseluruhan unsur pembentuk IPLM; dan
c. Infrastruktur sektor pendidikan masih perlu dioptimalkan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan serta kualitas bangunan sekolah.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan perlindungan sosial yang adaptif di Kota Bekasi, yaitu masih banyaknya masyarakat pekerja informal di Kota Bekasi yang belum mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan beragama maslahat dan berkebudayaan maju di Kota Bekasi, antara lain:

a. Pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian budaya lokal;
b. Perlu adanya kebijakan yang kuat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal di Kota Bekasi dalam posisinya sebagai kota metropolitan yang mendukung akulturasi budaya; dan
c. Perlunya optimalisasi dan penyediaan pusat seni dan budaya.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Kota Bekasi, antara lain:

a. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodasi;
b. Rata-rata perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi mencapai 35 orang per bulannya di tahun 2024;
c. Dengan iBangga sebesar 64,96 di tahun 2024 menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga masuk dalam klasifikasi "Berkembang" sehingga perlu peningkatan agar mencapai "Tangguh";
d. Kualitas keluarga terutama pada aspek kemandirian yang masih rendah dengan capaian hanya 55,62 poin di tahun 2023;
e. Pemenuhan klaster Kota Layak Anak yang mencapai 74,32 persen di tahun 2024, menurun sebanyak 19,56 poin semenjak tahun 2020 yang mencapai 93,88 persen; dan
f. Ketimpangan gender yang relatif masih tinggi dibanding kota-kota lain di sekitar Jakarta dengan IKG berada di 0,273 poin pada tahun 2024.

2.3.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing sumber daya manusia di Kota Bekasi, antara lain:

a. Rasio ketergantungan Kota Bekasi cenderung meningkat dan berada di angka 39,29 di tahun 2023; dan
b. Perlunya penguatan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal bagi investor.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Kota Bekasi, antara lain:

a. TPAK yang tinggi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja mengingat TPT masih berada di angka 7,82 persen di tahun 2024;
b. IDSD Kota Bekasi nilainya relatif tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di kawasan sekitar Jakarta sehingga persaingan antara kota-kota tersebut dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi cukup seimbang;
c. Pilar dinamisme bisnis dari IDSD masih belum menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah;
d. Perlunya meningkatkan sektor potensial (ekonomi kreatif dan digital) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi; dan
e. Pengembangan ekonomi kreatif masih memerlukan dukungan faktor transportasi dan aksesibilitas serta faktor SDM, talenta dan pendidikan karena kedua faktor ini menunjukkan penurunan.

C. Transformasi Digital

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan penerapan transformasi digital di Kota Bekasi, antara lain:

a. Belum optimalnya literasi digital masyarakat meskipun adopsi TIK sudah tinggi; dan
b. Perlunya mitigasi risiko terhadap keamanan data dan privasi sehingga perlu langkah adaptif dalam menghadapi potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi dalam implementasi transformasi digital.

D. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan integrasi ekonomi domestik dan global di Kota Bekasi, antara lain:

a. Realisasi investasi mengalami penurunan di tahun 2024 (menurun 1,72 persen sejak tahun 2022) sehingga diperlukan upaya perluasan investasi selain berbasis lahan;
b. Realisasi penyerapan PAD tidak tercapai di tahun 2024 mengingat target PAD yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun hanya tercapai sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 86 persen dari target; dan
c. Kota Bekasi raih predikat Upah Minimum Kota tertinggi di Indonesia tahun 2024 sehingga perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap investasi serta inflasi.

E. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, antara lain:

a. Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar;
b. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti polder, kolam retensi, dan tanggul mengingat Kota Bekasi memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi;
c. Belum optimalnya pemasangan fasilitas lalu lintas, penempatan petugas pengatur lalu lintas, penataan median, pelebaran simpang, dan perbaikan radius serta manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah;
d. Belum optimalnya pengelolaan air bersih, penyediaan lahan untuk pembangunan PSU, dan penyusunan *database* ketersediaan serta kebutuhan pemenuhan PSU;
e. Akses terhadap air minum perpipaan masih dibawah target Nasional;
f. Penyediaan perumahan untuk masyarakat terkendala ketersediaan lahan yang makin sulit didapatkan;
g. Belum optimalnya penanganan pengelolaan persampahan mengingat timbulan sampah yang dihasilkan cenderung meningkat tetapi kapasitas pengolahannya terbatas;
h. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir realisasi indeks penataan ruang menurun dari 57,00 menjadi 54,82
i. Estetika kota perlu peningkatan untuk mendukung kenyamanan dan keindahan kota;
j. Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW yaitu 30 persen;
k. Kemantapan jalan di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan, dikarenakan beberapa ruas jalan masih belum pada kondisi kemantapan baik;

l. Penetapan beberapa titik TOD yang berbasis LRT di Kota Bekasi perlu didukung adanya Integrasi antar angkutan publik pada area pendukungnya agar banyak daerah yang terlayani angkutan *feeder*; dan

m. Di Kota Bekasi masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni di Kota Bekasi.

F. Stabilitas Ekonomi Makro

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan stabilitas ekonomi makro di Kota Bekasi, antara lain:

a. Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi karena angka inflasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif;

b. Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; dan

c. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel; dan

d. Jumlah penduduk yang besar menyebabkan PDRB per Kapita relatif lebih rendah hanya Rp 29,40 juta (ADHK) dibandingkan dengan kota-kota di sekitar Jakarta yang lain.

2.3.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Bekasi, antara lain:

a. Kualitas RB di Kota Bekasi pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Roadmap* RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional dan peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara PD;

b. Pelayanan Publik di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, akan tetapi realisasi masih dibawah target;

c. Perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengingat nilai SAKIP berada pada angka 67,33 di tahun 2024; dan

d. Meskipun 94 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan "Sangat Baik" dan "Baik", namun masih terdapat 2 unit pelayanan memiliki mutu "Kurang Baik".

2.3.2 ISU SESUAI KONTEKS

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Terdapat beberapa isu global yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti demografi global, geopolitik dan ekonomi, krisis air pangan dan energi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi.

Gambar 2.81 Isu Global

Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Secara umum, **ketegangan geopolitik** yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara di Timur Tengah, menyebabkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap perekonomian global. Negara-negara yang terlibat dalam ketegangan politik ini tidak hanya memiliki kekuatan militer yang besar, tetapi juga memiliki pengaruh dikarenakan kepemilikan mereka terhadap sumber daya alam seperti minyak bumi, yang menjadi faktor penting dalam perekonomian global. Menurut data dari Dana Moneter Internasional (IMF), setiap kenaikan inflasi minyak global sebesar 10 persen rata-rata akan berdampak pada kenaikan inflasi domestik sekitar 0,4 persen dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global, terutama dalam hal harga

minyak, memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Ketegangan ini tidak hanya berpotensi mengganggu kondisi perekonomian, tetapi juga berpotensi berdampak pada kondisi keamanan. Provinsi Jawa Barat, terlebih Bekasi, sebagai daerah dengan aktivitas perekonomian yang tinggi, juga berpotensi terdampak situasi ini.

Situasi ekonomi global juga menunjukkan adanya **pelemahan ekonomi China** yang berpotensi mempengaruhi pasar komoditas secara signifikan. China yang selama ini menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dikatakan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didorong oleh langkah-langkah kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang lebih keras terhadap China dibandingkan sebelumnya. Di balik kondisi tersebut, Indonesia perlu mewaspadai adanya dampak negatif yang mungkin terjadi. Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi, memiliki koridor industri yang banyak didukung oleh investor China, sehingga ketika ekonomi China menurun, Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat perlu menguatkan industri lokal, seperti UMKM, agar dapat bertahan, atau bahkan bertumbuh, dalam kondisi tersebut.

Terjadinya krisis iklim yang sudah dirasakan di berbagai belahan dunia akan tetap berlangsung seiring dengan tuntutan kestabilan ekonomi. **Dampak perubahan iklim global** tersebut juga sudah dirasakan oleh Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi yang diindikasikan dengan kejadian bencana yang makin meningkat dan kekeringan serta krisis air di sebagian wilayah. Fenomena krisis yang sudah terjadi memerlukan perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan lingkungan sebagai variabel yang penting dan setara dengan variabel ekonomi serta sosial. Krisis air, energi, dan pangan akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dunia yang juga meningkat. Indonesia yang dianugerahi berbagai potensi sumber daya alam tentunya akan menjadi incaran untuk memasok kebutuhan dunia tersebut. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah yang luas dan merupakan salah satu sumber pangan Nasional. Melihat kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung menurun sementara kebutuhan semakin meningkat diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan akan ketersediaan sumber daya alam tersebut.

Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat juga berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi yang perlu diwaspadai. Kebijakan ini berupa penaikan tarif impor yang tinggi terhadap sejumlah besar barang yang berasal dari beberapa negara seperti China, Eropa, dan Kanada. Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia setelah

China. Komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Amerika Serikat meliputi produk-produk seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak hewan atau nabati, alas kaki, serta produk hewan air. Dengan peningkatan tarif impor, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di Amerika Serikat sehingga bisa mengurangi volume ekspor Indonesia ke sana. Terlebih, Amerika Serikat menjadi salah satu mitra dagang andalan bagi ekspor Indonesia. Provinsi Jawa Barat serta Kota Bekasi juga perlu mewaspadai kondisi ini ke depannya dengan lebih berupaya untuk menguatkan perdagangan domestik.

Isu lainnya yang perlu diwaspadai adalah adanya kondisi perubahan **demografi global** yang akan mempengaruhi kehidupan di masa depan. Seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat namun laju pertumbuhannya melambat membawa konsekuensi akan pentingnya ketahanan pangan, air, dan energi untuk memenuhi kebutuhan yang juga makin meningkat. Di sisi lain, mobilitas penduduk dunia akan semakin mudah menciptakan dunia tanpa batas, mendorong pertukaran ideologi, pengetahuan, dan budaya. Selain itu, meningkatnya jumlah lansia akan berdampak pada penyediaan layanan sosial. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi juga Jawa Barat dan Kota Bekasi. Sementara itu, disrupsi teknologi terus mempercepat perubahan, mengubah peran manusia secara signifikan tanpa mengenal batas wilayah. Baik di perkotaan maupun perdesaan, dampaknya semakin terasa. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi keharusan, tidak hanya bagi sektor swasta, tetapi juga sektor publik dalam memberikan layanan yang cepat dan efisien bagi masyarakat.

2.3.2.2 ISU NASIONAL

Beberapa isu Nasional diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti perpindahan IKN, ekonomi hijau dan biru, iklim dan ketahanan bencana, konektivitas dan infrastruktur, bonus demografi, serta desentralisasi dan otonomi daerah.

Gambar 2.82 Isu Nasional

Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Tingkat **produktivitas** Indonesia tergolong masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau. Dampak dari produktivitas yang rendah terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Di Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi sebagai pusat industri, produktivitas yang rendah dapat berdampak pada daya saing ekonomi daerah.

Di sisi lain, **kualitas SDM** di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan nilai PDB per pekerja mencapai US$28.600, jauh di bawah Amerika Serikat (US$149.100) dan rata-rata ASEAN (US$60.200). Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, sebagian besar penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/SMA). Kondisi ini berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Untuk mencapai pembangunan yang optimal,

Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dampak negatif dari kondisi ini juga dapat terjadi di Provinsi Jawa Barat ataupun Kota Bekasi, sebagai wilayah dengan pusat industri dan perdagangan, rendahnya kualitas SDM dapat mempengaruhi daya saing tenaga kerja lokal. Diperlukan investasi besar dalam pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, serta penguatan kerja sama antara dunia industri dan pendidikan. Dengan demikian, Bekasi dan Jawa Barat dapat mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Terdapat potensi adanya **pergeseran struktur kelas masyarakat** di Indonesia, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena kondisi ekonomi makro di Indonesia yang kurang baik dan menimbulkan kondisi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan 2024, pada Agustus 2024, tercatat sebanyak 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat yang kemudian berimplikasi pada penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha. Industri-industri yang terdapat di Provinsi Jawa Barat serta Kota Bekasi, yang secara umum juga bergantung pada aktivitas ekspor impor, berpotensi menghadapi tekanan akibat biaya operasional yang meningkat namun permintaan yang melemah, sehingga juga menimbulkan risiko peningkatan masyarakat rentan miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan akan mencapai 147,71 juta jiwa, yang menimbulkan tantangan pembangunan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya alam seperti pangan, energi, air, dan lahan. **Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif** semakin menekan pentingnya perlindungan sosial, akses kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang besar agar kesejahteraan dapat terjaga dan pembangunan berkelanjutan tetap tercapai. Provinsi Jawa Barat, serta Kota Bekasi, yang berlokasi dekat dengan megapolitan Jakarta, berpotensi menjadi wilayah pusat industri dan urbanisasi, sehingga juga dapat menghadapi tantangan ini. Diperlukan strategi pembangunan

yang efektif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan pada ancaman tiga **krisis lingkungan** (*Triple Planetary Crisis)*, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sebanyak 50-75 persen populasi global berisiko terdampak kondisi iklim ekstrem pada tahun 2100, dengan kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun. Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi, yang merupakan isu strategis dan memerlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mempercepat pembangunan Nasional, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan investasi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022 dan stagnan di 2023, menunjukkan tantangan dalam upaya antikorupsi. Selain itu, tata kelola data menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang akurat dan berkelanjutan. Namun, keamanan siber dan perlindungan data masih menghadapi risiko peretasan serta potensi pelanggaran privasi, yang dapat mengancam stabilitas dan efektivitas pengelolaan data Nasional.

2.3.2.3 ISU REGIONAL JAWA BARAT

Terdapat beberapa isu regional yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan kawasan aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta serta pengembangan koridor industri, penguatan layanan infrastruktur dasar, serta permasalahan kemiskinan dan ketimpangan.

Gambar 2.83 Isu Regional Jawa Barat

Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Penguatan **ekosistem ekonomi kreatif** berbasis kekayaan intelektual dilakukan melalui strategi seperti pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi kekayaan intelektual; penguatan data serta integrasinya; perluasan pasar domestik dan global; serta dukungan terhadap produk kreatif lokal. Pengembangan ekonomi ini sejalan dengan adanya potensi besar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Pengembangan ekonomi ini juga akan berpengaruh terhadap Kota Bekasi terutama ekonomi kreatif dan digital. Hal ini tidak lepas dari Kota Bekasi yang minim dengan kekayaan sumber daya alam, sehingga sektor kreatif dan digital menjadi peluang utama dalam pembangunan ekonominya. Dalam hal ini, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi utama.

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan membawa pengaruh signifikan terhadap orientasi bisnis dan investasi yang mengarah ke Provinsi Jawa Barat. Adanya rencana pengembangan **Wilayah Metropolitan Jakarta** pada arah pembangunan wilayah Pulau Jawa akan memberikan pengaruh pada perkembangan Provinsi Jawa Barat. Dengan keterbatasan pengembangan wilayah di Jakarta, Provinsi Jawa Barat yang terkoneksi langsung dengan berbagai infrastrukturnya akan menjadi pilihan menarik bagi pengembangan bisnis dan investasi. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap Kota Bekasi mengingat konektivitas dengan Jakarta semakin membaik.

Di samping itu, adanya rencana **pengembangan koridor industri** prioritas Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban pada arah pembangunan wilayah Jawa dalam perencanaan Nasional jangka menengah akan berdampak langsung pada perkembangan Jawa Barat, terlebih Kota Bekasi. Hal ini akan mendorong pengembangan aksesibilitas yang baik sebagai penguatan konektivitas antar-wilayah sehingga akan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah di Kota Bekasi.

Penguatan **layanan infrastruktur dasar** di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini lebih berorientasi di wilayah utara dan tengah. Kondisi demikian menyebabkan konektivitas di wilayah selatan belum optimal terkoneksi dengan seluruh wilayah. Hal ini diperparah dengan penyediaan infrastruktur dasar yang juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Kesenjangan pembangunan ini tentunya berpengaruh pada Kota Bekasi yang posisinya relatif berada di wilayah utara.

Permasalahan **kemiskinan dan ketimpangan** masih menjadi tantangan yang signifikan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial masih menjadi persoalan yang perlu untuk diselesaikan. Sama halnya dengan Kota Bekasi, sebagai salah satu pusat penggerak ekonomi di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi lekat dengan arus urbanisasi yang tinggi sehingga menjadi rentan dengan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3.3 ISU STRATEGIS KOTA BEKASI

Berdasarkan permasalahan, isu sesuai konteks, dan dengan memperhatikan potensi daerah, maka rumusan isu strategis Kota Bekasi untuk 5 tahun ke depan adalah seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.84 Isu Strategis Kota Bekasi

Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

1. Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan

Peran Jakarta sebagai kota global membawa pengaruh besar terhadap Kota Bekasi. Aksesibilitas yang memadai dengan Jakarta menjadikan Kota Bekasi menarik bagi para komuter dan pendatang serta menjadi tempat yang menarik untuk tinggal, bekerja dan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi akan semakin padat. Kota Bekasi merupakan bagian pengembangan wilayah Jabodetabekpunjur, sehingga pengembangan wilayah perlu terintegrasi dari sisi transportasi maupun penggunaan lahan. Kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong integrasi pembangunan mengingat berbagai rencana pembangunan infrastruktur berskala Nasional yang berlokasi atau melintasi Kota Bekasi.

Perkembangan pembangunan di Kota Bekasi yang pesat berimplikasi pada kebutuhan lahan yang makin meningkat. Dengan ketersediaannya lahan yang semakin terbatas maka pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang harus dioptimalkan. Tidak hanya itu, sebagai kota metropolitan, Kota Bekasi telah transformasi menjadi mega urban sehingga mendorong pengelolaan kota harus menggunakan pendekatan *smart city*. Berbagai infrastruktur pendukung sangat diperlukan dan tentunya harus ramah lingkungan, mengingat Kota Bekasi sangat rentan dengan berbagai ancaman bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem. Upaya-upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk menjaga *trade-off* jasa

ekosistem, karena pada dasarnya kota juga membutuhkan jasa dari ekosistem penyedia, pengatur, sosial maupun biodiversitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Daya Saing SDM

Bonus demografi yang dimiliki Kota Bekasi saat ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Keberadaan SDM usia produktif yang melimpah menjadi peluang strategis bagi kota ini dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Namun, jumlah SDM yang besar harus disertai dengan peningkatan kualitas, terutama dalam hal literasi yang masih menjadi tantangan utama. Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Bekasi membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki daya saing tinggi. Jika literasi rendah, maka pemahaman, keterampilan berpikir kritis, serta kualitas hidup masyarakat di masa depan bisa terpengaruh.

Peningkatan kualitas SDM Kota Bekasi juga harus didukung dengan pendidikan karakter dan budaya. Pendidikan ini berperan dalam membentuk moral, etika, serta identitas budaya yang kuat, sehingga menghasilkan masyarakat yang berintegritas dan memiliki kesadaran sosial tinggi untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya kota. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi harus dapat memastikan bahwa akses terhadap kesehatan dan lapangan kerja juga perlu ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbuka Kota Bekasi masih tinggi.

3. Ekonomi Kreatif dan Digital

Kota Bekasi tidak memiliki kekayaan alam melimpah, sehingga kota ini cukup banyak mengandalkan perkembangan kesejahteraan wilayahnya dari sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan konstruksi sebagai mesin penggerak ekonominya. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan era ekonomi digital merupakan sebuah peluang yang harus dioptimalkan. Dengan bertambahnya penduduk usia produktif, Kota Bekasi tentu juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang juga mengandalkan inovasi dan kreativitas SDM, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai sektor baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota ke depannya.

Bekasi Creative Hub (BCH), yang telah ada, perlu dioptimalkan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri kreatif agar manfaatnya semakin luas. Dukungan terhadap infrastruktur transportasi dan aksesibilitas menjadi faktor penting untuk menunjang distribusi produk kreatif dan meningkatkan daya saing pelaku industri di Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan keterampilan bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri kreatif sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital dan kreatif yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Kota Bekasi dapat menjadikan ekonomi digital dan kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

4. Iklim Investasi yang Kompetitif

Jumlah penduduk Kota Bekasi yang cukup besar merupakan sebuah potensi bagi peningkatan daya tarik investasi, terutama pada sektor jasa dan perdagangan. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, kebutuhan terhadap sektor-sektor seperti pusat perbelanjaan, kuliner, properti, serta layanan kesehatan dan pendidikan akan semakin meningkat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol dan transportasi umum, dapat berpotensi memperkuat daya tarik Bekasi sebagai lokasi strategis bagi investor. Jika didukung dengan perizinan yang mudah dan kebijakan pro-investasi, Kota Bekasi berpotensi menjadi pusat ekonomi regional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Kondisi investasi yang berkembang dengan baik perlu untuk dioptimalkan ke depannya. Persaingan investasi antara Kota Bekasi dengan daerah lain perlu untuk menjadi fokus perhatian agar investor dapat nyaman melakukan investasi di wilayah ini. Selain itu, perlu untuk dapat menguatkan kebijakan agar investor yang melakukan kerja sama di Kota Bekasi bersedia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal agar kondisi ekonomi masyarakat dapat meningkat.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Modern

Penduduk Kota Bekasi cenderung meningkat dengan karakter heterogen serta berciri urban yang kuat. Perkembangan kota dan penduduknya yang makin kompleks mengharuskan pengelolaan kota yang prima. Pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saja namun juga dituntut menghadirkan kemudahan,

kecepatan, dan jangkauan yang lebih merata. Inovasi dan teknologi harus menjadi perangkat utama dalam melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pesatnya pembangunan yang terjadi baik dari arus perkembangan dalam wilayah maupun dari luar wilayah, mengharuskan kondisi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

Perumusan isu strategis Kota Bekasi seperti yang diuraikan di atas juga telah mempertimbangkan rekomendasi isu dari KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rekomendasi isu berdasarkan KLHS, antara lain:

1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11);
2. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia (TPB 3);
3. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6);
4. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9);
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB 8);
6. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13); dan
7. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).

Dari rekomendasi yang dihasilkan terdapat korelasi dengan isu strategis Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan. Korelasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.85 Keterkaitan Isu Strategis Kota Bekasi dengan Rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Sumber: Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Tabel 2.53 Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BEKASI
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kebijakan wilayah DK Jakarta yang menonaktifkan NIK warga yang tidak lagi bertempat tinggal di Jakarta menyebabkan adanya tren perpindahan warga eks Jakarta ke Kota Bekasi.	Dampak Perubahan Iklim Global	Krisis Lingkungan	Aglomerasi WM Jakarta	Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan
Adanya potensi ledakan jumlah penduduk Kota Bekasi sehingga perlu mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan serta ruang dan lahan untuk tempat tinggal, sarana prasarana, serta aktivitas perekonomian lainnya.				
Daya dukung dan daya tampung air dan pangan sudah melewati ambang batas				
Berkurangnya lahan pertanian dikarenakan konversi lahan ke non pertanian			Pengembangan Koridor Industri	
Ketersediaan lahan yang terbatas				
Infrastruktur sektor pendidikan masih perlu dioptimalkan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan serta kualitas bangunan sekolah.			Layanan Infrastruktur Dasar	
Pemenuhan klaster Kota Layak Anak yang cenderung menurun sejak tahun 2020.				
Krisis iklim berpotensi mengancam ketahanan pangan				
Rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi aman cenderung menurun				
Kualitas lingkungan menurun dalam kurun waktu 5 tahun				

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BEKASI
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Performa jasa ekosistem pengaturan iklim pada kategori sangat rendah				
Ancaman bencana banjir masih berpotensi tinggi				
Ketahanan Daerah di Kota Bekasi cenderung masih kecil dibandingkan dengan daerah hulu yaitu Kota Bogor				
Normalisasi dan naturalisasi sungai belum dilakukan secara optimal				
perlu dilakukan penerapan infrastruktur ramah lingkungan				
Konflik lahan di Kota Bekasi masih berpotensi terus terjadi				
Perlu keselarasan *roadmaps* antara RB di Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional				
Peningkatan jumlah komuter dan Kota Bekasi sekaligus sebagai tujuan komuter daerah sekitarnya				
RLS masih setara kelas 3 SMA.	Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat	Kualitas SDM Rendah	Kemiskinan dan Ketimpangan	Daya Saing SDM
Tekanan Jumlah penduduk yang semakin besar				
Perlunya penguatan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal bagi investor.		Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif		
Adanya fenomena *aging population* dimana jumlah masyarakat lansia relatif banyak dibandingkan usia produktif.				

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BEKASI
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perlu ada kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal				
Tingginya TPT di tahun 2024 menyebabkan bonus demografi belum dapat dioptimalkan.		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		
Terdapat warga miskin ekstrem.				
Tingkat pengangguran di Kota Bekasi termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024.				
Tingkat ketimpangan di Kota Bekasi masih tinggi.				
Masih banyaknya masyarakat pekerja informal di Kota Bekasi yang belum mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan.				
Masih adanya permasalahan stunting.				
Belum optimalnya literasi digital masyarakat meskipun adopsi TIK sudah tinggi.			Ekosistem Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif dan Digital
Perlunya mitigasi risiko terhadap keamanan data dan privasi, serta langkah adaptif dalam menghadapi potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi dalam implementasi transformasi digital.				
Perlunya meningkatkan sektor potensial (ekonomi kreatif dan digital) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru selain sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi.				
Pengembangan ekonomi kreatif masih memerlukan dukungan faktor transportasi dan aksesibilitas serta faktor SDM, talenta dan pendidikan karena kedua faktor ini menunjukkan penurunan.				

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BEKASI
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengaruh budaya luar yang masif serta gaya hidup urban dapat menggerus upaya-upaya pelestarian budaya lokal.				
Perlu adanya kebijakan yang kuat untuk dapat mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal di Kota Bekasi dalam posisinya sebagai kota metropolitan yang mendukung akulturasi budaya.				
Perlunya optimalisasi dan penyediaan pusat seni dan budaya.				
Walaupun nilai realisasi investasi tahun 2024 mengalami kenaikan, dikarenakan ada investasi terkait pembangunan SPAM jatiluhur 1, namun di tahun 2025 nilai realisasi investasi akan sulit untuk meningkat dikarenakan faktor lahan yang terbatas, UMK Kota Bekasi yang tinggi, dan pembangunan pabrik baru di daerah Subang dan Purwakarta yang akan meningkatkan nilai investasi di daerah tersebut. Pada triwulan 2, realisasi investasi Kota Bekasi adalah peringkat 7 di Provinsi Jawa Barat, yang artinya mengalami penurunan dari tahun 2024 yakni peringkat 4 se-Provinsi Jawa Barat	Ketegangan Geopolitik	Geopolitik Global		Iklim Investasi yang Kompetitif
IDSD Kota Bekasi nilainya relatif tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di kawasan sekitar Jakarta sehingga persaingan antara kota-kota tersebut dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi cukup seimbang.				
Pilar dinamisme bisnis dari IDSD masih terendah padahal menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah.				

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BEKASI
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi karena angka inflasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif.				
LPE yang cukup tinggi belum mampu mengurangi tingginya ketimpangan pendapatan secara signifikan.	Pelemahan Ekonomi China			
Belum optimalnya langkah preventif guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta peningkatan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.		Produktivitas Rendah		
Kota Bekasi raih predikat UMK tertinggi di Indonesia tahun 2024, yang perlu diwaspadai terhadap pengaruhnya dengan investasi serta inflasi.				
TPAK yang tinggi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja.				
Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dan kerap tidak terakomodir.				
Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Tata Kelola Pemerintahan yang Modern
Pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi masih dibawah target				

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI

3.1.1 RPJPD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2045

Rangkaian kinerja visi yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang berjumlah 5 (lima) telah dilakukan penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Hal yang sama juga dilakukan untuk Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi ini merupakan gambaran kondisi

terwujudnya Visi **"Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan"** pada akhir periode rencana.

Secara ringkas, makna yang terkandung pada visi di atas adalah maju yang artinya Kota Bekasi diharapkan menjadi mega urban yang maju dengan perekonomian berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Berdaya saing artinya Kota Bekasi dapat memperkuat dan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Berkelanjutan dimaknai bahwa Kota Bekasi berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang dengan pertumbuhan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan ihsan dimaknai sebagai perilaku masyarakat yang patuh pada peraturan, disiplin, tertib, berbudaya, dan bertoleransi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Gambar 3.2 Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Rangkaian kerja misi merupakan upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja visi yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan rangkaian kerja misi dimaksud, 2 (dua) hal yang harus diperhatikan adalah Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dan

indikasi intervensi yang berkaitan dengan Kota Bekasi dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Kedua rujukan rangkaian kerja tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3 Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Gambar 3.4 Indikasi Intervensi dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2025 (diolah)

3.1.2 VISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **"Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"**

Gambar 3.5 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

KOTA BEKASI

NYAMAN SEJAHTERA

Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa "Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera". Kata "yang Semakin" menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata "Nyaman" menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan berbudayanya di Kota Bekasi.

Kata "Sejahtera" menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup "sandang, pangan, dan papan" serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

3.1.3 MISI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.6 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

1. **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai**

   Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

2. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan**

   Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

3. **Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi**

   Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi. serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

4. **Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat**

   Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya

yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

5. **Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren**

   Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

3.1.4 TUJUAN DAN SASARAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- **Tujuan 1: Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari**

  Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi sebagai kota metropolitan diharapkan dapat menjadi kota yang nyaman bagi masyarakatnya untuk tinggal dan beraktivitas dengan estetika (keindahan), modernitas (infrastruktur dan teknologi), dan kelestarian (keberlanjutan lingkungan). Sasaran pada tujuan ini, antara lain:

  - **Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern**, yang berarti bahwa Kota Bekasi diharapkan memiliki wajah kota yang indah, tertata rapi, dan serasi, didukung

oleh sarana dan prasarana yang canggih dan fungsional mencakup penataan taman, jalan, trotoar, dan elemen visual lainnya, sistem transportasi, drainase, serta fasilitas umum

- **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari**, yang berarti bahwa Kota Bekasi diharapkan memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dengan pengendalian pencemaran, pelestarian ekosistem, peningkatan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah yang efektif
- **Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**, yang berarti bahwa Kota Bekasi diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi, bertahan, serta pulih dengan cepat dari dampak negatif bencana alam maupun perubahan iklim melalui sistem peringatan dini yang andal, penguatan infrastruktur terhadap risiko bencana, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi

- **Tujuan 2: Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis**

  Tujuan ini mengandung arti bahwa SDM Kota Bekasi sebagai bagian kawasan aglomerasi diharapkan memiliki budaya yang maju, adaptif, kompetitif, toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta kearifan lokal. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:

  - **Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata**, yang berarti bahwa masyarakat Kota Bekasi diharapkan memiliki akses yang adil terhadap layanan pendidikan yang bermutu mencakup pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pengajar yang kompeten, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta dukungan teknologi dan lingkungan belajar yang kondusif
  - **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, yang berarti bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Bekasi diharapkan optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, edukasi mengenai pola hidup sehat, serta penguatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit
  - **Meningkatnya ketangguhan keluarga**, yang berarti bahwa setiap keluarga di Kota Bekasi diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi, mengelola, dan bangkit dari berbagai tantangan kehidupan memalui penguatan keharmonisan hubungan

antaranggota, nilai-nilai positif, dukungan emosional, serta kecakapan dalam pengelolaan sumber daya

- **Meningkatnya kesetaraan gender**, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan di Kota Bekasi diharapkan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan perlindungan hukum melalui peningkatan keadilan, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak tanpa diskriminasi
- **Meningkatnya pemenuhan hak anak**, yang berarti bahwa setiap anak di Kota Bekasi diharapkan mendapatkan haknya secara penuh, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung

- **Tujuan 3: Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif**

  Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi sebagai kota metropolitan diharapkan memiliki struktur ekonomi yang lebih mengandalkan potensi SDM sehingga sektor jasa, ekonomi kreatif dan digital akan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi baru. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:

  - **Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa, dan industri**, yang berarti bahwa Ekonomi Kota Bekasi diharapkan berfokus pada pengembangan sektor industri sebagai penghasil barang dan jasa serta perdagangan sebagai penghubung distribusi produk ke pasar yang lebih luas melalui dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang kondusif
  - **Meningkatnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital**, yang berarti bahwa Diversifikasi ekonomi Kota Bekasi diharapkan membawa kemajuan kota dalam memanfaatkan potensi budaya, seni, dan teknologi untuk meningkatkan daya tarik dan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital
  - **Meningkatnya ketahanan pangan kota**, yang berarti bahwa Ketahanan pangan Kota Bekas diharapkan terpenuhi secara cukup, aman, dan berkelanjutan melalui ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan dengan pengembangan sistem produksi pangan lokal (urban farming), pengelolaan distribusi yang efisien, serta peningkatan kualitas dan diversifikasi pangan

- **Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja**, yang berarti bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Bekasi diharapkan menunjukkan peningkatan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan ketrampilan tenaga kerja, dan peningkatan pendidikan vokasi
- **Menurunnya tingkat kemiskinan,** yang berarti bahwa kemiskinan di Kota Bekasi menunjukkan penurunan melalui berbagai intervensi yang komprehensif terutama dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif

▪ **Tujuan 4: Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**

Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi sebagai kota yang menjadi tempat tinggal kaum urban diharapkan memiliki daya saing investasi yang kompetitif dengan berbagai fasilitas dan keamanannya sehingga investor merasa nyaman untuk berinvestasi. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:

- **Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif**, yang berarti bahwa lingkungan usaha di Kota Bekasi diharapkan kondusif, transparan, dan menarik bagi para investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, serta dukungan kebijakan yang pro-bisnis yang dapat mempercepat proses investasi dan meminimalkan risiko
- **Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat**, yang berarti bahwa kondisi sosial Kota Bekasi diharapkan harmonis di mana setiap warga merasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari melalui penerapan aturan dan norma yang jelas, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
- **Meningkatnya kerja sama kota yang efektif**, yang berarti bahwa sinergi dan koordinasi Kota Bekasi diharapkan berjalan baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga lainnya, untuk mencapai tujuan pembangunan bersama secara efisien dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan kota seperti kemacetan, lingkungan, dan pelayanan publik

- **Tujuan 5: Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif**

  Tujuan ini mengandung arti bahwa Kota Bekasi diharapkan menjadi kota yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui pembaruan, terobosan, dan kreativitas dalam pemberian pelayanan publik. Sasaran pada tujuan ini, antara lain:

  - **Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima**, yang berarti bahwa Layanan publik Kota Bekasi diharapkan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui efisien dan berorientasi pada kepuasan warga, dilakukan dengan standar yang tinggi, dan menggunakan teknologi informasi secara optimal
  - **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota**, yang berarti bahwa akuntabilitas kinerja Kota Bekasi diharapkan meningkat melalui penguatan sistem pelaporan yang terbuka, evaluasi kinerja yang terukur, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif agar pembangunan kota dapat berjalan lebih tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat
  - **Meningkatnya Kota Bekasi cerdas**, yang berarti bahwa transformasi Kota Bekasi diharapkan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal melalui sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi layanan, dan partisipasi warga yang aktif

Gambar 3.7 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

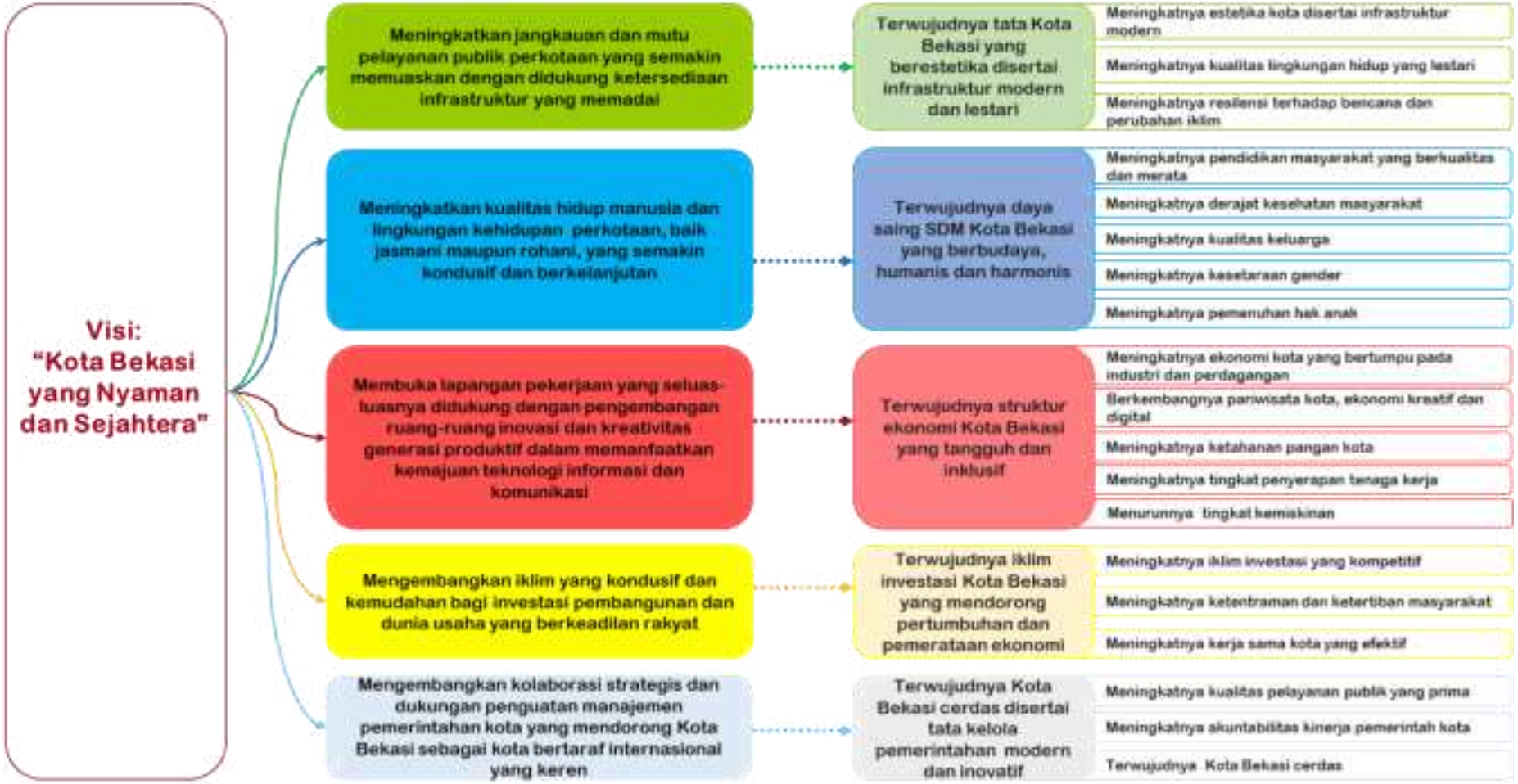

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" **Misi:** **1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai** **2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan** **3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif**	Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5
		Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Pilar Infrastruktur (IDSD)	Nilai	4,81	4,83	4,85	4,87	4,89	4,91	4,93
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,88	1,31	1,77	2,32	3,19	3,80
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,58	111,0	110,5	110,0	109,5	109,0	108,5
	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,55	83,80	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15
		Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun	Nilai	84,62	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,14	76,16	76,26	76,39	76,52	76,66	76,79
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,20	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64
		Meningkatnya ketangguhan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742,34	742.35	742.36	742.37	742.38	742.39	742.40
	Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi		PDRB Per Kapita	Juta Rp	48,92	48.98 - 49.34	54.94	56,89 – 58,64	60,53 - 63,33	64,5 - 68,65	68,94 - 75,15

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi **4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat** **5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren**	yang tangguh dan inklusif	Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri	Proporsi PDRB Perdagangan	Persen	20,70	20,36	20,01	19,67	19,32	18,98	18,63
			Proporsi PDRB Industri Pengolahan	Persen	33,05	33,15	32,85	32,54	32,23	31,9	31,55
		Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Persen	4,21	4,38	4,47	4,57	4,67	4,78	4,90
		Meningkatnya ketahanan pangan kota	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	93,90	94,00	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
		Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,82	7.06 - 7.68	7.32	6.77 - 7.4	6.74 - 7.36	6.72 - 7.34	6.67 - 7.3
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3.34 - 3.69	3.55	3.12 - 3.40	2.98 - 3.27	2.83 - 3.11	2.73 - 3.02
	Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5.14 - 5.50	6.38	5.70 - 6.20	5.84 - 6.34	5.98 - 6.48	6.56 - 7.06
			Rasio Gini	Poin	0,435	0.401 - 0.408	0.414	0.391 - 0.414	0.390 - 0.413	0.389 - 0.412	0.388 - 0.411
			Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,18	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Pilar Dinamisme Bisnis (IDSD)	Nilai	4,63	4,35	4,40	4,45	4,50	4,60	4,65
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	N/A	6.47	6.48	6.49	6.51	6.53	6.55
		Meningkatnya kerja sama kota yang efektif	Efektivitas Kerja Sama Kota	Persen	0	20	40	60	80	100	100

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83.46	84	84.5	85	85.5	86	86.5
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	88,02	88,10	88,15	88,25	88,50	88,75	89,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	67,33	67,83	68,33	68,83	69,33	69,83	70,33
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	73,329 (2023)	74,872	75,072	75,272	75,717	76,406	79,782
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,17	3,0	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
			Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	Poin	2,796	2,80	3,01	3,05	3,15	3,25	3,25
		Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	Indeks Kota Cerdas	Nilai	3,60	3,66	3,72	3,78	3,84	3,90	3,93

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI

3.2.1 STRATEGI KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Gambar 3.8 Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Lokus pengembangan Kota Bekasi berdasarkan RTRW Tahun 2024-2044, terdiri dari:

1. Pengembangan struktur ruang, terdiri dari:
   a. Perwujudan pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi daerah sebagai Pusat Kegiatan Nasional, dengan strategi:
      1) menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
      2) mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara dan Bagian Tengah;
      3) mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan;
      4) mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;

5) mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya; dan
6) menetapkan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.

b. Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat dan sungai yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek, dengan strategi:
1) meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol, *light rail tran* (LRT),
2) *bus rapid transit* (BRT) dan *double-double track*;
3) mengembangkan jaringan transportasi umum masal yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi massal Jabodetabek;
4) memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan jalan;
5) membuka meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;
6) mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;
7) menyediakan angkutan umum masal berbasis rel atau jalan raya sesuai rencana berdasarkan kewenangan pemerintah;
8) menata dan mengembangkan terminal dan subterminal yang ada di Daerah;
9) mengalihkan beban pergerakan di wilayah pusat kota ke subpusat pelayanan kota lainnya; dan
10) mengembangkan sistem transportasi sungai termasuk sarana dan prasarana pendukung.

c. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi, dengan strategi:
1) meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air bersih;
2) meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih;
3) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai (DAS);
4) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; dan

5) meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi.

d. Perwujudan pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, dengan strategi:
   1) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal melalui proses *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* dan *Repair* (5R);
   2) mengembangkan teknologi pengolahan sampah;
   3) mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan
   4) mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

e. Perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh daerah dan regional, dengan strategi:
   1) membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ dan polder sebagai daerah penampungan air;
   2) menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan pemanfaatan yang berhubungan dengan tata air dan penampungan air;
   3) menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kota; dan
   4) pembangunan polder sebagian tempat penampungan air.

f. Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu, dengan strategi:
   1) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas dan telekomunikasi;
   2) menata dan mengembangkan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
   3) mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas;
   4) mengembangkan sistem jaringan energi yang bersumber dari energi terbarukan; dan
   5) pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota.

2. Pengembangan pola ruang, terdiri dari:

a. Perwujudan pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal, dengan strategi:
   1) menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan setempat;

2) menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung; dan
3) merehabilitasi dan mengonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan dan ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup;
4) mengembangkan kerja sama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi yang mencakup SDA, SDB bernilai sejarah.

b. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 20 persen untuk RTH Publik dan 10 persen untuk RTH Privat dari luas wilayah daerah, dengan strategi:
1) memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
2) mengembangkan RTH di sekeliling zona TPST Sumur Batu;
3) mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;
4) revitalisasi RTH;
5) penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu;
6) meningkatkan jumlah RTH privat dan publik melalui penetapan koefisien dasar hijau minimal pada setiap kavling lahan;
7) menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat dengan menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan; dan
8) penyediaan RTH melalui pola kerja sama.

c. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, dengan strategi:
1) mengembangkan kawasan peruntukan perumahan;
2) mengarahkan kawasan peruntukan perumahan dengan pola-pola hunian vertikal;
3) menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4) meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun dan komersial untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses kawasan;
5) mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan;

6) mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan
7) mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat *Sewage Treatment Plant* (STP) komunal, mengelola sampah komunal secara *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* dan *Repair* (5R), dan menyediakan RTH paling sedikit 10 persen.

d. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan di wilayah selatan daerah, dengan strategi:
1) mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke daerah selatan dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
2) mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
3) mengembangkan kegiatan industri kreatif.

e. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal, dengan strategi:
1) mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
2) mengendalikan dan menertibkan kawasan perdagangan dan jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah ke jalan yang mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;
3) membatasi pengembangan kegiatan perdagangan secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
4) mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan super blok atau *mix-used* di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut;
5) merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan;
6) mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima;
7) mengonsentrasikan kegiatan jasa pada lokasi yang sudah berkembang; dan

8) membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah.

f. Perwujudan pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya religi dan prasarana dan sarana pendukungnya, dengan strategi:
   - pengembangan kawasan pariwisata ke dalam dua wilayah yaitu Daerah Utara dan Daerah Selatan;
   - pembagian sub pengembangan pariwisata menurut wilayah yang membentuk tiga karakter atraksi utama yaitu wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata budaya religi;
   - pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
   - membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
   - meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
   - meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
   - menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah; dan
   - meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat.

g. Perwujudan pengembangan kawasan pertambangan gas di Kecamatan Jatisampurna dan wilayah lainnya dengan strategi pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertambangan.

3. Pengembangan kawasan strategis kota, terdiri dari perwujudan penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu, dengan strategi:
   a) penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
   b) pengelolaan dan pengendalian Kawasan strategis melalui kerja sama pemerintah dan swasta.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
1.	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai	▪ Perluasan daya dukung lahan di tengah arus pembangunan ▪ Peningkatan daya dukung air untuk memenuhi kebutuhan kota yang cenderung meningkat ▪ Evaluasi kebijakan dan penataan ulang sistem penanganan kawasan rawan bencana banjir ▪ Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri, nyaman dan berestetika ▪ Peningkatan penanganan sampah berkelanjutan	
2.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan	▪ Penerapan dan penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota ▪ Peningkatan Infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat yang layak ▪ Peningkatan layanan transportasi perkotaan yang terintegrasi dan ramah lingkungan ▪ Peningkatan penanganan kemacetan di berbagai simpul kemacetan ▪ Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi	
3.	Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	▪ Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (menaikkan status 5 RSUD) ▪ Percepatan penanganan prevalensi gizi kurang dengan melibatkan peran aktif perempuan (PKK) dan kelembagaan masyarakat setempat ▪ Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan yang berkelanjutan (penambahan ruang belajar SD, SMP dan bahkan SMA) ▪ Peningkatan dan penyelarasan pendidikan vokasi (keterampilan) dengan perkembangan kebutuhan kompetensi pasar kerja ▪ Peningkatan ketangguhan keluarga, pemenuhan hak anak, dan penerapan pembangunan berperspektif gender ▪ Peningkatan penerapan nilai-nilai dan sikap masyarakat yang berbudaya maju	
4.	Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat	▪ Pengembangan kapasitas manajemen UMKM yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pasar ▪ Percepatan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, berkualitas dunia, dan berbasis inovasi ▪ Peningkatan ketahanan pangan kota untuk menjaga stabilitas dan keamanan pangan ▪ Pengembangan wisata kota yang lebih menarik, bervariasi, dan menghormati tata nilai agama dan budaya setempat ▪ Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan mencakup industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi ▪ Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam melaksanakan transformasi ekonomi perkotaan	
5.	Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren	▪ Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi ▪ Penciptaan layanan investasi yang komprehensif, mudah dan cepat ▪ Peningkatan jangkauan promosi investasi ▪ Peningkatan kerja sama kota untuk meningkatkan peluang investasi	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		▪ Peningkatan daya saing daerah dengan mendongkrak sektor- sektor kontributor kunci PDRB ▪ Peningkatan produktivitas tenaga kerja ▪ Peningkatan penempatan tenaga kerja ▪ Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lini pelayanan publik ▪ Peningkatan kualitas dan jangkauan penerapan *smart city* ▪ Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif berbasis TIK ▪ Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah ▪ Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan ▪ Peningkatan tata kelola pemerintahan berorientasi melayani ▪ Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani	

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

3.2.3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan **"Sapta Program Kota Bekasi Keren"**, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Ke-7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**)

   Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Sehat, antara lain: pembangunan 3 (tiga) Puskesmas di kelurahan yang belum memiliki fasilitas kesehatan; peningkatan status 5 (lima) RSUD dan kualitasnya; perluasan cakupan jaminan kesehatan masyarakat; pemberian insentif bagi para kader Posyandu, Tim PKK, dan para penggeraknya; peningkatan sarana dan prasarana

kesehatan; peningkatan jangkauan dan mutu layanan kesehatan; dan penyediaan sekolah lansia.

2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**)

   Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Cerdas, antara lain: peningkatan daya tampung sekolah SD tanpa biaya dan SMP dengan biaya terjangkau; peningkatan daya tampung SMA/SMK; pembangunan Kota Bekasi ramah anak, perluasan PAUD dan anak berkebutuhan khusus; penerapan *"two in one"* pemanfaatan lahan dan gedung sekolah; pembangunan unit pembelajaran, pencegahan, dan penanganan narkoba; dan peningkatan kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**)

   Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Hijau, antara lain: pembangunan Taman Kota Patriot dan ruang publik di seluruh kelurahan dan kecamatan; pengembangan nilai ekonomi sampah, gerakan masyarakat sadar sampah, dan perluasan TPA; pembangunan jalan kota, perparkiran disertai integrasi antarmoda transportasi; pembangunan sarana dan prasarana ramah disabilitas; pengembangan destinasi wisata kota; memasyaratkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat; peningkatan ketenteraman dan ketertiban kota; *land banking saving*; dan pembangunan tematik berbasis wilayah.

4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**)

   Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Berkarya, antara lain: pembangunan kota cerdas; pengembangan industri kreatif dan digital; pembangunan sentra-sentra inkubator bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan *start up* di masing-masing kecamatan; penyediaan beasiswa internasional bagi 50 pelajar/pemuda berprestasi; pemanfaatan BLK bagi pengembangan usaha; pembangunan kampung digital; pengembangan pola 'Bapak Asuh"

bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR; fasilitasi bantuan modal UMKM; dan fasilitasi pelaku UMKM disabilitas.

5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**)

   Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Menarik, antara lain: peningkatan daya tarik investasi dan kemudahan perizinan; perluasan jaringan pemasaran dan pendampingan UMKM; pengembangan *sister city* dengan 5 (lima) kota di negara maju; pengembangan daya tarik wisata; peningkatan kolaborasi pembangunan; penyediaan internet gratis di ruang publik; dan pemberian apresiasi bagi inovator dan kreator pencipta lapangan kerja.

6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**)

   Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Bersinergi, antara lain: peningkatan kebebasan beribadah dan prasarana beribadah; pembangunan rumah-rumah Tahfidz; bantuan peningkatan keswadayaan masyarakat melalui LPM/BKM secara bertahap hingga Rp1 miliar; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; apresiasi petugas pelayanan tempat-tempat ibadah dan pusat pelestarian budaya; peningkatan kehidupan berdemokrasi; bantuan modal untuk wisuda sekolah pemberdayaan perempuan; dan fasilitasi pemberdayaan perempuan melalui PKK.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**)

   Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program-program berkaitan Gerakan Kobe Berkinerja, antara lain: peningkatan capaian kinerja makro pembangunan; pelaksanaan reformasi birokrasi; bantuan operasional dan sarpas Praja Bhakti per tahun Rp100 juta/RW; pembangunan sarana dan prasarana olah raga di masing-masing kecamatan; pengembangan *sport city*; peningkatan kesejahteraan ASN; pemenuhan SDM ASN khususnya tenaga kesehatan dan guru sekolah; dan peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan.

Tabel 3.3 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" **Misi:** **1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai** **2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan** **3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi**	**Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari**			**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**			
		Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		**Pilar Infrastruktur (IDSD)**			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pertanahan	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Gerakan Kobe Sehat**
			Meningkatnya kelancaran jalan	Persentase Penurunan V/C Rasio	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Perhubungan			
			Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kapasitas Penumpang Angkutan Umum			
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sarana dan prasarana lingkungan	Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang direhabilitasi/dibangun	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan	**Gerakan Kobe Hijau, Berkinerja**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi **4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat** **5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari**		**Penurunan Intensitas Emisi GRK**			
			Meningkatnya kualitas air dan udara	• Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Pertumbuhan Kampung Iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Capaian RTH/Taman Hutan Kota yang Terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan Hidup	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya tata kelola persampahan	▪ Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R ▪ Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA ▪ Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA ▪ Persentase Cakupan Area Pelayanan	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	**Gerakan Kobe Hijau**
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		**Indeks Risiko Bencana**			
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	▪ Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana ▪ Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Gerakan Kobe Hijau**
			Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Gerakan Kobe Hijau**
	Terwujudnya daya saing SDM Kota			**Indeks Pembangunan Manusia**			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
	Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	**Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata**		▪ **Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun** ▪ **Harapan Lama Sekolah**			
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	• Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD) • Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD) • Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP) • Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	**Gerakan Kobe Cerdas**
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	• Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik • Rasio terpenuhinya Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	**Gerakan Kobe Cerdas**
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	**Gerakan Kobe Cerdas**
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		• **Usia Harapan Hidup** • **Prevalensi Stunting pada Balita**			
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	• Indeks Nilai Mutu. • Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas • Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di UPTD Rumah Sakit Lingkup Dinas Kesehatan • Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	**Gerakan Kobe Sehat**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
				Emergency Dasar (PONED) • Persentase Puskesmas Terakreditasi • Persentase Rumah sakit Terakreditasi • Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit			
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	• Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi • Persentase praktik tenaga kesehatan yang terkendali • Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	**Gerakan Kobe Sehat**
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Gerakan Kobe Sehat**
			Meningkatnya partisipasi masyarakat olahraga dan peningkatan prestasi olahraga	▪ Jumlah Atlet/Pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional ▪ Jumlah Event Olahraga di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olah Raga	**Gerakan Kobe Sehat**
		Meningkatnya ketangguhan keluarga		**Indeks Pembangunan Keluarga**			
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Tingkat Kelurahan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Gerakan Kobe Bersinergi**
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan	• Angka Prevalensi Kontrasepsi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Gerakan Kobe Bersinergi**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR) • Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)			
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	• Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga • Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Gerakan Kobe Bersinergi**
		Meningkatnya kesetaraan gender		**Indeks Ketimpangan Gender**			
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Gerakan Kobe Bersinergi**
		Meningkatnya pemenuhan hak anak		**Nilai Kota Layak Anak**			
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk.	Program Pemenuhan Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	**Gerakan Kobe Bersinergi**
	Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif			**PDRB Per Kapita**			
		Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri		• **Proporsi PDRB Perdagangan** • **Proporsi PDRD Industri Pengolahan**			
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Perindustrian	**Gerakan Kobe Berkarya**
			Meningkatnya IKM yang berdaya saing	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perindustrian	**Gerakan Kobe Berkarya**
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	**Gerakan Kobe Berkarya**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			Meningkatnya pelaku UMKM yang berdaya saing	• Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal • Pertumbuhan Wirausaha	Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	**Gerakan Kobe Berkarya**
		Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital		**Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum**			
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	• Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata • Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan • Persentase Peningkatan Kepatuhan Usaha Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata	**Gerakan Kobe Menarik**
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pariwisata	**Gerakan Kobe Menarik**
			Meningkatnya kapasitas SDM ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	**Gerakan Kobe Berkarya**
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi pelaku seni dan budaya dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan	**Gerakan Kobe Menarik**
		Meningkatnya ketahanan pangan kota		**Indeks Ketahanan Pangan**			
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan	**Gerakan Kobe Berkarya**
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan masyarakat	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan	**Gerakan Kobe Berkarya**
		Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja		**Tingkat Pengangguran Terbuka**			
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi bagi Pencari Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	**Gerakan Kobe Berkarya**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	**Gerakan Kobe Berkarya**
		Menurunnya tingkat kemiskinan		**Tingkat Kemiskinan**			
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	**Gerakan Kobe Berkarya**
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	**Gerakan Kobe Bersinergi**
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	**Gerakan Kobe Berkarya**
	Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			**Indeks Daya Saing Daerah**			
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif		**Pilar Dinamisme Bisnis (IDSD)**			
			Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	**Gerakan Kobe Menarik**
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase KBLI Terbit	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal	**Gerakan Kobe Menarik**
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat		**Indeks Harmoni Indonesia**			
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	• Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Persentase Penegakan Pelanggaran Perda • Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Gerakan Kobe Bersinergi**
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	**Gerakan Kobe Bersinergi**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
		Meningkatnya kerja sama kota yang efektif		**Efektivitas Kerja Sama Kota**			
			Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan • Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerja sama Pemerintah Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	**Gerakan Kobe Menarik**
	Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif			**Indeks Reformasi Birokrasi**			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima		**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**			
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	• Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital • Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	• Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan • Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melaporkan • Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang Melaporkan • Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Gerakan Kobe Berkinerja**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan PERDA APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah			**Gerakan Kobe Berkinerja**
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota		▪ **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** ▪ **Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** ▪ **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah** ▪ **Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi**			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan	• Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh • Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya tata kelola anggaran	• Ketepatan Waktu Penetapan APBD • Ketepatan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Belanja Daerah			
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik			
			Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya efektivitas pengawasan intern pemerintah	Nilai AKIP Kota (Komponen Evaluasi)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		**Gerakan Kobe Berkinerja**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KET.
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh PD	**Gerakan Kobe Berkinerja**
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan			
			Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah			
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel			
		Meningkatnya Kota Bekasi Cerdas		**Indeks Kota Cerdas**			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	**Gerakan Kobe Berkinerja**

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Gambar 3.9 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

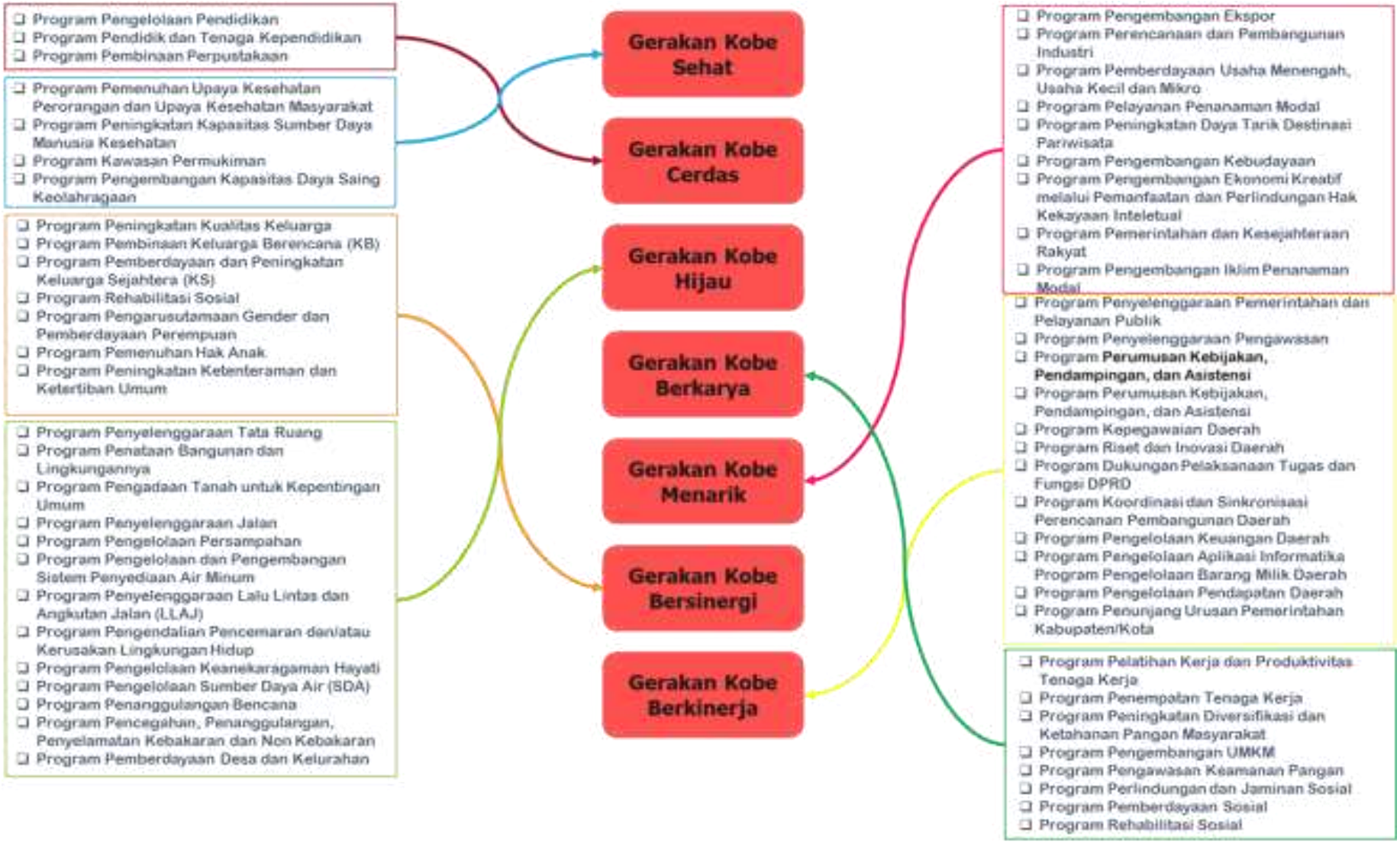

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

3.2.4 PROGRAM UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT DI KOTA BEKASI

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat beberapa program strategis/unggulan yang akan dikerjakan di Kota Bekasi. Program unggulan tersebut antara lain:

1. Pembangunan *Underpass* Jalan Perjuangan dengan indikasi anggaran Rp700.000.000,-;
2. Pembangunan Jalan Tol Cikunir – Karawaci (*Elevated*) dengan indikasi anggaran Rp26.150.000.000.000,-;
3. Pembangunan TPPAS Bekarpur dengan indikasi anggaran Rp300.000.000,- (termasuk Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta); dan
4. Pembangunan *Flyover* Bulak Kapal di Bekasi Timur.

3.2.5 PROGRAM/PROYEK PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA DI KOTA BEKASI

Sebagai Kawasan Aglomerasi, peran DKI Jakarta tidak bisa diabaikan begitu saja. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan DKI Jakarta seperti terkait pengelolaan lahan TPA, transportasi dan penyediaan air bersih, serta pengendalian polusi udara sangat diperlukan.

Dalam rangka kolaborasi pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan persoalan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membangun dua *flyover* di wilayah Kemang Pratama Bekasi, dan Simpang Bantargebang Kota Bekasi untuk mempercepat akses pengiriman sampah. Rencana pembangunan ini, diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp200-300 milliar untuk 1 pembangunan jalan *flyover* tersebut.

3.2.6 PROGRAM/PROYEK NASIONAL DI KOTA BEKASI

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 disebutkan beberapa program/proyek yang akan dikerjakan di Kota Bekasi atau bersinggungan dengan Kota Bekasi, antara lain:

1. Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
2. Pembangunan TPST Regional Bekasi Raya;
3. Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bekasi; dan

4. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

3.2.7 KETERKAITAN SAPTA PROGRAM KOTA BEKASI DENGAN ASTA CITA DAN JABAR ISTIMEWA

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional, maka Kota Bekasi berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapai prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.10 Keterkaitan Gerakan Kobe dengan Asta Cita dan Jabar Istimewa

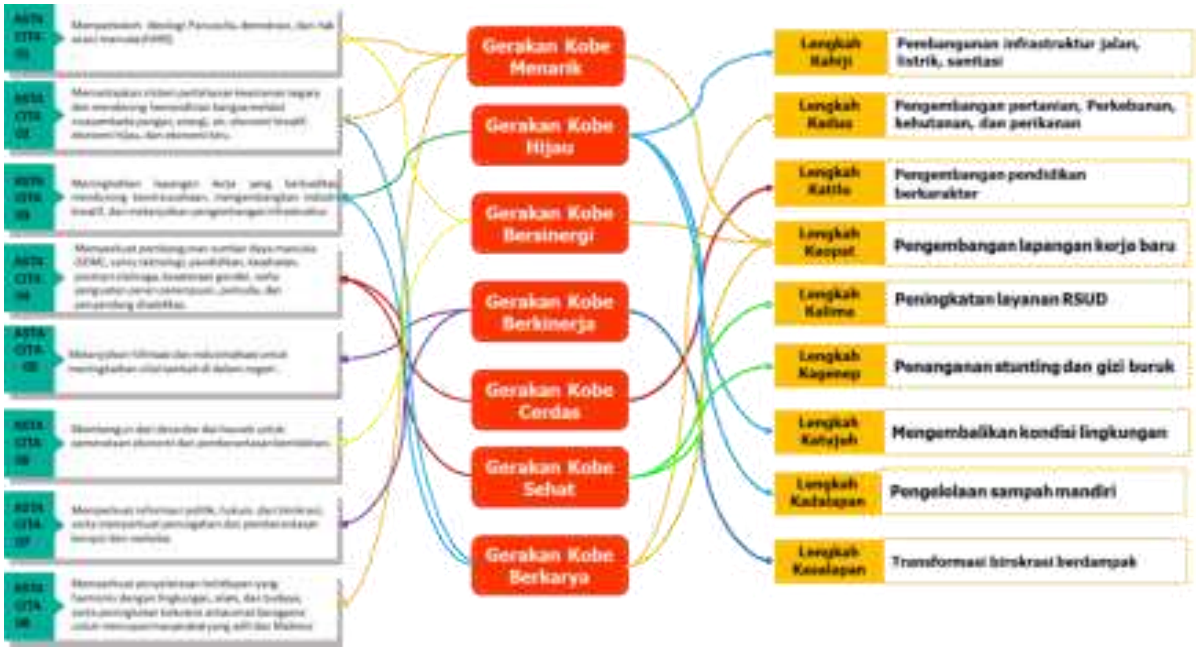

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Sapta Program Kota Bekasi adalah cermin lokal dari semangat Asta Cita dan Jabar Istimewa, dengan penyesuaian konteks kota urban. Kesamaan substansi ketiganya yaitu:

1. Berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif;
2. Berbasis pada nilai gotong royong dan kolaborasi;
3. Fokus pada digitalisasi dan inovasi;
4. Memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
5. Sinergi vertikal antarlevel pemerintahan.

Kesamaan substansi ini penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan, memudahkan akses pendanaan, dan memastikan kesesuaian arah pembangunan antar tingkat pemerintahan.

3.2.8 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BEKASI

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi pengurangan beban pengeluaran, dengan arah kebijakan:
   - Pengendalian penduduk dan promosi keluarga berencana
   - Pengurangan beban pengeluaran pangan dan peningkatan ketahanan pangan
   - Peningkatan kualitas keluarga
   - Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan
   - Pengurangan beban pengeluaran pendidikan/kesehatan dan peningkatan akses pendidikan/kesehatan
   - Pengurangan beban pengeluaran umum dan beban pengeluaran pajak
2. Strategi peningkatan pendapatan, dengan arah kebijakan:
   - Penyusunan studi/rencana ekonomi inklusif
   - Pengembangan ekonomi inklusif
   - Relasi pencari kerja – lapangan kerja
   - Pelatihan dan pengenalan jenis usaha
   - Peningkatan akses permodalan
   - Fasilitasi dan pendampingan usaha
3. Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur, dengan arah kebijakan:
   - Perbaikan kualitas rumah
   - Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
   - Penanganan bencana di kawasan permukiman
4. Strategi peningkatan tata kelola, dengan arah kebijakan:
   - Penguatan peran TKPD

- Perbaikan koordinasi dan pembagian peran di lingkup pemerintah daerah
- Kolaborasi dengan pihak nonpemerintah
- Data kependudukan dan kemiskinan ter-update
- Pengembangan satu data kemiskinan
- Pelayanan terpadu dan diversifikasi strategi
- Penguatan peran kelurahan dan kecamatan serta kader sosial dan kependudukan

5. Strategi peningkatan kualitas diri dan keluarga, dengan arah kebijakan:
   - Edukasi untuk motivasi diri dan keluarga
   - Edukasi dan fasilitasi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pribadi dan keluarga
   - Edukasi dan fasilitasi peningkatan kesadaran kualitas lingkungan hidup

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.1.1 PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program prioritas Kota Bekasi beserta pagu indikatif (merupakan sigma pagu subkegiatan yang paling dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.568	1.460	1.535	1.624	1.707	1.741	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	187.379	144.559	153.734	154.129	162.020	170.121	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	231.3711	170,591	185.233	173.920	179.137	195.260	Pertanahan
Program Penyelenggaraan Jalan	277.784	320.262	328.111	330.796	340.720	357.756	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877	16.735	16.915	3.874	4.073	4.291	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	101.124	94.309	123.706	131.740	138.540	149.473	Perhubungan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.736	7.390	7.649	5.547	5.831	6.144	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.783	60.750	63.897	67.577	71.037	74.845	Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.575	49.923	52.509	55.534	58.377	62.464	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Persampahan	202.873	317.166	329.078	336.872	348.804	364.346	Lingkungan Hidup

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Penanggulangan Bencana	6.604	5.377	5.656	5.982	6.288	6.625	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	886	1.270	2.600	1.100	1.100	1.600	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Program Pengelolaan Pendidikan	592.320	557.475	595.609	623.697	636.171	642.533	Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.112	3.500	3.665	3.559	3.741	3.942	Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	1.516	1.920	2.019	2.135	2.245	2.236	Perpustakaan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	244.047	226.847	244.419	259.173	272.555	286.183	Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.869	16.223	17.063	18.046	18.970	19.987	Kesehatan
Program Kawasan Permukiman	16.876	20.399	21.456	22.691	23.853	25.132	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.350	4.000	1.600	1,700	1,800	1.900	Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.246	37.100	3.513	3.579	3.689	3.799	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.998	1.299	1.366	1.445	1.519	1.600	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.360	1.076	2.120	2.220	2.320	2.520	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	4.868	2.047	2..373	2.729	3.139	3.610	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.451	1.611	1.830	2.010	2.175	2.460	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengembangan Ekspor	819	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	910	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	702	500	500	600	700	800	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	2.139	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.075	1.510	1.570	1.650	1.900	1.700	Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	200	200	200	500	600	Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	539	500	500	500	650	650	Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Program Pengembangan Kebudayaan	-	1.170	1.270	1.290	1.390	1.390	Kebudayaan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	278	758	805	825	857	882	Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.260	1.054	1.054	1.054	1.084	1.084	Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	257	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Sosial	3.166	2.387	2.510	2.655	2.791	2.940	Sosial
Program Reahabiltasi Sosial	8.425	4.962	5.219	5.520	5.803	6.114	Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.800	3.040	3.197	3.381	3.554	3.745	Sosial
Program Pelayanan Penanaman Modal	3.667	4.293	4.515	4.775	5.019	5.289	Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205	225	600	250	263	277	Penanaman Modal
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.439	38.677	40.015	40.595	40.780	41.135	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.400	377	397	420	441	465	Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	50.389	52.012	54.706	57.857	60.819	62.035	Sekretariat Daerah
Program Kepegawaian Daerah	1.438	1.900	2.140	2.260	2.340	2.430	Kepegawaian
Program Pendaftaran Penduduk	3.900	3.550	3.733	3.948	4.151	4.373	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	1.080	700	736	778	818	862	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	240	280	370	370	370	370	Kecamatan (Pondok Gede)
	159	310	350	350	350	350	Kecamatan (Jati Sampurna)
	39	140	140	140	140	140	Kecamatan (Jatiasih)
	204	219	230	243	256	268	Kecamatan (Bantar Gebang)
	151	95	99	105	111	117	Kecamatan (Rawa Lumbu)
	285	1.896	1.994	2.109	2.217	2.336	Kecamatan (Medan Satria)
	180	310	326	344	362	381	Kecamatan (Mustika Jaya)
	232	240	252	266	280	295	Kecamatan (Pondok Melati)
	230	290	305	322	339	357	Kecamatan (Bekasi Timur)
	400	280	294	311	327	344	Kecamatan

PROGRAM PRIORITAS KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							(Bekasi Utara)
	387	320	336	355	374	394	Kecamatan (Bekasi Barat)
	282	300	315	333	350	369	Kecamatan (Bekasi Selatan)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.650	19.503	19.578	19.578	19.578	19.578	Kecamatan (Pondok Gede)
	14.677	15.618	16.093	16.115	16.115	16.145	Kecamatan (Jati Sampurna)
	24.668	24.657	24.657	24.657	24.657	24.657	Kecamatan (Jatiasih)
	8.643	9.338	9.821	10.387	10.919	11.504	Kecamatan (Bantar Gebang)
	21.862	21.626	22.747	24.057	25.289	26.644	Kecamatan (Rawa Lumbu)
	15.402	20.180	21.255	22.448	23.597	24.862	Kecamatan (Medan Satria)
	19.955	21.807	22.937	24.258	25.500	26.867	Kecamatan (Mustika Jaya)
	8.544	15.323	16.117	17.045	17.918	18.878	Kecamatan (Pondok Melati)
	20.828	22.916	24.103	25.491	26.796	28.233	Kecamatan (Bekasi Timur)
	32.000	36.109	37.979	40.167	42.223	44.486	Kecamatan (Bekasi Utara)
	20.733	22.916	24.103	25.419	26.796	29.233	Kecamatan (Bekasi Barat)
	12.980	23.265	24.365	25.768	27.088	28.540	Kecamatan (Bekasi Selatan)
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	97.506	107.348	111.933	116.442	120.529	121.283	Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.570	2.453	2.650	2.650	3.150	4.600	Perencanaan
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	437	2.390	2.390	2.440	2.800	2.700	Perencanaan
Program Riset dan Inovasi	2.335	2.550	2.800	2.800	3.100	3.100	Penelitian dan Pengembangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	33.491	34.465	35.503	37.719	39.850	42.195	Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.001	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900	Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.065	5.964	7.800	8.000	10.100	10.100	Keuangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.907	1.540	1.620	1/713	1.801	1.897	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.461	1.319	1.387	1.4671	1.542	1.625	Inspektorat Daerah
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.505	13.5121	14.212	15.031	15.801	16.648	Komunikasi dan Informatika

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

4.1.2 PROGRAM DUKUNGAN KOTA BEKASI TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA

Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Kota Bekasi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Lengkah Kahiji: Infrastruktur Istimewa Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi	Program Penyelenggaraan Jalan	277.784	281.306	309.155	330.796	340.720	357.756	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	102.595	95.709	126.309	134.540	142.090	153.023	Perhubungan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.575	49.923	52.509	55.534	58.377	62.464	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877	16.735	16.915	3.874	4.073	4.291	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Kawasan Permukiman	16.876	20.399	21.456	22.691	23.853	25.132	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80.780	66.882	70.346	74.398	78.207	79.772	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lengkah Kadua: Pertanian Istimewa Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	278	758	805	825	857	882	Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
Lengkah Katilu: Pendidikan Istimewa Pengembangan Pendidikan Berkarakter	Program Pengelolaan Pendidikan	592.320	557.475	595.609	623.697	636.171	642.533	Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.113	3.500	3.665	3.559	3.741	3.942	Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.516	1.920	2.019	2.135	2.245	2.236	Perpustakaan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.360	1.076	2.120	2.220	2.320	2.520	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Kebudayaan	-	1.170	1.270	1.290	1.390	1.390	Kebudayaan
Lengkah Kaopat: Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa	Program Penempatan Tenaga Kerja	257	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.260	1.054	1.054	1.054	1.084	1.084	Tenaga Kerja

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pengembangan Lapangan Kerja Baru	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	910	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	819	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Perdagangan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	200	200	200	500	600	Pariwisata
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	702	500	500	600	700	800	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	2.139	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.075	1.510	1.570	1.650	1.900	1.700	Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	539	500	500	500	650	650	Pariwisata
	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.667	4.293	4.515	4.775	5.019	5.289	Penanaman Modal
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205	225	600	250	263	277	Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.505	13.5121	14.212	15.031	15.801	16.648	Komunikasi dan Informatika
Lengkah Kalima: **Kesehatan Istimewa** Peningkatan Layanan RSUD dan SDM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	433.599	355.725	377.529	352.488	370.535	389.062	Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.869	16.223	17.063	18.046	18.970	19.987	Kesehatan
Lengkah Kagenep: **Keluarga Istimewa** Penanganan Stunting dan Gizi Buruk	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.246	37.100	3.513	3.643	3.689	3.799	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.998	1.299	1.366	1.445	1.519	1.600	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.360	1.076	2.120	2.220	2.320	2.520	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Perlindungan Khusus Anak (PHA)	1.652	1.594	1.823	2.096	2.410	2.770	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lengkah Katujuh: LIngkungan Hidup Istimewa Mengembalikan Kondisi Lingkungan	Program Penataan Bangunan Gedung	187.379	144.559	153.734	154.129	162.020	170.121	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.223	1.387	1.459	1.543	1.622	1.709	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.736	7.390	7.649	5.547	5.831	6.144	Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.575	49.923	52.509	55.534	58.377	62.464	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lengkah Kadalapan: Pengelolaan Sampah Mandiri Pengelolaan Sampah Mandiri	Program Pengelolaan Persampahan	202.873	317.166	329.078	336.872	348.804	364.346	Lingkungan Hidup
Lengkah Kasalapan: Penyelenggaraan Pemerintah Istimewa dan Kesejahteraan Perangkat Desa Istimewa Transformasi Birokrasi Berdampak	Program Kepegawaian Daerah	1.438	1.900	2.140	2.260	2.340	2.430	Kepegawaian
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.065	5.964	7.800	8.000	10.100	10.100	Keuangan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.001	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900	Keuangan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	46.899	34.465	35.503	37.719	39.850	42.195	Keuangan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.907	1.540	1.620	1/713	1.801	1.897	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.461	1.319	1.387	1.4671	1.542	1.625	Inspektorat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.789	4.680	5.011	5.248	5.476	5,721	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	217.942	253.258	263.755	275.390	286.476	299.627	Kecamatan

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

4.1.3 PROGRAM DUKUNGAN KOTA BEKASI TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA

Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029. Kontribusi Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA								
PN 1								
Pcnguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif,Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.205	6.909	8.164	7.896	9.305	9.693	Komunikasi dan Informatika
PN 2								
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.201	924	940	955	970	985	Pertanian
Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	682	450	480	500	510	520	Perikanan
Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.575	49.923	52.509	55.534	58.377	62.464	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877	16.735	16.915	3.874	4.073	4.291	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21.458	45.827	43.468	45.972	48.326	50.916	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	202.873	317.166	329.078	336.872	348.804	364.346	Lingkungan Hidup
Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.505	13.5121	14.212	15.031	15.801	16.648	Komunikasi dan Informatika
Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	200	200	200	500	600	Pariwisata
PN 3								
Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.505	13.5121	14.212	15.031	15.801	16.648	Komunikasi dan Informatika

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	539	500	500	500	650	650	Pariwisata
Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	650	467	480	500	600	700	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah
PN 4								
Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	45.967	48.828	52.141	54.183	55.267	55.820	Pendidikan
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139	Pendidikan
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.800	3.040	3.197	3.381	3.554	3.745	Sosial
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139	Pendidikan
Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	2.335	2.550	2.800	2.800	3.100	3.100	Penelitian dan Pengembangan
Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	12.390	10.278	10.792	11.311	11.898	12.493	Kesehatan
Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	12.390	10.278	10.792	11.311	11.898	12.493	Kesehatan
Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	183.423	126.149	130.245	90.307	94.823	99.564	Kesehatan
Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	6.127	6.839	7.181	7.540	7.917	8.313	Kesehatan
Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
Eliminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	6.127	6.839	7.181	7.540	7.917	8.313	Kesehatan
Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	183.423	81.911	86.007	90.307	94.823	99.564	Kesehatan

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	2.328	7.500	7.888	8.342	8.770	9.240	Kesehatan
Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.869	16.223	17.063	18.046	18.970	19.987	Kesehatan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	-	1.170	1.270	1.290	1.390	1.390	Kebudayaan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi	2.335	2.550	2.800	2.800	3.100	3.100	Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	37.621	236.014	39.425	41.688	43.810	46.154	Kepemudaan dan Olahraga
PN 5								
Tidak ada kegiatan yang relevan								
PN 6								
Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.800	3.040	3.197	3.381	3.554	3.745	Sosial
Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Program Pengembangan UMKM	2.139	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah
Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Pengembangan UMKM	2.139	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80.780	66.882	70.346	74.398	78.207	79.772	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PN 7								
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.907	1.540	1.620	1/713	1.801	1.897	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.461	1.319	1.387	1.4671	1.542	1.625	Inspektorat Daerah
Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	1.438	1.900	2.140	2.260	2.340	2.430	Kepegawaian

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	15.505	13.5121	14.212	15.031	15.801	16.648	Komunikasi dan Informatika
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.065	5.964	7.800	8.000	10.100	10.100	Keuangan
PN 8								
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.812	1.885	1.983	2.097	2.204	2.322	Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Wawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	-	1.170	1.270	1.290	1.390	1.390	Kebudayaan
PROGRAM/PROYEK STRATEGIS NASIONAL								
Program Makan Bergizi Gratis	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139	Pendidikan
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	81.327	82.025	83.123	65.304	68.647	74.139	Pendidikan
Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	2.328	7.500	7.888	8.342	8.770	9.240	Kesehatan
Pengentasan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.800	3.040	3.197	3.381	3.554	3.745	Sosial
Sekolah Rakyat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.800	3.040	3.197	3.381	3.554	3.745	Sosial
Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan	3.360	2.750	2.892	3.059	3.215	3.288	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.201	924	940	955	970	985	Pangan
Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	126.113	160.000	174.229	185.474	195.170	204.929	Kesehatan
Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.683	1.523	1.600	2.000	2.400	2.800	Perdagangan
Koperasi Merah Putih	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	650	467	480	500	600	700	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kemudahan Perizinan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205	225	600	250	263	277	Penanaman Modal

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

4.1.4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Tabel 4.4 Program Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN												PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	KINERJA	PAGU (Rp.)	
PENDIDIKAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.364.412. 057.982**		**1.115.587. 106. 000**		**1.171.366. 461.300**		**1.229.934. 784.365**		**1.236.084. 458.287**		**1.239.792. 711.662**	**Dinas Pendidikan**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	598. 130.000	100	275. 000.000	100	288. 750.000	100	303. 187.500	100	304. 703.438	100	305. 617.548	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	1.360.576. 961.685	100	1.111.562. 986.000	100	1.667.141. 135.300	100	1.225.498. 192.065	100	1.231.625. 683.025	100	1.235.320. 560.074	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	85,21	86,21	185. 000.000	86,71	50. 000.000	87,21	52. 500.000	87,71	55. 125.000	88,21	55. 400.625	88,71	55. 566.827	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	3.051. 966.297	100	3.669. 120.000	100	3.884. 076.000	100	4.078. 279.800	100	4.098. 671.199	100	4.110. 967.213	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan					**592.320. 488.988**		**557.475. 947.535**		**595.609. 248.863**		**623.697. 381.282**		**636.171. 328.908**		**642.533. 042.198**	**Dinas Pendidikan**
Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Usia 7-12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun (SD)	%	99,61	99,75	335.939. 771.300	99,90	306.501. 519.435	100,00	327.319. 625.795	100,00	340.494. 999.601	100,00	347.304. 899.593	100,00	350.777. 948.589	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah 13-15 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)	%	99,61	99,75	195.299. 236.588	99,90	188.157. 810.000	100,00	201.208. 341.701	100,00	213.327. 670.618	100,00	217.594. 224.031	100,00	219.770. 166.272	Dinas Pendidikan

Outcome: Meningkatnya Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD)	%	68,44	71,48	45.967. 226.100	74,52	48.828. 213.100	77,56	52.141. 188.017	80,60	54.183. 931.178	83,56	55.267. 609.802	86,53	55.820. 285.900	Dinas Pendidikan
Outcome: Meningkatnya Partisipasi Kesetaraan/ Non Formal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan)	%	17,07	21,17	15.114. 255.000	25,27	13.988. 405.000	29,37	14.940. 093.350	33,47	15.690. 779.885	37,57	16.004. 595.482	41,67	16.164. 641.437	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan					**81.237. 089.551**		**82.025. 183.383**		**83.123. 591.909**		**65.304. 041.937**		**68.647. 608.884**		**74.139. 417.595**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Gedung Pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	44,69	52,09	81.237. 089.551	60,00	82.025. 183.383	65,50	83.123. 591.909	70,35	65.304. 041.937	75,00	68.647. 608.884	80,35	74.139. 417.595	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Kurikulum					**-**		**1.022. 448.887**		**1.075. 411.739**		**1.137. 355.456**		**1.195. 588.055**		**1.259. 671.575**	**Dinas Pendidikan**
Outcome: Meningkatnya Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	-	-	80	1.022. 448.887	85	1.075. 411.739	90	1.137. 355.456	95	1.195. 588.055	100	1.259. 671.575	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					**3.112. 543.300**		**3.500. 000.000**		**3.665. 760.000**		**3.559. 627.776**		**3.741. 880.718**		**3.942. 445.525**	**Dinas Pendidikan**
Outcome: Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar	%	65	69	3.112. 543.300	73	3.500. 000.000	77	3.665. 760.000	81	3.559. 627.776	85	3.741. 880.718	98	3.942. 445.525	Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	50	55		60		65		70		75		100		Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					**1.149. 280.000**		**800. 000.000**		**841. 440.000**		**889. 906.944**		**935. 470.180**		**985. 611.381**	**Dinas Pendidikan**
Outcome: Terjaminnya Kualitas Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Swasta Berakreditasi B	%	70	75	1.149. 280.000	80	800. 000.000	85	841. 440.000	90	889. 906.944	95	935. 470.180	100	985. 611.381	Dinas Pendidikan
KESEHATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**270.623. 184.940**		**407.770. 662.286**		**420.003. 782.155**		**444.196. 000.007**		**453.079. 920.007**		**455.345. 319.607**	**Dinas Kesehatan**

Outcome: Meningkatnya Keselaranan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	219. 987.300	100	200. 000.000	100	210. 000.000	100	220. 500.000	100	231. 525.000	100	243. 101.250	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	262.836. 567.640	100	403.682. 632.286	100	415.711. 350.655	100	439.688. 946.932	100	448.347. 514.279	100	450.376. 293.593	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	85	100	1.850. 000.000	85	1.985. 000.000	86	2.084. 250.000	87	2.188. 462.500	88	2.297. 885.625	89	2.412. 779.906	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	5.716. 630.000	100	1.903. 030.000	100	1.998. 181.500	100	2.098. 090.575	100	2.202. 995.103	100	2.313. 144.858	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**440.243. 568.000**		**415.436. 169.000**		**415.436. 169.000**		**415.436. 169.000**		**415.436. 169.000**		**415.436. 169.000**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	440.243. 568.000	100	415.436. 169.000	100	415.436. 169.000	100	415.436. 169.000	100	415.436. 169.000	100	415.436. 169.000	Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					**2.328. 465.232**		**7.500. 000.000**		**7.888. 500.00**		**8.342. 877.600**		**8.770. 032.933**		**9.240. 106.698**	**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Gedung Kesehatan	Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	23,21	25,54	2.328. 465.232	58,5	7.500. 000.000	60,35	7.888. 500.00	64	8.342. 877.600	66,76	8.770. 032.933	70	9.240. 106.698	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							**52.680. 281.800**		**84.489. 715.335**		**118.797. 453.363**		**100.640. 234.511**		**30.000. 000.000**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
Outcome: Meningkatnya Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B	%	86,68	86,68	30.386. 750.000	86,69	52.680. 281.800	86,7	84.489. 715.335	86,71	118.797. 453.363	86,72	100.640. 234.511	86,73	30.000. 000.000	Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					**30.386. 750.000**		**355.725 068.379**		**377.529. 149.595**		**352.488. 514.774**		**370.535. 926.731**		**389.062. 723.067**	**Dinas Kesehatan**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	90,57	100	105.543. 228.449	100	56.569. 368.849	100	59.397. 837.291	100	62.367. 729.156	100	65.486. 115.613	100	68.760. 421.393	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3,2	3,0	12.390. 866.716	2,8	10.278. 313.975	2,6	10.792. 229.673	2,4	11.331. 841.156	2,2	11.898. 433.214	2,20	12.493. 354.875	Dinas Kesehatan
	Persentase Institusi dan Fasilitas Umum Memenuhi Syarat Kesehatan	%	92,86	92,96		93,06		93,2		93,26		93,36		93,46		Dinas Kesehatan
	Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat	%	94,86	94,96		95,06		95,2		95,26		95,36		95,46		Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Jaminan Kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC)	%	98,50	100	126.113. 485.080	100	160.000. 000.000	100	174.229. 737.493	100	185.474. 235.632	100	195.170. 933.632	100	204.929. 480.315	Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas	%	72,17	72,20	183.423. 573.480	72,25	126.149. 994.555	72,3	130.245. 584.588	72,35	90.307. 760.253	72,4	94.823. 148.266	72,45	99.564. 305.679	Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Lingkup Dinas Kesehatan	%	77,4	77,45		77,50		77,55		77,60		77,65		77,7		Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	90,89	91,39		91,89		92,39		92,89		93,39		93,89		Dinas Kesehatan
Outcome: Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Rata Rata Capaian SPM Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	86,93	87,03	6.127. 928.595	87,13	2.727. 391.000	87,23	2.863. 760.550	87,33	3.006. 948.577	87,43	3.157. 296.006	87,53	3.315.. 160.805	Dinas Kesehatan

Menular dan Tidak Menular	Persentase kasus penyakit Menular dan Tidak Menular Non SPM yang Tertangani	%	41,39	41,49		41,59		41,69		41,79		41,89		41,99		Dinas Kesehatan
	Persentase Kasus KLB yang Ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					**48.869. 506.640**		**16.223. 234.560**		**17.063. 598.110**		**18.046. 461.361**		**18.970. 440.183**		**19.987. 255.777**	**Dinas Kesehatan**
Outcome: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi	%	75,91	100	48.869. 506.640	100	16.223. 234.560	100	17.063. 598.110	100	18.046. 461.361	100	18.970. 440.183	100	19.987. 255.777	Dinas Kesehatan
	Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang Terkendali	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS	%	77	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman					**275. 400.000**		**275. 400. 000**		**289. 665.720**		**306. 350.465**		**322. 035.609**		**339. 296.718**	**Dinas Kesehatan**
Outcome: Terkendalinya Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah Sarana Kefarmasian Yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	96,8	100	275. 400.000	100	275. 400.000	100	289. 665.720	100	306. 350.465	100	322. 035.609	100	339. 296.718	Dinas Kesehatan
	Persentase Jumlah Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berlabel yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					**8.414. 008.007**		**16.434. 000.000**		**17.285. 281.200**		**18.280. 913.397**		**19.216. 896.163**		**20.246. 921.797**	**Dinas Kesehatan**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perilaku Masyarakat	Persentase Keluarga ber-PHBS	%	65,03	65,1	8.414. 008.007	65,12	16.434. 000.000	65,14	17.285. 281.200	65,16	18.280. 913.397	65,18	19.216. 896.163	65,2	20.246. 921.797	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**38.123. 084.960**		**47.597. 136.000**		**50.062. 667.645**		**50.563. 294.321**		**51.574. 560.208**		**52.606. 051.412**	**Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	187. 100.000	100	367. 000.000	100	370. 000.000	100	375. 000.000	100	400. 000.000	100	400. 000.000	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	83,99	85,25	35.256. 084.960	86,53	39.927. 982.000	87,83	42.792. 667.645	89,14	43.188. 294.321	90,48	44.074. 560.208	91,83	45.079. 551.412	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82	83	477. 250.000	83	500. 000.000	84	500. 000.000	84	500. 000.000	85	500. 000.000	85	500. 000.000	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	89,73	91,13	2.202. 650.000	92,53	6.802. 154.000	93,09	6.400. 000.000	93,65	6.500. 000.000	94,77	6.600. 000.000	95,24	6.626. 500.000	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					**31.575. 145.200**		**49.923. 762.000**		**52.509. 812.872**		**55.534. 378.093**		**58.377. 738.251**		**62.464. 179.929**	**Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air**
Outcome: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	37,97	41,43	31.575. 145.200	43,08	49.923. 762.000	44,37	52.509. 812.872	45,65	55.534. 378.093	46,94	58.377. 738.251	48,23	62.464. 179.929	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					**218.349. 796.480**		**227.962. 949.795**		**236.592. 940.777**		**241.423. 983.131**		**248.666. 702.625**		**266.073. 371.809**	**Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	68,91	69,64	218.349. 796.480	70,37	227.962. 949.795	71,10	236.592. 940.777	71,82	241.423. 983.131	72,55	248.666. 702.625	73,28	266.073. 371.809	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Penyelenggaraan Jalan							**320.262. 483.000**		**328.111. 823.134**		**330.796. 712.563**		**340.720. 613.940**		**357.756. 644.637**	**Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air**
Outcome: Meningkatkanya Aksesibilitas Masyarakat Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan	%	97,75	97,79	277.784. 561.060	97,82	320.262. 483.000	97,88	328.111. 823.134	97,94	330.796. 712.563	97,97	340.720. 613.940	97,99	357.756. 644.637	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					**277.784. 561.060**		**618. 819.000**		**650. 873.824**		**688. 364.156**		**723. 608.401**		**762. 393.812**	**Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air**

Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	31,24	37,14	2.430. 000.000	39,47	618. 819.000	41,80	650. 873.824	44,13	688. 364.156	46,46	723. 608.401	48,80	762. 393.812	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					**2.430. 000.000**		**16.735. 330.800**		**16.915. 762.932**		**3.874. 705.781**		**4.073. 090.717**		**4.291. 408.380**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap SPAM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Kab/Kota	%	23	25,26	25.877. 444.600	25,78	16.735. 330.800	28,5	16.915. 762.932	30,03	3.874. 705.781	32,52	4.073. 090.717	34,78	4.291. 408.380	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					**21.458. 850.000**		**45.827. 719.399**		**43.468. 494.212**		**45.972. 279.479**		**48.326. 060.188**		**50.916. 337.014**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99,31	99,58	21.458. 850.00	99,63	45.827. 719.399	99,74	43.468. 494.212	99,8	45.972. 279.479	99,89	48.326. 060.188	100	50.916. 337.014	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	1,8	2		2,5		5		5		5		5		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung					**187.379. 223.487**		**144.559. 827.120**		**153.734. 997.730**		**154.129. 333.600**		**162.020. 755.480**		**170.121. 793.254**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tata Ruang**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	35,71	40,6	187.379. 223.487	50,89	144.559. 827.120	63,89	153.734. 997.730	68,56	154.129. 333.600	71,5	162.020. 755.480	73	170.121. 793.254	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan	%	94,18	94,3		94,4		94,5		94,6		94,7		95		Dinas Tata Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**24.241. 815.700**		**23.831. 784.400**		**24.070. 102.244**		**24.310. 803.266**		**24.553. 911.299**		**24.799. 450.412**	**Dinas Tata Ruang**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat	%	100	92,5	190. 800.000	92,5	25. 000.000	92,5	25. 000.000	92,5	30. 000.000	92,5	30. 000.000	92,5	230.. 000.000	Dinas Tata Ruang

Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Daerah dengan Penganggaran															
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,1	89,3	23.613. 290.638	89,5	23.116. 784.400	89,7	23.205. 102.244	89,9	23.340. 803.266	90,1	23.383. 911.299	90,3	23.384. 450.412	Dinas Tata Ruang
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	78,5	79	0	79,5	90. 000.000	80	140. 000.000	80,5	190. 000.000	81	240. 000.000	81,5	240. 000.000	Dinas Tata Ruang
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	91,67	437. 725.062	91,67	600. 000.000	91,67	700. 000.000	91,67	750. 000.000	91,67	900. 000.000	91,67	945. 000.000	Dinas Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					**5.053. 218.270**		**3.101. 504.800**		**3.262. 162.749**		**3.450. 063.323**		**3.626. 706.565**		**3.763. 735.005**	**Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan	%	44,87	45,50	2.568. 192.840	46,15	1.460. 000.000	46,79	1.535. 628.000	47,43	1.624. 080.173	48,08	1.707. 233.078	48,72	1.741. 377.739	Dinas Tata Ruang
	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	%	77	78		78,2		78,4		78,6		78,8		79		Dinas Tata Ruang
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	77	78		78,2		78,4		78,6		78,8		79		Dinas Tata Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	83	83		83		83		83		83		83		Dinas Tata Ruang
Outcome: Terwujudnya Penataan Reklame dan Utilitas Jalan yang Tertib, Aman, Estetis, dan Sesuai Peraturan Guna Mendukung Kenyamanan,	Persentase Tingkat Pengaduan Masyarakat Terkait Reklame dan Utilitas Jalan yang Ditindaklanjuti	%	N/A	100	2.485. 025.430	100	1.641. 504.800	100	1.726. 534.749	100	1.825. 983.150	100	1.919. 473.487	100	2.022. 357.266	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Keselamatan, serta Keindahan Ruang Kota																
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**22.025.688.800**		**18.183.458.000**		**21.086.561.000**		**21.091.561.000**		**21.246.561.000**		**21.301.561.000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	65.930.000	100	90.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	90,39	100	21.029.015.440	100	17.833.458.000	100	19.453.561.000	100	19.453.561.000	100	19.453.561.000	100	19.453.561.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,35	85,6	395.000.000	85,85	0	86	660.000.000	86,25	665.000.000	86,5	670.000.000	86,75	675.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	535.743.360	100	260.000.000	100	858.000.000	100	858.000.000	100	908.000.000	100	958.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengembangan Perumahan					**3.360.019.173**		**2.750.019.173**		**2.892.470.166**		**3.059.076.448**		**3.215.701.162**		**3.288.062.744**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	3.360.019.173	100	2.750.019.173	100	2.892.470.166	100	3.059.076.448	100	3.215.701.162	100	3.288.062.744	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	6,26	6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Kawasan Permukiman					**16.876. 000.000**		**20.399. 427.578**		**21.456. 117.927**		**22.691. 990.319**		**23.853. 820.223**		**25.132. 384.987**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	1,64	3,28	16.876. 000.00	4,92	20.399. 427.578	6,56	21.456. 117.927	8,2	22.691. 990.319	9,84	23.853. 820.223	11,48	25.132. 384.987	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					**3.223. 350.640**		**1.387. 620.800**		**1.459. 499.557**		**1.543. 566.732**		**1.622. 597.349**		**1.709. 568.567**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar di Kawasan Perkotaan	%	16,03	21,84	3.223. 350.640	37,47	1.387. 620.800	53,1	1.459. 499.557	68,74	1.543. 566.732	84,37	1.622. 597.349	100	1.709. 568.567	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)					**80.780. 028.878**		**66.882. 239.600**		**70.346. 739.611**		**74.398. 711.813**		**78.207. 925.858**		**79.772. 084.375**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	%	43,75	47,26	80.780. 028.878	50,78	66.882. 239.600	54,98	70.346. 739.611	59,18	74.398. 711.813	63,38	78.207. 925.858	67,58	79.772. 084.375	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**81.663. 054.560**		**106.502. 242.657**		**123.198. 000.000**		**123.819. 000.000**		**124.440. 000.000**		**124.450. 000.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	160. 000.000	100	310. 000.000	100	315. 000.000	100	315. 000.000	100	320. 000.000	100	325 .000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	92,80	100	46.799.112.000	100	91.566.519.657	100	100.023.000.000	100	100.024.000.000	100	100.030.000.000	100	100.035.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	83,99	85	30.753.942.560	86	6.125.723.000	87	6.960.000.000	88	7.530.000.000	88	7.990.000.000	90	7.990.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	3.950.000.000	100	8.500.000.000	100	15.900.000.000	100	15.950.000.000	100	16.100.000.000	100	16.100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					**37.439.355.000**		**38.677.900.000**		**40.015.000.000**		**40.595.000.000**		**40.780.000.000**		**41.135.000.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
Outcome: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	37.439.355.000	100	38.677.900.000	100	40.015.000.000	100	40.595.000.000	100	40.780.000.000	100	41.135.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Rasio Pelindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	Rasio	01:31	01:31		01:31		01:31		01:31		01:31		01:31		Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**8.108.590.420**		**6.919.651.000**		**7.058.044.020**		**7.128.624.460**		**7.271.196.949**		**7.416.620.888**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	33.905.000	100	21.955.000	100	22.394.100	100	22.618.041	100	23.070.402	100	23.531.810	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	87,58	100	4.315.627.000	100	5.274.675.000	100	5.380.168.500	100	5.433.970.185	100	5.542.649.589	100	5.653.502.580	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	86,92	87	257.506.420	87,25	489.983.000	87,5	499.782.660	87,75	504.780.487	88	514.876.096	88,25	525.173.618	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(IP ASN) Perangkat Daerah																
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	3.501.552.0000	100	1.133.038.000	100	1.155.698.760	100	1.167.255.748	100	1.190.600.863	100	1.214.412.880	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana					**6.604.302.000**		**5.377.669.438**		**5.656.232.715**		**5.982.031.719**		**6.288.311.743**		**6.625.365.253**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	6.604.302.000	100	5.377.669.438	100	5.656.232.715	100	5.982.031.719	100	6.288.311.743	100	6.625.365.253	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Program Penanggulangan Bencana Dalam Dokumen Perencanaan	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Kemampuan Aparatur dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**70.153.820.260**		**81.846.880.328**		**90.246.644.560**		**98.140.144.560**		**105.783.144.560**		**113.316.144.560**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	95.000.000	100	30.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	81,49	100	63.374. 944.260	100	73.293. 380.328	100	80.104. 644.560	100	86.967. 644.560	100	93.870. 644.560	100	100.743. 644.560	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	74,65	75	626. 080.000	76	627. 500.000	77	1.127. 500.000	78	1.127. 500.000	79	1.127. 500.000	80	1.127. 500.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.057. 796.000	100	7.896. 000.000	100	8.959. 500.000	100	9.990. 000.000	100	10.730. 000.000	100	11.390. 000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					**29.123. 833.320**		**17.733. 721.798**		**24.197. 910.000**		**23.973. 700.000**		**25.278. 200.000**		**27.125. 400.000**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
Outcome: Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	886. 000.000	100	1.270. 000.000	100	2.600. 000.000	100	1.100. 000.000	100	1.100. 000.000	100	1.600. 000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	%	55	60		65		70		75		80		85		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Layanan Response Time Penanggulan Kejadian Kebakaran 15 Menit	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	%	94,49	92	11.562. 388.190	95	3.530. 460.900	96	4.743. 200.000	97	5.540. 200.000	98	6.117. 200.000	99	6.644. 200.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebaran dan Non Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	%	100	100	3.198. 194.290	100	1.752. 692.000	100	3.215. 000.000	100	3.350. 000.000	100	3.490. 000.000	100	3.650. 000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	58,63	63	13.477. 250.840	67	11.180. 568.898	70	13.639. 710.000	72	13.983. 500.000	74	14.571. 000.000	76	15.231. 200.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
SOSIAL																

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**14.592.000.000**		**13.652.995.250**		**13.789.525.203**		**13.927.420.455**		**14.066.964.659**		**14.207.361.606**	**Dinas Sosial**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	50.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,7	90	12.635.446.000	91	12.741.995.250	92	12.742.525.203	93	12.880.420.455	94	12.891.964.659	95	12.932.361.606	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,08	85,08	231.554.000	85,08	50.000.000	86	125.000.000	86	125.000.000	87	150.000.000	87	150.000.000	Dinas Sosial
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.675.000.000	100	846.000.000	100	907.000.000	100	907.000.000	100	1.010.000.000	100	1.110.000.000	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial					**3.166.240.000**		**2.387.000.000**		**2.510.646.600**		**2.655.259.844**		**2.791.209.148**		**2.940.817.959**	**Dinas Sosial**
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Ikut Serta Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100	100	3.166.240.000	100	2.387.000.000	100%	2.510.646.600	100%	2.655.259.844	100%	2.791.209.148	100%	2.940.817.959	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial					**8.425.000.000**		**4.962.840.000**		**5.219.915.112**		**5.520.582.222**		**5.803.236.032**		**6.114.289.484**	**Dinas Sosial**
Outcome: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	%	100	100	8.425.000.000	100	4.962.840.000	100	5.219.915.112	100	5.520.582.222	100	5.803.236.032	100	6.114.289.484	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					**2.800.000.000**		**3.040.000.000**		**3.197.472.000**		**3.381.646.387**		**3.554.786.682**		**3.745.323.248**	**Dinas Sosial**

Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS	%	90	93	2.800.000.000	94	3.040.000.000	95	3.197.472.000	96	3.381.646.387	97	3.554.786.682	98	3.745.323.248	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana					**3.350.000.000**		**1.901.683.166**		**2.000.190.354**		**2.115.401.318**		**2.223.709.866**		**2.342.900.715**	**Dinas Sosial**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	3.350.000.000	100	1.901.683.166	100	2.000.190.354	100	2.115.401.318	100	2.223.709.866	100	2.342.900.715	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					**1.400.000.000**		**792.000.000**		**833.025.600**		**881.007.875**		**926.115.478**		**975.755.267**	**Dinas Sosial**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Area	1	1 Area	1.400.000.000	1 Area	792.000.000	1 Area	833.025.600	1 Area	881.007.875	1 Area	926.115.478	1 Area	975.755.267	Dinas Sosial
TENAGA KERJA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**15.903.732.840**		**15.577.118.040**		**14.970.729.945**		**14.940.242.462**		**15.538.435.768**		**15.912.346.500**	**Dinas Tenaga Kerja**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	11.346.000	100	10.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	88,52	90	14.642.807.840	90	14.957.118.040	90	13.410.729.945	90	13.357.766.040	90	13.572.766.040	90	13.622.766.040	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85	85	101.300.000	86	20.000.000	87	320.000.000	88	320.000.000	89	330.000.000	90	399.580.460	Dinas Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.148.279.000	100	590.000.000	100	1.175.000.000	100	1.197.476.422	100	1.520.669.728	100	1.775.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja					**0**		**0**		**0**		**250.000.000**		**0**		**0**	**Dinas Tenaga Kerja**

Outcome: Terkelolanya Infomasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	0	0	0	0	0	0	0	100	250.000.000	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					**1.260.750.000**		**1.204.647.200**		**1.254.647.200**		**1.254.647.200**		**1.284.647.200**		**1.314.647.200**	**Dinas Tenaga Kerja**
Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	N/A	13,28	1.170.250.000	15,28	1.054.647.200	17,28	1.054.647.200	19,28	1.054.647.200	21.28	1.084.647.200	23.28	1.084.647.200	Dinas Tenaga Kerja
Outcome : Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	%	84,40	85	90.500.000	86	150.000.000	87	200.000.000	88	200.000.000	89	200.000.000	90	230.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja					**257.726.000**		**3.400.000.000**		**3.400.000.000**		**3.400.000.000**		**3.400.000.000**		**3.400.000.000**	**Dinas Tenaga Kerja**
Outcome: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	43,33	44,44	257.726.000	44,67	3.400.000.000	44,89	3.400.000.000	45,11	3.400.000.000	45,33	3.400.000.000	45,56	3.400.000.000	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial					**1.060.707.000**		**1.400.000.000**		**2.423.200.000**		**2.724.800.000**		**3.006.400.000**		**3.303.000.000**	**Dinas Tenaga Kerja**
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	9,93	9,93	1.060.707.000	15,35	1.400.000.000	25,59	2.423.200.000	38,38	2.724.800.000	51,18	3.006.400.000	61,41	3.303.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ)	%	33,5	34,0		36,0		38,5		41,5		45,0		49,0		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**9.223.295.870**		**10.017.371.400**		**11.863.431.000**		**12.048.431.000**		**12.223.431.000**		**12.398.431.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	54. 000.000	100	39. 000.000	100	169. 000.000	100	174. 000.000	100	179. 000.000	100	184. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	90	90	8.492. 833.870	90	9.437. 971.400	90	10.962. 431.000	90	11.102. 431.000	90	11.242. 431.000	90	11.382. 431.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,04	88,14	53. 850.000	88,24	0	88,34	120. 000.000	88,44	140. 000.000	88,54	150. 000.000	88,64	160. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	622. 612.000	100	540. 500.000	100	612. 000.000	100	632. 000.000	100	652. 000.000	100	672. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan					**4.868. 229.500**		**2.047. 720.800**		**2.373. 854.000**		**2.729. 932.000**		**3.139. 421.800**		**3.610. 335.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	53,39	53,39	4.868. 229.500	53,89	2.047. 720.800	54,39	2.373. 854.000	54,89	2.729. 932.000	55,39	3.139. 421.800	55,89	3.610. 335.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan					**1.116.6 76.564**		**1.123. 275.000**		**1.174. 000.000**		**1.315. 000.000**		**1.395. 000.000**		**1.580. 000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Outcome : Tertanganinya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	64,53	64,53	1.116. 676.564	65,03	1.123. 275.000	65,53	1.174. 000.000	66,03	1.315. 000.000	66,53	1.395. 000.000	67,03	1.580. 000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kualitas Keluarga					**0**		**37.100.000.000**		**3.513.500.000**		**3.579.500.000**		**3.689.500.000**		**3.799.500.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesejahteraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Posyandu dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	Unit	1621	1621	0	1622	37.100.000.000	1626	3.513.500.000	1628	3.579.500.000	1630	3.689.500.000	1636	3.799.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan	%	20	20		32,29		46,86		55,86		64,86		73,86		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					**119.355.000**		**195.000.000**		**224.000.000**		**258.000.000**		**297.000.000**		**341.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Data Gender dan Anak	%	28,97	28,97	119.355.000	29,9	195.000.000	30,84	224.000.000	31,78	258.000.000	32,71	297.000.000	33,64	341.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					**1.451.848.000**		**1.611.868.200**		**1.830.000.000**		**2.010000.000**		**2.175.000.000**		**2.460.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Outcome : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	%	18,84	18,84	1.451.848.000	37,68	1.611.868.200	53,73	1.830.000.000	73,91	2.010000.000	84,05	2.175.000.000	100	2.460.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak					**1.652.109.514**		**1.594.656.000**		**1.823.000.000**		**2.096.000.000**		**2.410.000.000**		**2.770.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Outcome : Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	63,90	63,90	1.652.109.514	64,40	1.594.656.000	64,90	1.823.000.000	65,40	2.096.000.000	65,90	2.410.000.000	66,40	2.770.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PANGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**16.750.288.010**		**18.424.388.000**		**18.475.118.637**		**18.910.012.193**		**19.319.569.627**		**19.430.425.549**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	22.390.000	100	18.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	35.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	84,83	85,5	15.277.441.510	86,5	17.290.388.000	87,5	17.383.118.637	88	17.577.512.193	89,5	17.799.569.627	90	18.022.425.549	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	84,7	84,80	195.900.000	84,90	50.000.000	85,00	65.000.000	85,10	151.000.000	85,20	77.000.000	85,30	83.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.254.556.500	100	1.066.000.000	100	1.005.000.000	100	1.156.500.000	100	1.416.000.000	100	1.290.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat					**278.845.000**		**758.000.000**		**805.000.000**		**825.000.000**		**857.000.000**		**882.000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	91,53	92	278.845.000	92,25	758.000.000	92,5	805.000.000	92,75	825.000.000	93	857.000.000	93,25	882.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan					**2.427.380.000**		**2.102.976.000**		**2.150.000.000**		**2.165.000.000**		**2.185.000.000**		**2.430.000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87	86,5	2.427.380.000	85,5	2.102.976.000	84,5	2.150.000.000	83,5	2.165.000.000	82,5	2.185.000.000	81,5	2.430.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Program Pengawasan Keamanan Pangan					**328.800.000**		**150.000.000**		**165.000.000**		**170.000.000**		**175.000.000**		**200.000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	85,5	89	328.800.000	90	150.000.000	91	165.000.000	92	170.000.000	93	175.000.000	94	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PERTANAHAN																
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					**0**		**100.000.000**		**105.180.000**		**111.238.368**		**116.933.772**		**123.201.423**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	0	100	0	100	100.000.000	100	105.180.000	100	111.238.368	100	116.933.772	100	123.201.423	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					**231.371.969.886**		**170.591.744.743**		**185.233.844.743**		**173.920.047.00**		**179.137.648.410**		**195.260.036.767**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	33	36,76	231.371.969.886	43,2	170.591.744.743	50,34	185.233.844.743	55,65	173.920.047.00	61,85	179.137.648.410	65,7	195.260.036.767	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**84.473.864.864**		**97.649.931.334**		**101.382.000.000**		**100.502.000.000**		**108.592.000.000**		**108.902.000.000**	**Dinas Lingkungan Hidup**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	124.500.000	100	97.649.931.334	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	92,87	92,90	74.333.378.970	93,00		93,10	89.727.000.000	93,15	89.732.000.000	93,20	97.737.000.000	93,25	97.742.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	72,7	72,7	539. 930.000	72,7		72,7	1.160. 000.000	72,7	570. 000.000	72,7	850. 000.000	72,7	950. 000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	95,83	95,90	9.476. 055.894	96,00		96,10	10.450. 000.000	96,15	10.150. 000.000	96,20	9.950. 000.000	96,25	10.150. 000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					**7.736. 511.208**		**7.390. 705.412**		**7.649. 039.648**		**5.547. 621.391**		**5.831. 659.606**		**6.144. 236.561**	**Dinas Lingkungan Hidup**
Outcome: Menurunnya Pencemaraan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	38,62	56,76	7.736. 511.208	56,96	7.390. 705.412	57,16	7.649. 039.648	57,36	5.547. 621.391	57,56	5.831. 659.606	57,76	6.144. 236.561	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	75,1	45,55		46,05		46,55		47,05		47,55		48,05		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pertumbuhan Kampung Iklim	%	-	19,04		38,09		61,90		80,95		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					**25.783. 918.250**		**60.750. 404.000**		**63.897. 274.927**		**67.577. 757.963**		**71.037. 739.171**		**74.845. 361.991**	**Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman Hutan Kota yang Terkelola	%	100	100	326. 049.000	100	250. 000.000	100	262. 950.000	100	278. 095.920	100	292. 334.431	100	308. 003.557	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome : Meningkatnya Pembangunan, dan Pemeliharaan Taman Perkotaan yang Mendukung Estetika Kota	Persentase Penambahan Taman Kota	%	23,67	24,98	25.457. 869.250	25,98	60.500. 404.000	26,98	63.634. 324.927	27,98	67.299. 662.043	28,98	70.745. 404.740	29,98	74.537. 358.434	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					**254. 175.000**		**150. 000.000**		**157. 770.000**		**166. 857.552**		**175. 400.659**		**184. 802.134**	**Dinas Lingkungan Hidup**

Outcome: Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	55	50	254.175.000	50	150.000.000	50	157.770.000	50	166.857.552	50	175.400.659	50	184.802.134	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					**112.770.000**		**13.007.660.000**		**13.012.840.000**		**111.238.368**		**116.933.772**		**123.201.423**	**Dinas Lingkungan Hidup**
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Persentase Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	109	100	112.770.000	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	13.007.660.000	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	13.012.840.000	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	111.238.368	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	116.933.772	100% (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	123.201.423	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					**0**		**300.000.000**		**315.540.000**		**333.715.104**		**350.801.317**		**369.604.268**	**Dinas Lingkungan Hidup**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	0	-	0	100	300.000.000	100	315.540.000	100	333.715.104	100	350.801.317	100	369.604.268	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					**415.375.000**		**250.000.000**		**262.950.000**		**278.095.920**		**292.334.431**		**308.003.557**	**Dinas Lingkungan Hidup**
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Lingkungan Hidup	%	80	80	415.375.000	100	250.000.000	100	262.950.000	100	278.095.920	100	292.334.431	100	308.003.557	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					**255.198.000**		**150.000.000**		**157.770.000**		**166.857.552**		**175.400.659**		**184.802.134**	**Dinas Lingkungan Hidup**
Outcome: Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	80	80	255.198.000	73	150.000.000	73	157.770.000	73	166.857.552	73	175.400.659	73	184.802.134	Dinas Lingkungan Hidup
	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					**77.990.000**		**25.000.000**		**26.295.000**		**27.809.592**		**29.233.443**		**30.800.356**	**Dinas Lingkungan Hidup**

Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100	100	77. 990.000	100	25. 000.000	100	26. 295.000	100	27. 809.592	100	29. 233.443	100	30. 800.356	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan					**202.873. 690.783**		**317.166. 091.218**		**329.078. 607.731**		**336.872. 977.881**		**348.804. 167.218**		**364.346. 375.579**	**Dinas Lingkungan Hidup**
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	11,97	13	202.873. 690.783	13,5	317.166. 091.218	13,7	329.078. 607.731	13,9	336.872. 977.881	14,1	348.804. 167.218	14,3	364.346. 375.579	Dinas Lingkungan Hidup
	Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Poin	71,50	73,10		71,50		71,50		71,50		71,50		71,50		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA	%	71,10	62,00		62,00		63,00		95,00		95,00		95,00		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**31.228. 030.440**		**25.459. 987.000**		**25.969. 186.740**		**26.228. 878.607**		**26.753. 456.180**		**27.020. 990.741**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	94,8	94,8	200. 000.000	94,85	75. 000.000	94,95	85. 000.000	95,05	95. 000.000	96	105. 000.000	96,5	240. 000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	90,92	90,92	27.658. 872.440	91,05	23.124. 537.000	91,25	23.424. 186.740	91,4	23.433. 878.607	91,55	23.698. 456.180	91,75	24.020. 990.741	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	88,58	88,88	1.060. 000.000	89,18	1.110. 000.000	89,48	1.160. 000.000	89,78	1.275. 000.000	89,98	1.325. 000.000	90,02	1.375. 000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	95,8	95,80	2.309. 158.000	96,00	1.150. 450.000	96,50	1.300. 000.000	96,85	1.425. 000.000	97,00	1.625. 000.000	97,25	1.385. 000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk					**3.900. 000.000**		**3.550. 000.000**		**3.733. 890.000**		**3.948. 962.064**		**4.151. 148.922**		**4.373. 650.504**	**Dinas Kependudukan**

															dan Pencatatan Sipil
Outcome: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	65	53	3.900. 000.000	55	3.550. 000.000	57	3.733. 890.000	59	3.948. 962.064	61	4.151. 148.922	65	4.373. 650.504	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil					**1.080. 000.000**		**700. 000.000**		**736. 260.000**		**778. 668.576**		**818. 536.407**		**862. 409.959**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Outcome: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	%	67,29	95	1.080. 000.000	96	700. 000.000	97,5	736. 260.000	98	778. 668.576	98,05	818. 536.407	98,05	862. 409.959	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					**3.960. 127.934**		**3.255. 000.000**		**3.423. 609.000**		**3.620. 808.878**		**3.806. 194.293**		**4.010. 206.307**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	N/A	33	3.960. 127.934	40	3.255. 000.000	50	3.423. 609.000	54	3.620. 808.878	61	3.806. 194.293	69	4.010. 206.307	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan					**150. 000.00**		**150. 000.000**		**157. 770.000**		**166. 857.552**		**175. 400.659**		**184. 802.134**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Outcome: Pemanfaatan Buku Profil Kependudukan bagi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan	%	100	100	150. 000.00	100	150. 000.000	100	157. 770.000	100	166. 857.552	100	175. 400.659	100	184. 802.134	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**24.748. 222.975**		**15.357. 823.875**		**15.664. 980.353**		**15.978. 279.960**		**16.138. 062.759**		**16.299. 443.378**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	127. 240.000	100	5.000.000	100	6.612.500	100	7.604.375	100	8.745.031	100	10.056.785	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86,5	87,5	23.917. 648.475	87,8	14.445. 558.875	87,92	14.838. 672.078	88	15.065. 075.796	88,2	15.128. 633.357	88,5	15.269. 710.841	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,31	86,00	90. 932.000	86	85. 000.000	86,05	78. 688.750	86,05	90. 492.062	86,05	104. 065.871	86,10	119. 675.752	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	612. 402.500	100	822. 265.000	100	741. 007.025	100	815. 107.727	100	896. 618.500	100	900. 000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					**1.360. 000.000**		**1.076. 817.000**		**2.120. 000.000**		**2.220. 000.000**		**2.320. 000.000**		**2.520. 000.000**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	40	50	1.360. 000.000	60	1.076. 817.000	70	2.120. 000.000	80	2.220. 000.000	90	2.320. 000.000	95	2.520. 000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan	%	5,6 (base line BKKBN 2023	6		6		8		10		12		14		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					**1.998. 054.000**		**1.299. 475.000**		**1.366. 787.805**		**1.445. 514.784**		**1.519. 525.139**		**1.600. 971.687**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive* (mCPR)	%	50	55	1.998. 054.000	56	1.299. 475.000	59	1.366. 787.805	61	1.445. 514.783	61,5	1.519. 525.139	62	1.600. 971.687	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	18,5	14		13		12		11,5		11		10		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	25,67	25,17		24,67		24,17		23,67		23,17		22,67		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk					**200. 000.00**		**300. 000.000**		**315. 540.000**		**333. 715.104**		**350. 801.317**		**369. 604.268**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Outcome: Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	%	1,81	1,80	200. 000.000	1,79	300. 000.000	1,78	315. 540.000	1,77	333. 715.104	1,76	350. 801.317	1,75	369. 604.268	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	%	5,2	5		4,95		4,9		4,85		4,8		4,75		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERHUBUNGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**95.909. 354.070**		**81.900. 921.150**		**226.864. 110.010**		**235.329. 900.128**		**246.521. 948.198**		**250.296. 188.075**	**Dinas Perhubungan**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	73. 000.000	100	20. 000.000	100	80. 000.000	100	125. 000.000	100	150. 000.000	100	160. 000.000	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93,92	94,42	92.808. 830.420	95,2	78.029. 778.000	95,5	217.821. 272.010	96	225.529. 879.128	96,42	235.496. 927.198	97	238.261. 167.075	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	86,25	86,50	276. 380.500	86,75	1.100. 000.000	87	2.100. 000.000	87,25	1.900. 000.000	87,50	1.500. 000.000	87,75	2.000. 000.000	Dinas Perhubungan

Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	2.751. 143.150	100	2.751. 143.150	100	6.862. 838.000	100	7.775. 021.000	100	9.375. 021.000	100	9.875. 021.000	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					**102.595. 959.400**		**95.709. 710.517**		**126.306. 483.340**		**134.540. 539.340**		**142.090. 539.340**		**153.023. 939.340**	**Dinas Perhubungan**
Outcome: Meningkatnya Kinerja Perlengkapan Jalan	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Indeks	N/A	85,6	92.720. 275.760	85,63	76.716. 310.524	85,65	97.314. 207.860	85,79	99.467. 330.860	85,8	100.567 .330.860	85,82	102.267. 330.860	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Ketaatan Berlalu Lintas	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	%	10	12	2.109. 146.487	13	1.247. 000.000	13,5	6.473. 208.480	14	8.473. 208.480	14,5	10.173. 208.480	15	10.673. 208.480	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan yang Wajib Uji Dalam Melaksanakan Uji Kendaraan Bermotor Secara Berkala	Jumlah Kendaraan Yang Wajib Uji yang Melakukan Uji Kendaraan Bermotor	Unit	68000	69000	1.471. 193.953	70000	1.400. 000.000	71000	2.600. 000.000	72000	2.800. 000.000	73000	3.550. 000.000	74000	3.550. 000.000	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi	%	49.50	51,72	1.343. 143.200	56,9	1.227. 332.993	57,76	2.300. 000.000	60,34	2.300. 000.000	61,21	2.300. 000.000	61,21	2.300. 000.000	Dinas Perhubungan
Outcome: Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Kapasitas Angkutan Umum yang Terpenuhi	%	20.45	70	4.952. 200.000	75	17.200. 000.000	78	19.700. 000.000	80	21.500. 000.000	83	25.500. 000.000	85	34.233. 400.000	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**18.178. 622.020**		**18.221. 768.487**		**19.276. 558.654**		**19.688. 582.643**		**20.270. 522.496**		**20.752. 770.073**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	25. 000.000	100	46. 000.000	100	104. 123.812	100	114. 383.690	100	125. 364.294	100	137. 005.909	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,27	90	16.336. 795.020	90,73	16.207. 608.487	91,46	17.137. 000.000	92,19	17.672. 000.000	92,92	18.190. 000.000	93,65	18.707. 000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	86,59	87	105. 000.000	87,50	441. 580.000	88	570. 000.000	88,5	625. 000.000	89	640. 000.000	89,5	650. 000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.711. 827.000	100	1.526. 580.000	100	1.465. 434.842	100	1.227. 198.953	100	1.315. 158.202	100	1.258. 764.164	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					**15.966. 359.700**		**13.512. 974.868**		**14.212. 946.966**		**15.031. 612.711**		**15.801. 231.282**		**16.648. 177.279**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	4,21	4,21	15.966. 359.700	4,98	13.512. 974.868	4,98	14.212. 946.966	4,98	15.031. 612.711	4,99	15.801. 231.282	4,99	16.648. 177.279	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					**5.509. 268.850**		**6.909. 454.000**		**8.164. 077.807**		**7.896. 282.813**		**9.305. 323.920**		**9.693. 663.204**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**
Outcome: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Indeks	4,68	4,69	5.509. 268.850	4,70	6.909. 454.000	4,71	8.164. 077.807	4,72	7.896. 282.813	4,73	9.305. 323.920	4,74	9.693. 663.204	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**8.448. 363.274**		**9.331. 964.494**		**9.601. 471.334**		**9.765. 544.580**		**9.791. 820.416**		**9.990. 275.970**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	8.998.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	100	20 .000.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86,06	88	7.977. 115.274	88,15	8.841. 964.494	88,2	8.941. 471.334	88,5	8.985. 544.580	88,7	9.001. 820.416	89	9.160. 275.970	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82	83	75. 250.000	83	60. 000.000	83	210. 000.000	83	310. 000.000	83	310. 000.000	84	310. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	93	93	387. 000.000	94	410. 000.000	95	430. 000.000	95	450. 000.000	96	460. 000.000	96	500. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					**60. 121.800**		**80. 000.000**		**150. 000.000**		**150. 000.000**		**150. 000.000**		**150. 000.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya Terdaftar di NIB Koperasi	%	0,43	2,5	60. 121.800	2,5	80. 000.000	2,5	150 .000.000	2,5	150. 000.000	2,5	150. 000.000	2,5	150. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					**702. 103.900**		**500. 000.000**		**500. 000.000**		**600. 000.000**		**700. 000.000**		**800. 000.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Outcome : Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	%	10,7	10	702. 103.900	10	500. 000.000	10	500. 000.000	10	600. 000.000	10	700. 000.000	10	800. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM					**2.189. 180.100**		**1.750. 000.000**		**1.750. 000.000**		**1.750. 000.000**		**1.750. 000.000**		**1.750. 000.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Outcome : Meningkatnya Pelaku UMKM yang Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	39	40	2.189. 180.100	41	1.750. 000.000	43	1.750. 000.000	44	1.750. 000.000	45	1.750. 000.000	47	1.750. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha	%	7	7		7		7		7		7		7		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi					**52. 900.000**		**150. 000.000**		**150. 000.000**		**150. 000.000**		**150. 000.000**		**150. 000.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Outcome : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	%	10,7	10	52. 900.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	10	150. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					**70. 262.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Outcome : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Telah Tersertifikasi Kesehatannya	%	4	4	70. 262.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					**650. 805.000**		**467. 250.000**		**480. 000.000**		**500. 000.000**		**600. 000.000**		**700. 000.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Outcome: Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,05	1,5	650. 805.000	2	467. 250.000	2	480. 000.000	2	500. 000.000	2	600. 000.000	2	700. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					**371. 820.000**		**250. 000.000**		**250. 000.000**		**350. 000.000**		**500. 000.000**		**500. 000.000**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Outcome: Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya	%	4,34	8,5	371. 820.000	8,5	250. 000.000	8,5	250. 000.000	8,5	350. 000.000	8,5	500. 000.000	8,5	500. 000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PENANAMAN MODAL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**28.647. 582.416**		**26.561. 416.340**		**27.937. 297.706**		**29.546. 486.054**		**31.059. 266.140**		**31.680. 451.463**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	86,93	100	37. 172.000	100	6.000.000	99	10. 000.000	99	10. 000.000	99	10. 000.000	99	10. 000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	91,12	91,5	27.197. 506.416	92	25.903. 756.340	92,5	27.075. 637.706	93	27.484. 826.054	93,5	28.822. 606.140	94	29.843. 791.463	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82,2	83	35. 500.000	84	50. 000.000	85	50. 000.000	86	550. 000.000	87	625. 000.000	88	625. 000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Peningkatan dan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	652. 366.000	100	601. 660.000	100	801. 660.000	100	1.501. 660.000	100	1.601. 660.000	100	1.201. 660.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Pelayanan Penanaman Modal					**3.667.686.130**		**4.293.000.000**		**4.515.377.400**		**4.775.463.138**		**5.019.966.851**		**5.289.037.074**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Outcome: Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	3.667.686.130	100	4.293.000.000	100	4.515.377.400	100	4.775.463.138	100	5.019.966.851	100	5.289.037.074	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					**367.456.300**		**525.319.070**		**519.530.598**		**584.356.360**		**614.275.406**		**647.200.568**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	4 sistem (100%)	100	367.456.300	100	525.319.070	100	519.530.598	100	584.356.360	100	614.275.406	100	647.200.568	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					**205.049.000**		**225.000.000**		**600.735.000**		**250.286.328**		**263.100.988**		**277.203.201**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Outcome: Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	n/a	4	205.049.000	4	225.000.000	4	600.735.000	4	250.286.328	4	263.100.988	4	277.203.201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal					**631.978.000**		**350.000.000**		**368.130.000**		**389.334.288**		**409.268.204**		**431.204.979**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Outcome: Tercapainya Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	%	n/a	100	631.978.000	100	350.000.000	100	368.130.000	100	389.334.288	100	409.268.204	100	431.204.979	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					**115.572.000**		**600.000.000**		**300.000.000**		**667.430.209**		**701.602.634**		**739.208.536**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Outcome: Meningkatnya Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	14,5	20	115. 572.000	23,5	600. 000.000	27,5	300. 000.000	31,5	667. 430.209	35,5	701. 602.634	40	739. 208.536	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**18.284. 600.680**		**20.437. 499.920**		**20.641. 874.919**		**21.054. 712.418**		**21.475. 806.666**		**21.905. 322.799**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan penganggaran	%	100	100	120. 000.000	100	125. 000.000	100	125. 000.000	100	125. 000.000	100	125. 000.000	100	125. 000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100	16.367. 100.680	100	18.152. 499.920	100	18.356. 874.919	100	18.769. 712.418	100	19.190. 806.666	100	19.620. 322.799	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	82,02	82,13	467. 500.000	82,29	600. 000.000	82,46	600. 000.000	82,62	600. 000.000	82,76	600. 000.000	82,82	600. 000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.330. 000.000	100	1.560. 000.000	100	1.560. 000.000	100	1.560. 000.000	100	1.560. 000.000	100	1.560. 000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					**2.019. 600.000**		**2.950. 000.000**		**3.102. 810.000**		**3.281. 531.856**		**3.449. 546.287**		**3.634. 441.968**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
Outcome: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,15	0,11	2.019. 600.000	0,15	2.950. 000.000	0,17	3.102. 810.000	0,18	3.281. 531.856	0,21	3.449. 546.287	0,22	3.634. 441.968	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					**38.971. 711.645**		**240.014. 490.760**		**41.025. 590.820**		**43.388. 664.851**		**45.610. 164.492**		**48.054. 869.308**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
Outcome: Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet/pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	722	732	37.621. 711.645	742	236.014. 490.760	752	39.425. 590.820	762	41.688. 664.851	772	43.810. 164.492	782	46.154. 869.309	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Outcome: Meningkatnya Pemasaran Olahraga	Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	21	9	1.350. 000.000	14	4.000. 000.000	16	1.600. 000.000	18	1.700.. 000.000	20	1.800.. 000.000	22	1.900. 000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					**800. 000.000**		**1.150. 000.000**		**1.209. 570.000**		**1.279. 241.232**		**1.344. 738.383**		**1.416. 816.360**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
Outcome: Meningkatnya Eksistensi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	0,61	1,02	800. 000.000	1,07	1.150. 000.000	1,14	1.209. 570.000	1,22	1.279. 241.232	1,29	1.344. 738.383	1,37	1.416. 816.360	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
STATISTIK																
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					**238. 926.000**		**550. 000.000**		**600. 000.000**		**650. 000.000**		**700. 000.000**		**700. 000.000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**
Outcome: Tercapainya Kolaborasi, Integrasi,dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	Indeks	3,75	4,38	238. 926.000	5	550. 000.000	5	600. 000.000	5	650. 000.000	5	700. 000.000	5	700. 000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
PERSANDIAN																
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					**1.070. 188.000**		**5.126. 524.897**		**3.783 500.000**		**4.723. 500.000**		**3.778. 500.000**		**4.083. 500.000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**
Outcome: Meningkatnya Keamanan Siber dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Indeks	5	5	1.070. 188.000	5	5.126. 524.897	5	3.783 500.000	5	4.723. 500.000	5	3.778. 500.000	5	4.083. 500.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
PARIWISATA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**11.380. 123.620**		**11.905. 306.000**		**12.577. 734.851**		**13.159. 796.378**		**13.250. 025.953**		**13.690. 769.642**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	40.000.000	100	23.032.000	100	42.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	195.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,33	90	10.382.462.220	91	11.289.389.306	92	11.506.234.851	93	11.547.796.378	94	11.848.025.953	95	12.210.769.642	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	84,6	84,7	195.561.900	84,8	50.000.000	84,9	239.500.000	85	160.000.000	85,6	310.000.000	85,7	235.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	90	90	762.099.500	90	542.884.694	90	790.000.000	90	1.395.000.000	90	1.035.000.000	90	1.050.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					**1.075.139.605**		**1.510.000.000**		**1.570.000.000**		**1.650.000.000**		**1.900.000.000**		**1.700.000.000**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
Outcome: Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata	lokasi	1	3	1.075.139.605	3	1.510.000.000	3	1.570.000.000	3	1.650.000.000	3	1.900.000.000	3	1.700.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan	%	47,62	54,76		64,29		64,29		64,29		64,29		64,29		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata	%	97,56	97,89		98,22		98,55		98,88		99,21		99,54		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pemasaran Pariwisata							**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.150.000.000**		**1.150.000.000**		**1.150.000.000**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
Outcome: Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi/Pemasaran Kepariwisataan	%	16,67	14,3	1.609.499.000	12,5	1.000.000.000	11,1	1.000.000.000	10	1.150.000.000	9,1	1.150.000.000	8,3	1.150.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					**589.845.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**650.000.000**		**650.000.000**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	19,71	21,11	589. 845.000	21,11	500. 000.000	21,11	500. 000.000	21,11	500. 000.000	21,11	650. 000.000	21,11	650. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					**0**		**200. 000.000**		**200. 000.000**		**200. 000.000**		**500. 000.000**		**600. 000.000**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
Outcome : Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	orang	n/a	n/a	n/a	50	200. 000.000	50	200. 000.000	50	200. 000.000	50	500. 000.000	50	600. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KEBUDAYAAN																
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					**376. 230.500**		**400. 000.000**		**450. 000.000**		**550. 000.000**		**550. 000.000**		**600. 000.000**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
Outcome: Meningkatnya Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	situs	6	6	376. 230.500	7	400. 000.000	7	450. 000.000	7	550. 000.000	7	550. 000.000	7	600. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan					**0**		**1.170. 000.000**		**1.270. 000.000**		**1.290. 000.000**		**1.390. 000.000**		**1.390. 000.000**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya dalam Pengembangan Kebudayaan	%	n/a	n/a	n/a	4,25	1.170. 000.000	4,25	1.270. 000.000	4,25	1.290. 000.000	4,25	1.390. 000.000	4,25	1.390. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional					**625. 310.000**		**350. 000.000**		**350. 000.000**		**450. 000.000**		**530. 000.000**		**600. 000.000**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
Outcome: Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	6,67	6,67	625. 310.000	33,33	350. 000.000	33,33	350. 000.000	33,33	450. 000.000	33,33	530. 000.000	33,33	600. 000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PERPUSTAKAAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**13.878. 485.080**		**15.067. 149.990**		**15.567. 149.990**		**15.675. 862.850**		**15.989. 380.107**		**16.309. 176.709**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah**

Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	110. 000.000	100	175. 000.000	100	175. 000.000	100	175. 000.000	100	175. 000.000	100	175. 000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	87,36	87,46	12.568. 845.080	87,56	13.142. 149.990	87,66	13.443. 492.990	87,76	13.750. 862.850	87,86	14.064. 380.107	87,96	14.384. 176.709	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	81,35	81,45	67. 500.000	81,46	250. 000.000	81,47	250. 000.000	81,48	250. 000.000	81,49	250. 000.000	81,5	250. 000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	80	80	1.132. 140.000	80	1.500. 000.000	80	1.500.000 .000	80	1.500. 000.000	80	1.500. 000.000	80	1.500. 000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Pembinaan Perpustakaan					**1.516. 686.160**		**1.920. 098.000**		**2.019. 559.076**		**2.135. 885.679**		**2.245. 243.026**		**2.365. 588.052**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah**
Outcome: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	10 (100 Perpustakaan)	10 (110 Perpustakaan)	1.516. 686.160	10 (121 Perpustakaan)	1.920. 098.000	10 (133 Perpustakaan)	2.019. 559.076	10 (146 Perpustakaan)	2.135. 885.679	10 (160 Perpustakaan)	2.245. 243.026	10 (176 Perpustakaan)	2.365. 588.052	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
KEARSIPAN																
Program Pengelolaan Arsip					**1.143. 809.000**		**900. 000.000**		**946. 620.000**		**1.001. 145.312**		**1.052. 403.952**		**1.108. 812.804**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah**
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	54.54 (24 OPD)	56.81 (25 OPD)	1.143. 809.000	59.09 (26 OPD)	900. 000.000	61.36 (27 OPD)	946. 000.000	63.63 (28 OPD)	1.001. 145.312	65.9 (29 OPD)	1.052. 403.952	68.18 (30 OPD)	1.108. 812.804	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip					**179. 991.750**		**200. 000.000**		**210. 360.000**		**222. 476.736**		**233. 867.545**		**246. 402.845**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah**
Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Penambahan Arsip Statis pada Depo Arsip	%	8,7 (403 Boks)	10	179. 991.750	10	200. 000.000	10	210. 360.000	10	222. 476.736	10	233. 867.545	10	246. 402.845	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					**682. 222.100**		**450. 000.000**		**480. 000.000**		**500. 000.000**		**510. 000.000**		**520. 000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1975	1975,1	682. 222.100	1980,2	450. 000.000	1.981,67	480. 000.000	1.982,43	500. 000.000	1.983,5	510. 000.000	1.985,5	520. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan					**393. 707.500**		**318. 000.000**		**330. 000.000**		**340. 000.000**		**350. 000.000**		**360. 000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Jumlah Produksi Olahan Perikanan	Ton	94.818	95.000	393. 707.500	97.000	318. 000.000	97.049	330. 000.000	97.107	340. 000.000	97.184	350. 000.000	97.194	360. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PERTANIAN																
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					**3.201. 884.400**		**924. 000.000**		**940. 500.000**		**955. 000.000**		**970. 000.000**		**985. 000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.379	2.380	3.201. 884.400	2.382	924. 000.000	2.385	940. 500.000	2.387	955. 000.000	2.389	970. 000.000	2.391	985. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	22170	22.180		22.200		22.220		22.240		22.260		22.280		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan	Ton	10.765	11.093		11.195		11.300		11.300		11.300		11.300		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					**0**		**200. 000.000**		**325. 000.000**		**320. 000.000**		**330. 000.000**		**435. 000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	29,60	0	0	29,60	200. 000.000	29,60	325. 000.000	29,60	320. 000.000	29,60	330. 000.000	29,60	435. 000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					**862. 025.000**		**912. 000.000**		**1.030. 500.000**		**1.056. 000.000**		**1.065. 000.000**		**1.065. 000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**

Outcome: Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	-	70,5	862.025.000	71	912.000.000	71,5	1.030.500.000	72	1.056.000.000	72,5	1.065.000.000	73	1.065.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	45,5	46		46,5		47		47,5		48		48,5		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian					**22.800.000**		**25.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**60.000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	%	-	100	22.800.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PERDAGANGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**27.386.123.392**		**29.016.801.000**		**29.789.589.667**		**30.629.524.797**		**31.442.013.085**		**32.328.213.175**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	14.999.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	86	87	26.373.624.392	87	28.385.416.000	88	29.158.204.667	89	29.998.139.797	90	30.810.628.085	91	31.696.828.175	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	82,79	83	473.500.000	83,5	30.000.000	84,0	30.000.000	84,5	30.000.000	85,0	30.000.000	85,5	30.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	80	80	524.000.000	80	566.385.000	80	566.385.000	80	566.385.000	80	566.385.000	80	566.385.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaa					**0**		**20. 000.000**		**20. 000.000**		**20. 000.000**		**20. 000.000**		**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome : Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	85	20. 000.000	85	20. 000.000	85	20. 000.000	85	20. 000.000	85	20. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					**3.142. 170.000**		**5.988. 000.000**		**5.988. 000.000**		**5.988. 000.000**		**5.988. 000.000**		**5.988. 000.000**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi	unit	10 Unit	10	3.142. 170.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	11	5.988. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					**2.683. 000.000**		**1.523. 615.000**		**1.600. 000.000**		**2.000. 000.000**		**2.400. 000.000**		**2.800. 000.000**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome: Tersedia dan terjangkaunya barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	1,54	< 4,00	2.683. 000.000	< 4,00	1.523. 615.000	< 4,00	1.600. 000.000	< 4,00	2.000. 000.000	< 4,00	2.400. 000.000	< 4,00	2.800. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					**219. 907.500**		**300. 000.000**		**300. 000.000**		**300. 000.000**		**300. 000.000**		**300. 000.000**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome: Meningkatnya kualitas produk dan layanan	Persentase peningkatan alat UTTP yang ditera ulang	%	2	2	219. 907.500	2	300. 000.000	2	300. 000.000	2	300. 000.000	2	300. 000.000	2	300. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Ekspor					**1.019. 794.750**		**1.300. 000.000**		**1.300. 000.000**		**1.300. 000.000**		**1.300. 000.000**		**1.300. 000.000**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	USD	375.981. 675 USD	375.000 .000	1.019. 794.750	380.000 .000	1.300. 000.000	385.000 .000	1.300. 000.000	390.000. 000	1.300. 000.000	395.000 .000	1.300. 000.000	400.000 .000	1.300. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PERINDUSTRIAN																
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					**910. 608.000**		**1.600. 000.000**		**1.600. 000.000**		**1.600. 000.000**		**1.600. 000.000**		**1.600. 000.000**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome: Meningkatnya IKM yang Berdaya Saing	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	%	14	14	910. 608.000	15	1.600. 000.000	15	1.600. 000.000	16	1.600. 000.000	16	1.600. 000.000	16	1.600. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Program Pengendalian Izin Usaha Industri					**0**		**60. 000.000**		**60. 000.000**		**60. 000.000**		**60. 000.000**		**60. 000.000**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Outcome : Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	n/a	n/a	n/a	85	60. 000.000	85	60. 000.000	85	60. 000.000	85	60. 000.000	85	60. 000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
SEKRETARIAT DAERAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**167.187. 577.951**		**167.866. 751.000**		**176.562. 248.702**		**186.732. 234.227**		**196.292. 924.619**		**200.218. 783.112**	**Sekretariat Daerah**
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum	Persentase Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	%	30	35	167.187. 577.951	40	167.866. 751.000	45	176.562. 248.702	50	186.732. 234.227	55	196.292. 924.619	60	200.218. 783.112	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Kebutuhan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Tertib Administrasi dan Manajerial Sekretariat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah

Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,49	85,58		85,67		85,75		85,84		85,93		86,02		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					**50.389. 419.150**		**52.012. 000.000**		**54.706. 221.600**		**57.857. 299.964**		**60.819. 593.722**		**62.035. 985.597**	**Sekretariat Daerah**
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan	%	100	100	50.389. 419.150	100	52.012. 000.000	100	54.706. 221.600	100	57.857. 299.964	100	60.819. 593.722	100	62.035. 985.597	Sekretariat Daerah
	Persentase Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Penyelesaian Perkara yang Dihadapi Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Peningkatan Pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Persentase Peningkatan Profil Kelurahan	%	3,57	8,93		10,71		16,07		19,64		19,64		21,43		Sekretariat Daerah
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan					**5.463. 044.375**		**5.426. 520.320**		**5.707. 614.073**		**6.036. 372.643**		**6.345. 434.922**		**6.685. 550.234**	**Sekretariat Daerah**
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	100	100	5.463. 044.375	100	5.426. 520.320	100	5.707. 614.073	100	6.036. 372.643	100	6.345. 434.922	100	6.685. 550.234	Sekretariat Daerah

Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	-	3		3		3		3		3		3		Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**112.228. 837.704**		**111.816. 658.562**		**115.171. 158.319**		**119.626. 293.068**		**124.141. 081.861**		**125.833. 572.549**	**Sekretariat DPRD**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	96,55	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	98	80. 000.000	Sekretariat DPRD
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	87	88	101.077. 071.704	88	97.793. 488.562	88	100.724. 173.219	88	104.142. 778.415	88	108.507. 941.768	88	110.054. 380.021	Sekretariat DPRD
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	86,20	86,2	951. 170.000	86,2	951. 170.000	86,2	979. 705.100	86,2	1.009. 096.253	86,2	1.039. 369.141	86,2	1.070. 550.215	Sekretariat DPRD
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	96,54	96,54	10.120. 596.000	96,54	12.992. 000.000	96,54	13.387. 280.000	96,54	14.394. 418.400	96,54	14.513. 770.952	96,54	14.628. 642.313	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					**97.507. 255.139**		**107.348. 440.671**		**111.933. 012.641**		**116.442. 050.743**		**120.529. 379.241**		**121.283. 593.164**	**Sekretariat DPRD**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N	%	100	100	21.880. 418.000	100	26.638. 181.000	100	28.801. 445.180	100	29.895. 446.223	100	30.152. 259.610	100	30.443. 484.847	Sekretariat DPRD
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Sekretariat DPRD
Outcome: Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	75.626. 837.139	100	80.710. 259.671	100	83.131. 567.461	100	86.546. 604.520	100	90.377. 119.631	100	90.840. 108.317	Sekretariat DPRD

	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	%	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
PERENCANAAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**25.839. 644.760**		**26.444. 520.496**		**26.909. 668.069**		**27.847. 048.700**		**27.573. 239.145**		**27.149. 795.281**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	38. 779.000	100	50. 000.000	100	100. 000.000	100	100. 000.000	100	250. 000.000	100	250. 000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	91,71	91,81	24.438. 135.960	91,91	24.007. 183.440	92,01	24.404. 668.069	92,11	25.224. 548.700	92,21	24.883. 239.145	92,31	24.774. 795.281	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,38	88,40	434. 002.800	88,42	707. 300.000	88,44	780. 000.000	88,46	847. 500.000	89,48	915. 000.000	88,50	550. 000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	N/A	94,4	928. 727.000	94,59	1.680. 037.056	94,77	1.625. 000.000	94,96	1.675. 000.000	95,15	1.525. 000.000	95,33	1.575. 000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					**3.570. 484.000**		**2.453. 285.000**		**2.650. 000.000**		**2.650. 000.000**		**3.150. 000.000**		**4.600. 000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
Outcome: Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program	%	81,58	83,30	3.570. 484.000	84,90	2.453. 285.000	86,50	2.650. 000.000	88,10	2.650. 000.000	89,70	3.150. 000.000	91,30	4.600. 000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					**437. 227.000**		**2.390. 000.000**		**2.390. 000.000**		**2.440. 000.000**		**2.800. 000.000**		**2.700. 000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan,**

															Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	133.170.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100	53.573.000	100	590.000.000	100	590.000.000	100	590.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Outcome: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	97	100	250.484.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.600.000.000	100	1.450.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KEUANGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**123.253.659.660**		**134.274.849.860**		**136.960.346.857**		**139.699.553.794**		**142.493.544.870**		**145.343.415.768**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	58.700.000	100	10.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,49	90	122.058.815.360	95,60	132.484.372.860	95,70	134.213.966.857	95,80%	136.953.173.794	95,90%	139.747.164.870	96%	142.597.035.768	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,09	88,11	50.000.000	88,44	160.477.000	88,87	700.000.000	89,20	700.000.000	89,63	700.000.000	89,96	700.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	1.086. 144.300	100	1.620. 000.000	100	1.896. 380.000	100	1.896. 380.000	100	1.896. 380.000	100	1.896. 380.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					**35.703. 537.054**		**34.465. 000.000**		**35.503. 097.000**		**37.719. 835.388**		**39.850. 770.959**		**42.195. 812.282**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100	100	33.491. 697.054	100	31.360. 000.000	100	32.113. 141.000	100	34.219. 679.388	100	36.231. 014.959	100	38.576. 056.282	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	%	86,12	86,2	425. 145.000	86,5	1.360. 000.000	86,7	1.263. 650.000	86,7	1.373. 850.000	86,7	1.493. 450.000	86,7	1.493. 450.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	N/A	77	1.786. 695.000	77	1.745. 000.000	79	2.126. 306.000	81	2.126. 306.000	84	2.126. 306.000	86	2.126. 306.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					**3.001. 116.600**		**3.850. 000.000**		**3.900. 000.000**		**3.900. 000.000**		**3.900. 000.000**		**3.900. 000.000**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
Outcome: Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	%	N/A	100	3.001. 116.600	100	3.850. 000.000	100	3.900. 000.000	100	3.900. 000.000	100	3.900. 000.000	100	3.900. 000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penyelesaian Usulan Penggunaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	N/A	70		71		72		73		74		75		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penyelesaian Usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	%	N/A	82		83		84		85		86		87		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	N/A	51		52		53		54		55		56		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	N/A	4		5		6		7		8		9		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**123.253. 659.660**		**225.574. 028.000**		**235.732. 680.232**		**249.560. 162.613**		**260.647. 242.939**		**274.209. 715.156**	**Badan Pendapatan Daerah**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	96,07	96,1	58. 700.000	96,25	10. 000.000	96,3	10. 000.000	96,5	10. 000.000	96,75	160. 000.000	97	10. 000.000	Badan Pendapatan Daerah
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	70,15	94,83	122.058. 815.360	95,5	220.999. 074.000	96,58	230.622. 680.232	97	243.900. 162.613	97,02	255.337. 242.939	97,50	268.049. 715.156	Badan Pendapatan Daerah
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	89,12	90	50. 000.000	91	150. 000.000	92	150. 000.000	93	650. 000.000	94	150. 000.000	95	650. 000.000	Badan Pendapatan Daerah
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	99,81	99,82	1.086. 144.300	99,83	4.414. 954.000	99,84	4.950. 000.000	99,85	5.000. 000.000	99,86	5.000. 000.000	99,87	5.500. 000.000	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					**15.065. 493.036**		**5.964. 934.000**		**7.800. 000.000**		**8.000. 000.000**		**10.100. 000.000**		**10.100. 000.000**	**Badan Pendapatan Daerah**
Outcome: Meningkatnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	44,93	57,05	15.065. 493.036	60,59	5.964. 934.000	61,75	7.800. 000.000	62,89	8.000. 000.000	64,03	10.100. 000.000	65,15	10.100. 000.000	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	%	1,27	2		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		Badan Pendapatan Daerah
	Nilai Hasil Survei Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai	86,37	86,4		86,5		86,75		87		87,25		87,3		Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang Terbayarkan	%	7,03	8		8		8		8		8		8		Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN DAERAH																

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**19.066. 415.040**		**17.146. 236.000**		**17.489. 160.720**		**17.838. 943.934**		**18.195. 722.813**		**18.559. 637.269**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Outcome : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10. 000.000	100	65. 000.000	100	65. 000.000	100	65. 000.000	100	65. 000.000	100	65. 000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	89,25	89,5	18.468. 002.040	89,75	15.920. 236.000	90	15.860. 160.720	90,25	16.094. 943.934	90,5	16.346. 722.813	90,75	16.610. 637.269	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85	85,25	24. 000.000	85,50	220. 000.000	85,75	424. 000.000	86	459. 000.000	86,25	474. 000.000	86,50	494. 000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	564. 413.000	100	941. 000.000	100	1.140. 000.000	100	1.220. 000.000	100	1.310. 000.000	100	1.390. 000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah					**6.709. 210.500**		**10.868. 200.000**		**11.431. 172.760**		**12.089. 608.311**		**12.708. 596.256**		**13.389. 777.016**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Mutu Layanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	Nilai	Baik (87.75)	Baik (88.00)	1.438. 580.500	Baik (88.25)	1.900. 000.000	Baik (88.50)	2.140. 000.000	Baik (88.75)	2.260. 000.000	Sangat Baik (90.00)	2.340. 000.000	Sangat Baik (90.25)	2.430. 000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi dan Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	50,47	50,60	5.120. 562.000	50,65	8.448. 200.000	50,70	8.516. 194.760	50,75	9.004. 630.311	50,80	9.493. 618.256	50,85	10.034. 799.016	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Outcome : Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	30,84	30,85	150. 068.000	30,86	520. 000.000	30,87	774. 978.000	30,88	824. 978.000	30,89	874. 978.000	30,90	924. 978.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
Program Riset dan Inovasi Daerah					**2.335. 331.000**		**2.550. 000.000**		**2.800. 000.000**		**2.800. 000.000**		**3.100. 000.000**		**3.100. 000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**
Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	%	79,31	80,00	2.335. 331.000	81,00	2.550. 000.000	82,00	2.800. 000.000	83,00	2.800. 000.000	84,00	3.100. 000.000	85,00	3.100. 000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	Predikat	5	2		2		2		2		2		3		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
INSPEKTORAT DAERAH																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**48.721. 401.060**		**46.318. 779.000**		**48.718. 091.752**		**51.524. 253.837**		**54.162. 295.634**		**57.065. 394.680**	**Inspektorat**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	48.721. 401.060	100	46.318. 779.000	100	48.718. 091.752	100	51.524. 253.837	100	54.162. 295.634	100	57.065. 394.680	Inspektorat
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93,8	95		95		96		96		100		100		
Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Inspektorat	IP ASN Inspektorat	%	86,8	86,8		86,9		86,95		87		87,5		88		
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pengawasan					**1.907. 429.000**		**1.540. 220.000**		**1.620. 003.396**		**1.713. 315.592**		**1.801. 037.350**		**1.897. 572.952**	**Inspektorat**
Outcome: Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal Tahun Anggran N-1	%	74	74,5	1.907. 429.000	74,55	1.540. 220.000	74,6	1.620. 003.396	74,65	1.713. 315.592	74,7	1.801. 037.350	74,75	1.897. 572.952	Inspektorat

Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Eksternal Tahun Anggran N-1	%	86,50	86,55		86,6		86,65		86,7		86,75		86,8		Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					**1.461. 553.000**		**1.319. 118.800**		**1.387. 449.154**		**1.467. 366.225**		**1.542. 495.376**		**1.625. 173.128**	**Inspektorat**
Outcome: Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko dan Implementasi Strategi Pencegahan Korupsi	Indeks Manajemen Risiko	Poin	2.717	3	1.461. 553.000	3	1.319. 118.800	3,15	1.387. 449.154	3,17	1.467. 366.225	3,2	1.542. 495.376	3,22	1.625. 173.128	Inspektorat
	Nilai MCSP KPK	Poin	90,23	90,5		91		91,5		92		92,5		93		Inspektorat
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**12.919. 513.000**		**13.213. 744.000**		**13.478. 018.880**		**13.747. 579.258**		**14.022. 530.840**		**14.302. 981.460**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	12.919. 513.000	100	13.213. 744.000	100	13.478. 018.880	100	13.747. 579.258	100	14.022. 530.840	100	14.302. 981.460	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					**2.812. 569.800**		**1.885. 499.300**		**1.983. 168.164**		**2.097. 398.650**		**2.204. 785.461**		**2.322. 961.962**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Outcome: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	2.812. 569.800	100	1.885. 499.300	100	1.983. 168.164	100	2.097. 398.650	100	2.204. 785.461	100	2.322. 961.962	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					**3.837. 400.000**		**2.637. 200.000**		**2.773. 806.960**		**2.933. 578.241**		**3.083. 777.447**		**3.249. 067.918**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	2.812. 569.800	100	2.637. 200.000	100	2.773. 806.960	100	2.933. 578.241	100	3.083. 777.447	100	3.249. 067.918	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					**15.229. 773.200**		**10.287. 880.000**		**10.820. 792.184**		**11.444. 069.814**		**12.030. 006.188**		**12.674. 814.520**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Outcome: Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	15.229. 773.200	100	10.287. 880.000	100	10.820. 792.184	100	11.444. 069.814	100	12.030. 006.188	100	12.674. 814.520	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					**9.800. 000.000**		**5.850. 000.000**		**6.153. 030.000**		**6.507. 444.528**		**6.840. 625.688**		**7.207. 283.225**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Outcome: Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	N/A	70	9.800. 000.000	71	5.850. 000.000	72	6.153. 030.000	73	6.507. 444.528	74	6.840. 625.688	75	7.207. 283.225	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya					**1.400. 000.000**		**377. 820.900**		**397. 392.023**		**420. 281.803**		**441. 800.231**		**465. 480.724**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Outcome: Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	1.400. 000.000	100	377. 820.900	100	397. 392.023	100	420. 281.803	100	441. 800.231	100	465. 480.724	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KECAMATAN PONDOK GEDE																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**22.665. 058.526**		**22.677. 507.424**		**22.945. 487.424**		**22.945. 487.424**		**22.945. 487.424**		**22.945. 487.424**	**Kecamatan Pondok Gede**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	7.800.000	100	28. 395.000	100	30. 000.000	100	30 .000.000	100	30. 000.000	100	30. 000.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	96,63	96,7	16.223. 751.000	96,9	18.945 .928.000	97	18.945. 303.000	97,2	18.945. 303.000	97,4	18.945. 303.000	97,6	18.945. 303.000	Kecamatan Pondok Gede
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	80	80,2	102. 338.800	80,4	20. 000.000	80,6	20. 000.000	80,8	20. 000.000	81	20. 000.000	81,2	20. 000.000	Kecamatan Pondok Gede

Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.331. 168.726	100	3.683. 184.424	100	3.950. 184.424	100	3.950. 184.424	100	3.950. 184.424	100	3.950. 184.424	Kecamatan Pondok Gede
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**240. 000.000**		**280. 000.000**		**370. 000.000**		**370. 000.000**		**370. 000.000**		**370. 000.000**	**Kecamatan Pondok Gede**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	240. 000.000	100	280. 000.000	100	370. 000.000	100	370. 000.000	100	370. 000.000	100	370. 000.000	Kecamatan Pondok Gede
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**17.650. 469.800**		**19.503. 237.000**		**19.578. 237.000**		**19.578. 237.000**		**19.578. 237.000**		**19.578. 237.000**	**Kecamatan Pondok Gede**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	17.650. 469.800	100	19.503. 237.000	100	19.578. 237.000	100	19.578. 237.000	100	19.578. 237.000	100	19.578. 237.000	Kecamatan Pondok Gede
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**39. 350.000**		**20. 000.000**		**50. 000.000**		**50. 000.000**		**50. 000.000**		**50. 000.000**	**Kecamatan Pondok Gede**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	39. 350.000	100	20. 000.000	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	50. 000.000	Kecamatan Pondok Gede
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**1.252. 675.000**		**1.148. 000.000**		**1.336. 125.000**		**1.336. 125.000**		**1.336. 125.000**		**1.336. 125.000**	**Kecamatan Pondok Gede**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.252. 675.000	100	1.148. 000.000	100	1.336. 125.000	100	1.336. 125.000	100	1.336. 125.000	100	1.336. 125.000	Kecamatan Pondok Gede
KECAMATAN JATI SAMPURNA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**22.831. 699.380**		**22.574. 254.000**		**23.191. 268.536**		**23.315. 500.536**		**23.447. 592.536**		**23.545. 196.536**	**Kecamatan Jatisampurna**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	3.000.000	100	11. 200.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,26	95,3	15.521. 771.000	95,5	19.488. 977.000	95,7	19.488. 977.000	95,9	19.490. 977.000	96	19.493. 977.000	96,2	19.498. 977.000	Kecamatan Jatisampurna

Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	82,71	82,9	53. 900.000	83,1	20. 000.000	83,3	20. 000.000	83,5	20. 000.000	83,7	20. 000.000	83,9	20. 000.000	Kecamatan Jatisampurna
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	7.253. 028.380	100	3.104. 077.000	100	3.667. 291.536	100	3.789. 523.536	100	3.918. 615.536	100	4.011. 219.536	Kecamatan Jatisampurna
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**159. 755.000**		**310. 000.000**		**350. 000.000**		**350. 000.000**		**350. 000.000**		**350. 000.000**	**Kecamatan Jatisampurna**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	159. 755.000	100	310. 000.000	100	350. 000.000	100	350. 000.000	100	350. 000.000	100	350. 000.000	Kecamatan Jatisampurna
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**14.677. 381.400**		**15.618. 572.800**		**16.093. 572.800**		**16.115. 572.800**		**16.115. 572.800**		**16.145. 572.800**	**Kecamatan Jatisampurna**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	14.677. 381.400	100	15.618. 572.800	100	16.093. 572.800	100	16.115. 572.800	100	16.115. 572.800	100	16.145. 572.800	Kecamatan Jatisampurna
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**50. 000.000**		**20. 000.000**		**50. 000.000**		**50. 000.000**		**50. 000.000**		**50. 000.000**	**Kecamatan Jatisampurna**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50. 000.000	100	20. 000.000	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	50. 000.000	Kecamatan Jatisampurna
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**1.205. 914.000**		**1.369. 875.000**		**1.420. 875.000**		**1.420. 875.000**		**1.420. 875.000**		**1.420. 875.000**	**Kecamatan Jatisampurna**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.205. 914.000	100	1.369. 875.000	100	1.420. 875.000	100	1.420. 875.000	100	1.420. 875.000	100	1.420. 875.000	Kecamatan Jatisampurna
KECAMATAN JATIASIH																

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**25.993.962.764**		**26.636.096.600**		**26.636.096.600**		**26.636.096.600**		**26.636.096.600**		**26.636.096.600**	**Kecamatan Jatiasih**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	30.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,80	95,82	19.441.957.000	95,84	22.487.777.144	95,86	22.487.777.144	95,88	22.487.777.144	95,90	22.487.777.144	95,92	22.487.777.144	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	86,11	86,13	6.375.000	86,15	20.000.000	86,17	20.000.000	86,19	20.000.000	86,21	20.000.000	86,23	20.000.000	Kecamatan Jatiasih
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.515.630.764	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	100	4.113.319.456	Kecamatan Jatiasih
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**39.362.000**		**140.000.000**		**140.000.000**		**140.000.0000**		**140.000.000**		**140.000.000**	**Kecamatan Jatiasih**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	88,08	88,08	39.362.000	88,10	140.000.000	88,12	140.000.000	88,14	140.000.000	88,16	140.000.000	88,18	140.000.000	Kecamatan Jatiasih
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**24.668.021.200**		**24.657.889.000**		**24.657.889.000**		**24.657.889.000**		**24.657.889.000**		**24.657.889.000**	**Kecamatan Jatiasih**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	24.668.021.200	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	100	24.657.889.000	Kecamatan Jatiasih
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**38.438.000**		**70.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**	**Kecamatan Jatiasih**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	38.438.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Jatiasih
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**267.014.000**		**340.000.000**		**340.000.000**		**340.000.000**		**340.000.000**		**340.000.000**	**Kecamatan Jatiasih**

Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Jatisampurna	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	267. 014.000	100	340. 000.000	100	340. 000.000	100	340. 000.000	100	340. 000.000	100	340. 000.000	Kecamatan Jatiasih
KECAMATAN BANTAR GEBANG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**19.539. 781.360**		**19.338. 218.000**		**20.171. 491.692**		**21.354. 889.614**		**22.447. 987.962**		**23.127. 427.601**	**Kecamatan Bantargebang**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10. 000.000	100	10. 284.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,05	95,06	12.888. 555.000	95,07	15.832. 370.800	95,08	16.855. 653.492	95,09	18.029. 051.414	95,1	19.122. 149.762	95,05	19.801. 589.401	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	82,59	82,6	9.275.000	82,61	20. 000.000	82,62	20. 000.000	82,63	20. 000.000	82,64	20. 000.000	82,65	20. 000.000	Kecamatan Bantargebang
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.631. 951.360	100	3.475. 563.200	100	3.275. 838.200	100	3.285. 838.200	100	3.285. 838.200	100	3.285. 838.200	Kecamatan Bantargebang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**204. 562.000**		**219. 000. 000**		**230. 344.200**		**243. 612.026**		**256. 084.962**		**269. 811.116**	**Kecamatan Bantargebang**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	204. 562.000	100	219. 000.000	100	230. 344.200	100	243. 612.026	100	256. 084.962	100	269. 811.116	Kecamatan Bantargebang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**8.643. 723.200**		**9.338. 084.200**		**9.821. 796.962**		**10.387. 532.467**		**10.919. 374.129**		**11.504. 652.582**	**Kecamatan Bantargebang**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	8.643. 723.200	100	9.338. 084.200	100	9.821. 796.962	100	10.387. 532.467	100	10.919. 374.129	100	11.504. 652.582	Kecamatan Bantargebang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**37. 025.000**		**80. 000.000**		**84. 144.000**		**88. 990.694**		**80. 000.000**		**98. 561.138**	**Kecamatan Bantargebang**

Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wlayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	37. 025.000	100	80. 000.000	100	84. 144.000	100	88. 990.694	100	80. 000.000	100	98. 561.138	Kecamatan Bantargebang
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**790. 625.000**		**859. 604.000**		**904. 131.487**		**956. 209.461**		**1.005. 167.385**		**1.059. 044.357**	**Kecamatan Bantargebang**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	790. 625.000	100	859.604. 000	100	904. 131.487	100	956. 209.461	100	1.005. 167.385	100	1.059. 044.357	Kecamatan Bantargebang
KECAMATAN RAWA LUMBU																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**23.830 .763.240**		**22.203. 818.748**		**22.978. 458.559**		**24.318. 041.772**		**25.577. 069.511**		**26.335. 631.596**	**Kecamatan Rawalumbu**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	27. 745.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	94,7	94,8	13.572. 911.000	95	17.925. 506.000	95,2	18.838. 380.811	95,4	20.147. 964.024	95,6	21.361. 991.763	95,8	22.125. 553.848	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,4	84,6	9. 275.000	84,8	20. 000.000	85	20. 000.000	85,1	20. 000.000	85,2	20. 000.000	85,3	20. 000.000	Kecamatan Rawalumbu
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	10.220 832.240	100	4.253. 312.748	100	4.105. 077.748	100	4.135. 077.748	100	4.180. 077.748	100	4.195. 077.748	Kecamatan Rawalumbu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**151. 432.000**		**95. 000.000**		**99. 921.000**		**105. 676.450**		**111. 087.084**		**117. 041.352**	**Kecamatan Rawalumbu**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	151. 432.000	100	95. 000.000	100	99. 921.000	100	105. 676.450	100	111. 087.084	100	117. 041.352	Kecamatan Rawalumbu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**21.862. 987.400**		**21.626. 811.800**		**22.747. 080.651**		**24.057. 312.497**		**25.289. 046.897**		**26.644. 539.810**	**Kecamatan Rawalumbu**

Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	21.862. 987.400	100	21.626. 811.800	100	22.747. 080.651	100	24.057. 312.497	100	25.289. 046.897	100	26.644. 539.810	Kecamatan Rawalumbu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**50. 000.000**		**20. 000.000**		**21. 036.000**		**22. 247.674**		**23. 386.754**		**24. 640.285**	**Kecamatan Rawalumbu**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50. 000.000	100	20. 000.000	100	21. 036.000	100	22. 247.674	100	23. 386.754	100	24. 640.285	Kecamatan Rawalumbu
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**1.340. 695.000**		**1.315. 695.000**		**1.383. 848.001**		**1.463. 557.646**		**1.538. 491.797**		**1.620. 954.958**	**Kecamatan Rawalumbu**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.340. 695.000	100	1.315. 695.000	100	1.383. 848.001	100	1.463. 557.646	100	1.538. 491.797	100	1.620. 954.958	Kecamatan Rawalumbu
KECAMATAN MEDAN SATRIA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**20.364. 262.104**		**20.827. 646.850**		**21.911. 698.957**		**23.173. 572.817**		**24.359. 186.945**		**25.086. 716.553**	**Kecamatan Medansatria**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10. 000.000	100	10. 000.000	100	10. 500.000	100	11. 025.000	100	11. 576.250	100	12. 155.063	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93.59	93.59	14.044. 346.000	93,8	17.421. 641.000	94	18.313. 892.814	94,2	19.396. 876.367	94,4	20.446. 558.495	94,6	21.468. 886.418	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	85,02	85,02	0	85,03	20. 000.000	85,04	20. 000.000	85,05	20. 000.000	85,06	20. 000.000	85,07	20. 000.000	Kecamatan Medansatria
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	91	91	6.309. 916.104	91,5	3.376. 005.850	92	3.567. 306.143	92,5	3.745. 671.450	93	3.881. 052.200	93,5	3.585. 675.072	Kecamatan Medansatria
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**285. 954.000**		**1.896. 244.000**		**1.994. 469.439**		**2.109. 350.879**		**2.217. 349.644**		**2.336. 199.585**	**Kecamatan Medansatria**

Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	285. 954.000	100	1.896. 244.000	100	1.994. 469.439	100	2.109. 350.879	100	2.217. 349.644	100	2.336. 199.585	Kecamatan Medansatria
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**15.402. 568.100**		**20.180. 269.300**		**21.225. 607.250**		**22.448. 202.227**		**23.597. 550.181**		**24.862. 378.871**	**Kecamatan Medansatria**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	15.402. 568.100	100	20.180. 269.300	100	21.225. 607.250	100	22.448. 202.227	100	23.597. 550.181	100	24.862. 378.871	Kecamatan Medansatria
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**115. 503.000**		**20. 000.000**		**21. 036.000**		**22. 247.674**		**23. 386.754**		**24. 640.285**	**Kecamatan Medansatria**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	115. 503.000	100	20. 000.000	100	21. 036.000	100	22. 247.674	100	23. 386.754	100	24. 640.285	Kecamatan Medansatria
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**959. 676.162**		**2.131. 285.312**		**2.241. 685.891**		**2.370. 806.998**		**2.492. 192.317**		**2.625. 773.825**	**Kecamatan Medansatria**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	959. 676.162	100	2.131. 285.312	100	2.241. 685.891	100	2.370. 806.998	100	2.492. 192.317	100	2.625. 773.825	Kecamatan Medansatria
KECAMATAN MUSTIKA JAYA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**21.609. 500.740**		**19.913. 148.040**		**20.955. 009.108**		**22.173. 537.633**		**23.319. 062.760**		**24.024. 634.643**	**Kecamatan Mustika Jaya**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	10. 000.000	100	10. 000.000	100	10. 000.000	100	10. 000.000	100	10. 000.000	100	10. 000.000	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,34	95,34	13.028. 031.000	95,35	17.328. 330.440	95,36	18.370. 191.508	95,37	19.588. 720.033	95,38	20.734. 244.960	95,39	21.439. 816.843	Kecamatan Mustika Jaya
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	87,66	87,66	45. 500.000	87,66	20.. 000.000	87,67	20.. 000.000	87,68	20.. 000.000	87,69	20.. 000.000	87,71	20.. 000.000	Kecamatan Mustika Jaya

Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	8.525.969.740	100	2.554.817.600	100	2.554.817.600	100	2.554.817.600	100	2.554.817.800	100	2.554.817.800	Kecamatan Mustika Jaya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**180.000.000**		**310.000.000**		**326.058.000**		**344.838.941**		**362.494.695**		**381.924.410**	**Kecamatan Mustika Jaya**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	180.000.000	100	310.000.000	100	326.058.000	100	344.838.941	100	362.494.695	100	381.924.410	Kecamatan Mustika Jaya
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**19.955.394.600**		**21.807.729.600**		**22.937.369.993**		**24.258.562.505**		**25.500.600.905**		**26.867.433.114**	**Kecamatan Mustika Jaya**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	19.955.394.600	100	21.807.729.600	100	22.937.369.993	100	24.258.562.505	100	25.500.600.905	100	26.867.433.114	Kecamatan Mustika Jaya
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**21.200.000**		**20.000.000**		**21.036.000**		**25.000.000**		**23.386.754**		**24.640.285**	**Kecamatan Mustika Jaya**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	21.200.000	100	20.000.000	100	21.036.000	100	25.000.000	100	23.386.754	100	24.640.285	Kecamatan Mustika Jaya
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**427.285.000**		**471.112.000**		**495.515.602**		**524.057.300**		**550.889.034**		**580.416.686**	**Kecamatan Mustika Jaya**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	427.285.000	100	471.112.000	100	495.515.602	100	524.057.300	100	550.889.034	100	580.416.686	Kecamatan Mustika Jaya
KECAMATAN PONDOK MELATI																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**18.631.928.770**		**18.727.072.600**		**19.357.041.120**		**20.622.561.445**		**21.690.852.591**		**22.348.853.169**	**Kecamatan Pondok Melati**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	1.000.000	100	2.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Kecamatan Pondok Melati

Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,35	95,35	12.473. 060.000	95,44	15.666. 532.000	95,53	12.476. 060.000	95,62	12.476. 060.000	95,71	12.476. 060.000	95,71	12.476. 060.000	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,10	84,10	40. 000.000	84,18	20. 000.000	84,26	20. 000.000	84,32	20. 000.000	84,42	20. 000.000	84,42	20. 000.000	Kecamatan Pondok Melati
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	6.117. 868.770	100	3.038. 540.600	100	6.855. 981.120	100	8.121. 501.445	100	9.189. 792.591	100	9.847. 793.169	Kecamatan Pondok Melati
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**232. 309.000**		**240. 000.000**		**252. 432.000**		**266. 972.083**		**280. 641.054**		**295. 683.414**	**Kecamatan Pondok Melati**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	232. 309.000	100	240. 000.000	100	252. 432.000	100	266. 972.083	100	280. 641.054	100	295. 683.414	Kecamatan Pondok Melati
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**8.544. 065.400**		**15.323. 514.400**		**16.117. 272.446**		**17.045. 627.339**		**17.918. 363.459**		**18.878. 787.740**	**Kecamatan Pondok Melati**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	8.544. 065.400	100	15.323. 514.400	100	16.117. 272.446	100	17.045. 627.339	100	17.918. 363.459	100	18.878. 787.740	Kecamatan Pondok Melati
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**50. 000.000**		**20. 000.000**		**21. 036.000**		**22. 247.674**		**23. 386.754**		**24. 640.285**	**Kecamatan Pondok Melati**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50. 000.000	100	20. 000.000	100	21. 036.000	100	22. 247.674	100	23. 386.754	100	24. 640.285	Kecamatan Pondok Melati
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**500. 896.000**		**400. 000.000**		**420. 720.000**		**444. 953.472**		**467. 753.090**		**492. 805.691**	**Kecamatan Pondok Melati**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	500. 896.000	100	400. 000.000	100	420. 720.000	100	444. 953.472	100	467. 753.090	100	492. 805.691	Kecamatan Pondok Melati

KECAMATAN BEKASI TIMUR																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**24.123. 780.400**		**22.596. 159.104**		**23.774. 410.146**		**25.152. 456.170**		**26.447. 941.926**		**27.245. 880.184**	**Kecamatan Bekasi Timur**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	30. 000.000	100	15. 789.424	100	15. 789.424	100	15. 789.424	100	15. 789.424	100	15. 789.424	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	96,02	96,15	13.569. 601.000	96,30	18.123. 617.000	96,45	19.301. 868.042	96,6	20.679. 914.066	96,75	21.975. 399.822	97	22.773. 338.080	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	83,13	83,15	33. 240.000	83,17	20. 000.000	83,19	30 000.000	83,21	30. 000.000	83,23	30. 000.000	83,25	30. 000.000	Kecamatan Bekasi Timur
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	10.490. 939.400	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	100	4.436. 752.680	Kecamatan Bekasi Timur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**230. 787.000**		**290. 000.000**		**305. 022.000**		**322. 591.267**		**339. 107.940**		**357. 284.126**	**Kecamatan Bekasi Timur**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	230. 787.000	100	290. 000.000	100	305. 022.000	100	322. 591.267	100	339. 107.940	100	357. 284.126	Kecamatan Bekasi Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**20.828. 866.000**		**22.916. 348.800**		**24.103. 415.668**		**25.491. 772.410**		**26.796. 951.158**		**28.233. 267.740**	**Kecamatan Bekasi Timur**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	20.828. 866.000	100	22.916. 348.800	100	24.103. 415.668	100	25.491. 772.410	100	26.796. 951.158	100	28.233. 267.740	Kecamatan Bekasi Timur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**100. 000.000**		**20. 000.000**		**21. 036.000**		**22. 247.674**		**23. 386.754**		**24. 640.285**	**Kecamatan Bekasi Timur**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	100. 000.000	100	20. 000.000	100	21. 036.000	100	22. 247.674	100	23. 386.754	100	24. 640.285	Kecamatan Bekasi Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**145. 150.000**		**50. 000.000**		**52. 590.000**		**55. 619.184**		**58. 466.886**		**61. 600.711**	**Kecamatan Bekasi Timur**

Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	145. 150.000	100	50. 000.000	100	52. 590.000	100	55. 619.184	100	58. 466.886	100	61. 600.711	Kecamatan Bekasi Timur
KECAMATAN BEKASI UTARA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**34.147. 726.388**		**32.013. 001.096**		**33.670. 756.553**		**35.609. 616.130**		**37.432. 316.476**		**38.554. 985.970**	**Kecamatan Bekasi Utara**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	15. 358.013	100	20. 000.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	100	20. 000.000	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	97,34	97,34	20.182. 242.000	97,34	27.342. 681.000	97,34	29.000. 436.457	97,34	30.939. 296.034	97,34	32.761. 996.380	97,34	33.884. 665.874	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,22	84,6	18. 550.000	84,22	20. 000.000	84,22	20. 000.000	84,22	20. 000.000	84,22	20. 000.000	84,22	20. 000.000	Kecamatan Bekasi Utara
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	13.931. 576.375	100	4.630. 320.096	100	4.630. 320.096	100	4.630. 320.096	100	4.630. 320.096	100	4.630. 320.096	Kecamatan Bekasi Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**400. 000.000**		**280. 000.000**		**294. 504.000**		**311. 467.430**		**327. 414.563**		**344. 965.970**	**Kecamatan Bekasi Utara**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	400. 000.000	100	280. 000.000	100	294. 504.000	100	311. 467.430	100	327. 414.563	100	344. 965.970	Kecamatan Bekasi Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**32.010. 190.900**		**36.109. 100.200**		**37.979. 551.590**		**40.167. 173.762**		**42.223. 733.059**		**44.486. 925.151**	**Kecamatan Bekasi Utara**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	32.010. 190.900	100	36.109. 100.200	100	37.979. 551.590	100	40.167. 173.762	100	42.223. 733.059	100	44.486. 925.151	Kecamatan Bekasi Utara
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**40. 000.000**		**30. 000.000**		**31. 554.000**		**33. 371.510**		**35. 080.132**		**36. 960.427**	**Kecamatan Bekasi Utara**

Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	40. 000.000	100	30. 000.000	100	31. 554.000	100	33. 371.510	100	35. 080.132	100	36. 960.427	Kecamatan Bekasi Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**75. 000.000**		**60. 000.000**		**63. 108.000**		**66. 743.021**		**70. 160.263**		**73. 920.854**	**Kecamatan Bekasi Utara**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	75. 000.000	100	60. 000.000	100	63. 108.000	100	66. 743.021	100	70. 160.263	100	73. 920.854	Kecamatan Bekasi Utara
KECAMATAN BEKASI BARAT																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**25.428. 581.680**		**23.982. 549.440**		**25.232. 278.801**		**26.693. 923.660**		**28.067. 999.751**		**28.914. 344.744**	**Kecamatan Bekasi Barat**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	8.530.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	100	15. 000.000	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	95,22	95,22	15.559. 606.000	95,22	20.354. 793.000	95,22	21.604. 522.361	95,22	23.066. 167.220	95,22	24.440. 243.311	95,22	25.286. 588.304	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	83,7	83,7	6.375.000	83,7	20. 000.000	83,7	20. 000.000	83,7	20. 000.000	83,7	20. 000.000	83,7	20. 000.000	Kecamatan Bekasi Barat
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	9.854. 070.680	100	3.592. 756.440	100	3.592. 756.440	100	3.592. 756.440	100	3.592. 756.440	100	3.592. 756.440	Kecamatan Bekasi Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**387. 735.000**		**320. 000.000**		**336. 576.000**		**355. 962.778**		**374. 188.072**		**394. 244.552**	**Kecamatan Bekasi Barat**
Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	387. 735.000	100	320. 000.000	100	336. 576.000	100	355. 962.778	100	374. 188.072	100	394. 244.552	Kecamatan Bekasi Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**20.733. 903.800**		**22.916. 366.400**		**24.103. 434.180**		**25.419. 791.988**		**26.796. 971.738**		**28.233. 289.423**	**Kecamatan Bekasi Barat**

Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	20.733. 903.800	100	22.916. 366.400	100	24.103. 434.180	100	25.419. 791.988	100	26.796. 971.738	100	28.233. 289.423	Kecamatan Bekasi Barat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**38. 312.000**		**20. 000.000**		**21. 036.000**		**22. 247.674**		**23. 386.754**		**24. 640.285**	**Kecamatan Bekasi Barat**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	38. 312.000	100	40. 000.000	100	21. 036.000	100	22. 247.674	100	23. 386.754	100	24. 640.285	Kecamatan Bekasi Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**1.439. 675.000**		**1.535. 233.000**		**1.614. 758.069**		**1.707. 768.134**		**1.795. 205.863**		**1.891. 428.897**	**Kecamatan Bekasi Barat**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	1.439. 675.000	100	1.535. 233.000	100	1.614. 758.069	100	1.707. 768.134	100	1.795. 205.863	100	1.891. 428.897	Kecamatan Bekasi Barat
KECAMATAN BEKASI SELATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**26.198. 995.060**		**24.657. 176.000**		**25.813. 381.717**		**27.295. 992.504**		**28.693. 129.320**		**29.547. 102.199**	**Kecamatan Bekasi Selatan**
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	5.000.000	100	15. 000.000	100	16. 500.000	100	17. 325.000	100	17. 498.200	100	18. 373.200	Kecamatan Bekasi Selatan
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	93	93,1	15.266. 169.000	93,2	20.533. 030.200	93,3	21.468. 901.717	93,4	22.792. 788.504	93,5	24.117. 093.420	93,6	24.805. 764.199	Kecamatan Bekasi Selatan
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	%	84,34	84,4	54. 118.000	84,5	20. 000.000	84,6	20. 000.000	84,7	20. 000.000	84,8	20. 000.0000	84,9	20. 000.000	Kecamatan Bekasi Selatan
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	10.873. 708.060	100	4.089. 145.800	100	4.307. 980.000	100	4.465. 879.000	100	4.538. 537.700	100	4.702. 964.800	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					**282. 500.000**		**300. 000.000**		**315. 540.000**		**333. 715.104**		**350. 801.317**		**369. 604.268**	**Kecamatan Bekasi Selatan**

Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	282. 500.000	100	300. 000.000	100	315. 540.000	100	333. 715.104	100	350. 801.317	100	369. 604.268	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**12.980. 088.575**		**23.165. 457.000**		**24.365. 427.673**		**25.768. 876.307**		**27.088. 242.773**		**28.540. 172.586**	**Kecamatan Bekasi Selatan**
Outcome: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	12.980. 088.575	100	23.165. 457.000	100	24.365. 427.673	100	25.768. 876.307	100	27.088. 242.773	100	28.540. 172.586	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					**50. 000.000**		**50. 000.000**		**52. 590.000**		**55. 619.184**		**58. 466.886**		**61. 600.711**	**Kecamatan Bekasi Selatan**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	52. 590.000	100	55. 619.184	100	58. 466.886	100	61. 600.711	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					**50. 000.000**		**50. 000.000**		**52. 590.000**		**55. 619.184**		**58. 466.886**		**61. 600.711**	**Kecamatan Bekasi Selatan**
Outcome: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	50. 000.000	100	50. 000.000	100	52. 590.000	100	55. 619.184	100	58. 466.886	100	61. 600.711	Kecamatan Bekasi Selatan

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Kota Bekasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.5 IKU Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,88	1,31	1,77	2,32	3,19	3,80
3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83,55	83,80	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,20	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00
6	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21
7	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742,34	742.35	742.36	742.37	742.38	742.39	742.40
8	PDRB Per Kapita	Juta Rp	48,92	48.98 - 49.34	54.94	56,89 – 58,64	60,53 - 63,33	64,5 - 68,65	68,94 - 75,15
9	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	93,90	94,00	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,82	7.06 - 7.68	7.32	6.77 - 7.4	6.74 - 7.36	6.72 - 7.34	6.67 - 7.3
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3.34 - 3.69	3.55	3.12 - 3.40	2.98 - 3.27	2.83 - 3.11	2.73 - 3.02
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5.14 - 5.50	6,38	5.70 - 6.20	5.84 - 6.34	5.98 - 6.48	6.56 - 7.06
13	Rasio Gini	Poin	0,435	0.401 - 0.408	0.414	0.391 - 0.414	0.390- 0.413	0.389 - 0.412	0.388 - 0.411
14	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,18	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25
15	Indeks Harmoni	Nilai	N/A	6.47	6.48	6.49	6.51	6.53	6.55
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83.46	84	84.5	85	85.5	86	86.5
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	88,02	89,10	88,15	88,25	88,50	88,75	89,00
18	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	67,33	67,83	68,33	68,83	69,33	69,83	70,33
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	71,33 (2023)	74,872	75,072	75,272	75,717	76,406	79,782
20	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,17	3,0	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Nilai Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi	Nilai	2,796	2,80	2,90	3,00	3,05	3,10	3,12
22	Indeks Kota Cerdas	Nilai	3,60	3,66	3,72	3,78	3,84	3,90	3,93

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.6 IKD Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	93,9	94	94,1	94,2	94,3	94,4	94,5	Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	2,04	1,71	1,65	1,57	1,49	1,39	1,32	Pangan
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	23,34	28,25	31,66	35,45	39,06	42,55	46,25	Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	50,70	47,16	47,46	47,75	48,04	48,34	48,64	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	21,41	22,59	27,97	33,34	38,72	44,09	49,47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	N/A	17,76	20,13	22,81	25,86	29,3	30,93	Lingkungan Hidup
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	78,33	78,33	81,97	85,77	89,75	99,23	100	Lingkungan Hidup
8	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,88	1,31	1,77	2,32	3,19	3,8	Lingkungan Hidup
	b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	62.298,43	96.860,03	144.436,79	215.564,57	346.824,69	514.380,73	Lingkungan Hidup
9	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,58	111,0	110,5	110,0	109,5	109,0	108,5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
10	Ketahanan Air									
	a. Kapasitas Air Baku	m^3/detik	1,974	5,94	6,74	7,55	8,35	9,17	9,98	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	23,34	28,25	31,66	35,45	39,06	42,55	46,25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5.14 - 5.50	6,38	5.70 - 6.20	5.84 - 6.34	5.98 - 6.48	6.56 - 7.06	Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Rasio Gini	Nilai	0,435	0.401 - 0.408	0.414	0.391 - 0.414	0.39 - 0.413	0.389 - 0.412	0.388 - 0.411	Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	83,55	83,8	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15	Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3.34 - 3.69	3.55	3.12 - 3.40	2.98 - 3.27	2.83 - 3.11	2.73 - 3.02	Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan, Komunikasi dan Informatika, Kecamatan
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,82	7.06 - 7.68	7,32	6.77 - 7.40	6.74 - 7.36	6.72 - 7.34	6.67 - 7.3	Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,12	76,12	76,26	76,39	76,52	76,66	76,79	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,20	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64	Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	Jumlah	24	0	0	0	0	0	0	Kesehatan, Pengendalain Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Persen	105,56	100	100	100	100	100	100	Kesehatan
11	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	79,2	91	91	91	91	91	91	Kesehatan
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,5	100	100	100	100	100	100	Kesehatan, Sosial
13	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	11,79	11,92	11,94	11,96	11,98	12	12,02	Pendidikan
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43	Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Skor Literasi/Numerasi									
	a. Skor Literasi SD	Nilai	87,96	88	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	Pendidikan
	b. Skor Literasi SMP	Nilai	86,93	87	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5	Pendidikan
	c. Skor Numerasi SD	Nilai	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80	Pendidikan
	d. Skor Numerasi SMP	Nilai	84,18	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6	84,7	Pendidikan
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	59,36	60	60,5	61	61,5	62	62,5	Perpustakaan, Pendidikan
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	33,5	34,0	36,0	38,5	41,5	45,00	49,00	Tenaga Kerja
18	Indeks Kota Toleran	Nilai	6,46 (2023)	6,47	6,48	6.49	6.51	6.53	6.55	Kesatuan Bangsa dan Politik
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	N/A	51	52	53	54	55	56	Kebudayaan
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	93,52	93,66	93,8	93,94	94,08	94,22	94,36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	13 (2023)	13,5	14	14,5	15	15,5	16	Tenaga Kerja, Sosial
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	48,91 (2023)	49,11	49,31	49,51	49,71	49,91	50,11	Tenaga Kerja
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,09	4,2	4,3	4,5	4,7	4,7	4,9	Perencanaan
2	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persen	4,56	4,49	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Perdagangan, Perindustrian, Perencanaan, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Koperasi Usaha Kecil Menengah
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	33,15	33,15	32,85	32,54	32,23	31,9	31,55	Perindustrian
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	4,38	4,38	4,47	4,57	4,67	4,78	4,9	Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	11,3	11,32	11,33	11,34	11,35	11,36	11,37	Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	25.623	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500	Pariwisata
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,53	3,53	3,7	3,87	4,06	4,26	4,47	Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kepemudaan dan Olahraga
8	Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99,73 (2023)	99,74	99,75	99,76	99,77	99,78	99,79	Koperasi Usaha Kecil Menengah
9	Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,158	0,16	0,162	0,165	0,168	0,17	0,172	Koperasi Usaha Kecil Menengah
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,58	65,79	66	66,21	66,42	66,63	66,84	Tenaga Kerja
11	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	80,94	81,00	81,30	81,50	81,70	81,80	82,00	Penelitian dan Pengembangan
12	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Nilai	49,85	51,15	52,31	53,27	54,30	55,40	56,83	Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pertanian
13	Adopsi TIK	Nilai	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	Komunikasi dan Informatika
14	Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	Miliar Rupiah	13.708	14.256	14.826	15.419	16.036	16.678	17.345	Penanaman Modal
15	Laju Pertumbuhan Investasi	Persen	7	4	4	4	4	4	4	Penanaman Modal
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	33,91	33,91	33,92	33,95	34	34,06	34,12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan
17	Nilai Ekspor	Juta USD	375	375	380	385	390	395	400	Perdagangan
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	64,93	64,93	66,4	67,87	69,34	70,81	72,63	Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Jumlah Kerja Sama Internasional yang ditindaklanjuti	Unit	-	-	-	-	-	1	1	Sekretariat Daerah
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,006 (2023)	0,007	0,008	0,009	0,01	0,02	0,03	Keuangan
21	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	Sekretariat Daerah, Perdagangan, Perencanaan
22	Jumlah *Sister City*	Unit	-	-	-	-	-	1	1	Sekretariat Daerah
23	PDRB Per Kapita	Rp Juta	48,92	48.98 - 49.34	54.94	56,89 – 58,64	60,53 - 63,33	64,5 - 68,65	68,94 - 75,15	Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	52,01	52,3	52,65	53	53,5	64,01	64,45	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
25	Indeks Inklusif Keuangan Daerah	Nilai	N/A	6,44	6,49	6,55	6,64	6,76	6,83	Perencanaan, Keuangan
26	Indeks Zakat	Indeks	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	Perencanaan, Keuangan
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83.46	84	84.5	85	85.5	86	86.5	Sekretariat Daerah
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,83	3,85	3,87	3,89	3,91	3,93	3,95	Komunikasi dan Informatika, Persandian
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai	88,02	88,1	88,15	88,25	88,5	88,75	89	Sekretariat Daerah
4	Indeks MCSP	Poin	90,23	90.50	91	91,55	90,2	92,5	93	Inspektorat Daerah
5	Indeks Demokrasi	Nilai	81,3	81,34	81,38	81,41	81,44	81,48	81,51	Kesatuan Bangsa dan Politik
NO	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**	**SATUAN**	**BASELINE 2024**	**TARGET TAHUN**						**PD PENGAMPU BIDANG URUSAN**
				2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
A	**PENDIDIKAN**									
	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	44,69	52,09	60	65,5	70,35	75	80,35	**Pendidikan**
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5- 6 Tahun (PAUD	%	68,44	71,48	75	78	80,60	83,56	86,53	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun (SD)	%	99,61	99,75	99,90	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun (SMP)	%	99,61	99,75	99,90	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -18 Tahun (Non Formal/ Kesetaraan)	%	17,07	21,17	25,27	29,37	33,47	37,57	41,67	
	Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	38,73	39,63	40,53	41,43	42,33	43,23	5	
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	-	-	80	85	90	95	100	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai Standar	%	65	69	73	77	81	85	98	
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	50	55	60	65	70	75	100	
	Persentase Satuan Pendidikan Swasta Berakreditasi B	%	70	75	80	85	90	95	100	
B	**KESEHATAN**									
	Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	23,21	25,54	58,5	60,35	64	66,76	70	**Kesehatan**
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Rumah Sakit Tipe B	%	86,68	86,68	86,69	86,7	86,71	86,72	86,73	
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	90,57	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	
	Persentase Institusi dan Fasilitas Umum Memenuhi Syarat Kesehatan	%	92,86	92,96	93,06	93,2	93,26	93,36	93,46	
	Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan Masyarakat	%	94,86	94,96	95,06	95,2	95,26	95,36	95,46	
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC)	%	98,50	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas	%	72,17	72,20	72,25	72,3	72,35	72,4	72,45	
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Lingkup Dinas Kesehatan	%	77,40	77,45	77,50	77,55	77,60	77,65	77,7	
	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rata Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	90,89	91,39	91,89	92,39	92,89	93,39	93,89	
	Rata Rata Capaian SPM Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	86,93	87,03	87,13	87,23	87,33	87,43	87,53	
	Persentase kasus penyakit Menular dan Tidak Menular Non SPM yang Tertangani	%	41,39	41,49	41,59	41,69	41,79	41,89	41,99	
	Persentase Kasus KLB yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi	%	75,91	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang Terkendali	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS	%	77	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah Sarana Kefarmasian Yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	96,8	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berlabel yang Memenuhi Standar Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Keluarga ber-PHBS	%	65,03	65,1	65,12	65,14	65,16	65,18	65,2	
C	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	37,97	41,43	43,08	44,37	45,65	46,94	48,23	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	68,91	69,64	70,37	71,10	71,82	72,55	73,28	
	Tingkat Kemantapan Jalan	%	97,75	97,79	97,82	97,88	97,94	97,97	97,99	
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	31,24	37,14	39,47	41,80	44,13	46,46	48,80	
	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	%	23	25,26	25,78	28,5	30,03	32,52	34,78	
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99,31	99,58	99,63	99,74	99,8	99,89	100	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	1,8	2	3,5	5	5	5	5	
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	35,71	40,6	50,89	63,89	68,56	71,5	73	
	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang Diterbitkan	%	94,18	94,3	94,4	94,5	94,6	94,7	95	
	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan	%	44,87	45,50	46,15	46,79	47,43	48,08	48,72	
	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	%	77	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	77	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	83	83	83	83	83	83	83	
	Persentase Tingkat Pengaduan Masyarakat Terkait Reklame dan Utilitas Jalan yang Ditindaklanjuti	%	-	100	100	100	100	100	100	
D	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	Cakupan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha yang Tertangani	%	1,64	3,28	4,92	6,56	8,2	9,84	11,48	
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar di Kawasan Perkotaan	%	16,03	21,84	37,47	53,1	68,74	84,37	100	
	Persentase Permukiman yang sudah Dilengkapi PSU	%	43,75	47,26	50,78	54,98	59,18	63,38	67,58	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
E	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
	Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	Rasio	01:31	01:31	01:31	01:31	01:31	01:31	01:31	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kemampuan Aparatur dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Program Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	%	55	60	65	70	75	80	85	
	Persentase Layanan Respon Cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	%	94,49	92	95	96	97	98	99	
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	58,63	63	67	70	72	74	76	
F	**SOSIAL**									

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase PSKS yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	**Sosial**
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS	%	90	93	94	95	96	97	98	
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Area	1	1	1	1	1	1	1	
G	**TENAGA KERJA**									
	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	-	-	-	-	90	-	-	**Tenaga Kerja**
	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	-	13,28	15,28	17,28	19,28	21,28	23,28	
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	%	84,40	85	86	87	88	89	90	
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	43,33	44,44	44,67	46,89	45,11	45,33	45,56	
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	9,93	9,93	15,35	25,59	38,38	51,18	61,41	
H	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	53,39	53,39	53,89	54,39	54,89	55,39	55,89	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	64,53	64,53	65,03	65,53	66,03	66,53	67,03	
	Jumlah Posyandu dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	Unit	1621	1621	1622	1626	1628	1630	1636	
	Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan	%	20	20	32,29	46,86	55,86	64,86	73,86	
	Persentase Pemenuhan Data Gender dan Anak	%	28,97	28,97	29,9	30,84	31,78	32,71	33,64	
	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	%	18,84	18,84	37,68	53,73	73,91	84,05	100	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	63,90	63,90	64,40	64,90	65,40	65,90	66,40	
I	**PANGAN**									
	PSkor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	91.53	92	92.25	92.5	92.75	93	93.25	**Pangan**
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87	86,5	85,5	84,5	83,5	82,5	81,5	
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	85.5	89	90	91	92	93	94	
J	**PERTANAHAN**									
	Persentase Terselesaikannya Kasus Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	100	1oo	100	100	100	100	100	**Pertanahan**
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	33	36,76	43,2	50,34	55,65	61,85	65,7	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
K	LINGKUNGAN HIDUP									
	Indeks Kualitas Air	Indeks	38.62	56.76	56.96	57.16	57.36	57.56	57.76	**Lingkungan Hidup**
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	75.10	45.55	46.05	46.55	47.05	47.55	48.05	
	Persentase Pertumbuhan Kampung Iklim	%	-	19,04	38,09	61,90	80,95	100	100	
	Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Hutan Kota yang Tersedia dan Terkelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penambahan Taman Kota	%	23,67	24,98	25,98	26,98	27,98	28,98	29,98	
	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	55	50	50	50	50	50	50	
	Persentase Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	109	100	100 (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100 (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100 (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100 (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	100 (50 usaha pengawasan, dan 40 usaha pembinaan)	
	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	0	0	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Lingkungan Hidup	%	80	80	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	80	80	73	73	73	73	73	
	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	11,97	13	13,5	13,7	13,9	14,1	14,3	
	Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Poin	71.50	73.10	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA	%	71.10	62	62	63	95	95	95	
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
'L	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
	Persentase Kepemilikan KTP el	%	94.51	99.5	99.6	99.7	99.75	99.8	99.85	**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	65	53	55	57	59	61	65	
	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	%	67,29	95	96	97,5	98	98,05	98,05	
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	-	33	40	50	54	61	69	
	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
M	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	40	50	60	70	80	90	95	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan	%	5,6	6	6	8	10	12	14	
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive* (mCPR)	%	50	55	56	59	61	61,5	62	
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	18,5	14	13	12	11,5	11	10	
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	25,67	25,17	24,67	24,17	23,67	23,17	22,67	
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	%	1,81	1,80	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19)	%	5,2	5	4,95	4,9	4,85	4,8	4,75	
N	**PERHUBUNGAN**									
	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Indeks	-	85,6	85,63	85,65	85,79	85,8	85,82	**Perhubungan**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	%	10	12	13	13,5	14	14,5	15	
	Jumlah Kendaraan Yang Wajib Uji yang Melakukan Uji Kendaraan Bermotor	Unit	68000	69000	70000	71000	72000	73000	74000	
	Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi	%	49.50	51,72	56,9	57,76	60,34	61,21	61,21	
	Persentase Kapasitas Angkutan Umum yang Terpenuhi	%	20.45	70	75	78	80	83	85	
O	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	4,21	4,21	4,98	4,98	4,98	4,99	4,99	**Komunikasi dan Informatika**
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Indeks	4,68	4,69	4,70	4,71	4,72	4,73	4,74	
P	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	39	40	41	43	44	45	47	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
	Pertumbuhan Wirausaha	%	7	7	7	7	7	7	7	
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,05	1,5	2	2	2	2	2	
Q	**PENANAMAN MODAL**									
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	**Penanaman Modal**
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	-	4	4	4	4	4	4	
	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	%	-	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh terhadap Kewajiban LKPM	%	14,5	20	23,5	27,5	31,5	35,5	40	
R	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**									
	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,15	0,11	0,15	0,17	0,18	0,21	0,22	**Kepemudaan dan Olahraga**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Jumlah Atlet/pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	722	732	742	752	762	772	782	
	Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah	21	9	14	16	18	20	22	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	0,61	1,02	1,07	1,14	1,22	1,29	1,37	
S	**STATISTIK**									
	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	Indeks	3,75	4,38	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**Statistik**
T	**PERSANDIAN**									
	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Indeks	5.0	5.0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**Persandian**
U	**KEBUDAYAAN**									
	Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Situs	6	6	7	7	7	7	7	**Kebudayaan**
	Tingkat Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya dalam Pengembangan Kebudayaan	%	-	-	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	6,67	6,67	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
V	**PERPUSTAKAAN**									
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	76,92	77,02	77,12	77,22	77,32	77,42	77,52	**Perpustakaan**
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	59,36	59,46	59,56	59,66	59,76	59,86	59,96	
	Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	10	10	10	10	10	10	10	
W	**KEARSIPAN**									
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	54.54	56.81	59,09	61,36	63,63	65,9	68,18	**Kearsipan**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Penambahan Arsip Statis pada Depo Arsip	%	8,7	10	10	10	10	10	10	
X	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.975	1.975,1	1,980,2	1.981,67	1.982,43	1,983,5	1.985,5	**Kelautan dan Perikanan**
	Jumlah Produksi Olahan Perikanan	Ton	94.818	95.000	97.000	97.049	97.107	97.184	97.194	
Y	**PARIWISATA**									
	Jumlah Kawasan Wisata yang Ditata	lokasi	1	3	3	3	3	3	3	**Pariwisata**
	Persentase Masyarakat Pariwisata yang Diberdayakan	%	47,62	54,76	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29	
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata	%	97,56	97,89	98,22	98,55	98,88	99,21	99,54	
	Persentase Peningkatan Promosi/ Pemasaran Kepariwisataan	%	16,67	14,3	12,5	11,1	10	9,1	8,3	
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	19,71	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	orang	-	-	50	50	50	50	50	
Z	**PERTANIAN**									
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.379	2.380	2.382	2.385	2.387	2.389	2.391	**Pertanian**
	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	22170	22.180	22.200	22.220	22.240	22.260	22.280	
	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan	Ton	10.765	11.093	11.195	11.300	11.300	11.300	11.300	
	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	29,60	0	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	-	70,5	71	71,5	72	72,5	73	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	
	Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang ditingkatkan	%	-	100	100	100	100	100	100	
AA	**PERDAGANGAN**									

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Peningkatan alat UTTP yang Ditera Ulang	%	2	2	2	2	2	2	2	**Perdagangan**
	Nilai Ekspor	USD (Juta)	375	375	380	385	390	395	400	
	Tingkat Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	%	1,54	<4	<4	<4	<4	<4	<4	
	Jumlah Pasar Rakyat yang Difasilitasi	Unit	10	10	11	11	11	11	11	
	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	-	-	85	85	85	85	85	
	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	
BB	**PERINDUSTRIAN**									
	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	%	14	14	15	15	16	16	16	**Perindustrian**
	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	-	-	85	85	85	85	85	
	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	
	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
CC	**SEKRETARIAT DAERAH**									
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	**Sekretariat Daerah**
	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyelesaian Perkara yang Dihadapi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Profil Kelurahan	%	3.57	8.93	10.71	16.07	19.64	19.64	21.43	
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	3	3	3	3	
	Persentase Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	%	30	35	40	45	50	55	60	
	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Tertib Administrasi dan Manajerial Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
DD	**SEKRETARIAT DPRD**									
	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N	%	-	100	100	100	100	100	100	**Sekretariat DPRD**
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tidak/Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	-	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	%	-	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
EE	**PERENCANAAN**									
	Persentase Capaian Kinerja Program	%	81,58	83,30	84,90	86,50	88,10	89,70	91,30	**Perencanaan**
	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	97	100	100	100	100	100	100	
FF	**KEUANGAN**									
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	**Keuangan**
	Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	%	86,12	86,12	86,5	86,7	86,7	86,7	86,7	
	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	%	-	77	77	79	81	84	86	
	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	%	-	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyelesaian Usulan Penggunaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	-	70	71	72	73	74	75	
	Persentase Penyelesaian Usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	%	-	82	83	84	85	86	87	
	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	-	51	52	53	54	55	56	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-	4	5	6	7	8	9	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	44,93	57,05	60,59	61,75	62,89	64,03	65,15	
	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	%	1,27	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Nilai Hasil Survei Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai	86,37	86,4	86,5	86,75	87	87,25	87,3	
	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang Terbayarkan	%	7,03	8	8	8	8	8	8	
GG	**KEPEGAWAIAN**									
	Mutu Layanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	Nilai	Baik (87.75)	Baik (88.00)	Baik (88.25)	Baik (88.50)	Baik (88.75)	Sangat Baik (90.00)	Sangat Baik (90.25)	**Kepegawaian**
	Nilai Dimensi Kualifikasi dan Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	50,47	50,60	50,65	50,70	50,75	50,80	50,85	
	Nilai Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	30,84	30,85	30,86	30,87	30,88	30,89	30,90	
HH	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	%	79,31	80	81	82	83	84	85	**Penelitian dan Pengembangan**
	Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang Diperoleh	Predikat	5	2	2	2	2	2	2	
II	**PENGAWASAN (INSPEKTORAT)**									
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal Tahun Anggaran N-1	%	74,49	74,50	74,55	74,60	74,65	74,70	74,75	**Inspektorat**
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal Tahun Anggaran N-1	%	86,50	86,55	86,6	86,65	86,7	86,75	86,8	
	Indeks Manajemen Risiko	Poin	2,717	3	3	3,15	3,17	3,2	3,22	
	Nilai MSCP KPK	Poin	90,23	90,5	91	91,50	92	92,5	93	
	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	4	4	4	4	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
JJ	**KEWILAYAHAN (KECAMATAN)**									
	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	**Kecamatan**
	Persentase LKM yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Wilayah Tertib	%	100	100	100	100	100	100	100	
KK	**PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)**									
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	**Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	N/A	70	71	72	73	74	75	
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 sekaligus merupakan penjabaran dari periode pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, program perangkat daerah, pagu indikatif, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun transisi;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pemerintah. Untuk itu, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan;
2. Bagi setiap Perangkat Daerah, RPJMD Tahun 2025-2029 ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik sehingga perlu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan/subkegiatan.

3. Masyarakat Kota Bekasi dapat berperan serta seluas-luasnya dalam proses perancangan dan perumusan kebijakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program/kegiatan/subkegiatan pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan pembangunan;
4. Dalam menyusun Renstra PD, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 akan didukung pendanaan yang bersumber dari sumber-sumber pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kota Bekasi, PKBL dan TJSL, KPBU, dan peran serta masyarakat.

Pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya, sehingga manajemen risiko sangat diperlukan. Penerapan manajemen risiko ini untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Untuk itu, mitigasi risiko yang merupakan langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah teridentifikasi menjadi hal yang krusial. Hal ini penting agar dapat mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari.